



KONGRES KESENIAN INDONESIA 1995 - 2015



**DIREKTORAT KESENIAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**K O N G R E S
K E S E N I A N
I N D O N E S I A
1 9 9 5 - 2 0 1 5**



Kongres Kesenian Indonesia 1995 - 2015

Pengarah:

Hilmar Farid

Penanggungjawab:

Restu Gunawan

Redaksi:

Adi Wicaksono

Arie Batubara

Yusuf Susilo Hartono

Ahda Imran

Berto Tukan

Ratu Selvi Agnesia

Riset & Pengolahan Data:

Undung Wiyono

Tri Sakti

Grafis dan Layout

M Fahrizal

Sekretariat

Kuat Prihatin

Edi Irawan

Sri Kuwati

Ike Rofiqoh Fazri

Benhartin HD Panggabean

Fitria Sawfini

Diterbitkan oleh:

Direktorat Kesenian

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Sekapur Sirih Direktur Kesenian	v
Pengantar	1
Kata Pengantar	2
Memaknai Kongres Kesenian Indonesia	5
Bagian I:	
Kongres Kesenian Indonesia I/1995	8
Presiden Soeharto Menerima Peserta KKI	18
Ringkasan Makalah Kongres Kesenian Indonesia I	22
Rumusan dan Rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia I	61
Tanggapan Media Massa Terhadap Kongres Kesenian Indonesia I ..	69
Bagian II:	
Kongres Kesenian Indonesia II/2005	72
Keputusan Kongres Kesenian II	91
Ringkasan Makalah Kongres Kesenian Indonesia II	94
Bagian III:	
Kongres Kesenian Indonesia III/2015	144
Ringkasan Makalah Kongres Kesenian Indonesia III	163
Hasil Persidangan	189
Sidang Komite	189
Sidang Komisi	215
Keputusan Kongres Kesenian Indonesia III	220
Di luar Arena Kongres	225
Pasca Kongres	231
Program Aksi	237

Sambutan

Direktur Jenderal Kebudayaan

Bertepatan dengan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, Kongres Kesenian Indonesia pertama diselenggarakan. Sebagai forum diskusi tentang agenda pengelolaan kesenian yang mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang kesenian, Kongres Kesenian Indonesia semula diharapkan dapat menjadi wadah menjangkau masukan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan di bidang kesenian. Pada kongres pertama di tahun 1995 itu, diperoleh masukan antara lain tentang perlunya porsi lebih besar pada kesenian dalam kurikulum di sekolah, pencantuman faktor kesenian dalam penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), pengurangan dominasi birokrasi kesenian di tingkat daerah yang menghambat kreativitas, dan sebagainya.

Masukan-masukan serupa juga dilontarkan dalam Kongres Kesenian Indonesia II yang diselenggarakan sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun 2005. Ada beberapa soal yang diperdalam dan dipertajam, seperti misalnya rekomendasi agar pemerintah menyusun Sruat Keputusan Bersama untuk mengatur secara lebih jelas yurisdiksi pengelolaan kesenian di berbagai instansi pemerintah terkait, serta usulkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesenian. Namun usulan-usulan positif ini sulit ditindak-lanjuti karena Kongres Kesenian Indonesia itu sendiri belum mewujudkan dalam organisasi yang dapat membimbing kerja pemerintah dalam menjalankan keputusan-keputusan kongres.

Hal itu diperbaiki dalam Kongres Kesenian Indonesia III yang terselenggara pada tahun 2005. Selain menghasilkan usulan-usulan seperti pemetaan ekosistem kesenian, penyiapan payung hukum bagi kesenian, pembenahan kelembagaan dan politik anggaran kesenian, kongres juga mendorong pembentukan Sekretariat Kerja Kongres Kesenian Indonesia dengan tugas dan fungsi melakukan sosialisasi, mengawal dan mengimplementasikan semua hasil keputusan kongres. Maka atas dasar itu, pemerintah kemudian menetapkan terbentuknya Badan Pekerja Kongres Kesenian Indonesia melalui SK Mendikbud Nomor 096/P/2016. Badan Pekerja inilah yang akan membantu pemerintah secara berkelanjutan untuk mengambil kebijakan yang mendorong realisasi pokok-pokok rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia.

Uraian lengkap sekaligus perdebatan internal yang mengiringi proses yang tergambar tadi dimuat di dalam buku ini. Saya berharap buku ini dapat menjadi acuan dalam mempelajari riwayat perkembangan diskusi seputar tata kelola kesenian di negeri ini. Buku ini merekam dengan baik semesta aspirasi seniman Indonesia mengenai pokok soal bagaimana kesenian Indonesia semestinya diatur. Direktorat Jenderal Kebudayaan, melalui Direktorat Kesenian, mendukung penuh usaha tersebut dan siap menjalankan amanat Kongres Kesenian Indonesia.

Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan

Sekapur Sirih Direktur Kesenian

Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2017 menerbitkan buku tentang Kongres Kesenian Indonesia (KKI). KKI adalah forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan kesenian di Indonesia sekaligus wahana diskusi dan bertukar wawasan tentang strategi pengembangan kesenian Indonesia secara ideal. Pertama kali, KKI dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3-7 Desember 1995, bertepatan dengan peringatan HUT ke 50 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta kongres yang pertama ini adalah 200 orang yang merepresentasikan unsur seniman, pengelola kesenian, pengusaha, pelindung seni, penikmat/konsumen seni, pemikir dan kritikus seni, serta unsur penentu kebijakan. Tema yang diangkat adalah “Retrospeksi dan Ancangan ke Depan”.

Meski terdapat rekomendasi yang mengamanatkan pelaksanaan kongres 5 tahun sekali, KKI kedua baru dapat dilaksanakan 10 tahun kemudian, yakni pada tanggal 26-30 September 2005 di Jakarta, dengan peserta berjumlah 350 orang yang merepresentasikan unsur seniman, pengelola kesenian, pengusaha, pelindung seni, penikmat/konsumen seni, pemikir dan kritikus seni, serta unsur penentu kebijakan. Kongres kedua ini mengangkat tema “Realitas, Dinamisasi dan Kesadaran Nasional dalam Kesenian”. Dan kongres ketiga juga dilaksanakan 10 tahun kemudian, pada tanggal 1-5 Desember 2015 di Bandung dengan peserta kurang lebih 700 orang yang merepresentasikan unsur seniman, komunitas seni, pengelola Kesenian, pengusaha, pelindung seni, penikmat/konsumen seni, peneliti dan kritikus seni, serta penentu kebijakan. Kongres ketiga mengangkat tema “Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan”.

Dalam KKI pertama dihasilkan beberapa rekomendasi, antara lain: Depdikbud perlu memberi porsi lebih besar pada kesenian dalam kurikulum, utamanya dengan mengaitkan lembaga pendidikan guru dan lembaga pendidikan kesenian; pentingnya pembentukan lembaga bantuan hukum bagi seniman dan pembentukan lembaga kesenian skala nasional guna menangani masalah-masalah kesenian. Sedangkan dalam KKI kedua, beberapa rekomendasinya antara lain: perlunya menyiapkan infrastruktur kesenian dan penguatan manajemen industri kesenian; menerapkan paradigma baru pendidikan seni yang berbasis kompetensi; optimalisasi pendidikan seni di wilayah timur Indonesia; membentuk balai penelitian dan kajian seni yang berorientasi akar sejarah Indonesia; menyokong

kantung-kantung budaya lokal; peran aktif seniman dalam pengembangan ruang publik untuk kesenian; dan membentuk tim advokasi seni.

Pada KKI III, dihasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya: pembuatan regulasi yang memayungi kebijakan menyeluruh pengelolaan kesenian; perlunya politik anggaran yang berpihak pada kesenian; partisipasi aktif warga negara dalam pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan preservasi kesenian; pemetaan ekosistem kesenian Indonesia terkini; pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik; penguatan kelembagaan/organisasi kesenian, khususnya koordinasi lembaga negara yang menangani kesenian agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel; pengembangan sistem pusat data, dokumentasi dan informasi seni; pengembangan jejaring kesenian; serta pembentukan Tim Kerja Rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia III; serta mendayagunakan seni sebagai wahana pembangunan karakter dan akal budi serta moralitas yang tinggi.

Sebagian dari rekomendasi tersebut telah dapat diwujudkan oleh Direktorat Kesenian, sebagian lainnya masih belum dilaksanakan. Namun itu semua menjadi kewajiban pemerintah untuk terus berupaya mewujudkannya. Khusus rekomendasi tentang pendayagunaan kesenian sebagai wahana pendidikan karakter bangsa, terutama di lingkungan pendidikan. Hal itu sejalan dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kreativitas, kecerdasan, penguatan karakter dan budi pekerti, agar anak didik memiliki moralitas dan integritas yang tinggi.

Untuk menjalankan agenda tersebut, Direktorat Kesenian, harus melakukan sinergi konstruktif dengan semua pemangku kepentingan kesenian di Indonesia. Dengan mengsinergikan potensi besar para pelaku dan pemangku kepentingan kesenian tersebut, pendayagunaan kesenian untuk pendidikan karakter di sekolah sebagai wahana penguatan kreativitas siswa, dapat dijalankan secara lebih optimal.

Penerbitan buku tentang Kongres Kesenian Indonesia ini menjadi penting, tidak hanya untuk melihat kilas balik pelaksanaan kongres, melainkan sebagai dokumen yang menggambarkan seluruh jalannya kongres dan rangkuman rekomendasi serta saran para peserta, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan atau pegangan bagi siapapun dalam upaya pengembangan kesenian di Indonesia ke depan.

Restu Gunawan
Direktur Kesenian

PENGANTAR

Kata Pengantar

Buku ini berisi rekaman perjalanan Kongres Kesenian Indonesia (KKI) yang diselenggarakan sepuluh tahun sekali sejak tahun 1995. KKI adalah pertemuan para pelaku dan pemangku kepentingan kesenian dari seluruh Indonesia. Pertama kali kongres dilakukan di Jakarta tahun 1995, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Indonesia merdeka. Peserta kongres adalah individu, kelompok, organisasi dan komunitas yang merepresentasikan unsur seniman, juga pengelola kesenian, pengusaha, pelindung seni, penikmat/konsumen seni, pemikir dan kritikus seni, serta unsur penentu kebijakan. Dengan tema yang diangkat adalah “Retrospeksi dan Ancangan ke Depan”, kongres pertama tersebut telah menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya: pelaksanaan kongres yang harus dilaksanakan 5 tahun sekali; Depdikbud perlu memberi porsi lebih besar pada kesenian dalam kurikulum, utamanya dengan mengaitkan lembaga pendidikan guru dan lembaga pendidikan kesenian; pentingnya pembentukan lembaga bantuan hukum bagi seniman dan pembentukan lembaga kesenian skala nasional guna menangani masalah-masalah kesenian.

Meski terdapat rekomendasi yang mengamanatkan pelaksanaan kongres 5 tahun sekali, KKI kedua baru dilaksanakan 10 tahun kemudian, yakni pada tahun 2005 di Jakarta. Kongres kedua tersebut mengangkat tema “Realitas, Dinamisasi dan Kesadaran Nasional dalam Kesenian”, dan telah menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain: perlunya menyiapkan infrastruktur kesenian dan penguatan manajemen industri kesenian; menerapkan paradigma baru pendidikan seni yang berbasis kompetensi; optimalisasi pendidikan seni di wilayah timur Indonesia; membentuk balai penelitian dan kajian seni yang berorientasi akar sejarah Indonesia; menyokong kantung-kantung budaya lokal; peran aktif seniman dalam pengembangan ruang publik untuk kesenian; dan membentuk tim advokasi seni.

Kongres ketiga juga dilaksanakan 10 tahun kemudian, yakni pada tahun 2015 di Bandung, dengan tema “Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan”, dan menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain: pembuatan regulasi yang memayungi kebijakan menyeluruh pengelolaan kesenian; perlunya politik anggaran yang berpihak pada kesenian; partisipasi aktif warga negara dalam pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan preservasi kesenian; pemetaan ekosistem kesenian Indonesia terkini; pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik;

penguatan kelembagaan/organisasi kesenian, khususnya koordinasi lembaga negara yang menangani kesenian agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel; pengembangan Sistem Pusat Data, Dokumentasi dan Informasi seni; pengembangan jejaring kesenian; serta pembentukan Sekretariat Kerja Kongres Kesenian Indonesia III; dan mendaya gunakan seni sebagai wahana pembangunan karakter dan akal budi serta moralitas yang tinggi.

Secara umum terdapat beberapa perbedaan mendasar antara KKI III dengan dua kongres sebelumnya. *Pertama*, perbedaan yang bersifat partisipatif. Jika pada kongres pertama dan kedua furom berlangsung satu arah di mana para peserta menjadi pihak yang pasif, pada kongres ketiga pihak peserta sangat aktif dan mengambil peran besar melalui sidang-sidang komite dan komisi. *Kedua*, untuk menindak lanjuti rekomendasi kongres maka dibentuk Tim Kerja yang ditetapkan dengan dengan SK Mendikbud Nomor 096/P/2016. Dalam SK tersebut tercantum tugas-tugas Tim Kerja dimaksud, antara lain: membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan isi rekomendasi KKI III dalam bentuk Program Aksi dan Rencana Kerja; membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengimplementasikan program-program di bidang kesenian yang terkait dengan pemenuhan rekomendasi KKI III, utamanya program-program yang dilaksanakan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan; melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya; serta menjadi penghubung antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan para pemangku kepentingan di bidang kesenian, utamanya yang terlibat dengan penyelenggaraan KKI III.

Perlu dicatat bahwa dalam rekomendasi KKI III, terdapat satu poin yang sangat ditekankan, yakni pentingnya mendayagunakan kesenian sebagai wahana pendidikan karakter bangsa, terutama di lingkungan pendidikan. Untuk mewujudkan poin penting ini, Tim Kerja telah menyusun program aksi yang bersifat operasional berdasar masukan dari para peserta kongres. Program merupakan usulan para peserta kongres sebagai manifestasi kebutuhan dari bawah sebagaimana tertuang dalam keputusan kongres. Salah satu butir dalam keputusan KKI III di Bandung tahun 2015, ditekankan pentingnya mengintegrasikan kesenian dalam pendidikan. Secara khusus, Tim Kerja kemudian memasukkan rencana kerja yang mengarah pada bagaimana menjadikan kesenian sebagai wahana penguatan pendidikan budi pekerti agar anak didik memiliki moralitas dan integritas yang tinggi. Program aksi tersebut kemudian diserahkan

kepada Direktorat Kesenian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk ditindak lanjuti.

Dalam Keputusan Menteri itu juga disebutkan pentingnya melaksanakan Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) yang diadakan satu kali setahun. Peserta forum adalah wakil-wakil para pemangku kepentingan kesenian Indonesia yang menjalankan praktik pengelolaan kesenian berbasis kelompok, komunitas, organisasi maupun berbagai inisiatif individual yang dijalankan secara mandiri, di pusat maupun daerah. Pada tahun 2017 FMKN sudah dilaksanakan dengan topik "Membangun Sistem Tata Kelola Kesenian yang Ideal". Pembahasan mencakup dasar-dasar ekosistem kesenian yang sehat, yakni suatu ekosistem yang menuntut adanya mata rantai fungsi dan peran masing-masing elemen dalam cakupan sistemik untuk menggodok berbagai problem mendasar berikut solusinya dalam konteks seni sebagai salah satu artikulator nilai-nilai kebudayaan. Forum telah membuat skema atau model multi-relasi yang produktif antara lembaga-lembaga pengelola kesenian yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat dan daerah, lembaga-lembaga atau organisasi pengelola kesenian oleh masyarakat, komunitas, dan pelaku kesenian secara umum.

Berbagai hal penting, baik proses pelaksanaan dan hasil-hasil kongres dirangkumkan di sini. Rangkuman ini sekurag-kurangnya dapat digunakan untuk menandai garis besar perjalanan pemikiran dari para pelaku kesenian itu sendiri, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh dunia kesenian, dan berbagai usulan dan rekomendasi tentang langkah-langkah strategis dalam pengembangan kesenian Indonesia. berbagai rekomendasi tersebut juga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, baik negara yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kesenian secara formal maupun lingkungan kesenian serta masyarakat luas.

Memaknai Kongres Kesenian Indonesia

Prof. Dr. Edi Sedyawati

Kongres Kesenian Indonesia I diselenggarakan pada tahun 1995, ditepatkan dengan perayaan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu itu pokok bahasan yang dikemukakan adalah “Retrospeksi dan Ancangan ke Depan”. Untuk sekarang pun pokok bahasan tersebut tetap relevan.

Lahirnya konsep mengenai “Kesenian Indonesia” itu sendiri adalah bagian dari sejarah bangsa, dan sudah tentu terkait erat dengan konsep mengenai “Bangsa Indonesia”. Kesadaran kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan adalah awal dari sejarah bangsa Indonesia. Mau tidak mau harus diakui bahwa gagasan ke-Indonesia-an itu adalah penerusan dari kesatuan “Nederlandsch-Indie” yang dibangun oleh bangsa Belanda yang dulu menjajah Indonesia. Bersyukurlah kita mempunyai pemimpin-pemimpin nasional yang tangguh seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang berhasil membangun cita kebangsaan Indonesia dengan antara lain mengusung semboyan-semboyan seperti “bhinneka tunggal ika”, “bersatu kita teguh”, dan lain-lain, yang nyatanya telah menjadi kekuatan moral bangsa untuk bangkit memerdekakan diri dari segala macam penjajahan.

Tugas kita sekarang dan seterusnya adalah merawat keanekaragaman di dalam persatuan. Salah satu prasyarat untuk itu adalah menyebarkan pemahaman mengenai segala ungkapan budaya yang aneka ragam di dalam berbagai sukubangsa bangsa Indonesia ini. Saling apresiasi budaya antar suku bangsa adalah tugas kita sepanjang masa sebagai suatu bangsa yang bersatu merawat keanekaragaman.

Keanekaragaman ungkapan seni yang ada sebagai milik bangsa Indonesia ini, di samping didasari oleh keanekaragaman suku bangsa di Indonesia, juga disebabkan oleh pewarisan dari berbagai zaman. Secara umum lapisan-lapisan budaya yang ada di Indonesia dapat dipilahkan antara zaman-zaman masing-masing, yaitu masa prasejarah, masa pengaruh Hindu-Buddha, masa pengaruh Islam dan masa pengaruh kolonial dari bangsa Eropa.

Keanekaragaman ungkapan seni pada berbagai segmen bangsa itu dapat pula dikaji secara khusus dari segi teknologi maupun konsep-konsep keindahan yang ada di baliknya. Keanekaragaman konsep dan teknologi tersebut perlu kita jaga agar tidak hilang tersapu oleh terjangan segala yang dianggap ‘modern’ atau ‘maju’.

Sepuluh tahun kemudian diselenggarakan kongres kedua, dengan pokok bahasan yang menajamkan pembahasan pada kongres pertama. Juga rekomendasi yang tidak jauh berbeda dengan kongres pertama tersebut. Sedangkan kongres ketiga pada tahun 2015 terdapat hal yang sangat menarik, yaitu pembahasan tentang perlunya pemahaman mendalam atas situasi-situasi sosial politik yang memengaruhi perkembangan kebudayaan, kesenian khususnya, yang sebenarnya memerlukan kajian kesejarahan tersendiri yang mendalam. Dalam kaitan itu perlu kita memiliki pemahaman yang tepat dan cukup mendalam mengenai situasi-situasi zaman yang bisa memiliki kekhususan tersendiri terkait dengan kondisi-kondisi sosial politik yang khas. Situasi-situasi berbagai zaman di masa lalu tidak hanya dapat dilihat dari kacamata kepentingan-kepentingan yang dikenali di masa kini.

Lingkup sosial yang perlu dibedakan dalam meninjau kesenian adalah terutama terkait dengan fungsi-fungsi kesenian dalam kehidupan di masing-masing satuan sosial. Ada kalanya dua atau tiga lebih kaidah kesenian hidup bersama atau berdampingan, terutama di daerah perkotaan. Maka yang perlu mendapat penyimakannya adalah bagaimana keanekaragaman itu dapat atau tidak dapat disaling-temukan dalam satu arena pergaulan.

Suatu hal lain yang masih perlu mendapat penyimakannya lebih banyak dan lebih mendalam adalah hubungan lintas bidang seni. Seni bangun, seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater, dan bentuk-bentuk seni media mutakhir memungkinkan keterkaitan yang khas dan sifat-sifat keterkaitan itu bisa pula mengalami perubahan melintasi waktu. Studi mendalam mengenai tokoh-tokoh seni berbagai bidang dan berbagai zaman pun masih banyak memerlukan realisasi. Hal ini akan memungkinkan dihasilkan apa yang bisa disebut "*thick description*" mengenai berbagai episode dalam sejarah kesenian kita.

BAGIAN I

Kongres Kesenian Indonesia I/1995

Latar Belakang

Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-50 pada 1995 adalah momentum yang tepat untuk mengenali dan memahami kembali dinamika kesenian secara luas dan menyeluruh sehingga dapat dijadikan dasar dan acuan pengembangan kesenian Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia waktu itu, Prof. Dr. Edi Sedyawati yang bertanggung jawab dalam pembinaan kebudayaan di negeri ini, menggagas penyelenggaraan Kongres Kesenian Indonesia (KKI) untuk yang pertama kali.

Terlepas dari kesan bahwa kongres kesenian ini ketinggalan jika dibandingkan dengan unsur budaya lain seperti sejarah, bahasa dan kebudayaan secara umum yang telah berkali-kali melaksanakan kongres, satu kongres kesenian tetap memiliki nilai penting dan strategis. Bagaimanapun, kesenian (di) Indonesia memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dibanding usia kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Dari berbagai warisan masa lalu menunjukkan bahwa bangsa yang mendiami wilayah Nusantara telah memiliki berbagai aspek seni yang tinggi. Jenis kesenian seperti musik, tari, teater, senirupa, seni sastra (lisan dan tulis), pedalangan, kerajinan dan lain-lain. Perenungan dan tinjauan kembali secara menyeluruh, meluas dan mendalam, sangat perlu dilakukan agar kita dapat memetakan ulang semua permasalahan, peluang dan tantangannya ke depan. Pemetaan itu kemudian dapat dipakai sebagai bahan untuk menyusun berbagai ancangan jawaban yang diperlukan.

Pokok Permasalahan

Kehidupan kesenian yang berkembang dalam masyarakat mana pun selalu terdapat kelompok-kelompok yang berperan penting, yaitu 1) Seniman, 2) Pengelola, pengusaha, atau sponsor seni (dengan ancangan komersial), 3) Pelindung seni (dengan ancangan pelestarian/pencarian nilai), 4) Penikmat/ konsumen karya-karya seni, 5) Pemikir seni dan kritikus, dan 6) Penentu kebijakan (pemerintah). Masalah pokok yang selalu timbul adalah bagaimana menjalankan koordinasi dan kerja sama yang terpadu antara berbagai unsur yang ada sehingga mampu menciptakan iklim yang sehat bagi kebebasan dan gairah penciptaan seni. Karena karya-



Dirjen Kebudayaan, Prof Dr Edi Sedyawati, didampingi penyair Sapardi Djoko Damono dan Nunus Supardi pada Kongres Kesenian Indonesia I/1995 (foto: dok Gatra)

karya seni para seniman Indonesia dapat menjadi wahana untuk memperkuat jati diri dan peningkatan harkat serta martabat bangsa Indonesia, maka harus disusun strategi pengembangan yang benar-benar baik dan relevan dengan perkembangan kesenian dan kebutuhan masyarakat.

Tentu, bukan hal yang mudah untuk mencapai semua itu. Kaum seniman sendiri sebagai pencipta karya seni, ternyata harus menghadapi berbagai tantangan berat, di antaranya masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek kebebasan mencipta dan berekspresi seperti perizinan pada saat hendak menghadirkan karya-karyanya di tengah masyarakat. Juga masalah tolok ukur yang mengacu pada aspek ekonomi yang semakin menguat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal itu tak dapat dielakkan dan telah menjadi keniscayaan.

Maka, kesenian harus dapat hidup dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang terus berubah. Kaitan antara kesenian dan industri tak dapat dihindarkan. Keduanya akan saling tergantung. Tapi, hubungan itu dapat bersifat negatif sekaligus positif. Hubungan negatif terjadi jika keduanya tidak dapat saling bersinergi sehingga aspek-aspek ekonomi dapat menggerus kehidupan kesenian, dan sebaliknya, hubungan menjadi positif jika seni dan industri tidak saling bertentangan, melainkan saling berkolaborasi tanpa harus meniadakan sifat-sifat dasarnya.

Kesenian yang berbasis pada kreativitas tidak mati oleh industri, dan

industri dapat memperkuat daya kreasi kaum seniman. Kaitan antara kesenian dengan industri merupakan masalah yang sangat pelik dan menyangkut berbagai aspek mendasar lainnya. Maka, berbagai masalah yang ada harus diatasi dengan kerja sama antarsektor kegiatan dalam masyarakat. Dengan demikian sistem kesenian berkait terintegrasi dengan berbagai sistem lain dalam hubungan yang benar-benar saling memperkuat. Tercakup di dalamnya adalah sistem perdagangan, sistem produksi, sistem informasi, sistem regulasi dan seterusnya.

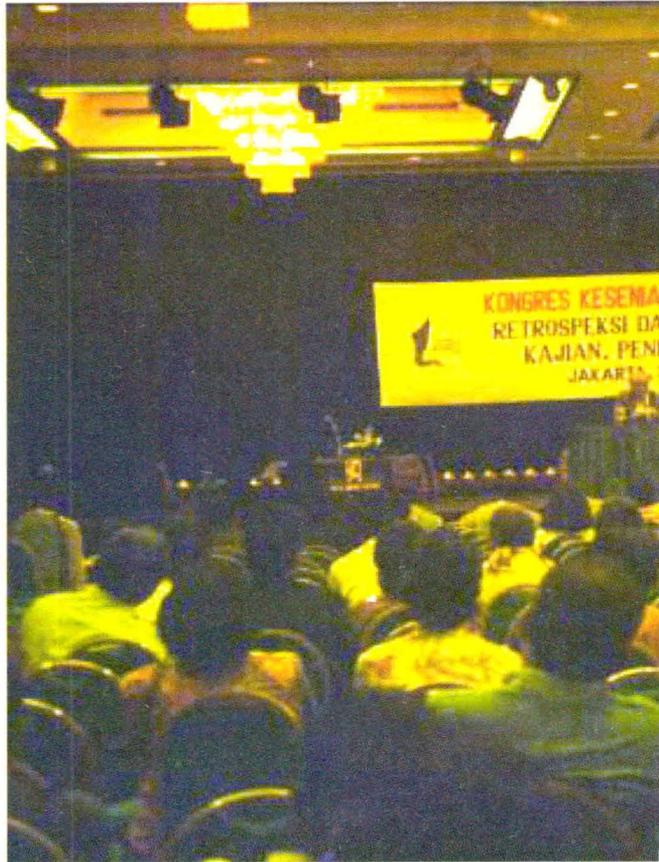
Tujuan

Bertolak dari permasalahan tersebut, dan berlandaskan hasil-hasil kajian secara akademis yang telah dilakukan, Kongres Kesenian Indonesia (selanjutnya disingkat KKI) diharapkan dapat memberikan saran-saran strategis dan rekomendasi bagi pengembangan kehidupan kesenian di Indonesia sehingga dapat dirumuskan dalam GBHN.

KKI diharapkan dapat meneropong kehidupan kesenian kita kemarin, kini dan esok, serta mencari jalan guna memajukan kesenian Indonesia. Hal itu didasarkan pada tinjauan dan pertimbangan intuitif maupun melalui pendekatan keilmuan. Yaitu tinjauan mendalam terhadap masalah-masalah apa saja yang pernah ataupun sedang dihadapi serta mengenai pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh selama setengah abad perjalanan negara Indonesia merdeka.

Tema

Berdasarkan tujuan tersebut, tema yang disepakati dalam KKI I adalah "Retrospeksi dan Ancangan ke Depan". Tema ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa selama 50 tahun Indonesia merdeka telah banyak karya





seni yang dihasilkan oleh para seniman dan untuk itu perlu dilakukan perenungan dan pengungkapan kembali (Retrospeksi) sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pengembangan kesenian yang akan datang (Ancangan ke Depan). Dalam aspek teknis pelaksanaannya, diperlukan sebuah logo. Semula disepakati logo KKI I berbentuk “gunungan” seperti yang lazim terdapat dalam wayang kulit Jawa. Tapi karena hasilnya kurang memuaskan dan untuk menghindari kesan “Jawanisasi”, maka logo itu di dibatalkan dan kemudian dibuat logo baru sebagai pengganti, yakni logo bergambar ‘perahu’ dengan lima garis lengkung di bagian kiri yang membentuk badan perahu

dan layarnya yang sedang mengembang, bergerak dinamis dan melaju ke depan. Di bagian kanan tertulis kata-kata: “Kongres Kesenian Indonesia I 1995”. Dengan ‘perahu kongres’ itulah kesenian Indonesia mengambil “ancangan ke depan”, mengembangkan layar dan mengarungi lautan menantang ombak menempuh perjalanan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia.

Waktu dan Tempat

KKI I diselenggarakan pada tanggal 3 - 7 Desember 1995. Perhelatan ini menjadi semacam puncak dari rangkaian kegiatan unggulan Direktorat Jenderal Kebudayaan bersamaan dengan peringatan Indonesia emas tersebut. Selain kongres juga diadakan acara Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Non Blok yang pertama dan festival internasional *Art Summit Indonesia: Performing Arts*, juga yang pertama.

KKI I diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Untuk menampung akomodasi peserta kongres, sebagian

ditempatkan di Hotel Wisata Internasional, Jl. Thamrin Jakarta Pusat (kini Grand Indonesia).

Kepanitiaan

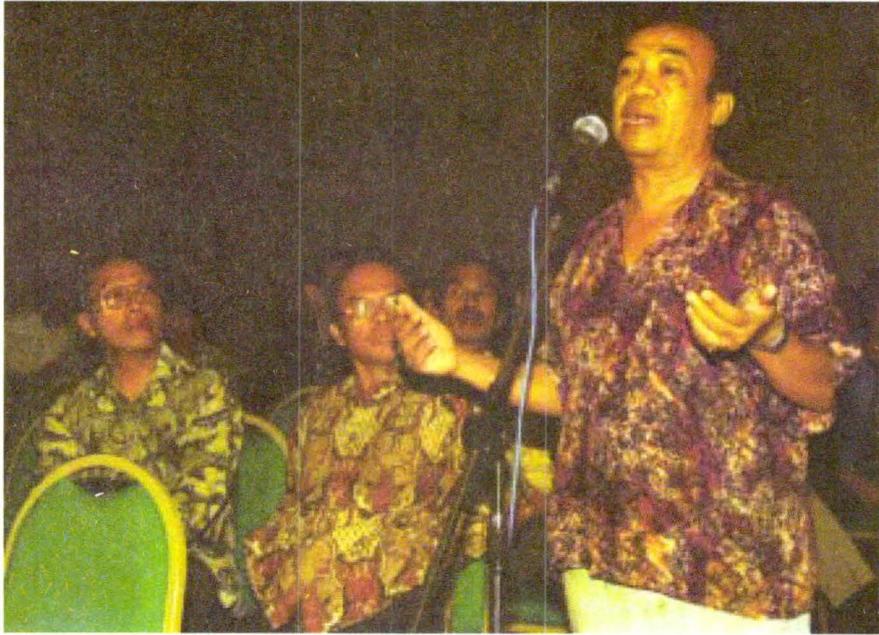
Dalam penyelenggaraan KKI I dibentuk organisasi kepanitiaan yang terdiri dari: Pelindung, Penanggung Jawab, Tim Penasihat, Tim Pengarah, dan Panitia Pelaksana. Pelindung adalah Presiden Republik Indonesia dan sebagai Penanggung Jawab adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dari Tim Penasihat memberikan saran dan nasihat secara umum, antara lain mengenai tujuan, pemilihan materi, dan pemakalah. Tim Penasihat terdiri dari Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Prof. Dr. Haryati Soebadio, Prof. H. Ali Hasmy dan H. Budiardjo.

Sedangkan Tim Pengarahnya terdiri dari: Prof. Dr. Edi Sedyawati (Ketua), Drs. Saini Kosim, (Sekretaris), Drs. Nunus Supardi (Anggota), Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono (Anggota), Prof. Dr. Umar Kayam (Anggota), Prof. Dr. Budi Darma (Anggota), Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc. (Anggota), Prof. Dr. Mursal Esten (Anggota), Dr. Salim Said (Anggota), Dr. Mukhlis PaEni (Anggota), Drs. Yustiono (Anggota), Drs. F.X. Sutopo Cokrohamijoyo (Anggota), Asrul Sani (Anggota), Putu Wijaya (Anggota), Drs. M. Samsudin Hardjakusuma (Anggota) dan Tatiek Malyati Sihombing (Anggota).

Adapun Ketua Umum Panitia Pelaksana adalah Prof. Edi Sedyawati yang dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris Umum yang diperkuat Wakil Sekretaris Umum Bidang Korespondensi, Bidang Registrasi, Bidang Kesekretariatan dan Bidang Keuangan. Di samping itu juga dibentuk Bidang-bidang yang dipimpin oleh seorang ketua. Selain tenaga dari dalam Departemen P dan K juga terlibat tenaga-tenaga profesional dari kampus, media, dan praktisi. Struktur Organisasi Kepanitiaan KKI I terlampir.

Peserta

Dari 500 jumlah peserta yang diharapkan, yang tercatat resmi 380 adalah peserta dari 27 provinsi se-Indonesia: DKI Jakarta (114), Jawa Barat (30), Jawa Tengah (41), DI Yogyakarta (31), Jawa Timur (37), D.I. Aceh (10), Sumatera Utara (9), Sumatera Barat (9), Riau (8), Jambi (7), Sumatera Selatan (4), Bengkulu (7), Lampung (10), Kalimantan Barat (8), Kalimantan Tengah (5), Kalimantan Selatan (2), Kalimantan Timur (7), Sulawesi Utara (8), Sulawesi Tengah (5), Sulawesi Selatan (6), Sulawesi Tenggara (4), Bali (9),



Suasana Kongres Kesenian Indonesia I (foto: dok Gatra)

Nusa Tenggara Barat (6), Nusa Tenggara Timur (5), Irian Jaya (1), Timor Timur (6), Maluku (1). Menurut buku panduan KKI I, selain peserta terdapat peninjau dari manca negara, sehingga jumlahnya mencapai 475.

Para peserta tersebut mewakili unsur-unsur yang ada pada masyarakat seni: seniman, pengelola/pengusaha/sponsor seni, pelindung seni, penikmat/*consumer* karya seni, wartawan seni, pemikir dan kritikus seni dan penentu kebijakan (pemerintah). Selain itu mewakili lembaga/institusi Perguruan Tinggi/Sekolah Seni, Pengurus Dewan Kesenian & BKKNI, Pemerintah Daerah, Kanwil Depdikbud, Bidang Kesenian, Taman Budaya, PWI, Pusat Kebudayaan/Atase Kebudayaan negara sahabat, dan sebagainya.

Ramai diberitakan sejumlah media massa, sejumlah seniman memboikot KKI sehingga tidak hadir, padahal setelah dikonfirmasi mereka dalam rombongan pergi ke luar negeri, ada juga yang sakit. Prof Umar Kayam sebagai pembicara pun tak bisa hadir, karena sakit, sehingga makalahnya dibacakan Prof Budi Darma.

Pembukaan

Mengingat kongres pertama ini merupakan tonggak sejarah dan memiliki arti penting bagi bangsa, kebudayaan dan kesenian Indonesia,

sedianya Kongres akan dibuka oleh Presiden Soeharto. Tapi karena Presiden berhalangan, akhirnya kongres dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Djojonegoro, pada 4 Desember 1995, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Dalam perkembangan kemudian, Presiden Soeharto menerima peserta KKI di Istana Negara pada tanggal 6 Desember 1995, sehari sebelum penutupan.

Persidangan

Dirancang agak berbeda dengan kongres pada umumnya, dalam pelaksanaan KKI ini, persidangan terdiri dari tiga bentuk, yaitu Sidang Pleno, Sidang Kelompok, dan Sidang Khusus dalam bentuk *Talk Show*. Selain itu juga diadakan pergelaran teater dan pameran seni.

Sidang Pleno dilaksanakan pada saat pembukaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta pada saat penutupan, di samping untuk penyajian dua topik, yaitu (1) Fungsi Kesenian dalam Masyarakat; (2) Kesenian Nasional dan Kesenian 'Daerah.'

Topik I: "Fungsi Kesenian dalam Masyarakat". Membahas beberapa subtopik, yaitu *Perjalanan Fungsi Seni dalam Masyarakat Kita* dengan



Suasana Kongres Kesenian Indonesia I (foto: dok Gatra)

pembicara Umar Kayam dan pemandu Bakdi Sumanto; *Peristiwa-peristiwa Kesenian yang Terjadi Selama Kurun Waktu 50 Tahun* oleh Asrul Sani dan pemandu Jakob Sumadjo; *Peranan Seni dalam Membina Ketahanan Budaya Bangsa* oleh Letnan Jenderal Mohamad Ma'ruf, Kepala Staf Sosial dan Politik ABRI, dengan pemandu Susanto Zuhdi; *Persepsi dan Perkembangan Pandangan Masyarakat Terhadap Kesenian* oleh Taufik Abdullah dengan pemandu Pudentia MP SS; *Perubahan Nilai Moral dan Nilai Sosial dalam Kaitannya dengan Perkembangan Kesenian* oleh Ignas Kleden dengan pemandu Melani Budiarta.

Topik II: "Kesenian Nasional dan Kesenian 'Daerah'". Membahas beberapa subtopik, yaitu *Pengertian, Kedudukan, Hubungan Timbal Balik, serta Fungsi Kesenian Nasional dan Kesenian 'Daerah'*, oleh Mukhlis Paeni dengan pemandu Amir Rochkyatmo; *Masa Depan Kesenian Nasional dan Kesenian 'Daerah'* oleh Sapardi Djoko Damono dengan pemandu Kasim Ahmad; *Kajian dan Pembinaan Kesenian Nasional dan Kesenian Daerah Sumatera Utara* oleh Tengku Lukman Sinar dengan pemandu Singgih Wibisono; *Perkembangan Nilai-nilai Artistik Kesenian Nasional dan Kesenian 'Daerah'* oleh Putu Wijaya dengan pemandu Riris K. Toha Sarumpaet; *Khalayak Kesenian Nasional dan Kesenian 'Daerah'* oleh Rahayu Supanggah dengan pemandu Rahayu Hidayat.

Setelah itu dilakukan Sidang Kelompok yang dibagi menjadi dalam tujuh kelompok, dengan topik dan penyaji makalah sebagai berikut:

Topik III: "Seni dan Media" yang terbagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: *Media sebagai Sarana*, oleh JB. Kristanto dengan pemandu Edwina S. Tanojo; *Dekade Transformasi 1995 - 2000: Konfigurasi Baru Kesenian Indonesia* oleh Garin Nugroho dengan pemandu Ibnu Wahyudi; *Media sebagai Konsep/ Pengkodean* oleh Primadi Tabrani dengan pemandu Ibnu Wahyudi; *Media sebagai Penentu Standar* oleh Ishadi SK dengan pemandu Kasijanto.

Topik IV: "Kajian Seni" yang terbagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: *Sastra Kita: Estetika dan Teori* oleh Budi Darma dengan pemandu Iwan Fridolin; *Dialog Tatap Seni Rupa -Estetika* oleh Mudji Sutrisno dengan pemandu Iwan Fridolin; *Pancasi-tuasi* oleh Harry Rusli dengan pemandu Agus Darmawan T; *Kajian Sejarah Kesenian* oleh Edi Sedyawati dengan pemandu Bakdi Sumanto; *Multikulturisme/Multimodernisme* oleh Jim Supangkat dengan pemandu Pudentia MPSS.

Topik V: "Seni dan Pendidikan" yang terbagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: *Lembaga Pendidikan Tinggi Kesenian Indonesia* oleh Mursal Esten dengan pemandu Suryadi; *Pendidikan Kesenian di Sekolah Umum* oleh

AA. Navis dengan pemandu Jakob Sumardjo; *Pendidikan Kesenian di Luar Sekolah* oleh Saini KM dengan pemandu Amir Rochkyatmo; *Fungsi Didaktis Kesenian* oleh FX. Sutopo Cokroamijoyo dengan pemandu Suryadi.

Topik VI: “Seni dan Pariwisata” yang terbagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: *Pariwisata Budaya - Seni sebagai Komoditi Pariwisata - Konsep Seni Wisata* oleh RM. Soedarsono dengan pemandu Pudentia MP SS; *Seni, Pariwisata dan Budaya Global*, oleh Yusuf Affendi dengan pemandu Josefina Mantik Kumaat; *Pariwisata Budaya* oleh H. Boediardjo dengan pemandu Agus Aris Munandar; *Pariwisata Budaya - Seni Budaya sebagai Andalan Pariwisata* oleh Andi Mappisameng dengan pemandu Supratikno R.

Topik VII: “Seni dan Hukum” yang terbagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: *Perlindungan Hak Cipta, Atas Karya Seni Sebagai Dasar Pemikiran Terhadap Pemahaman Industri Kultural* oleh Arnel Affandi dengan pemandu Melani Budianta; *Lembaga-lembaga Karya Seni dan Hak Cipta* oleh Chandra Darusman dengan pemandu Ugrasena; *Peraturan dan Perizinan* oleh Nico Kansil dengan pemandu Edwina S. Tanojo; *Seni dalam Persinggungannya dengan Peraturan dan Perizinan* oleh Alfons Taryadi dengan pemandu Rahayu Hidayat; *Seni dan Perpajakan* oleh Moch Soebakir dengan pemandu Susanto Zuhdi.

Topik VIII: “Seni dan Pengayoman” yang terbagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: *Peran Pemerintah dalam Mengayomi Kesenian - Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian - Seni sebagai Komoditi* oleh Kusnadi Hardjasumantri dengan pemandu Kasim Ahmad; *Peran Pemerintah dalam Mengayomi Kesenian - Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian - Seni sebagai Komoditi* oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan pemandu Singgih Wibisono; *Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian* oleh Susrinah Sanyota Sastrowardoyo dengan pemandu Rahayu Hidayat; *Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian* oleh Salim Said dengan pemandu Agus Darmawan T.

Topik IX: “Seni dan Tata Lingkungan” yang terbagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: *Seni dalam Bidang Tata Perkotaan* oleh Djoko Sujarto dengan pemandu Supratikno R; *Seni dalam Tata Lingkungan Perumahan* oleh Toto Rusmanto dengan pemandu Josefina Mantik Kumaat; *Seni dalam Arsitektur* oleh Eko Budihardjo dengan pemandu Agus Aris Munandar; *Seni dalam Bidang Tata Ruang Luar (Seni dan Arsitektur Kota)*, oleh Slamet Wirasonjaya dengan pemandu Ugrasena.

Sidang Khusus, ditampilkan dalam bentuk panggung debat atau talk show, dengan topik “Refleksi atas Perkembangan Seni”. Untuk seni rupa menampilkan Amang Rahman, Wagiono Sunarto, Dwi Kundoro, Rita

Widagdo dan Nyoman Nuarta, dengan pemandu Darmanto Yatman. Seni tari, dengan penyaji: Gusmiati Suid, Tom Ibnur, Ati Ganda, Sardono W. Kusumo, dan Yulianti L. Parani, dipandu Emha Ainun Nadjib. Seni teater, dengan penyaji: Adi Kurdi, Dedi Gumelar, Putu Wijaya, Deri Syrna dan Dindon, dipandu S. Sinansari Ecip.

Seni sastra, dengan penyaji: Sutardji Calzoum Bachri, Arswendo Atmowiloto, La Rose, Mustofa Bisri, dan Taufiq Ismail, dipandu Satyagraha Hoerip. Seni musik, dengan penyaji: Rhoma Irama, Suka Hardjana, Jadug Ferianto, dan Sam Bimbo, dipandu Remy Silado. Seni film dengan penyaji: Misbach Yusa Biran, Arizal, Rizal Mantovani, Ayu Azhari dan Eros Jarot dipandu Salim Said.

Pergelaran dan Pameran Seni

Melengkapi penyelenggaraan Kongres Kesenian Indonesia I 1995 para peserta diajak menonton pertunjukan Teater Koma mengangkat lakon "Semar Gugat" karya dan sutradara N. Riantiarno di Graha Bhakti Budaya TIM, 5 Desember 1995, dan pertunjukan Teater Mandiri dengan lakon "Bor" disutradarai Putu Wijaya bertempat di Teater Arena TIM, 6 Desember 1995. Sedangkan peserta dari utusan Dewan Kesenian mengikuti pertemuan/rapat Dewan Kesenian se Indonesia.

Pameran seni lukis, digelar di Gedung Kirana I Hotel Kartika Chandra, bersebelahan dengan ruangan Kongres. Menampilkan 50 karya dari 540 koleksi Direktorat Kesenian (kini menjadikan koleksi pemerintah yang dikelola oleh Galeri Nasional Indonesia-pen). Antara lain karya AD Pirous, Agus Djaja, Bagong Kussudihardjo, Danarto, Dullah, Fadjar Sidik, Henk Ngantung, Nyoman Gunarsa, Mulyadi W, Irsam, Kusnadi, Made Wianta, Mustika, Nashar, Oesman Effendi, Popo Iskandar, Otto Djaja, Rusdi Isbandi, Rusli, dan Zaini.

Presiden Soeharto Menerima Peserta KKI

Karena tidak bisa meresmikan pembukaan KKI, Presiden Soeharto akhirnya menerima Panitia dan Peserta KKI I pada 6 Desember 1995. Namun, karena keterbatasan tempat, tidak semua peserta dan panitia mengikuti pertemuan dengan Presiden yang berlangsung di Istana Negara tersebut. Pada kesempatan pertemuan tersebut, Presiden Soeharto menyampaikan pidato sambutan. Selengkapnya sambutan tersebut sebagai berikut:

Sambutan Presiden Soeharto



Saudara-saudara,

Saya sungguh gembira dapat menerima Saudara-saudara semua, para peserta Kongres Kesenian Indonesia sekarang ini. Bukan saja karena kongres ini baru untuk pertama kali diadakan, tetapi juga karena dari kongres ini kita mengharapkan tumbuhnya gagasan-gagasan kreatif dalam rangka memantapkan serta mengembangkan budaya bangsa kita.

Kongres ini juga diselenggarakan pada saat yang tepat, yaitu saat bangsa kita masih dalam suasana memperingati 50 tahun Kemerdekaan. Dalam saat-saat yang berbahagia ini kita perlu menilai perkembangan kesenian yang telah kita capai dan hal-hal yang masih harus kita kerjar setelah setengah abad menjadi bangsa yang merdeka.

Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat menyalurkan harapan, suka dan dukanya dalam kehidupan ini melalui berbagai media seni. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seni mewujudkan citra diri suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu secara meneluruh. Manusia Indonesia seuruhnya ingin kita bangun bukan saja manusia yang sehat, terampil, berakal dan bertakwa, tetapi juga manusia yang hidup rasa seninya. Dalam masyarakat kita yang sangat majemuk ini

tumbuh dan berkembang berbagai jenis dan bentuk kesenian.

Saudara-saudara;

Kita semua menyadari benar pentingnya arti kesenian terutama untuk memperkukuh dan mengembangkan jatidiri kita sebagai bangsa yang sedang membangun masa depannya. Hal ini juga diyakini oleh para pendahulu kita, para pendiri Republik Indonesia ini, yang melalui UUD '45 secara tegas mengamanatkan kepada kita semua untuk memajukan kebudayaan nasional. Saya yakin bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan di sini juga termasuk kesenian. Lebih dari itu, kesenian itu sendiri akan memperkaya kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk termulia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebagai bangsa yang sedang membangun dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, amanat yang tersurat dalam UUD '45 tadi tidak saja harus dijabarkan oleh Pemerintah, tetapi juga harus dilaksanakan oleh segenap warga bangsa Indonesia. MPR yang merupakan pengejawantahan rakyat Indonesia juga telah menggariskan dalam GBHN bahwa pembinaan dan pengembangan kesenian sebagai ungkapan budaya bangsa diusahakan agar menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, memperluas jatidiri bangsa, meningkatkan apresiasi dan gairah membangun. Petunjuk GBHN tadi perlu difahami dan dihayati benar oleh Saudara-saudara semua segenap peserta kongres.

Pembangunan kebudayaan pada umumnya dan pembangunan kesenian pada khususnya bukanlah kegiatan yang sekali jadi. Kemajuan kebudayaan dan kesenian berlangsung secara bertahap dan terus-menerus, melalui sumbangan kreatif para budayawan dan seniman. Dalam kongres kesenian yang pertama ini kita berharap agar seluruh gagasan kreatif para budayawan dan seniman, dirumusakan, dikembangkan dan dijabarkan sebagai masukan lebih lanjut dalam proses besar pembangunan kebudayaan dan kesenian bangsa kita yang berlangsung terus-menerus. Saya yakin bahwa kongres yang diikuti oleh para peserta yang bersasal dari segala penjuru Tanah air ini, akan dapat kita andalkan kemampuan dan kesanggupannya untuk mencapai sasaran tadi.

Saudara-saudara,

Masalah dasar pembangunan kesenian yang kita hadapi dewasa ini adalah menciptakan kondisi dan peluang yang sebaik-baiknya agar para seniman dapat mengembangkan krestivitasnya secara optimal, baik berupa

seni terapan dan hiburan yang sehari-hari diperlukan, maupun berwujud karya seni yang untuk menikmatinya diperlukan perenungan yang dalam, Yang dapat kita laksanakan bersama memang hanya penciptakan kondisi dan peluang, oleh karena kreativitas para seniman, sesungguhnya merupakan kualitas yang sangat pribadi dari para seniman.

Kesenian bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia diciptakan oleh masyarakat oleh manusia, dari waktu ke waktu. Puncak-puncak pencapaian di bidang seni budaya itu merupakan landasan dan pangkalan tolak untuk karya kreatif berikutnya.

Dalam perjalanan sejarah budaya bangsa Indonesia telah terjadi rangkaian panjang pertemuan-pertemuan budaya, baik antarsuku bangsa, maupun antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Berbagai khasanah budaya baru pun tumbuh sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan budaya tadi. Namun, khasanah budaya juga tumbuh sebagai hasil dari daya cipta di dalam masyarakat kita sendiri. Karena itu, kita perlu mengasah kearifan untuk dapat mengenali dan menumbuhkan daya cipta yang ada di dalam diri kita sendiri sebagai bangsa.

Untuk tetap memelihara semangat kebangsaan, kita perlu mengembangkan daya cipta. Kita memang menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh asing. Namun, hasil karya budaya yang keluar dari diri kita, mestilah berkepribadian. Kita tidak boleh hanya menjadi pengekor semata dari bangsa lain yang manapun. Dalam hubungan inilah kita memerlukan kesadaran akan wawasan kebangsaan. Dalam olah kegiatan di bidang kesenian pada khususnya diperlukan pula kesadaran berbangsa itu. Dalam teknik dan gaya, kita dapat bergabung dengan aliran perkembangan yang terjadi di manca negara, tetapi isi pesan dan penggarapannya haruslah memperlihatkan kekuatan jati diri kita sendiri.

Saudara-saudara,

Dalam kehidupan berkesenian di negeri yang kita cintai ini kita dapat berbeda-beda pendapat mengenai selera seni. Kita juga dapat berbeda-beda pilihan terhadap gaya seni yang kita sukai. Tetapi saya minta agar kita tidak berbeda arah dalam menuju sasaran membangun bangsa yang kuat dan bersatu dalam cita-cita kebangsaan.

Aneka ragam seni budaya daerah adalah kekayaan kita sebagai satu bangsa. Masing-masing kebudayaan daerah dapat mengembangkan jati dirinya. Di samping itu kita semua perlu pula mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap berbagai budaya daerah yang beraneka

ragam itu, sehingga tidak perlu tumbuh rasa kesukuan yang sempit. Tugas yang lebih penting lagi bagi kita adalah mengembangkan dan memperkuat sosok kebudayaan nasional kita, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia yang modern dan berakar pada warisan budaya para pendahulu kita.

Saudara-saudara,

Kreativitas seni –seperti halnya kreativitas dalam bidang manapun— memerlukan suasana yang mendukung. Karena itulah, untuk menggelorakan kreativitas diperlukan kejelian kita dalam menangkap tantangan-tantangan kehidupan dan pada waktu yang sama kita membina suasana aman dan tenteram dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat.

Marilah kita berusaha untuk memunculkan makin banyak karya-karya seni unggul dari para seniman Indonesia. Saya berharap pertemuan akbar para seniman dan pemerhati seni ini dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan semangat berkarya dan sekaligus menjawab tantangan dari alam pergaulan global yang dewasa ini makin memasuki kehidupan kita.

Demikianlah pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan selamat bahwa Saudara-saudara dapat menyelenggarakan Kognres Kesenian Indonesia yang pertama ini. Saudara-saudara adalah kekayaan bangsa kita, sumber karya-karya cipta seni yang dapat meningkatkan mutu kehidupan bangsa kita. Berjuanglah untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 6 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Ringkasan Makalah Kongres Kesenian Indonesia I

TOPIK I: FUNGSI KESENIAN DALAM MASYARAKAT

Perjalanan Fungsi Seni dalam Masyarakat Kita

Oleh Umar Kayam

Kesenian berfungsi merangsang manusia memahami kebudayaan sebagai dialektika antar sistem dalam masyarakat. Kemerdekaan geografis dari penjajahan, membangun suatu kebudayaan baru sebuah negara dan masyarakatnya. Rancangan UUD 1945 dan Pancasila menunjukkan kehendak kuat bangsa kita untuk meninggalkan sistem kekuasaan absolut dan feodal aristokratik.

Sejarah kesenian dari dialektika tersebut menghasilkan sintesa budaya “adiluhung” yang “indah dan luhur” berorientasi kepada sistem “halus-kasar”— dari feodal aristokratik yang stratifikasi sosialnya dari wong cilik hingga elit birokrasi. Seniman merefleksikan dialektika budaya sehingga kita mengenali pula tradisi budaya “paternalistik pertanian” di Nusantara yang bersistem kerajaan. Kesenian rakyat berhubungan dengan ritus pertanian tradisional. Meski pemerintah kolonial Belanda menghancurkan struktur etnik kerajaan nusantara, fungsi tradisi tidak terkebiri. Yang terjadi justru sintesis budaya “Indo” Barat terserap paternalistik pertanian tradisional. Pada kelas elit birokrasi modern lahir kalangan baru entrepreneur, dan dialektika yang terus berkembang kemudian menampilkan modifikasi paham “ke-Indonesiaan”.

Peran bahasa Melayu sebagai *lingua-franca* di seluruh kepulauan Nusantara sebagai solidaritas budaya berbagai etnik yang pada saat itu secara geografis bernama Hindia Belanda. Para cendekiawan politik mendirikan Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Boedi Oetomo, Panindra, PNI, Partindo, dan beragam gerakan lainnya. Mereka berhimpun dengan para cendekiawan budaya dan seniman yang juga antara lain tergabung dalam Persagi dan Poejangga Baroe, juga yang individual atau independen. Mereka adalah “kuman-kuman” pertama diskursus budaya “Indonesia”, yang merumuskan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu yang semula bahasa perantara dan perdagangan Nusantara. Sanoesi Pane, Arjmin Pane, Sutan Takdir Alisjahbana, Soedjojono, Agoes Djaja, Otto Djaja, dan lain-lain mereka pelopor dari sintesis budaya feodal aristokratik dan paternalistik.

Peralihan penjajahan oleh Jepang walau singkat namun membuat bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional baik dalam buku, media, dan bahasa pemerintah. Kesenian tumbuh berorientasi pada dialektika konsep Asia Timur Raya, yakni untuk propaganda legitimasi Jepang sebagai pemimpin. Namun diskursus Indonesia pada masa ini dimanfaatkan para seniman untuk sintesis pematangan persepsi bahasa Indonesia = budaya Indonesia. Mereka menciptakan dunia alternatif, melakukan introspeksi untuk bebas dari ideologi sistem; dan retrospeksi posisi subyektif yang bebas dan menghargai ekspresi kesenian yang indah.

Seraya terus memahami diskursus ke-Indonesia-an kesenian terutama seni rupa, sastra, dan teater, mengikuti arus revolusi demokratis, antara lain hasilnya aliran "humanisme universal", dari pernyataan Gelanggang (Angkatan '45). Beberapa aliran seni rupa juga dirintis oleh Persagi, bahkan sejak tahun 1930-an. Sejalan dengan eksperimen politik- "demokrasi parlementer", kesenian merangsang masyarakat memahami kebebasan dan haknya, meski juga bolak-balik antara feodal aristokratik-paternalistik pertanian tradisi. Hal ini antara lain karena Presiden Soekarno tidak puas dengan demokrasi yang mengacu kepada pemahaman Barat. Begitu pula di kesenian dengan pemahaman humanisme universal yang mengklaim bahwa kita adalah pewaris kebudayaan dunia yang dikhawatirkan mengabaikan idiom kebudayaan bangsa sendiri. Demokrasi Terpimpin ala Soekarno di mana "politik sebagai panglima" kemudian membuat kesenian lebih diwarnai idiom-idiom politik. Pertentangan atas orientasi tersebut oleh sekelompok seniman dibakukan sebagai "Manifes Kebudayaan". Namun pada saat itu protes mereka terkalahkan kekuatan lembaga-lembaga kebudayaan yang bernaung di bawah partai politik.

Pada masa Orde Baru, komersialisasi masyarakat mendorong kegairahan ekonomi dan perdagangan. Kesenian menjadi gamang dalam arus komersial dan populer, keketatan manajemen politik menyendatkan perkembangan seni kreatif yang membuat seniman sulit merefleksi makna kerumitan dan kekayaan proses dialektika budaya yang berlangsung. Dunia alternatif, dunia ciptaan seniman yang idealnya membuat kesenian lebih menarik, cenderung tidak diperkaya.

Pada dasarnya, kesenian Indonesia tidak mengenal dikotomi kesenian "nasional" dan kesenian "etnik". Kesenian Indonesia baru adalah semua ekspresi kesenian Nusantara baik bersifat tradisi, kontemporer, populer, bahkan komersial. Semua aspirasi itu untuk menjadi negara kebangsaan yang modern dan demokratis yang mengembangkan kebudayaan baru pluralistik.

Peristiwa-peristiwa Seni yang Terjadi Selama Kurun Waktu 50 Tahun

Oleh Asrul Sani

“Umumnya dapat dilihat bahwa teknik, isi cerita, dan perkembangan film suatu bangsa hanya dapat dipahami secara utuh dalam hubungannya dengan pola psikologis aktual bangsa itu.”

From Caligari to Hitler, Sigfried Craceuer

Sejak diambil alih Belanda dari tangan Pangeran Jayakarta, kota Jakarta menjadi majemuk kebudayaan. Para sosiolog menyebut *Mestiza*, kebudayaan campuran bukan murni Eropa maupun pribumi. Orang-orang Eropa khususnya Belanda, datang ke Indonesia bukan sebagai duta kebudayaan. Mereka adalah pedagang avonturir, bertujuan mengumpulkan uang untuk dibawa pulang. Bahkan penyair Prancis, Rimbaud, datang sebagai serdadu kolonial.

Sejarawan Taufik Abdullah dalam buku *Film Indonesia* mengutip keheranan seorang pria keturunan Portugis bernama d'Almeida yang bertemu dengan pelukis Raden Saleh: “*Cafe et sucre, sucre et cafe, son tout ca qu'on parle ici. C'estvraiment un air triste pour un artiste* (Kopi dan gula, gula dan kopi, cuma itu yang dipercakapkan di sini. Betul-betul suasana yang menyedihkan bagi seniman.)”

Koran-koran bahasa Melayu pertama menggunakan bahasa Melayu Pasar yang tata bahasanya tidak cukup memadai untuk mengutarakan tentang “masyarakat campuran”. Kesenian hiburan berupa seni pertunjukan oleh kelompok-kelompok “bukan terpelajar” kecuali pemimpinnya dari kalangan Indo dan Cina. Dewi Dja, sri panggung Dja's Dardanella masih buta huruf waktu tampil di panggung.

Sandiwara-sandiwara mengangkat penderitaan masyarakat kolonial di tanah partikelir-*Si Tjonat, Si Jampang*, misalnya. Kemudian lahir kesusastraan dengan cerita *Njai Dasima* dan lain-lain ditulis oleh pengarang-pengarang Indo dan Cina. Musik pun lebih terpengaruh Eropa yang tangga nadanya berbeda dengan nada Indonesia atau Jawa, menjadi bentuk Tanjidor dan Keroncong.

Pertumbuhan bentuk baru beragam bidang seni karena proses urbanisasi, ekonomi, dan perluasan sekolah. Strata masyarakat, teratas orang Eropa, disusul Indo yang menurut hukum dianggap Eropa, namun kenyataannya tidak diakui orang Eropa dan berstatus terjepit keturunan pribumi dan Eropa, lalu turunan Timur Asing (Cina, Arab), dan akhirnya pribumi —yang disebut orang Selam— mendapat karcis dispensasi untuk menonton bioskop. Pertumbuhan kesenian

Indoensia modern lahir dari masyarakat yang sedang tumbuh. Menjelang berakhirnya riwayat Hindia Belanda, pembuatan film yang dibiayai pemodal Cina lebih mengangkat tokoh pribumi, misalnya *Kartinah*, sehingga lebih mendekati kenyataan.

Dalam menghadapi suatu perjuangan di mana jelas perbedaan antara saudara dan musuh, seniman Indonesia menolak nasionalisme sempit dan ingin melanjutkan tradisi mempertanyakan segala sesuatu seperti hal kontroversial: Hak Asasi Manusia. Setiap penghayatan kesenian sama artinya menghayati hidup ini kembali dengan cara otentik, tidak saya yang kemarin atau yang dulu. Peristiwa-peristiwa terus berlangsung, kehidupan tidak akan gersang hanya jika kesenian mekar dan dinikmati masyarakat.

Seorang penjelajah ruang angkasa, Werner von Braun, ketika ditanya wartawan, apa sebab yang membuatnya mengabdikan pada dunia antariksa, menjawab bahwa sejak kecil ia senang membaca buku cerita Jule Verne yakni *Perjalanan ke Bulan*. Ini adalah renungan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak tumbuh dalam ruang vakum selama ia bersentuhan dengan kesenian—konteks kebudayaan yang tidak lahir dalam bentuk dentuman, lebih halus dari sebuah bisikan.

Peran Seni dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Oleh Muhammad Ma'ruf

Sebenarnya pengaruh nilai-nilai luar kepada kebudayaan kita sudah menjadi pertimbangan para pembuat Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 32 dijelaskan: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia."

Sifat universal pada seni menjadikan seni mempunyai jangkauan lintas budaya. Globalisasi mempercepat proses lintas budaya tersebut. Dampak positifnya adalah meningkatnya nilai ekonomi dari karya-karya seni, seperti pada seni kriya, seni rupa, dan sebagainya. Banyak karya seni yang tadinya telah obselete kemudian dibersihkan, digelar kembali, dan dijual dengan harga

tinggi. Bersamaan dengan itu tidak bisa dihindari pendangkalan nilai-nilai sakral. Perubahan paradigma masyarakat modern, masuknya nilai-nilai ekonomi dalam upacara-upacara ritual yang sarat dengan nilai seni dan sakral hanya boleh dimainkan golongan tertentu berubah menjadi komoditi. Tidak mustahil kalau suatu saat kita belajar gamelan atau bahkan *Serat Wedhotomo*, atau *Wulangreh* dari negeri lain.

Menghadapi lingkungan yang keras dan tuntutan terpeliharanya jati diri bangsa akan terjawab melalui pembinaan ketahanan nasional di segala bidang kehidupan; ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Seni tidak bisa lepas dari konteks proses yang menuntut keunggulan kompetitif. Bukan oleh siapa-siapa, oleh seniman itu sendiri. Dalam GBHN 1993, "ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, dan berkemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tak sesuai dengan kebudayaan bangsa."

Dialog antar "Dua Dunia"

Oleh Taufik Abdullah

Setiap kali kita mempermasalahkan hubungan kesenian dan estetikanya, ada 3 hal yang saling berkaitan; 1) apakah terjadi komunikasi antara seni dan khalayak; 2) bagaimana selera khalayak akan seni; 3) makna simbol estetik dan perwujudannya. Ketiganya menghadapkan persoalan dialog. Tanpa adanya komunikasi antara seni dan khalayak, secara hipotesis "seni tidak ada", yang ada hanya rasa seni, bukan karya seni. Kesenian berakar jauh menulik ke dalam pengalaman kolektif, apapun batasan dan kesadarannya. Selera atau apresiasi seni disebut oleh Kant "selera keinderaan", sedangkan Bordieu "selera dan keperluan"-yang menuntut kenecisan dan keteraturan. Kesenjangan dialog akan semakin tinggi ketika kita berhadapan dengan "selera yang bebas" (Bordieu) atau 'selera reflektif' (Kant), yang tak lagi mementingkan fungsi, tetapi pada tata penyajian-stilisasi.

Dari masalah dialog ini tersusun stratifikasi: 1. Dunia sosial ekonomis, yang mengajukan tuntutan politik dan kultural-beragam dan berubah-ubah; 2. Gaya hidup-istilah Bordeu yang memantulkan perwujudan dan pengejaran efek estetik. Kedua dunia ini bisa menemukan afinitas yang akrab-seni dan gaya hidup

adalah wakil estetik dari kenyataan "dunia sosial". Dalam masyarakat, dialog yang terjadi dengan keseniannya bisa menyenangkan, komunikatif, dan bersifat festival. Perubahan pada presentasi bisa mengganggu keharmonisan selera, juga mengancam terputusnya komunikasi yang bermakna.

Perubahan dan inovasi hanyalah dimungkinkan dari wilayah yang telah jelas batas-batasnya. Wilayah bahasa memberikan aturan dasar jaminan komunikasi. Pada pendekatan linguistik Saussure *parole* atau ucapan, kebebasan relatif dan ketentuan bahasa-tak lagi komunikatif, bahkan menjadi ofensif dan subversif kesenian. Bagi masyarakat yang menghasilkannya, *polysemi* atau bermakna banyak dan *multi-interpretability* yang melekat pada karya seni ketika kemantapan agraris mengalir dari homogenitas yang mencair. Afinitas antara realitas sosial dengan simbol seni semakin melonggar.

Gurvitch mengatakan, "sublimasi dari situasi sosial tertentu apakah (teater itu) mengidealisir, memperlakukan, atau mengharapakan melampaui dirinya."

Sedangkan dalam sosiologi seni menurut Duvignaud, "kita mendefinisikan drama sebagai kombinasi perilaku, perasaan, sikap, ideologi, tindakan dan penciptaan yang, bagi individu kreatif, mengadakan kristalisasi masyarakat dan menempatkan asal-usul seni ke dalam kompleksitas dari segala macam kekuatan yang saling bertentangan membentuk kehidupan kolektif.

Drama dan sastra memberikan kebebasan untuk memikirkan dan merenungkan berbagai keharusan struktural, yang mantap dalam dunia sosial ekonomis. Dunia rekaan yang dimunculkannya bersifat romantika kehidupan juga kritik, semua itu cermin dan ajakan dialog bahwa "hidup ini harus dijalani ke depan"-kata seseorang-anonim.

Pergeseran Nilai-Nilai Moral, Perkembangan Kesenian, dan Perubahan Sosial

Oleh Ignas Kleden

Dalam kalangan ilmuwan sosial, nilai biasanya dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan-lebih khusus, dengan dunia simbolik dalam kebudayaan. Dunia simbolik adalah tempat produksi dan penyimpanan muatan mental dan muatan kognitif kebudayaan, berupa pengetahuan dan kepercayaan, makna dan simbol, maupun nilai normatif kebudayaan itu. Perwujudan nilai estetik secara fisik dalam beragam bentuk karya seni kita namakan kesenian. Perwujudan nilai moral dalam tingkah laku sehari-hari kita namakan dunia sosial. Kesenian dengan demikian adalah materialisasi nilai-nilai estetik dalam wujud fisik, sedangkan dunia sosial perwujudan nilai dan norma-

norma yaitu dalam tindakan sosial dan interaksi sosial.

Pergeseran Nilai atau *Category Mistake*

1. Estetik dan Estetisasi. Estetik ialah sikap kita dalam mengapresiasi keindahan. Estetisasi saya maksudkan penggunaan kategori estetik untuk menanggapi nilai di luar keindahan. Jika kita menanggapi nilai-nilai moral secara estetik yang terjadi adalah estetisasi, kategori etik direduksi menjadi kategori estetik.
2. Moral dan Moralisasi. Atas cara yang sama, moral ialah tanggapan kita terhadap nilai baik-buruk, perwujudannya dalam tingkah laku sehari-hari. Moralisasi semacam melihat semua gejala sosial tidak dengan konsep-konsep sosiologis, tetapi dengan menggunakan kategori moral.

Dengan kedua konsep di atas, saya akan mengemukakan dua tesis umum tentang hubungan nilai-nilai moral, nilai estetik, dan perkembangan sosial dewasa ini;

- Ada kecenderungan kuat dalam masa sekarang untuk melakukan estetisasi nilai-nilai yang hakikatnya bersifat moral, serta estetisasi terhadap kenyataan sosial yang tidak menyenangkan.
- Ada kecenderungan yang sama kuatnya untuk melakukan moralisasi terhadap gejala-gejala dan perkembangan yang pada dasarnya bersifat sosial semata.

Kebaikan moral sudah mempunyai sesuatu yang indah dalam dirinya. Para filsuf skolastik mengatakan *bonum est pulchrum* (baik itu indah). Eufemisme adalah contoh estetisasi mengaburkan norma-norma moral dalam selubung estetis. Dilema masalah sosial memerlukan analisis dengan bahasa yang jelas. Tingkah laku manusia adalah hasil tarik-menarik atau dialektika situasi obyektif dan motif subyektif. Berpegang pada motif subyektif, kita akan terjatuh kepada moralisme dan moralisasi. Berpegang pada situasi obyektif, kita akan terperangkap kepada determinisme.

Masalah Kesenian

Hubungan antara kesenian dan moral, kesenian dan perubahan sosial, adalah ambivalensi simbolik kebudayaan.

1. Kesenian dan Moral. Pertama, kesenian dapat menjadi sarana penyampaian nilai-nilai moral, atau sarana pendidikan umum. Dalam sastra lama, dongeng bersifat didaktis ditanamkan ke kehidupan anak-anak. Dalam sastra modern Indonesia, Sutan Takdir Alisjahbana melihat sastra sebagai sarana pendidikan untuk kemajuan masyarakat. Kesenian tidak otonom, tetapi heretonom. Kedua, spiritualitas yang menyebabkan

penghayatan moral seorang seniman tidak bisa diukur dengan norma moral yang biasanya. Dasar anggapan ini, kesenian bersifat otonom, tanggungjawab masuk kategori personal, bukan sosial; kedisiplinan ialah kesetiaan kepada kewajiban yang ditentukan sendiri; kejujuran merupakan kesesuaian antara ekspresi dan intuisi kreatif; kebajikan yaitu orisinalitas dan otentisitas. Ketiga, kesenian menjadi hibernasi. Kontradiksi-kontradiksi moral; kemunafikan, kesalehan formal, dekadensi umum, ditampung perlindungan kesenian yang kebal terhadap pertanggungjawaban moral. Imunitas ini semacam kekebalan estetik terhadap tuntutan moral.

2. Kesenian dan Masalah Sosial. Pertama, kesenian menjadi sarana menyampaikan masalah-masalah sosial, memperjuangkannya, dan turut menyelesaikannya. Seni sebagai bagian realisme masyarakat, dalam sejarah sastra Indonesia, paham ini pernah dianut Lekra yang beranggapan seni tidak bisa terpisah dari politik, tugas kesenian adalah mengabdikan pada rakyat. Realisme sosialis ini menjadikan kesenian sebagai subordinat kepentingan sosial dan politik. Kedua, otonomi kesenian sebagai suatu konsep sektoral, dilegitimasi filsafat humanisme universal. Ketiga, teori kesenian adalah bagian teori sosial dan kritik kesenian sebagai kritik sosial.

Kesenian sendiri sudah memperhalus dengan cara menerjemahkan kekasaran moral ke dalam suatu versi estetis. Keterkaitan antara nilai moral, kesenian, dan perubahan sosial akan lebih dapat dipahami dan ditengarai jika kita berpedoman kategori yang jelas, sebab jika kita memasukkan ke kamar yang salah, sama saja melakukan *category mistake*.

TOPIK II: KESENIAN NASIONAL DAN KESENIAN 'DAERAH'

Fungsi Kesenian Nasional dan Kesenian Daerah

Oleh Mukhlis Paeni

Tujuh puluh lima kilometer dari Kota Makassar ke arah Utara, desa Anrong Appaka dahulu termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Akang. Sebelum tahun 1945 desa itu bernama Pacelang. Di kerajaan kecil itu seni tari *Pa'karena Burane*, juga disebut *Pamingki*, populer di masyarakat. Karaeng Pangkajene, raja yang arif bijaksana, gandrung pada kesenian, memberi sebidang tanah seluas kurang lebih 71 petak atau 25 hektar kepada para seniman di daerahnya. Mereka mengais masa depan sebagai seniman agraris, tidak perlu mengemis sumbangan

untuk kehidupan keluarga sehari-hari. Mereka mempunyai tempat terhormat sebagai seniman di masyarakatnya. Karaeng Pangkajene tidak perlu mengatur para senimannya, kapan harus latihan dan pertunjukan. Para seniman itu sendiri mengetahui perannya dan siklus kehidupan bermasyarakat tanpa diminta, dan tak mengajukan proposal untuk pemicu kreativitasnya. Bagi mereka seni adalah denyut kehidupan masyarakat dan negara.

Kesenian daerah yang kita kenal sebagai kesenian etnik, sekarang “setangkai kembang plastik yang mekar” di almari souvenir pariwisata Indonesia. Banyak hasil kreativitas seni yang muncul di lingkungan sekitar, sifatnya sangat sporadis, lahir dan seketika itu mati. Karya seni “abortus”, hanya untuk satu momentum, sekali pakai dan tergantung orderan, walaupun bertahan ia cacat, karena tanpa spirit. Orang Bugis menyebutnya “pajo-pajo” atau “wajo-wajo” (bayang-bayang).

Dalam keadaan demikian, apa yang bisa diharap bagi kepentingan nasional dari realitas berkesenian di daerah seperti ini? Akankah kita biarkan dengan alasan mencari bentuk, kesenian sebagai pernyataan kebudayaan bukan sesuatu yang abadi secara mutlak?

Kesenian senantiasa mengikuti alunan dinamika budaya tempatnya bertaut. Tantangan kebudayaan yang dihadapi, jawaban yang direspons, terekspresi dalam dunia seni secara aktual sepanjang zaman. Kesenian bukan sesuatu yang paten dan tak berubah. Karya seni senantiasa aktual sepanjang zaman. Seniman yang produktif, karya seninya selalu peka terhadap perubahan sekitarnya. Bukan dalam arti kuantitatif, tetapi karya yang bermutu, sekali dilahirkan ia tersimpan dalam memori masyarakat dalam skala daerah maupun nasional.

Masa Depan Kesenian Nasional dan Kesenian Daerah

Oleh Sapardi Djoko Damono

Setiap kesenian diciptakan berdasarkan hasil yang telah ada sebelumnya, termasuk kesenian asing sudah masuk ke negeri ini sejak nenek moyang kita memutuskan tinggal di gugusan kepulauan. Karena pengertian “Indonesia” belum ada, kesenian nasional bisa saja diciptakan berdasarkan kesenian asing ini. Bukankah novel, puisi, drama, musik, lukisan, dan sebagainya itu berbau asing juga, bahkan penentuan nama-namanya dan cara kita membagi-baginya menjadi genre dan subgenre.

Semua karya sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia dianggap sebagai sastra Indonesia. Keterkaitan sastra dengan bahasa yang dipergunakannya, tergantung nasib bahasanya. Sastra daerah menyangkut sastra lisan, berkaitan

dengan perubahan kelisanan ke keberaksaraan. Pengalaman agak berbeda terjadi pada beberapa kelompok etnis yang besar, yang sebelum ada pengaruh bahasa Indonesia telah mengembangkan sastra tulis.

Sekarang yang terjadi dalam perkembangan kesenian ialah khalayaknya. Kecuali untuk beberapa kecenderungan khusus, khalayak yang semakin luas semakin tidak jelas diri, watak, dan seleranya. Pergeseran kesenian apapun menjadi kesenian populer. Pergunjungan banyak atau sedikit peminat, laku atau tidaknya karya seni. Sastrawan mengeluh karena karyanya tidak dibaca banyak orang; penari mengeluh karena pendapatannya sedikit gara-gara tidak ada peminat; orang teater mengeluh karena gedung pertunjukan sepi penonton, dan seterusnya. Ini merupakan isyarat bahwa yang menjadi sasaran adalah khalayak seluas-luasnya, yang tidak lain berarti pendapatan sebanyak-banyaknya.

Artinya, kita sama-sama menuju ke kesenian. Kecenderungan itu bisa ditafsirkan sebagai perkembangan ke arah kesenian nasional. Dalam pengertian terakhir, semua jenis kesenian yang ada di negeri ini, berasal dari kelompok etnis manapun, berusaha untuk mendapat tempat khalayak yang lebih luas, yakni khalayak nasional. Untuk bisa mencapai tujuan itu, masing-masing kesenian harus melakukan perubahan yang menghasilkan kesenian baru yang “nasional”, yang mungkin sekali tidak lagi dikenal oleh pemiliknya. Dalam hal ini yang paling menderita adalah seni sastra, karena proses itu akan “mengecilkan” peran bahasa daerah dalam penciptaan sastra. Setiap jenis kesenian berusaha untuk menjadi milik masyarakat yang lebih luas sehingga mau tidak mau harus melewati batas-batas kedaerahannya.

Namun upaya apapun yang kita lakukan untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya, harus diingat bahwa dalam kesenian tidak dikenal demokrasi, jika dalam istilah itu tercakup pengertian selera terbaik adalah selera masyarakat terbanyak. Hakikat kesenian adalah kebebasan, baik dalam mencipta maupun dalam memahami dan menghayatinya. Jika seniman tidak boleh mengalami tekanan dalam menentukan apa yang ingin diciptakannya, maka masyarakat tentu juga memiliki kebebasan untuk menentukan hasil seni yang dinilainya paling baik. Jika ada “elit kebudayaan” yang sengaja menciptakan kesenian untuk masyarakat seluas-luasnya, tentu ada juga kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang menciptakan dan menjadi khalayak yang lebih terbatas ragam kesenian yang tidak populer, yang bisa saja berasal dari kelompok etnis kita atau dari negeri lain. Itu semua merupakan bagian yang sah dari kesenian nasional kita.

Nilai-Nilai Artistik Kesenian Nasional dan Kesenian Daerah

Oleh Putu Wijaya

Mengawal kesenian nasional yang ingin berkibar di kancah kesenian internasional, kesenian daerah diberi beban “essen”-menjadi stempel Indonesia. Dengan memanfaatkan peta baru, tanpa membubuhkan kata “hanya”-kita dapat memahami lebih gamblang karya-karya seni Indonesia masa kini, baik yang memertahankan tradisi, mengembangkan, maupun mengingkarinya. Termasuk juga karya yang sama sekali tak ada hubungannya dengan tradisi, misalnya Balet, tegar sebagai kesenian import dalam alam pikiran tradisi baru. Tradisi baru adalah pergeseran nilai dalam perkembangan seni daerah dan seni nasional yang diciptakan oleh kebutuhan politik.

Manusia memiliki “mesin converter” dalam dirinya sehingga segala pergeseran bahkan tanda-tandanya dapat dijinakkan, diadaptasi, baik secara simbiosis mutualistik, hingga akulturasi. Di Bali tersebut “desa-kala-patra”-tempat, waktu, suasana batin. Di Jawa, “empan, papan, winiraos”. di daerah-daerah lain mungkin dengan istilah setempat, yang jiwanya sama: mengembangkan harmoni.

Tradisi baru mengaktifkan “desa-kala-patra” sebagai converter hingga segala pergeseran nilai menjadi positif. Tetapi itu dapat menjadi senjata berdalih, dimanipulasi tanpa batas dari negatif seolah positif dan sebaliknya. Seni pertunjukan langka digeber, seperti Gambuh, Topeng Pajegan, melalui orang-orang Bali sendiri dan bersentuhan dengan nilai-nilai aktual dan universal, ketika tampil langsung memuncratkan ciri-ciri kontemporer.

Tak pernah ada jurang antara kawan dan lawan. Tak pernah ada masalah antara tradisi dengan ekspresi kontemporer. Yang ada adalah kealpaan untuk mengakui keberadaan nuansa-nuansa di antara kedua kutub hingga keterbatasan menangkap yang ada dari sesuatu yang dianggap tidak ada. Kesalahkaprahan dalam membuat peta membuat kita buta dan tuli, bencana dan hikmah melahirkan seni kontemporer. Karena dia juga akan terus bergerak ala desa-kala-patra.

Khalayak Kesenian Nasional dan Kesenian Daerah

Oleh Rahayu Supanggah

Istilah kesenian nasional kemungkinan dimunculkan untuk keperluan, tujuan, dan maksud strategis, baik seperti politis (persatuan dan kesatuan, kebangsaan,

serta wawasan nusantara), pembinaan dan pengembangan kesenian Indonesia, pemupukan rasa cinta tanah air melalui kesenian, pencarian identitas, dan sebagainya. Ia juga dianggap utopia, imajiner, dengan bentuknya yang baru sebagai perwujudan cita-cita ideal mewakili kesenian seluruh bangsa Indonesia. Sebaliknya kesenian daerah, dianggap sebagai kesenian yang lahir di lokasi tertentu, hidup berkembang dan didukung sejumlah masyarakat lokusnya. Sifatnya yang lokal diposisikan di bawah kesenian nasional.

Kesenian pada umumnya tidak mengenal batas daerah politik dan administrasi. Terdapat banyak bangsa negara (terutama yang sedang berkembang) telah membangun kelompok-kelompok kesenian dengan menamakannya sebagai National Dance Company, National Theatre Company, National Music Company, atau "kompani-kompani nasional", sebagai salah satu usaha membuat wadah untuk menyusun-menampilkan karya-karya yang dianggap "seni nasional". Mereka tidak begitu berhasil, dan malah menuai kritik. Di beberapa negara Eropa bahkan sebagian masyarakat peminat seni apriori untuk melihat tontonan yang disajikan oleh "kompani-kompani nasional", karena dianggap menyajikan karya-karya palsu, artifisial, atau dangkal.

Sebenarnya bangsa Indonesia yang telah merdeka, telah terbiasa untuk tidak "memisah-misahkan" dirinya sebagai orang daerah atau nasional. Setiap warga negara merasakan dan menyadarinya sebagai orang Jawa, atau Bali, atau Sumatera sekaligus sebagai warga dunia. Manusia yang monodualis, monopluralis, bersifat "bhinneka" dan tidak berwujud tunggal.

Kesenian (nasional) kita akan selalu ada dinamika, tantangan, dan sekaligus jaminan bagi seniman dan pekerja seni lainnya untuk terus kreatif, belajar, mengikuti pertumbuhan dan perkembangan zaman. Kehidupan kesenian Indonesia dengan demikian juga akan menjadi taman seni yang berwarna-warni disertai keharuman, membawa bangsa Indonesia ke dalam pergaulan yang mendunia.

TOPIK III: SENI DAN MEDIA

Media sebagai Sarana

Oleh JB Kristanto

Media boleh dikata "subordinat" dari kesenian. Kedudukan demikian berlaku untuk bidang kehidupan lainnya. Media boleh tidak ada, atau tidak menyediakan ruangan, tetapi kesenian akan jalan terus. Sejalan dengan keterbelahan masyarakat dalam kelompok-kelompok karena tuntutan profesi,

media berkedudukan “antara”-sama penting dengan yang diperantarainya. Dia harus memenuhi hukumnya sendiri sebagai media-antara-, agar berfungsi. Jika menjadi penting sendiri, lalu bersikap sombong, koreksi dengan sendirinya akan datang baik dari dirinya sendiri maupun dari yang diperantarai, hingga kedudukan yang sebenarnya tercapai.

Tidak ada penerbitan atau koran yang sengaja menggaji seorang pengamat dan kritikus baik karena pendidikan maupun keahliannya. Yang terjadi adalah wartawan generalis, yang karena periode tertentu, ditugaskan meliput dunia kesenian. Pengetahuannya berasal dari pekerjaannya itu; mewawancarai seniman, melihat pameran, pertunjukan, dan lain sebagainya. Ada yang mencoba mendalami sendiri sebuah cabang kesenian karena minat berlebih itu dengan mencari buku. Kalau hendak lebih mendalam, mereka tak tahu mesti ke mana. Sampai sekarang, belum ada telaah serius yang bisa diperoleh umum tentang seniman besar, dan dokumentasi lengkap karya seni.

Saya tidak berilusi bahwa semua jenis kesenian akan bisa dimengerti oleh semua orang. Bagaimana memperbaikinya? Menumbuhkan pendidikan kesenian yang baik dari sejak usia dini, dan memperbaiki pendidikan kesenian khusus pada tingkat akademi dan sekolah tinggi. Menumbuhkan pengumpulan data-data dasar kesenian baik dalam bentuk museum, dokumentasi visual, buku, dan lain-lain. Mendorong penulisan-penulisan telaah dan teori tentang jenis kesenian apapun yang ada. Atau dalam kata yang lebih gagah: menumbuhkan budaya tulisan!

Budaya tulisan bukan sekadar dikenalnya huruf sebagai simbol dan cara berkomunikasi. Karena tertulis, akumulasi data dan sistematisasi pikiran, bahkan pembuatan teori, bisa dilakukan. Pikiran menjadi milik umum. Akibat selanjutnya, dunia tulisan menjadi dunia tersendiri, yang bisa digugat dengan mudah, disalahkan, atau dibetulkan, dicari kemungkinan-kemungkinan lainnya, dikembangkan, dan seterusnya.

Museum seni lukis sudah ada, pribadi maupun umum seperti Balai Seni Rupa dan Keramik di Jakarta Kota. Lebih hebat lagi jika diterbitkan pula buku yang berisi pengetahuan seperti yang dilihat di museum. Tulisan tidak bisa menampung keaslian lukisan, tetapi penulisnya bisa menjelaskan warna, garis, corak, bahan, latar belakang sosial pelukis dan zamannya. Kalau ada yang tak setuju dengan si penulis tadi, penulis lain bisa membuat versinya sendiri. Hingga pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang belum terangkum. Pengetahuanlah yang membuat terjalannya kerja sama antara beragam jenis kesenian hingga bisa saling memperkaya. Kesenian tidak bisa berkembang baik bila tidak tumbuh budaya kritik yang baik juga. Sudahkah kita mempunyai budaya demikian ini?

Dekade Transformasi 1995-2000: Konfigurasi Baru Kesenian Indonesia

Oleh Garin Nugroho

Pencarian pada bahasa global, hakikatnya kembali pada esensi dunia yang memiliki batas yang jelas. Namun, bahasa-bahasa yang mudah didefinisikan dan jelas, yakni bahasa ibu dengan adanya sastra daerah, penggunaannya, dan lain-lain sesungguhnya juga pencarian yang tidak terdefiniskan, karena bahasa itu dinamis, selalu mengalami perubahan.

Televisi menjadi ruang bagi berita, politik, komunikasi, hingga ilmu pengetahuan. Berarti setiap pemahaman topik dibentuk oleh bias televisi. Ia menjadi urbanisasi kesadaran. Ia bisa memperluas atau memperlemah seseorang. Televisi adalah panduan sastra rakyat hari ini. Plot, situasi, dan watak dari tokoh-tokoh dan satuan show di televisi adalah bagian kehidupan sehari-hari masyarakat. Didukung dominasi teknologi dan ekonomi adalah gerbang terbesar mempertemukan komunikasi Indonesia dengan realitas industri. Kesenian Indonesia bertumpu pada pemujaan televisi sekaligus penolakannya.

Hubungan kesenian Indonesia dengan teknologi dan industrinya selain diberi pertanyaan persoalan kemampuan pencapaian, sudah saatnya diberi pertanyaan untuk apa pencapaian itu? Pada dua pertanyaan tersebut terlihat teknologi dalam pencapaian komunikasi Indonesia dipenuhi paradoks.

Inilah dekade transformasi yang menentukan arah konfigurasi baru komunikasi Indonesia. Sudah saatnya kita mencipta deskripsi atau representasi abstrak pola komunikasi sebagai pola komunikasi kebudayaan kini dan masa depan.

Mengikatkan diri pada perubahan teknologi industri bukan berarti tindakan pasif mengikuti tindakan aktif. Kodrat manusia yang agung dan unik adalah mengontrol dan menentukan arahnya sendiri.

Media sebagai Konsep Pengkodean

Oleh Primadi Tabrani

Media sebagai Perantara

Sejak masa prasejarah sampai masa tradisional, media yang bisa berpindah tempat (*portable*), hanyalah media dengan diri kita sendiri, namun harus bertatap muka. Media di luar tubuh kita terikat tempat: dinding gua, candi, dan lain-lain.

Pembuat dan pemirsa harus bertemu di kawasan yang terikat tempat. Ketika

tulisan paku dan hiroglip berkembang jadi alfabet dengan kaligrafinya lalu ke blockprint dan linotip, batu-batu prasasti berubah jadi gulungan parkamen, lembar papyrus, beberan kulit kayu, lontar, hingga akhirnya media portable. Begitu pula karya seni, bisa dibawa, dipertukarkan, diperjualbelikan.

Media sebagai Hasil Proses

Pada manusia, apa yang diindera dapat disimpan dalam memori. Saat belum ada nama sebagai media, maka untuk “bentuk” manusia saja, dapat diindera bentuk-bentuk yang bisa didikriminasikan; bayi-bocah-remaja-dewasa-tua-lelaki-wanita-berkulit coklat/hitam/putih/kuning, dan sebagainya.

Di masa hidup masih komunal, seniman masih anonim, konsep dan pengkodean latar belakang suatu suku bangsa boleh dikata sama, tak terjadi kesenjangan pembuat-pemirsa, media seni jadi komunikatif. Penelitian seni tradisi harus dipercepat, tanpa itu, seni kita berikut desain akan kalah bersaing atau dicuri negara yang lebih maju-dan kemudian kita import kembali. Namun, adalah tugas kita memadukan apa yang datang dari luar tanpa kehilangan jati diri.

Media sebagai Mediator dan Standarisasi Kesenian

Oleh Ishadi S.K

Membicarakan media sebagai medium dan penentu standar kesenian di Indoensia memberikan dua pertanyaan besar:

1. Perkembangan berkesenian di Indonesia berada pada tahap krusial dalam arti akankah kesenian kita mampu menempatkan diri dalam wahana perubahan waktu di era globalisasi yang sekarang sedang melanda?
2. Media di Indonesia, khususnya televisi, akankah mampu memegang peranan yang kuat untuk menempatkan diri sebagai benteng terhadap arus penetrasi kesenian dari luar, sekaligus mampu mengkreasikan dan mengakomodasikan paket-paket kesenian yang dapat diterima oleh pendengar radio dan khalayak penonton televisi di Indonesia? Era globalisasi memang paling dirasakan mengancam dilihat dari aspek kesenian dan kebudayaan. Karena dari aspek ini sesungguhnya rambu-rambunya paling lentur. Tidak ada hitung-hitungan matematis, dan hitung-hitungan *cost and efficiency* sebagaimana halnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan.

Media telah masuk dalam pertarungan antara bisnis dan idealisme. Ini tidak baru. Mass media tidak mungkin tumbuh dan berkembang tanpa memikirkan sisi bisnisnya. Bedanya, dahulu kala, bisnis media berada di bawah satu tangan dan berada di bawah kontrol redaksi. Di era persaingan yang semakin kuat

sekarang, urusan bisnis dipecah dalam bagian tersendiri. Seakan ada pertentangan idealisme antara bagaimana mengatur agenda isi media dan meraih khalayak sebanyak-banyaknya sehingga menguntungkan dan bagaimana mendesain isi media agar gagasan idealisme lebih menonjol.

Pada era globalisasi yang ditandai pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang dibicarakan, dirundingkan, dan disepakati oleh pimpinan negara adalah masalah-masalah perdagangan bebas, keringanan pajak, menghilangkan batasan tarif, menghilangkan proteksi ekspor-impor. Kalau ada faktor kesenian, hanyalah menjadi pelengkap dan bumbu jamuan santap malam pertemuan petinggi manca negara. Produk-produk mass culture negara-negara industri leluasa memasuki relung-relung rumah tangga, negara-negara berkembang di dunia. Indonesia contoh yang bagus sebagai negara dengan ragam produk kesenian dan budaya yang amat kuat dengan tradisi leluhur.

Mudah-mudahan peta persaingan di antara sesama mass media lokal maupun media trans nasional semakin ketat, menjadikannya mediator dan penentu standar kesenian. Diperlukan kajian yang lebih komprehensif dan masukan dari berbagai pihak untuk mengembangkan sebuah konsep. Dalam situasi itu pembicaraan tentang eksistensi lokal akan strategis pengaruhnya.

TOPIK IV: KAJIAN SENI

Sastra Kita: Estetika dan Teori

Oleh Budi Darma

Nilai estetika ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu sejarah dan karya itu sendiri. Faktor sejarah ikut menentukan estetika, karena sastrawan tidak dapat membebaskan diri dari kesadaran kolektif yang menggarisbawahi kreativitas sastra dan pembentukan kanon. Dalam keadaan sejarah berjalan linear, harkat dan martabat sastra lebih banyak ditentukan oleh sastra itu sendiri. Sophistikasi estetika merupakan obsesi yang menarik-nilai estetika tidak lepas dari intelektualitas pengarang. Sastra sebagai pemikiran, menuntut kita untuk berkepala dingin, berotak cerdas, dan berwawasan luas. Dengan prasyarat ini, sastrawan sanggup membuat jarak antara sastra di satu pihak, dan emosi serta eksplorasi sastrawan, baik sebagai individu, maupun wakil kesadaran kolektif. Jarak inilah yang membebaskan sastra dan pencemaran emosi dari aspirasi.

Dalam sastra, sebagaimana juga halnya emosi dan nasionalisme, aspirasi adalah daya dorong. Dalam proses sastra, tidak memerlukan emosi sebagai emosi, nasionalisme sebagai nasionalisme, dan aspirasi sebagai aspirasi itu

sendiri. Sastra memerlukan simpul-simpul emosi, nasionalisme, dan aspirasi.

Salah satu hukum alam menyatakan, makin jauh seseorang berjalan, makin rindu kampung halaman. Tidak hanya pada sastra, karena harus ada hukum Indonesia, psikologi Indonesia, arsitektur Indonesia, dan lain-lain. Sastra Indonesia juga harus khas Indonesia, demikian juga teori sastra kita. Panorama sub-kebudayaan Indonesia sudah mewarnai sastra Indonesia. Ada sastra Jawa, Minang, Kalimantan, dan lain-lain. Namun yang tidak terikat sub-kebudayaan itu juga berjalan terus, demikian pula proses sophistikasi estetika.

Kesulitan teori sastra terletak pada polarisasi sastra itu sendiri. Teori selalu tertinggal oleh dinamika sastra, sehingga bisa menjadi steril. Tentu teori sastra bergandengan dengan estetika. Selama kita bersikap terlalu abstrak, atau terlalu deskriptif, kita kurang siap analitis. Teori sastra tergantung pada sastra, bukan sebaliknya. Kalau kita mempunyai teori sastra, maka teori tersebut sesuai dengan hakikat karya sastra itu sendiri.

Dialog Tatap Seni Rupa - Estetika

Oleh Mudji Sutrisno

Tersekatnya pelaku kesenirupaan dalam “rumah”—perenungannya, penikmat dalam “rumah”—sudut pandangnya, dan “rumah” kritikus dapat dijembatani lewat “apresiasi seni rupa”. dari perspektif estetika, yang bernilai indah itu akan diuji oleh kemampuan seniman mempertemukan yang jati dari bahan, atau jati dari seniman sendiri. Ketulusan dalam pemenuhan, proses kreatif memilih bahan jati olahannya untuk disenyawakan dengan jati inspirasinya.

Dari wawasan estetika, orang harus secara jernih membedakan tiga ukuran sekaligus; ada hal yang berguna, ada hal yang enak, ada hal yang indah. Thomas Aquinas, melanjutkan estetika Aristoteles dengan menegaskan, bahwa yang indah itu bisa dikenali sebagai pijar sinar kebenaran.

Kita baru disadarkan ketersekatan masing-masing pelaku seni dalam “rumah” masing-masing membuat kesenirupaan tidak diakrabi penikmat dan peminat, apalagi masyarakat umum. Hanya bila orang biasa berdialog mengenai seni rupa antar seniman, pemirsa, kolektor, atau kritikus, di sana akan terjadi keleluasaan wawasan dalam mengenal dan menyelami seni rupa.

Prakarsa dialog tatap seni rupa pantas didukung siapa saja. Bila terjembatani, lembaga-lembaga seni rupa (yang barangkali sampai hari ini sengaja bersendiri-sendiri atau membiarkan masyarakat kita “buta seni” agar kepentingan dagang bisa jalan terus) sebuah forum dialog antara masyarakat akan terpadu dalam “pendidikan informasi”, bola salju dialog menggelinding,

tinggal tantangannya: maukah kita berendah hati saling belajar untuk keluar dari sekat-sekat keterbatasan “kebenaran” kita sendiri?

Pancasi-tuasi

Oleh Harry Roesli

Ketika manusia mulai bisa menerima dan menikmati seni, apa yang terjadi? Manusia mulai memahami bahwa tubuhnya itu terdiri dari partikel-partikel yang disusun sedemikian rupa hingga mudah untuk dirangsang. Entah rangsang menolak atau menerima.

Ditakdirkan cara penerimaan seni musik melalui medium waktu. Semua orang punya lagu favorit yang didengar berulang-ulang tanpa kehilangan rasa atau tensi.

Masyarakat kita adalah masyarakat seni populis. Percikan api dialektika tidak sehebat masyarakat seni Barat. Di sana, dua seniman yang sezaman dan seestetik bisa “berkelahi” habis-habisan, yang hasilnya sampai 8 buku teori, atau filosofi tentang kesenian mereka. Sedang di sini, orang tidak usah sepaham, tidak usah satu selera, bahkan bisa berbeda proses berkarya, filosofisnya, tujuannya, tapi dengan tenang dan damai bisa bersatu membentuk karya bersama.

Kesulitan seniman kontemporer masa kini di samping terkondisinya masyarakat, keanekaragaman gramatika musik, hanya seniman dan atau komposernya menentukan kamus musiknya. Rupanya sekarang ini zaman “bagaimana” bukan “mengapa”. yang pertanyaan bagaimana akan menghasilkan jawaban serba teknis, estetika teknis. Tetapi pertanyaan “mengapa” akan membuat diskusi panjang, asosiatif, pengkajian, filosofis, nalar sosiologis.

Kajian Sejarah Kesenian

Oleh Edi Sedyawati

Kepelikan yang harus dihadapi seorang peneliti Sejarah Kesenian Indonesia adalah keberagaman jenis dan tradisi seni yang terkandung dalam khasanah seni di Indonesia. Sudah tentu seorang penulis sejarah kesenian tidak perlu sekaligus menulis tentang keseluruhan jenis tradisi tersebut, namun tetap dituntut untuk memahami kedudukan masing-masing seni tradisi itu dalam sistem besar atau jaringannya. Meski ia akan membahas aspek khusus, yang amat spesifik, ia

tetap dapat mengintegrasikannya.

Perkembangan studi kesejarahan seni yang mendalam memerlukan dinamika, dialog terus-menerus antara kajian struktural dan prosesusal. Seringkali peneliti harus melakukan keduanya. Pada kajian struktural ia harus menghimpun dan mengolah data baru. Pada aspek prosesusal ia melakukan interpretasi.

Sudah tentu susunan sejarah itu dapat dibuat bermacam-macam. Sejarah seni rupa dapat disusun sebagai sejarah munculnya gaya demi gaya sepanjang waktu; dalam hal ini wujud ekspresi seni memiliki *inner logic* yang berkembang otonom, mengikuti jiwa zaman (*zeitgeist*). Sosok sejarah kesenian Indonesia terbentuk semakin kokoh apabila semakin banyak kajian mengenai subyek-subyek tertentu pada masa tertentu pula.

Kajian-kajian seperti itu perlu tuntas dalam penangan data, agar simpul yang didapat pun mantap. Selanjutnya, kupasan-kupasan mengenai perkembangan dalam rentang waktu yang lebih panjang dapat menampilkan berbagai tafsiran mengenai arah perkembangan, juga mengenai pola-pola keterkaitan antara seni dan berbagai bidang kegiatan manusia yang lain.

Multikulturalisme/Multimodernisme

Oleh Jim Supangkat

Polemik seni musik kontemporer Indonesia menampilkan kenyataan, ternyata tidak mudah menerapkan istilah seni kontemporer dalam perkembangan kesenian kita. Polemik ini berakhir tanpa memberi gambaran, bahkan yang sederhana, tentang seni kontemporer. Apalagi menunjuk perkembangannya.

Muncul pertanyaan, benarkah seni kontemporer sesungguhnya sudah di Indonesia? Apakah relevan mempersoalkan seni kontemporer di Indonesia? Apakah seni kontemporer dunia tidak mempunyai sangkut-paut dengan perkembangan kesenian kita?

Kita bisa berspekulasi terdapat sejumlah perubahan di dunia yang bisa ditafsirkan sebagai tanda-tanda berakhirnya era modern. Perubahan yang bertubi-tubi itu terjadi tanpa pola. Kepentingan kita adalah berakhirnya dominasi, agar terbuka peluang membangun pemahaman diri atau *self-knowledge*. Bila fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan seni kontemporer, jelas relevan untuk kita permasalahan dalam perkembangan kesenian kita.

Dalam perkembangan *mainstream* muncul tema-tema sosial-politik. Namun tema sosial politik di Indonesia dengan kecenderungan moralistik membuat karya seni modern di Indonesia malah bertentangan dengan *mainstream* itu sendiri.

Sudah masanya kita melakukan retrospeksi. Pengkajian adalah bagian

multimodernisme yang sekilas sulit diterima, baik di lingkungan kesenian kita, apalagi dalam perkembangan mainstream, karena seperti dalam perkembangan mainstream, proposal itu menyodorkan zero option.

TOPIK V: SENI DAN PENDIDIKAN

Lembaga Pendidikan Tinggi Kesenian Indonesia ke Arah Peran yang Lebih Strategis

Oleh Mursal Esten

Lembaga pendidikan tinggi kesenian dapat berperan strategis sebagai pusat-pusat kebudayaan-pusat-pusat kesenian. Secara kreatif dan akademis mengkaji serta mengembangkan suatu bentuk kesenian yang berakar tradisi dan memiliki jati diri, tanpa terperangkap oleh sikap yang tradisional, konservatif, dan puritan. Sejak awal abad ini telah terjadi perubahan penting dalam pola dan sistem kemasyarakatan di Indonesia.

Bergesernya kekuasaan berpengaruh kepada kebudayaan, yang lebih dahsyat dari masyarakat agraris ke industri, lalu masyarakat informasi. Bentuk-bentuk kesenian yang anonymous berubah menjadi semakin individual dan personal, sehingga hak paten dan hak cipta menjadi sangat penting di dalam kehidupan kesenian. Kesenian tak lagi hanya upacara, di masyarakat industri ia menjadi komoditi.

Lembaga pendidikan tinggi kesenian akan berperan:

- Sebagai pusat dokumentasi, baik terhadap bentuk-bentuk kesenian yang merupakan kekayaan kesenian tradisi, maupun karya-karya eksperimental dan karya-karya kontemporer. Dokumentasi kesenian itu akan merupakan bahan yang penting sebagai sumber penciptaan.
- Sebagai pusat kajian dan penelitian. Kesenian tradisi yang akan dilestarikan bukanlah kesenian yang telah didokumentasikan itu. Kekayaan kesenian tradisi yang telah diinventarisasi dan direvitalisasi, diteliti dan dikaji lagi, sehingga kejayaan kesenian tradisi tersebut mampu menjadi jiwa dan akar dari proses penciptaan baru. Melalui penelitian dan pengkajian, kejayaan kesenian tradisi yang menjadi bagian masa lalu, mampu menjadi bagian masa kini dan masa depan.
- Sebagai pusat proses belajar-mengajar. Tiga komponen yang harus berperan dalam proses ini, yakni guru (dosen), mahasiswa, dan kurikulum. Keberadaan guru atau dosen yang menguasai seni sangat penting. Mereka adalah Mpu, yang mungkin secara akademis atau berdasarkan kualifikasi

keilmuan formal tidak memenuhi syarat, akan tetapi menjadi sumber ilmu yang harus ditimba dan diajarkan. Tanpa kehadiran mereka, lembaga pendidikan tinggi kesenian Indonesia menjadi endogen dan artifisial. Para Mpu ini harus dapat masuk ke dalam sistem administrasi lembaga pendidikan tinggi kesenian.

Kurikulum pendidikan tinggi kesenian di Indonesia haruslah mampu menjadi muatan lokal, berkembang nasional kemudian global. Kurikulum yang demikian harus ditunjang berbagai kelengkapan akademis lainnya, seperti laboratorium, ruang atau gedung pertunjukan dan segenap fasilitasnya, percetakan, dan penerbitan, serta kelengkapan yang memungkinkan peran sebagai pusat kebudayaan dan kesenian.

Pendidikan Kesenian di Sekolah Umum

Oleh A.A. Navis

Dalam pandangan bangsa kita, setiap orang yang menamatkan perguruan tinggi digolongkan sebagai cendekiawan. Sesuai dengan visi Belanda, sebagai bangsa bekas anak jajahan, pengaruh Belanda di bidang pendidikan masih kuat pada bangsa Indonesia.

Pendidikan Belanda di Indonesia, dikukuhkan dengan program, kurikulum, sistem, dan metoda yang strategis *nago* kepentingan kekuasaan penjajahan. Yaitu untuk mendidik bangsa Indonesia agar menjadi warga negara jajahan yang baik di satu sisi, dan menjadi alat negara yang terampil di sisi lain. Bangsa yang tidak mampu menggunakan otaknya untuk berpikir akan lebih mudah diperintah. Atau tidak berinisiatif dan hanya akan bekerja bila ada perintah atasan.

Pada pendidikan umum sejak di Sekolah Rendah sampai Sekolah Menengah, Belanda memberikan pendidikan kesenian, seperti menyanyi dan menggambar, juga olahraga dan kerajinan tangan. Bila ada kesempatan, diajarkan juga bermain drama. Bila jam pendidikan kesenian dianggap kurang, dapat dilakukan di luar jam wajib. Pendidikan kesenian tidak memerlukan guru spesial. Dalam merekrut calon sekolah guru, diberi prioritas kepada mereka yang punya bakat, kesenian, atau olahraga. Pendidikan kesenian ditujukan sebagai alat indoktrinasi guru mencabut akar budaya bangsa dan memandang Belanda sebagai bangsa superior. Sebagai alat pendidikan keterampilan meniru secara persis benda yang diberikan sebagai contoh, para murid diberikan kurikulum akademik sekaligus indoktrinasi, dan pendidikan kolonial tersebut Belanda akan dapat menaklukkan anak-anak jajahannya.

Taman Siswa memberikan bobot dan waktu yang lebih banyak kepada

pendidikan kesenian. Materi kesenian yang diajarkan ialah seni tradisional/ daerah di mana Taman Siswa berada. Memberikan pendidikan kesenian tersebut dimaksud untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Di samping latihan kepemimpinan, pendidikan kesenian dijadikan alat indoktrinasi nasionalisme.

Metoda yang dikembangkan Taman Siswa, murid menjadi subjek-guru membimbing di belakang. Misalnya, dalam pelajaran menyanyi murid diusahakan agar mampu bernyanyi sendirian dan bersama di depan kelas menyanyikan lagu rakyat yang telah dikenalnya. Demikian pula dalam pelajaran menari, yaitu menarik tari-tarian yang mereka kenal dan membanggakan sebagai milik bangsanya.

Dalam pelajaran menggambar diutamakan menggambar bebas, baik dengan meniru benda atau alam yang dipilih, maupun berasal dari imajinasi sendiri.

Dalam sistem ini, hasil tidak penting. Yang dipentingkan adalah prosesnya, keberanian melakukan sesuatu yang mereka pikirkan. Dengan demikian, murid terdidik untuk mengembangkan pribadinya sebagai individu maupun sebagai bagian dari lingkungan, juga menyiapkan dirinya sebagai pemimpin. Ajaran semangat Taman Siswa menanamkan spirit nasionalisme dan latihan menjadi kader pemimpin bangsa.

Pendidikan Seni di Luar Sekolah

Oleh Saini K.M

Pendidikan seni di luar sekolah ialah upaya-upaya yang dilakukan perorangan maupun lembaga. Upaya seorang seniman yang berhasil menciptakan karya-karya bermutu, pertama bersifat kreatif, niscaya akan memberikan dampak edukatif bagi masyarakat, namun sebaliknya karya yang diciptakan tanpa tanggungjawab estetik akan memberi dampak negatif dipandang dari kepentingan pendidikan seni. Upaya-upaya lain yang dilakukan secara kolektif oleh panitia atau lembaga, bahkan oleh keluarga (informal) dan sanggar-sanggar juga merupakan bagian pendidikan seni, dengan dampak yang positif atau negatif.

Masyarakat sasaran pendidikan seni sebagai model terdiri dari tiga penggalan (*segment*):

1. Awam-jumlah terbesar warga masyarakat cenderung merancukan nilai dalam menghadapi karya seni. Mereka tidak dapat membedakan karya seni sebagai lambang dan realitas sehari-hari. Contoh lain yang lebih umum ialah peristiwa-peristiwa ketika (para) pejabat berpesanan agar penari-penari yang

diundang untuk suatu acara terdiri dari gadis-gadis cantik. Dalam kasus itu keindahan alam dirancukan dengan nilai estetik.

2. Apresiator-ia memiliki kepekaan akan nilai (*sense of value*) dan dapat mengenali (mengidentifikasi) nilai estetik walaupun *experiental*-nya menakutkan, menyedihkan, menjijikkan, dan sebagainya. Kemampuan mengatasinya dengan kepekaan akan memberi peluang untuk memperkaya diri dengan jiwa dan pergaulan karya seni.
3. Snob-(sine nobilitas)-menikmati atau mencintai karya-karya seni merupakan permainan sandiwara. Walaupun karya seni tidak memberikan nilai estetik padanya, karena sebenarnya ia tidak mampu menghayatinya, pergaulan dengan karya seni memberinya nilai lain, terutama nilai sosial, yaitu dalam bentuk gengsi (*prestige*), dan rasa termasuk ke dalam khusus (*exclusivisme*). Kecenderungan lainnya ialah: pameran.

Keluhan para seniman tentang masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap karya-karya seni dan bahwa seni masih merupakan sesuatu yang terletak di "pinggiran" dalam kehidupan, walaupun perlu pengkajian lebih rinci mengungkapkan lemahnya pendidikan seni di luar sekolah. Sebaliknya, sering pula masyarakat mengeluh karena merasa diberi sajian seni yang mereka tidak memahaminya, apalagi menikmatinya. Demikian pula gambaran tentang upaya-upaya seperti pertunjukan, penayangan, pameran, diskusi-seminar-sarasehan yang sporadis, tidak terencana, tidak terarah dan tidak terkoordinasi. Sumber daya manusia yang sangat diperlukan seperti dramaturg, kurator, kritikus, dan peneliti seni masih merupakan kelompok yang kecil dan bahkan tidak atau belum dikenal oleh masyarakat awam.

Fungsi Didaktis Kesenian

Oleh F.X. Sutopo Cokrohamijoyo

Didaktik adalah bagaimana dari paedagogik atau ilmu mendidik dan digunakan dalam pendidikan formal yang dilakukan di sekolah. Didaktik dengan pengertian sebuah ilmu mengajar yang memberikan prinsip-prinsip cara menyampaikan pelajaran sehingga dikuasai dan dimiliki oleh anak didik sangat dipengaruhi oleh psikologi. Didaktik juga membutuhkan filsafat yang menentukan tujuan, dan pandangan guru-murid. Sedangkan sosiologi atau antropologi karena mendidik dalam masyarakat tertentu.

Prinsip-prinsip didaktik (motivasi, aktivitas, penagaan, individualitas, persepsi, lingkungan, korelasi, konsentrasi, dan integrasi) sepadan dengan apa yang bisa dicapai oleh kesenian. Kesenian adalah perwujudan dan hasil dari kebudayaan,

sedang pelaku kebudayaan adalah manusia, jadi wujud ekspresi seni dalam kaitan itu juga tidak selalu tercipta oleh seniman sebagai profesi, tetapi dimungkinkan juga terlahir dan mengalir bersamaan dengan perjalanan kebudayaan itu sendiri. Darah atau kadar seni pada proses terwujudnya karya cipta sangat melekat pada pemrakarsa atau penciptanya.

Fungsi didaktis kesenian semakin nyata dibutuhkan dan bermanfaat apabila dihadapkan kepada:

- Pengetahuan sebagai alat mencapai tujuan pendidikan.
- Dari semua asas didaktik, aktivitaslah asas yang terpenting, sebab belajar sendiri merupakan kegiatan.
- Diminta atau tidak, kita menerima segala sumber informasi secara simultan dalam waktu yang sama.
- Semakin sempit sarana, waktu, dan kesempatan berkomunikasi dalam arti luas.
- Didaktik kesenian dapat memenuhi motivasi instrinsik-di mana kegiatan belajar didorong oleh keinginan untuk mengetahui, bukan untuk meraih prestasi semata.
- Semakin merenggang antara karya seni dengan lahan wujud ekspresi seni yang semestinya lahan itu justru dibutuhkan.
- Pasti akan terjadi pengaruh dan pergeseran nilai dari masyarakat agraris ke masyarakat industri-informasi

Yang lebih penting sekarang adalah mengkondisikan kemauan kita sendiri dan lingkungan yang mampu merangsang tumbuhnya karya seni dan wujud ekspresinya, karena dengan itu dapat diharapkan munculnya manusia kreatif, jujur, dan idealis.

TOPIK VI: SENI DAN PARIWISATA

Seni dan Pariwisata

Oleh R.M. Soedarsono

Pariwisata Budaya

Walaupun Indonesia memiliki objek-objek wisata yang sangat beragam, baik yang berupa kekayaan alam maupun lingkungan, tetapi kekayaan budaya merupakan aset yang harus kita perhatikan dalam industri pariwisata kita. Saya katakan harus, karena Indonesia memiliki kekayaan budaya luar biasa sebagai akibat dan jumlah kelompok etnis yang menghuni tanah air kita ini, dan juga karena kehadiran agama-agama besar di negara kita. Bahkan daerah terpencil

atau pedalaman yang masih melestarikan budaya pra-sejarah, merupakan lahan yang cukup menarik bagi wisata budaya.

Daerah yang penghuninya beragama Hindu, terutama Bali, kekayaan budayanya sangat luar biasa. Pulau yang mungil, mempunyai sekitar 20.000 Pura-bangunan keagamaan-indikator betapa kayanya budaya wilayah yang selalu menjadi tujuan wisatawan mancanegara. Tradisi keagamaan untuk memperingati hari kelahiran pura yang disebut **piodalan** atau **odalan**, misalnya, merupakan kegiatan religi serta adat yang sangat marak. Ubud yang menampilkan seni rupa, mendapat predikat "*The Mecca of Visual Arts*"-yang biasanya dikenakan pada seni pertunjukan, dan yang mendapat julukannya adalah New York.

Di Jawa, selain candi-candi, keraton yang sudah tidak berfungsi sebagai pusat kehidupan politik dan budaya di beberapa bekas kerajaan Indonesia yang jumlahnya berpuluh-puluh, merupakan daya tarik yang besar pula bagi wisatawan mancanegara. Bila mau, kampus pun bisa menjadi objek wisata yang cukup menarik, lebih-lebih kampus seni, tentu tetap dijaga jangan sampai merusak proses belajar-mengajar.

Seni sebagai Komoditi Pariwisata

Tomars mengatakan dalam tulisannya "*Class Systems and the Arts*", setiap kelompok masyarakat pasti memiliki seni yang sesuai dengan ciri dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pada masyarakat yang masih melestarikan budaya prasejarah, mereka memerlukan seni hampir pada semua kegiatan serta peristiwa penting mereka yang umumnya bernilai ritual. Pada masyarakat feodal, ketika masyarakat terbelah dua kelompok besar, kelas bangsawan dan kelas rakyat, kategori seni pun berbeda; seni istana, dan seni rakyat. Seni pertunjukan kota setelah Indonesia merdeka, bisa dibeli jelas telah merupakan komoditi, yang harus mampu bersaing.

Nasib seni pertunjukan komersial mulai mendapat angin baru lagi ketika industri pariwisata digalakkan sejak tahun 1986, ketika harga minyak bumi dan gas anjlok, ditambah terjadinya devaluasi rupiah. Usaha mempromosikan budaya Indonesia ke luar negeri terus berlangsung. Hasilnya, industri pariwisata Indonesia telah mampu menduduki peringkat pemasok devisa negara berdampingan dengan tekstil.

Konsep Seni Wisata

Maquet mengutarakan bahwa dengan hadirnya masyarakat wisata di sebuah daerah yang berkembang seperti Indonesia, akan berakibat lahirnya seni yang

khas buat masyarakat asing, di samping seni bagi masyarakat setempat. Seni buat masyarakat setempat disebutnya *art by destination*, sedangkan buat wisatawan mancanegara *art of acculturation* atau *pseudo-traditional arts* atau yang lazim kita sebut sebagai *tourist arts* (seni wisata).

Disebut sebagai *art of acculturation* karena seni buat masyarakat wisata itu merupakan akulturasi antara selera estetis seniman penciptanya/penggemarnya dengan selera estetis masyarakat luar yang menjadi penikmatnya. Disebut sebagai *pseudo-tradition arts* karena seni ini bentuknya masih mengacu kepada tradisi, tetapi sudah dihilangkan nilai-nilai sakral dan magisnya. Dengan demikian konsep Maquet ini kehadiran industri pariwisata tidaklah merusak perkembangan seni di negara berkembang, tetapi justru memperkaya.

Kesenian, Pariwisata, dan Budaya Globalisasi

Oleh Yusuf Affendi

Siapa saja yang bekerja dalam bidang seni dan desain memiliki tugas berat di depannya, yaitu menjernihkan pikiran mengenai semua pendapat yang terbentuk sebelumnya tentang seni dan para senimannya. Pikiran-pikiran yang didapat dari sekolahan di masa lalu, mengharuskan kita untuk berpikir, bahwa hanya ada satu cara selama hidup. Tanpa sejenak pun diam, untuk berpikir, hidup itu selalu berubah, dan kini bahkan lebih cepat dari sebelumnya.

Ciri-ciri masyarakat modern antara lain memiliki intelektualitas tinggi, etos kerja besar, produktif, efisien, terencana, tidak untung-untungan, berkeinginan maju, berhasil, dan mandiri. Hubungan antar manusia juga akan diwarnai oleh ciri-ciri yang rasional dan lugas. Dalam berpikir secara rasional, masyarakat cenderung berpikir pragmatis, profesional, spesialis, sistematis, dan hidupnya lebih teratur. Budaya kerja keras berkembang dan prestasi lebih dihormati daripada status dan kekayaan.

Seni dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengubah gagasan manusia menjadi suatu bentuk, mentransfer yang tidak teraga menjadi teraga. Desain juga merupakan proses mengubah mental, sosial, dan kejiwaan menjadi wujud bentuk. Dalam analisa mutakhir seni dan desain adalah hasil proses ciptaan manusia dalam wajah bentuk serta realitas baru. Penciptaan realitas itu selalu merupakan kegiatan yang sintesis dan hasilnya perlu memiliki keindahan. Keindahan desain itu pada hakikatnya terletak dalam jiwa (roh) dan hati manusia. Secara singkat prinsip-prinsip seni dan desain dapat bermakna: inovasi, kegunaan estetis dan artistik dan fungsional, kejujuran, keluwesan, dan penghormatan kepada pemakai, antara lain keselamatan dan rasa puas serta

senang.

Selain sifat global dari desain, diperlukan juga seniman lokal yang berciri budaya khusus. Sentuhan itu mungkin ramuan teknologi dengan semiotik atau simbolisasi dari suatu gaya/mode yang sedang melanda pasaran internasional masa kini.

Kebangkitan seni modern secara keseluruhan bersifat lebih transendental, fungsional, terbuka, membongkar dinding pemisah, dan menghilangkan kepura-puraan. Ungkapan-ungkapan seni yang mengangkat derita manusia, tercipta *dadaisme* hingga *neo-dada*, yang menampilkan kolase dari bahan-bahan akibat perang. Kemudian disusul dengan lahirnya Pop Art atau seni yang populer.

Jadilah filsafat baru, karya seni tidak perlu abadi, yang perlu adalah konsep seni, kontekstual seni, kesan, dan citra (*image*) lebih penting dari keabadian. Kekagetan dan kejutan dalam seni lebih menonjol karena aspek itulah yang menyajikan pengalaman baru. Teater rakyat terangkat kembali, "seni kejadian"- (*happening art*) digelar di mana-mana di seluruh dunia, sekitar awal 1970-1980-an. Seni Murni dan Desain hampir tiada bolos, demikian juga dengan seni film, seni teater, dan seni musi-semua jadi satu.

Gerakan memanggulkan seni diiringi oleh kebangkitan "*Post Modern*". Cirinya eklektisisme, membuang jauh fungsionalisme, menghadirkan motif-motif kesejahteraan dipadukan secara jenaka dengan pola-pola seni/desain masa kini.

Kemasan pariwisata seni, kiranya tidak hanya untuk seni-seni klasik atau tradisional, melainkan untuk kemasan seni-seni modern atau kontemporer pun teramat perlu. Seperti halnya seni, dunia pariwisata tidak diinginkan untuk statis, sebaliknya perlu polesan terus-menerus, gubahan, dan kreativitas baru selalu dinantikan. Pariwisata dan seni tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan unsur-unsur tekno-ekonomi dari manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai.

Pariwisata Budaya

Oleh H. Boedihardjo

Sifat pariwisata yang mendunia tidak lagi mengenal batas negara atau bangsa, batas geografi, ataupun batas peradaban. Tolak ukurnya adalah ekonomi, yang pada dasarnya berorientasikan pada perhitungan laba-rugi material-finansial dan pada umumnya lebih mengandalkan pada segi jumlah atau kuantitas dengan mengalahkan, kalau perlu, pertimbangan mutu atau kualitas.

Pariwisata budaya memerlukan imajinasi dan inovasi bagi tuan rumah untuk

membuat daerah wisata tetap menarik bagi tamu wisatawan sepanjang waktu. Setiap saat harus ada yang baru tanpa merusak kebudayaan yang asli dan otentik. Pluralisme yang mencerminkan kebhinekaan budaya antar kelompok-etnik Indonesia hendaknya tetap merupakan aset utama yang penuh pesona-daya tarik bagi wisatawan. Pertemuan dua kebudayaan yang berlainan kutub, yaitu yang dibawakan oleh wisatawan, di satu pihak, dan yang disuguhkan oleh tuan rumah, di lain pihak, suatu perkenalan yang saling menguntungkan dari pengalaman yang mengesankan satu sama lain.

Pemeo atau slogan "*there is no tourism without culture*" yang seringkali didengungkan, rumusan ini masih dibiarkan mengambang, bisa melebar dan meluas untuk menampung *mass tourism*, dan juga dalam artinya yang terbatas mendalam bagi SIT (*Special Interest Tourism*).

Dalam pengertian SIT ini tercakup sifat dan syarat pariwisata yang seni-budaya, pendidikan, olahraga, petualangan-*ecotourism* dan lain sebagainya. Untuk pengembangannya perlulah dijajagi dan digarap secara cermat segmen atau aspek "*special markets*"-nya di luar atau di dalam negeri, antara lain yang manula, keluarga, remaja, *incentive tourism*, dan sebagainya.

Dengan sedikit menyederhanakan persoalan pariwisata budaya yang kini menjadi canggih, rumit, rawan, rancu, perlu dikaji implementasinya bahwa:

- Pariwisata budaya merupakan pembinaan semangat dan jiwa *culture-Co-existence* dunia yang ruwet dan kompleks.
- Pariwisata bermanifestasikan pada mobilitas perjalanan dan perkunjungan (*movements*) serta manusia-manusia dengan berbagai macam motivasi (yang kebanyakan adalah) budaya.
- Tiada *progress* tanpa perubahan. Perubahan-perubahan dalam pembangunan pariwisata diharapkan tidak sampai menggoyahkan sendi-sendi kehidupan budaya bangsa dan masyarakat, tidak sampai menyingkirkan, apalagi menghapuskan nilai-nilai seni dan budaya secara fundamental, betapa pun seni budaya itu sendiri sudah universal tiada mengenal batas bangsa dan peradaban serta tidak sampai merusak atau mengotori lingkungan hidup budaya yang alami dalam rangka membina suatu "*green globe*".

Pariwisata Budaya: Seni Budaya sebagai Andalan Pariwisata

Oleh Andi Mappi Sammeng

"Bangsa-bangsa yang kehilangan kepribadiannya akan menjadi bangsa yang lemah, akhirnya akan runtuh dari luar atau hancur dari dalam. Karena itulah kita harus berusaha terus-menerus untuk memelihara semua warisan

budaya kita dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi tanpa ada putus-putusnya. Sekali saja satu generasi tidak tahu akan warisan budayanya sendiri, maka sepanjang zaman warisan budayanya itu akan lenyap dari hati bangsa.” (Pidato Presiden RI Soeharto pada HUT TMII, 27 April 1987).

Dahulu di mancanegara, orang mengira bahwa Pulau Bali tidak termasuk dalam rangkaian kepulauan Indonesia. Mereka mengenalnya sebagai Pulau Dewata yang memiliki seni budaya tinggi dan inilah yang menarik mereka untuk datang.

Wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang berkunjung ke Indonesia justru tertarik pada seni budaya yang benar-benar asli dan belum terpengaruh budaya modern dari luar. Dapat digarisbawahi, bahwa pariwisata tidak akan mempromosikan seni budaya tradisional, yang justru nantinya diperkirakan dapat merugikan bangsa Indonesia.

Meskipun Wisman meminta untuk dapat melihat langsung seni budaya asli dan salah satu suku bangsa di tanah air, namun diperlukan langkah koordinasi dari berbagai instansi terkait, dengan meninjau permasalahan dari segala macam sudut, sehingga walaupun dari segi pariwisata menguntungkan akan tetapi bilamana kunjungan tersebut merugikan kepentingan nasional, maka permintaan kunjungan wisman ke daerah tertentu perlu dengan tegas ditolak. Jadi, pariwisata sama sekali tidak memanfaatkan keindahan kesenian dan kebudayaan semata, tapi juga turut menjaga dan mengamankan segala hal yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Keberhasilan sektor pariwisata akan dinikmati pula oleh para pelaku dan pengelola seni budaya, sehingga akan dapat ditingkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan lebih merata.

TOPIK VII: SENI DAN HUKUM

Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Seni Sebagai Dasar Pemikiran terhadap Pemahaman Industri Kultural

Oleh Arnel Affandi

Karena dalam praktiknya implementasi perlindungan hak cipta dalam masyarakat kita, bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Pola-pola budaya tertentu dalam masyarakat merupakan hambatan yang serius. Di samping itu implementasi perlindungan hak cipta yang bersinggungan langsung dengan industri kultural menuntut adanya konstelasi yang memadai untuk melaksanakan sistem dan lalu lintas fungsi-fungsi ekonomi.

Keberadaan lembaga-lembaga pendukung implementasi tersebut juga merupakan suatu hal yang mutlak. Sehingga masyarakat harus mulai membiasakan diri dengan segala atribut dan instrumen tersebut. Kondisi masyarakat yang belum terbiasa, dari perlindungan hak cipta yang bukan berasal dari kebudayaan kita sendiri, cenderung menyebabkan masyarakat kita tidak siap untuk menghadapi kehidupan kesenian dalam era globalisasi.

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memasyarakatkan perlindungan hak cipta adalah melalui jalur pendidikan, dan dengan melakukan kampanye anti pelanggaran hak cipta. Pengenalan tentang seluk-beluk hak cipta kepada masyarakat selama ini masih belum dilakukan secara maksimal, padahal cukup banyak sarana yang dapat digunakan untuk itu. Sebagai salah satu contoh adalah iklan layanan masyarakat yang tengah populer di kalangan media massa di Indonesia. Jenis iklan yang satu ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sekaligus menimbulkan minat untuk lebih memahami hak cipta.

Lembaga-lembaga Karya Seni dan Hak Cipta

Oleh Chandra Darusman

Sungguhlah tepat anekdot yang menggambarkan bahwa imbalnya sebagai contoh, kendali demokratisasi, ibarat memegang seekor burung, bila dipegang terlalu keras burung tersebut akan mati, namun bila terlalu longgar dia akan lepas dan lama-lama hilang. Pemeran kuncinya adalah, siapa yang memegang burung itu. Apakah manusia yang beriman atau manusia yang mementingkan diri sendiri?

Kehidupan berkesenian tidaklah berdiri sendiri seolah-olah lepas dari pembentukan dan penentuan *policy* kebudayaan. Kita ketahui bahwa *policy* kebudayaan saat ini menekankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Walaupun pernah dilontarkan oleh seorang pemuka masyarakat bahwa iptek harus disertai dengan imtak (iman dan takwa). Mottonya sudah benar. Bagaimana pelaksanaan *equilibrium*-nya? Ini yang perlu digeluti untuk diperjelas.

Seniman kita seringkali kurang menyadari bahwa dirinya perlu di-*manage* oleh pihak-pihak yang memang memiliki spesialisasi dalam bidang ini. Di lain pihak, dalam kenyataannya juga belum banyak pihak yang berkonsentrasi penuh dalam bidang ini. Apakah namanya impresario, Manajemen Artis, atau Agent perlu terus ditumbuhkembangkan. Walaupun tanda-tanda ke arah ini sudah mulai ada, oleh karena memang secara alamiah dibutuhkan. Begitu pula Music Publisher bagi para pencipta lagu.

Hambatan psikologisnya adalah seringkali para seniman belum sadar dan rela honorinya dipotong untuk profesi manager. Sehingga cenderung untuk mengatur segalanya seorang diri. Hal ini bisa dilakukan sampai batas karier tertentu.

Bila kita bicara kesenian industri, maka juga kita temukan masalah-masalah seperti masih banyaknya pemilik hak cipta itu sendiri belum mengetahui sampai di mana hak dan kewajibannya, dalam terbatasnya pengetahuan para penegak hukum.

Instansi yang menangani Hak Cipta, yang merupakan bagian dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) ada dua:

1. Tim Keppres 34 yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara.
2. Departemen Kehakiman RI c/q Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Selain kedua instansi di atas juga telah dibentuk Dewan Hak Cipta yang berfungsi membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Eksistensi Dewan ini diakui dalam Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987.

Peraturan dan Perizinan

Oleh Nico Kansil

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan berkaitan informasi yang tertuang (*incorporated*) dalam benda-benda yang berwujud pada waktu yang sama dalam jumlah copy yang tidak terbatas pada lokasi yang berbeda-beda di mana pun di dunia. Hak milik terhadap HaKI tidak terletak pada copy dan benda-benda tersebut tetapi pada informasi yang tercermin di dalam copy benda.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum di bidang HaKI. Persetujuan Pembentukan World Trade Organization (WTO) dalam rangka Persetujuan Putaran Uruguay. Para pencipta, termasuk seniman, agar memanfaatkan sistem HaKI, terutama di bidang Hak Cipta sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Undang-Undang Hak Cipta membagi jangka waktu perlindungan menurut tiga kategori karya ciptaan:

1. Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal seperti diatur dalam pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, maka perlindungan hukum diberikan untuk selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai 50 tahun setelah pencipta meninggal.

2. Untuk karya cipta yang bersifat turunan atau derivatif seperti diatur dalam Pasal 27 ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, jangka waktu hanya 50 tahun sejak saat karya cipta yang bersangkutan pertama kali diumumkan.
3. Untuk karya cipta di bidang fotografi, program komputer, saduran, dan penyusunan bunga rampai jangka waktu perlindungan selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Seni dalam Persinggungan Hukum dengan Peraturan dan Perizinan
Oleh Alfons Taryadi

Hubungan antara Seni dan Hukum, apakah memang diperlukan peraturan dan perizinan untuk kegiatan kesenian? Apa landasan hukum yang menyadarinya? Masih sesuaikah? Bila produk-produk hukum itu tak lagi sesuai, apa jalan keluar dari situasi tersebut?

Tentang istilah hukum, dalam makalah ini, adalah norma yang disepakati oleh suatu masyarakat sebagai sarana untuk "mengatur secara menyeluruh mengenai diri orang, eksistensi dan kewenangan orang, benda dan hak-hak atasnya, perikatan dan persetujuan, negara dan organisasinya serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi dan kesejahteraan rakyat.

Bahwa di Indonesia seni sebagai kegiatan manusia tunduk pada hukum, hal itu merupakan konsekuensi dan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, seperti dapat disimpulkan dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 12)

Pada tanggal 9 Agustus 1990 Pemerintah RI mengundang Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan karya cetak dan karya rekam, yang rekam sebagai bertujuan untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, dan melestarikan karya cetak serta karya rekam sebagai hasil budaya bangsa sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.

Seni dan Hukum Perpajakan

Oleh Moch. Soebakir

Apakah fungsi pajak hanya mengumpulkan uang dari masyarakat dan untuk pembangunan saja? Jawabannya tidak. Pada dasarnya pajak mempunyai 2 fungsi; pertama budgetter, yaitu menghimpun dana dari masyarakat ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan. Kedua, fungsi mengatur, pemungutan pajak diusahakan dapat

membantu atau menolong kebijakan pemerintah di bidang-bidang lainnya.

Bagaimana perlakuan hukum pajak terhadap seni dan kebudayaan?

Peranan pajak dimaksud ialah hakikatnya merupakan pelaksanaan dari fungsi pajak itu sendiri terlihat pada:

- Dapat memenuhi kebutuhan dan untuk pembiayaan pemerintahan serta pembangunan yang setiap tahun jumlahnya selalu meningkat.
- Dapat mendorong kebijaksanaan pemerintah di bidang-bidang lain di luar perpajakan, termasuk seni dan kebudayaan.

TOPIK VIII: SENI DAN PENGAYOMAN

Peran Pemerintah dalam Mengayomi Kesenian, Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian, dan Seni sebagai Komoditi

Oleh Kusnadi Hardjasoemantri

Peran pemerintah dan swasta dapat dilihat dari sudut hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam UU No 4 tahun 1962. Dalam UU ini dinyatakan, orang seorang, kelompok, atau badan hukum mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

UU ini juga menjelaskan, lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Kesenian merupakan faktor sosial budaya yang merupakan unsur dalam lingkungan secara keseluruhan.

Dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang AMDAL, tercantum keharusan mengalisis dampak usaha kegiatan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan sosial budaya. Dampak terhadap lingkungan sosial budaya, yang berarti pula dampak terhadap kegiatan seni budaya, perlu diperhatikan dalam pelaksanaan AMDAL, yang berarti bahwa dampak negatif yang timbul terhadap kehidupan seni budaya perlu ditanggulangi, dan, pada pihak lain dampak positifnya perlu dikembangkan.

Peran pemerintah didasarkan atas kebijaksanaan yang tercantum dalam GBHN sebagai kehendak politik bangsa, karena kehendak politik pemerintah merupakan subordinasi kehendak politik bangsa.

Dalam Repelita VI dinyatakan bahwa pembinaan kesenian diarahkan pada upaya menumbuhkan daya cipta kreatif yang dapat memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Pembinaan kesenian didukung oleh kegiatan penggalan, pengolahan, pendokumentasian, perekaman, dan peneliatan kesenian.

Dalam menganalisis dalam suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan, tidak hanya dampak terhadap lingkungan fisik yang harus diperhatikan, akan tetapi juga dampak terhadap lingkungan sosial budaya yang berarti juga perlu dimasukkan dampak terhadap kehidupan seni budaya. Sampai sekarang dampak dari suatu usaha atau kegiatan terhadap kehidupan seni budaya tidak pernah menjadi pertimbangan dalam penyusunan AMDAL. Oleh karena itu, dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap seni budaya perlu mulai diperhatikan oleh BAPEDAL dan komisi-komisi AMDAL.

Ada baiknya diperhatikan suatu kebiasaan di negeri Belanda dalam rangka memperindah bangunan pemerintah dipinjamkannya lukisan atau bentuk perwujudan seni rupa lainnya untuk waktu tertentu. Lukisan atau karya seni rupa tersebut dibeli oleh pemerintah dari para senimandan kemudian dipinjamkan secara bergilir untuk waktu tertentu.

Perlu kiranya dijadikan kebiasaan, malahan kalau perlu menjadi ketentuan peraturan bahwa sebagian biaya pembangunan gedung diperuntukkan bagi karya seni guna memperindah bangunan. Di sisi lain, perlu pula dihimpun dana khusus untuk pengembangan seni budaya yang merupakan komitmen para pengusaha. Seiring dengan itu, di antara para pengusaha perlu didorong untuk melakukan suatu persaingan dalam memberi perhatian kepada kegiatan kesenian, misalnya menjadi patron untuk kegiatan kesenian tertentu di kediaman masing-masing.

Karya seni merupakan komoditi yang dapat diperjualbelikan, akan tetapi tidak tunduk sepenuhnya pada hukum penawaran dan pembelian yang banyak dikaitkan dengan selera dan kebutuhan pembeli.

Seorang seniman yang menghasilkan suatu karya seni, tidak mempermasalahkan apa selera dan kebutuhan pembeli. Ia menciptakan karyanya secara mandiri. Dengan demikian, seni sebagai komoditi memerlukan proses edukasi masyarakat. Apabila proses edukasi telah berlangsung, barulah berlaku hukum penawaran dan pembelian.

Hal ini tidak berlaku bagi karya seni yang kurang dipahami masyarakat, akan tetapi diminati penggemar eksklusif. Tingkat ini bisa dicapai apabila seniman yang bersangkutan sudah mempunyai nama yang dapat "mendiktekan" harga.

Akan tetap, sebagian besar seniman belum sampai atau tidak akan sampai pada tingkat tersebut, sehingga memerlukan bantuan untuk diolaksanakannya proses edukasi masyarakat tersebut.

Masih amat banyak yang perlu dikerjakan dalam rangka pengayoman seni baik oleh pemerintah maupun swasta, dengan kerja sama erat dengan para

seniman, dalam hubungan kemitraan yang benar-benar ingin menjunjung tinggi kreativitas para seniman.

Peran Pemerintah dalam Mengayomo Kesenian, Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian, dan Seni sebagai Komoditi

Oleh Mochtar Kusumaatmaja

Tentang seni sebagai komoditi, bagi seni lukis dan seni rupa pada umumnya, persoalannya adalah tingkat kemakmuran tertentu pada masyarakat dan adanya apresiasi tentang hasil karya seni. Dalam hal ini, galeri-galeri sangat membantu karena mampu mempertemukan seniman dengan publik pencinta seni, termasuk orang-orang atau lembaga yang memiliki dana untuk keberlangsungan hidup seniman. Hari depan Indonesia cukup cerah.

Mengenai seni musik, seni tari, seni drama, persoalannya sedikit lain. Harus dibedakan antara seni atau "art" dan hiburan atau "entertainment". Di negara-negara yang sudah mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi bahkan ada beberapa perusahaan melakukan pelelangan benda-benda seni-untuk mendapatkan harga sebaik-baiknya bagi si pemilik. Hal ini boleh dikatakan seni sudah merupakan komoditi karena banyak orang kaya pergi ke pelelangan yang diselenggarakan oleh Sotheby dan Christy untuk membeli benda-benda seni yang dilelangkan, untuk kemudian disimpan sebagai suatu investasi.

Tinjauan sekilas tentang peranan pemerintah dalam mengayomi kesenian di kota besar metropolitan sebesar Jakarta ini menunjukkan bahwa segala unsur dan lembaga yang diperlukan untuk memajukan kesenian setidaknya ada. Kenyataan bahwa kemunduran bertalian usaha memajukan kesenian yang apabila kita batasi saja pada Taman Ismail Marzuki terdiri dari ruang pameran, ruang pertunjukan, dan Dewan Kesenian serta lembaga pendidikannya, adalah bertambah sulit mengisi personil, baik kepengurusan maupun lembaganya.

Pergantian generasi, mungkin generasi muda tidak besar perhatian dan komitmennya dalam memajukan kesenian. Jadi persoalan bukan hanya soal pembiayaan. Pengusaha Indonesia enggan memberikan sumbangan, lepas dari persoalan bahwa yayasan yang diberi sumbangan itu pengurusan keuangannya juga kurang beres. Bagi pemerintah, *tax deductability* (pajak yang terutang pada negara) mungkin belum waktunya dipertimbangkan untuk menjadi bagian sistem perpajakan Indonesia, karena:

1. Yayasan yang sebenarnya harus didirikan untuk usaha-usaha amal atau memajukan pendidikan kesenian, dalam kenyataannya sering digunakan untuk melakukan usaha yang bersifat komersial. Mengizinkan tax

deductability dikhawatirkan membuka peluang atau kemungkinan bocornya pendapatan negara dan pajak.

2. Pengusaha atau perusahaan memberikan bantuan keuangan pada kegiatan kesenian adalah dengan memberikan *sponsorship*. Ini berarti bahwa pertunjukan atau pertunjukan kesenian harus dilangsungkan sedemikian rupa sehingga bisa mempromosikan kegiatan bisnis perusahaan, atau barang yang diperdagangkannya. Cara ini tidak mudah karena kebanyakan perusahaan tidak bersedia memperhitungkan *sponsorship* demikian sebagai ongkos produksi, kecuali apabila betul-betul merupakan iklan atau promosi. Ini lebih mudah dengan pertunjukan bersifat *entertainment*.

Peran Swasta dalam Memajukan Kesenian

Oleh Salim Said

Dari cerita panjang lebar tentang sejarah hubungan kesenian dan para penyandang dananya, terlihat jelas betapa kesenian dan kemajuan kesenian bukan hal yang terjadi dalam ruang hampa. *Interrelasi* antara sumber dana, kemajuan tingkat ekonomi masyarakat dan perkembangan masyarakat memainkan peranan dalam perkembangan kesenian. Baik ditinjau dari sudut artistik maupun dari sudut pemasyarakatan kesenian. Kesenian di zaman purbakala hanya meladeni keperluan agama dan kekuasaan para raja, itu berakibat pada terbatasnya ekspresi estetis kesenian. Kini kesenian meladeni seluruh umat manusia, karena itu variasi bentuk ekspresinya berkembang nyaris tak terbatas, demikian pula massa penikmatnya.

Yayasan yang bertugas mengumpulkan dana dari orang kaya bagi pengayoman kesenian, belum bisa diharapkan memainkan peranan, betapa pun ada nama-nama terkenal atau terkaya di dalamnya. Menyumbang bagi orang kaya di Indonesia masih terkait erat dengan kemajuan usahanya. Mereka mau menyumbang jika tahu sumbangan itu akan terbuka jalan baginya untuk proyek yang lebih besar. Dan, mengurus kesenian adalah hal baru bagi swasta di Indonesia. Kesalahan asumsi kita terhadap orang kaya di sekitar kita yang ternyata keliru bahwa mereka siap menjadi *maecenas* atau penyandang dana kesenian.

Yang kita punyai adalah orang kaya, memang, tetapi belum lagi kelas menengah lantaran mereka tidak kaya hanya oleh keringat dan upaya mandiri, melainkan ditopang negara. Orang kaya yang sebenarnya dan pada dasarnya adalah "tukang kelontong kemarin" yang tentu saja belum berkesempatan

tumbuh dalam alam yang cukup punya leisure bagi mereka mempertajam selera seni dan membudayakan mengayomi kesenian, sebagaimana yang dialami kaum kelas menengah Eropa dahulu dan kini. Karena belum mempunyai selera seni yang baik, orang-orang kaya kita mudah terperosok merusak pasaran seni rupa sebagai yang terjadi dalam boom seni rupa tempo hari. Dengan selera seni yang sama mereka juga mudah bersitegang dengan seniman yang diayominya lewat yayasan yang mereka asuh. Yang terjadi karena terhadap kesenian mereka cenderung mempergunakan “logika dengan kelontong”.

TOPIK IX: SENI DALAM TATA LINGKUNGAN

Seni dalam Tata Kota dan Penataan Kota sebagai Suatu Seni

Oleh Djoko Sujarto

Kota dapat diartikan sebagai suatu lingkungan yang sangat kompleks, yang mengandung berbagai ragam kehidupan dan penghidupan serta perpaduan struktur sosial dan fisik. Kehidupan di kota merupakan percampuran atau amalgam dengan berbagai tinjauan:

- Demografis, di mana terdapat pemusatan atau konsentrasi penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
- Sosial budaya, kota merupakan suatu lingkungan sosial budaya yang sangat beragam dengan berbagai pergeseran dan perubahan.
- Sosial ekonomis, kota merupakan suatu lingkungan dengan kegiatan perekonomian dan usaha yang beragam dan didominasi jasa, perdagangan, angkutan, dan perindustrian.
- Fisik, di mana terdapat tatanan lingkungan fisik yang didominasi struktur binaan
- Geografis, lingkungan yang menempati lokasi strategis secara sosial, ekonomis, dan fisik
- Politis administratif, wilayah dengan batas kewenangan pemerintahan/ administrasi kota

Pengembangan kota yang berkelanjutan wawasan lingkungan pada dasarnya akan menjadi landasan di dalam pelestarian nilai seni penataan kota, termasuk konservasi lingkungan alam dan preservasi berbagai unsur kota yang bernilai budaya dan sejarah.

Seni dalam Tata Lingkungan Perumahan

Oleh Totok Roesmanto

Keunggulan seni dan tata krama penataan pemukiman yang ditunjukkan oleh lingkungan tradisional belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai konsep dasar penataan permukiman baru yang akan dibangun. Dianggap kurang bernilai jual, sebagaimana halnya penggunaan patokan penghuni yang semakin merebak, sedangkan patokan-patokan lokal seperti Nawasanggah, Asta Kosala,-KOsal, Betal Jemur, kawruh Kalang, Kawruh Griya, Asta Dipalaga dan lain-lain yang masih banyak tidak pernah dikenal atau dilupakan.

Seni tata lingkungan Perumahan harus memerhatikan:

1. Kekayaan pola tata lingkungan pemukiman yang ada di Nusantara dikembangkan dan diusahakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan konsep tata lingkungan pemukiman modern atau masa kini
2. Patokan-patokan yang berkaitan dengan tata letak pemukiman yang sebetulnya banyak terdapat di bumi Nusantara, karena telah terlupakan, seyogyanya dijadikan kajian, dibandingkan penggunaan patokan tata letak yang berasal dari luar (penghuni).
3. Pengembangan kawasan-kawasan wisata perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat yang menghuni, melibatkan mereka dalam proses perencanaan selanjutnya.
4. Tim Pengendali Arsitektur Kota seharusnya diwakili oleh semua lembaga yang berkecimpung dan berkompeten terhadap perkembangan kota nantinya. Lembaga ini berfungsi sebagai mitra dalam memberikan kritik arsitektur dan perancangan kawasan kota selama proses perancangan disiapkan.
5. Perhatian pada bangunan-bangunan tua yang rentan terhadap pembongkaran yang merupakan aset arsitektur, meskipun tidak atau belum termasuk bangunan yang dicagarbudayakan.

Seni dalam Arsitektur

Oleh Eko Budiharjo

Arsitek tidak boleh bersikap seperti seniman murni yang lebih mementingkan penguasaan ekspresi individualnya, tanpa mempertimbangkan persepsi, aspirasi, dambaan dan harapan para pemakai serta pengamat hasil karyanya.

Tolok ukur penilaian, khususnya yang menyangkut segi estetika, perlu dirumuskan secara jernih, karena bila sudah menyangkut selera keindahan

seringkali susah untuk dicapai kata sepakat. Bahkan sampai ada yang secara ekstrem menyatakan bahwa suatu karya itu indah justru karena kejelekan dan kesemrawutannya.

Arsitektur sebagai karya seni, cerminan semangat zaman, dan anak kandung kebudayaan, mestinya tidak boleh lepas dari keunikan masyarakat dan tapak tempat karya itu berdiri. "Di balik setiap bangunan yang Anda lihat, terdapat manusia yang sering tidak Anda lihat", begitu kecaman seorang pakar terhadap arsitek yang kurang peka terhadap lingkungan dan budaya lokal. Arsitektur bukanlah sejenis komoditi yang bisa dibuat secara massal untuk diekspor ke segenap penjuru dunia.

Seni dalamTatalingkungan,Seni dalam Bidang Tata Ruang Luar, Seni dan Arsitektur Kota

Oleh Slamet Wirasonjaya

Ruang luar telah dikenal sejak zaman antike, dan dengan berkembangnya peradaban serta orientasi hidup manusia, ruang luar pun mendapat pengaruhnya. Di masa lalu, ruang luar lebih ditekankan pada pengkultusan, religiusitas (keagamaan), mengutamakan monumen kekuasaan dan kemenangan dalam peperangan, yang diwujudkan dengan patung-patung, arca-arca di forum-forum, plaza-plaza di Eropa, dan gerbang-gerbang, tembok-tembok, candi-candi dan prasasti di Bali lokasinya pun hanya di sekitar istana dan kuil-kuil.

Sifat teknologi yang mudah usang menyebabkan ruang luar yang dulu bersifat permanen, kini temporer. Di lain pihak, tingginya nilai harga benda-benda seni, semakin sulit untuk menjadikannya sebagai milik umum dan makin rumit lagi kriteria yang dijadikan dasar untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Bukankah indah menikmati seni di tempat terbuka? Di dalam museum kita harus menyengajakan diri menjadi penikmat seni, kini, kita sementara berada di awal suatu saat yang penting, yakni berakhirnya isolasi antara seniman dengan masyarakatnya.

Rumusan dan Rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia I/1995

Rumusan

Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 bertujuan untuk mengadakan tinjauan dan mencari jalan menumbuhkan kesenian, baik secara intuitif maupun melalui jalan penelitian, mengenai masalah-masalah yang pernah ataupun sedang dihadapi, serta mengenai pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh selama 50 tahun perjalanan negara Indonesia merdeka. Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Kongres diharapkan dapat mengajukan saran-saran untuk pembinaan kehidupan kesenian di Indonesia selanjutnya.

Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 ini diadakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dari tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 1995 dan diikuti oleh 475 peserta dari seluruh propinsi di Indonesia, yang terdiri atas seniman, pemikir dan kritikus seni, pengelola, pengusaha atau sponsor seni, pelindung seni, wartawan kesenian, serta penentu kebijakan (pemerintah).

Dalam kongres ini dibahas pokok-pokok permasalahan yang mengambil tema Retrospeksi dan Ancangan ke depan, dengan pemilahan sudut pandang untuk tinjauan Kajian, Penilaian, dan Strategi.

Dengan memperhatikan: Undang-undang Dasar 1945, Bab XIII pasal 32, yang menyatakan bahwa Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, beserta penjelasannya; Garis-garis Besar Haluan Negara yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Nomor II/MPR/1993; Amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1995 di Istana Negara; Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pembukaan Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 pada tanggal 4 Desember 1995; Makalah-makalah yang disajikan dan dibahas di dalam sidang pleno dan sidang kelompok; Pandangan, tanggapan, usul, dan saran para pembicara dalam panggung debat; Pandangan, tanggapan, usul, dan saran-saran para peserta kongres; Maka Kongres Kesenian Indonesia I Tahun 1995 menghasilkan rumusan sebagai berikut:

Fungsi Kesenian dalam Masyarakat

Kesenian tumbuh dari dialektika antar unsur dalam sosok budaya masyarakat. Oleh karena itu, fungsi kesenian adalah membantu manusia untuk lebih memahami kehidupan. Untuk itu dibutuhkan keadaan yang kondusif agar penciptaan seni dan penikmatan seni dapat terjadi dengan optimal.

Salah satu persoalan yang mendesak adalah masalah perizinan untuk pertunjukan kesenian. Persoalan itu harus dipecahkan bersama oleh seniman, masyarakat, dan aparat penentu perizinan. Dalam hal ini diperlukan pengertian yang lebih baik dari semua pihak mengenai fungsi dan kedudukan seni dalam masyarakat. Pelarangan buku, sensor, pencekalan, dan pembajakan tercakup dalam persoalan.

Kesenian pada hakekatnya adalah tanggapan dan penilaian terhadap kehidupan. Hal ini memberikan isyarat pentingnya didorong kajian sosiologi terhadap seni untuk mendudukan sifat hakikat persoalan kesenian dan kemasyarakatan secara lebih tepat.

Kesenian Nasional dan Kesenian Daerah

Istilah kesenian nasional dan kesenian daerah timbul ketika kita sepakat untuk membentuk negara kesatuan. Pertemuan antara kesenian-kesenian daerah, nasional, dan asing telah menumbuhkan jenis-jenis kesenian yang merupakan wujud baru dalam kebudayaan kita. Dalam kaitannya dengan itu kita harus segera menyusun peta kesenian Indonesia yang baru yang tidak sekedar didasarkan pada dikotomi nasional-nasional daerah atau klasik modern.

Dalam kaitannya dengan pengembangan wisata budaya, kita harus menumbuhkan sikap yang hati-hati terhadap berbagai jenis kesenian yang sudah sejak lama tumbuh di daerah-daerah. Karena fungsi dan perannya yang khas, beberapa jenis kesenian tertentu tidak dapat diubah untuk kepentingan pariwisata.

Perkembangan kesenian tidak bisa dilepaskan dari usaha mencari khalayak yang lebih luas. Usaha itu wajar dan sah, serta harus dilaksanakan atas dasar kerja sama antara seniman, pemerintah, dan masyarakat. Namun kita juga harus sepenuhnya menyadari bahwa kecenderungan tersebut berakibat pergeseran fungsi dan kedudukan kesenian dalam masyarakat.

Pergelaran kesenian dari berbagai daerah dalam festival nasional hendaknya tidak diselenggarakan sebagai lomba, tetapi digunakan sebagai bahan kajian untuk pengembangan kesenian selanjutnya.

Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jatidiri budaya masyarakatnya hendaknya tidak dikorbankan untuk kepentingan upaya mewujudkan kesenian nasional.

Seni dan Media

Agar media massa dapat memenuhi fungsinya dengan baik, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan:

Pendokumentasian kesenian oleh badan-badan pemerintah yang berwenang dalam masalah kesenian, lembaga-lembaga swasta, dan media massa perlu dimulai atau ditingkatkan.

Penyebarluasan informasi mengenai kesenian, termasuk peta kesenian, perlu dilakukan secara intensif, dan media massa perlu mengambil peran yang penting dalam penyebaran informasi ini.

Tenaga kerja di media massa perlu menguasai ilmu dan data-data kesenian, agar penyebaran informasi kesenian melalui media massa dapat dipertanggungjawabkan dari segi estetika, serta dapat memacu perkembangan kesenian. Di samping itu, penguasaan teknologi untuk meningkatkan mutu kesenian dan mutu informasi perlu terus ditingkatkan.

Agar media massa dapat menyebarkan informasi dengan baik dan agar masyarakat dapat menyerap informasi itu dengan baik, maka kebiasaan menulis dan kebiasaan membaca perlu ditingkatkan.

Memberikan perhatian yang lebih besar kepada karya seni yang tidak sekadar memenuhi selera pasar, agar media massa ikut memacu apresiasi masyarakat terhadap seni dan memacu kreativitas seni.

Meningkatkan fungsi media sebagai sarana internalisasi nilai-nilai seni yang bermutu tinggi.

Kajian Seni

Kajian sejarah kesenian yang dilakukan oleh orang Indonesia masih sangat langka sementara yang suda adapun sangat terbatas penyebarluasannya. Karena pentingnya jenis kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan kesenian, pemerintah perlu menyediakan kemudahan dan dana yang lebih besar agar penelitian di bidang itu di kalangan peminat seni maupun perguruan tinggi bisa ditingkatkan.

Banyaknya istilah yang beredar dalam kesenian kita sekarang ini di satu pihak menunjukkan kekayaan-kekayaan, namun di lain pihak juga bisa menyiratkan kekaburan konsep-konsepnya. Pengembangan kajian kesenian kita menuntut usaha yang terus menerus untuk lebih memahami konsep-

konsep itu agar hasil-hasil yang dicapainya lebih bermanfaat untuk semua kalangan.

Seni dan Pendidikan

Dalam mengupayakan terciptanya manusia seutuhnya, pendidikan umum seyogyanya memantapkan kedudukan mata ajaran kesenian sebagai bagian integral dalam kurikulum. Perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan kesenian yang terarah, bertingkat, dan berkala, untuk terbinanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat.

Hendaknya ada hubungan saling menunjang antara pendidikan kesenian di lembaga-lembaga formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi seni, dengan pendidikan non-formal kesenian.

Di samping seniman kreatif, perlu mulai dipikirkan pengadaan dan pembinaan sumber daya manusia lain, seperti kurator, dramaturg, kritikus, peneliti, seni dan impresario.

Pembinaan perguruan tinggi seni hendaknya juga diarahkan kepada upaya menjadikan perguruan tinggi seni sebagai pusat kebudayaan, dimana kreativitas, pengkajian, penelitian dan eksperimen seni dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perguruan tinggi seni hendaknya dianggap dan dijadikan modal utama di dalam melestarikan dan mengembangkan jatidiri kebudayaan di tempat perguruan tinggi seni itu berada. Pendidikan kesenian hendaknya dimulai sejak usia dini.

Seni dan Pariwisata

Dalam era kebudayaan global yang ditandai oleh teknologi informasi yang sangat canggih, keterkaitan unsur seni dalam industri pariwisata tidak dapat dielakkan. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah tiga hal penting, yaitu wawasan dan kobaran semangatnya, teknologi yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, dan pencarian visi.

Untuk menghadapi hal tersebut perlu peningkatan kualitas seni dan senimannya. Hanya dengan kualitas pribadi tinggi sebuah penciptaan karya seni yang bermutu dapat dihasilkan. Sehubungan dengan itu diperlukan segera adanya dokumentasi terhadap karya yang berupa ciptaan-ciptaan baru.

Namun demikian secara ideal pengembangan seni dan pembinaan seni tidak seluruhnya diperuntukkan bagi kepentingan pariwisata, karena seni

adalah bagian dari jatidiri bangsa yang perlu dijaga sebagai cerlang budaya kita.

Seni dan Hukum

Pengaturan lebih lanjut mengenai undang-undang Hak Cipta yang menyangkut kesenian perlu segera di susun.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak cipta, yang perlu diupayakan penyebarluasan pemahaman hak cipta kepada segenap pihak yang terkait. Dalam kaitannya dengan itu, perlu dibuat kajian tentang konsep penciptaan pada masyarakat tradisi.

Seni dan Pengayoman

Seniman hendaknya memiliki sikap yang tegas terhadap campur tangan pengayom dalam menciptakan karyanya.

Keprofesionalan seniman perlu ditingkatkan agar kesenian dapat lebih disebarluaskan.

Di setiap daerah perlu dibentuk yayasan yang bertugas untuk mencari dan menghimpun dana yang berupa subsidi, donasi, sponsor, dan bantuan lainnya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi pengembangan kesenian di daerahnya.

Mengingat kesenian merupakan faktor yang sangat penting dalam lingkungan sosial budaya, maka dalam penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) kesenian sebagai unsur seni budaya perlu ikut diperhitungkan.

Mekanisme perlindungan hak cipta karya seni perlu ditingkatkan sehingga perlindungan tersebut dapat terlaksana secara efektif.

Lembaga-lembaga kesenian yang ada sebagai mitra Pemerintah dalam pelayanan masyarakat di bidang kesenian di daerah perlu meningkatkan mekanisme kerjanya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Anggota DPR dan DPRD dari komisi yang menyangkut bidang kebudayaan perlu memperjuangkan anggaran yang memadai untuk pembiayaan pengembangan kesenian.

Mengingat kesenian sebagai komoditi merupakan aset pembangunan yang produktif maka KADIN perlu memberikan dukungan dan bantuan dalam pemasaran hasil kesenian.

Seni dalam Tata Lingkungan

Tata lingkungan yang menyangkut arsitektur lansekap, perumahan, dan perkotaan hendaknya menampilkan kekhasan dan jatidiri yang bertumpu pada iklim dan budaya setempat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia yang selalu berkembang.

Pembangunan kota perlu mempertimbangkan aspek fungsi, ekonomi, harmoni, dan estetika, dengan memperhitungkan persepsi dan aspirasi segenap lapisan masyarakat.

Perencanaan ruangan luar dengan kelengkapan berupa perabot lansekap dan papan iklan berikut tata lampunya perlu ditata agar kota tidak sekedar fungsional tetapi juga estetis.

Upaya pelestarian warisan arsitektur dan konservasi kawasan kota kuno bersejarah perlu lebih digalakkan agar setiap kota dapat tampil sebagai karya seni sosial yang mencerminkan sejarah perkembangan masyarakatnya dari waktu ke waktu.

Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mencari akar arsitektur tradisional dari khasanah budaya di segenap pelosok tanah air, untuk dijadikan landasan dalam pengembangan tata lingkungan di masa mendatang.

Sangat dirasakan pentingnya panduan perencanaan dan perancangan berwawasan lingkungan dengan mekanisme pengawasan pembangunan yang dilengkapi sistem intensif dan disinsentif.

Refleksi atas Perkembangan Seni

Agar kekuasaan birokrasi dalam bidang kesenian di daerah dapat dikurangi karena sering menghalangi perkembangan kreativitas.

Agar penilaian dalam festival tari di tingkat nasional ditiadakan untuk mengurangi kecurigaan antar daerah.

Lebih memacu festival kesenian daerah daripada kesenian nasional untuk memberi peluang kreativitas lebih banyak kepada daerah.

Sistem pemberian anugerah seni perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Semua pihak dihimbau untuk mengerahkan opini dan lobi ke arah peningkatan masukan mengenai kesenian dalam persiapan naskah GBHN 1998.

Dalam hubungannya dengan perkembangan sastra, diusulkan agar pengajaran bahasa dan sastra ditunjang oleh kegiatan ekstra kurikuler.

Pemerintah dihimbau untuk meningkatkan fungsi Balai Pustaka sebagai

penerbit buku-buku sastra, dan budaya di samping buku-buku teks dan umum.

Kemajuan seni perlu didukung oleh manajemen yang baik sesuai dengan bidang seninya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan industri kebudayaan perlu diupayakan untuk mencari penyantun dana untuk jangka panjang.

Apresiasi masyarakat terhadap seni merupakan salah satu faktor penting. Oleh karena itu, perlu didukung oleh pendidikan kesenian yang memadai.

Kendala yang dihadapi dalam teater terutama adalah masalah pendanaan dan penonton atau konsumen teater.

Kehidupan teater yang normal tidak lepas dari hubungan antara seni dan masyarakat. Namun teater tidak boleh datang dengan intensitas kampanye politik atau sebagai alat propaganda.

Untuk menyasati keberadaan teater di Indonesia, hendaknya dibentuk sebuah jaringan kerja teater.

Rekomendasi

1. Kongres Kesenian agar dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali;
2. Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan menindaklanjuti keputusan kongres;
3. Agar Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan porsi yang lebih besar kepada kesenian dalam kurikulum nasional;
4. Pemerintah perlu membuat kebijakan baru dalam pendidikan guru kesenian dengan mengaitkan lembaga pendidikan guru dan lembaga pendidikan kesenian;
5. Agar para seniman yang sudah mapan mendirikan sanggar kesenian untuk dapat meningkatkan apresiasi seni masyarakat;
6. Agar aparat pemerintah yang menangani kesenian meningkatkan pengetahuannya mengenai kesenian sehingga dapat membantu perkembangan kesenian dan tidak mempersulit pertumbuhan kesenian;
7. Agar dipikirkan keberadaan lembaga bantuan hukum bagi seniman;
8. Agar dibentuk sebuah lembaga kesenian yang bersifat nasional yang menangani berbagai masalah kesenian yang muncul.

Tim Perumus:

Sapardi Djoko Damono (Ketua);

Bakdi Sumanto (Sekretaris);

Yulianti L. Parani (Anggota);

Budi Darma (Anggota);

Saini K.M. (Anggota);

Eko Budiardjo (Anggota);

Singgih Wibisono (Anggota);

Mukhlis Paeni (Anggota);

Samsudin Hardjakusumah (Anggota)

Tanggapan Media Massa Terhadap Kongres Kesenian Indonesia I

KKI I mendapat liputan hangat media massa (cetak, radio, televisi), baik nasional maupun daerah, di antaranya *Kompas*, *Tempo*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Berita Buana*, *Angkatan Bersenjata*, *Merdeka*, *The Jakarta Post*, *Harian Ekonomi Neraca*, *Suara Pembaruan*, *Pelita*, *Terbit*, *Surabaya Post*, *Jawa Pos*, *Suara Merdeka*, dan *Pikiran Rakyat*.

Dari ratusan kali liputan, yang berhasil dikliping panitia sebanyak 134 tulisan dalam bentuk berita, tajuk dan esai, yang terbit pada tanggal 15 November 1995, sebelum acara digelar, hingga Kamis 7 Desember 1995 bertepatan dengan penutupan KKI I. Pemberitaan media mengangkat dua hal pokok : 1) masalah perizinan dan pencekalán, 2) tentang hak cipta. Dedengkot Depot Kreasi Bandung (DKSB) Harry Roesli berkomentar bahwa membicarakan masalah perizinan dan hak cipta bagi kepentingan seniman dalam berproses kreatif, sama pentingnya dengan membicarakan masalah ekonomi bagi kelangsungan pembangunan Indonesia. "Menurut saya di negara yang demokratis sebaiknya masalah perizinan dihapus saja. Segarang-garangnya Rendra baca sajak tidak akan menimbulkan revolusi." (*Pikiran Rakyat*, 3 Desember 1995).

Terkait masalah perizinan dan pencekalán ini, Kasospol ABRI Letjen TNI Muhammad Ma'rif saat tampil di hari pertama KKI I langsung mendapat "serangan tajam" dari para seniman, sebab mereka kuatir pencekalán akan membuat kreativitas seniman terhambat dan jiwa masyarakat menjadi kering (*Suara Karya*, 5 Desember 1995). Menurut Kasospol, fenomena pencekalán yang sering terjadi akibat minimnya iklim berdialog antara seniman dan pemerintah (*Merdeka*, 5 Desember 1995). Ia mengakui dalam soal seni ia aparat kurang peka dibanding seniman, sehingga aparat dan seniman punya persepsi yang berbeda. Ia menegaskan, masalah perizinan akan dapat dipecahkan dengan dialog (*Jawa Pos*, 5 Desember 1995). Dua pekan terakhir saja sebelum kongres, pentas "Semar Gugat" Teater Koma dan debat publik Majalah Humor nyaris gagal gara-gara perijinan.

Liputan *Kompas* 6 Desember 1995 berjudul "Izin Pementasan, Birokrasi dan Uang", mengungkap sulit dan berlikunya mengurus izin pameran, bedah buku, hingga pertunjukan, bagi seniman maupun pusat kesenian.

Dalang Ki Anom Suroto, penerima Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden RI, dan anggota Persatuan Pedalangan Indonesia, telah memiliki "Kartu Seniman" yang dikeluarkan Seksi Kebudayaan Depdikbud setempat, tetap saja setiap kali mau pentas ke luar Solo, harus mendapat surat jalan untuk aparat keamanan setempat. Untuk mengurus Kartu Seniman, diperlukan kelengkapan seperti surat bebas G30S/PKI dan lain-lain.

Pramana Pmd, Direktur Pelaksana Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, mengakui bahwa tempat-tepat kesenian resmi mempunyai "izin tahunan". "TIM juga mempunyai itu, kecuali untuk Rendra, Teater Koma dan Guruh Soekarnoputra. Ia menyerukan perlunya penyederhaan perizinan, sambil memberi contoh betapa lama dan rumitnya mengurus izin pentas *Semar Gugat* Teater Koma. Proses perizinan yang dimulai H-50 itu, melibatkan banyak lembaga: TIM, DKJ, Dinas Kebudayaan, Ditsospol, Pariwisata, Bakorstanas Jaya, Polda Metro Jaya. Dan untuk membedah naskah, rapat Dinas Kebudayaan melibatkan pihak TIM, DKJ, BKKNI, Pepadi, dan Ketua POKJ. Jika ada revisi, naskah revisian, harus diteliti ulang untuk mendapat rekomendasi Dinas Kebudayaan, Ditsospol, Dinas Pariwisata dan Polda. Dari 6 Oktober PKJ TIM mengurus, ijin dari Polda baru diterima TIM pada H-1 24 November 1995 pukul 11.30 WIB. Kompas keesokan harinya menurunkan liputan lanjutan, berjudul "DPR Diimbau Gunakan Hak Inisiatif untuk Sehatkan Sistem Izin Pementasan".

Hal di atas tidak selaras dengan Pidato Presiden Soeharto pada saat menerima Panitia dan Peserta KKI di Istana Negara, 6 Desember 1995. Seperti dikutip *Media Indonesia*, 7 Desember 1995, Presiden menyatakan bahwa masalah paling mendasar dari pembangunan kesenian adalah menciptakan kondisi dan peluang yang sebaik-baiknya agar para seniman dapat mengembangkan kreativitasnya secara optimal. Menurut Presiden, dalam berkesenian dapat terjadi perbedaan pendapat maupun selera dan pilihan terhadap gaya seni tertentu." Tetapi saya minta agar kita tidak berbeda arah dalam menuju sasaran membangun bangsa yang kuat dan bersatu dalam cita-cita kebangsaan."

Prof Edi Sedyawati, dalam wawancara dengan *Surabaya Post*, 3 Desember 1995 menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil peran yang lebih besar dan menentukan dalam kehidupan kesenian di Indonesia.

BAGIAN II

Kongres Kesenian Indonesia II/2005

Latar Belakang

Rekomendasi KKI I tahun 1995, pada butir pertama menyebutkan: Kongres Kesenian agar dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Artinya, setelah penyelenggaraannya yang pertama pada 1995 itu, maka pada tahun 2000 mestinya kongres berikutnya (KKI II) dilaksanakan lagi. Namun pada kenyataannya hal itu tak terjadi. KKI II baru dilaksanakan tahun 2005 atau 10 (sepuluh) tahun setelah KKI I.

Molornya penyelenggaraan KKI II hingga lima tahun dari yang semestinya itu, memang bisa dipandang sebagai satu keniscayaan. Seperti diketahui, kurang lebih dua setengah tahun setelah penyelenggaraan KKI



Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, membuka Kongres Kesenian Indonesia II (foto: dok Tempo)

I, kehidupan sosial politik di Indonesia mengalami turbulensi yang luar biasa. Melalui serangkaian kegiatan demonstrasi yang lazim dikenal dengan Gerakan Reformasi 1998, publik pro demokrasi berhasil memaksa Presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun turun dari kursi kekuasaan. Lengsernya Soeharto, tak ayal menjadi semacam titik balik dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Demokrasi dan kebebasan menjadi kata kunci yang kerap dikumandangkan di mana-mana.

Paralel dengan itu, perubahan-perubahan juga terjadi, bahkan dalam nomenklatur pemerintahan. Dalam konteks Kongres Kesenian, situasi sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung di tahun-tahun sekitar 1998 itu, serta perubahan yang terjadi dalam nomenklatur pemerintahan (misalnya beralihnya urusan di bidang kebudayaan dari semula disatukan dengan pendidikan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan lalu dipindah dan disatukan dengan pariwisata di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata), seperti saling berkelindan untuk akhirnya menyebabkan butir pertama Rekomendasi KKI I tak bisa dilaksanakan.

Demikianlah, setelah 10 tahun berselang sejak KKI I, KKI II pun akhirnya digelar. Berlangsung pada 26-30 September 2005 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, KKI II dilaksanakan dengan kehadiran sebuah perusahaan penyelenggara acara atau *Event Organizer* (EO) sebagai pelaksana. Konon, pelibatan EO ini sesuai ketentuan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah yang menggunakan dana dari uang negara (APBN).

Di samping menghadirkan EO, situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan sosial-politik Indonesia ketika itu yang praktis masih berada dalam euforia pasca keberhasilan Gerakan Reformasi 1998 dengan demokrasi dan kebebasan sebagai kata kuncinya itu, tak pelak juga ikut pula membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan kongres. Hal ini, misalnya terlihat pada metode dan mekanisme peserta yang akan menghadiri kongres. Selain mereka yang memang diundang khusus untuk menjadi peserta, panitia juga memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengajukan diri menjadi peserta. Tidak jelas, atas dasar apa panitia mengambil kebijakan seperti ini. Namun, implisit bisa terbaca kebijakan itu agaknya didasarkan pada semangat demokratisasi dan kebebasan yang ketika itu memang masih sangat kuat bergaung setelah Gerakan Reformasi 1998. Hanya saja, tak ayal, kebijakan ini justru memancing reaksi keras dari kalangan seniman. Sejumlah seniman kemudian meluapkan kejengkelan dengan menggelar unjuk rasa saat

berlangsungnya kongres.

Sementara itu, ada pula situasi lain yang berkembang, yakni terkait adanya rencana pembentukan Dewan Kesenian Indonesia (DKI) oleh beberapa seniman. Ide pembentukan DKI itu sendiri sebenarnya bermula dari adanya Musyawarah Dewan Kesenian se-Indonesia yang berlangsung beberapa waktu sebelumnya di Jayapura, Papua. Namun, ide ini ditolak oleh sebagian besar seniman. Oleh para penggagasnya, rupanya ada upaya memasukkan ide ini dalam kegiatan KKI II, sebagaimana ditandai dengan beredarnya selebaran tentang DKI di kamar-kamar penginapan peserta.

Menyimak berbagai situasi yang berlangsung sepanjang KKI II berlangsung, tak bisa dipungkiri, euforia demokrasi dan kebebasan jelas terasa sangat kental mewarnai pelaksanaannya. Peristiwa demonstrasi oleh sejumlah seniman yang menolak penyelenggaraan kongres, merupakan bukti nyatanya. Namun demikian, meski diwarnai protes, secara umum dapat dikatakan kongres berhasil dilaksanakan dengan baik.

Tema dan Pokok Bahasan

KKI II memilih tema “Realitas, Dinamisasi dan Kesadaran Nasional dalam Kesenian”. Tema ini kemudian diurai dalam pokok-pokok bahasan yang selanjutnya didiskusikan melalui Sidang Pleno, Sidang Kelompok, dan Forum Pekerja Seni. Pokok-pokok bahasan itu kemudian diurai lagi dalam sejumlah topik-topik bahasan untuk didiskusikan pada Sidang Kelompok dan Forum Pekerja Seni. Tiap topik bahasan menghadirkan dua orang sebagai nara sumber. Nara sumber nantinya akan menyampaikan paparan kepada peserta, yang kemudian diikuti dengan diskusi/tanya jawab antara peserta dengan nara sumber.

Ada lima Pokok Bahasan yang ditentukan dalam KKI II. Pertama, “Seni dan Industri dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Internasional”. Pokok bahasan ini dibagi dalam tiga topik, yaitu: 1) Proses Pewacanaan Seni pada Tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional; 2) Kolaborasi Seni, Peluang, dan Jebakan; 3) Membangun Gerakan Kesenian Lokal yang Mandiri dan Sinambung.

Pokok bahasan kedua adalah “Kajian dan Pendidikan Seni”, yang dibagi dalam enam topik, meliputi: 1) Optimalisasi Pendidikan Kesenian; 2) Pergeseran Paradigma Pendidikan Seni; 3) Menggali Alternatif Pendidikan Seni Berbasis Tradisi; 4) Apresiasi Terhadap Sejarah Seni di Tanah Air; 5) Tradisi Kritik dan Riset Seni; 6) Perluasan Pendidikan Formal Seni untuk Kawasan Timur Indonesia.

Pokok bahasan ketiga adalah “Fungsi Kesenian di Masyarakat”. Seperti halnya pokok bahasan kedua, pokok bahasan ini juga dibagi menjadi enam topik, masing-masing: 1) Seni, Media Massa dan Ekse; 2) Komodifikasi dan Substansi Seni; 3) Seni dan Perkotaan; 4) Fungsi Terapeutik dan Katalisasi Seni di Wilayah Konflik; 5) Dinamika Kantung-kantung Budaya Sebagai Budaya Tanding; 6) Proteksi dan Advokasi Terhadap Seni Tradisi.

Pokok bahasan keempat adalah “Hukum, Profesionalisme Seni dan Pengelolaan Kesenian”. Pada pokok bahasan ini, hanya ada empat topik bahasan, terdiri atas: 1) Perumusan UU Kebudayaan/Kesenian dan Pembentukan Departemen Kebudayaan untuk Mendukung Konsistensi dan Profesionalisme Seni; 2) Kompetisi Sebagai Penunjang Kreativitas dan Profesionalisme Kerja Seni; 3) Perlukah Asosiasi Seniman di Indonesia?;

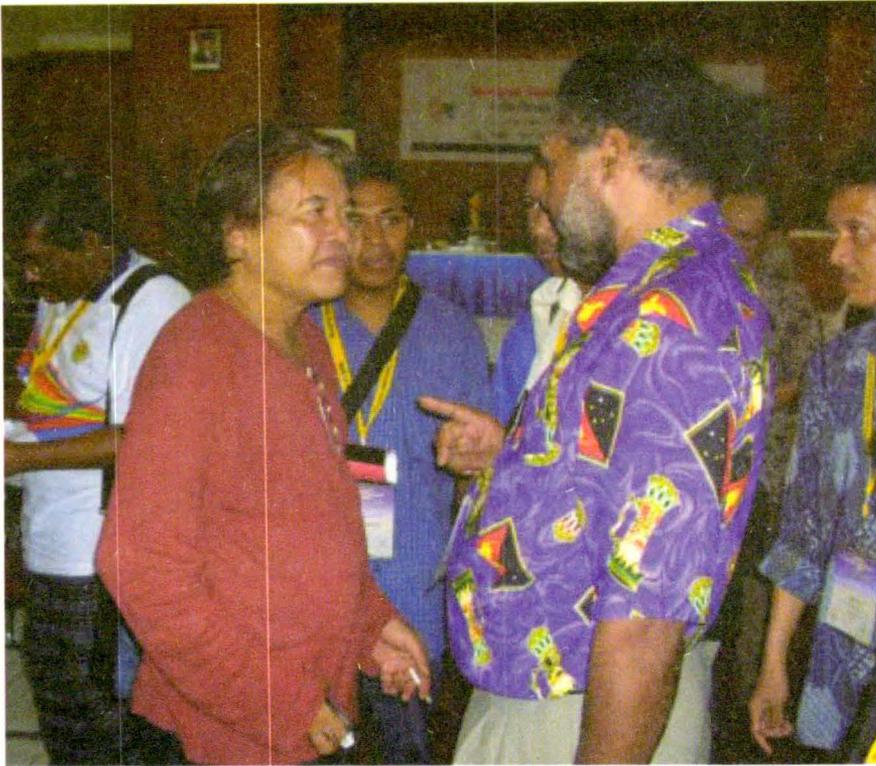
Pokok bahasan yang kelima adalah “Dinamika dan Kreativitas Media Seni”. Pokok bahasan ini juga dibagi menjadi empat topik bahasan, yakni: 1) Dinamika dan Kreativitas Media Seni; 2) Fenomena Kreasi Lintas Media dalam Situasi Kesenian Masa Kini; 3) Peran dan Pengaruh Media Informasi bagi Proses Kesenian Masa Kini; 4) Seni dan Penciptaan Ruang Publik.

Dari lima pokok bahasan di atas, empat pokok bahasan pertama didiskusikan dalam sidang kelompok. Adapun pokok bahasan kelima, dibicarakan dalam Forum Pekerja Seni. Sementara itu, di luar lima pokok bahasan tersebut, masih ada “topik” lain yang dibicarakan dalam KKI II tapi tidak dikategorikan sebagai pokok bahasan. Topik ini ditampilkan dalam Sidang Pleno. Ada tiga topik yang ditentukan, yaitu: 1) Kebijakan Kemitraan Perusahaan/Yayasan dalam Mendukung Kehidupan Kesenian; 2) Produk Hukum yang Memihak kepada Sistem Keringanan Pajak Perusahaan untuk Mendukung Kesenian; 4) Eksplorasi Hubungan Mutualistik Seni dan Industri

Alat Kelengkapan

Berdasarkan Tata Tertib Kongres yang disusun Panitia, KKI II memiliki empat alat kelengkapan, yaitu Sidang Pleno, Sidang Kelompok, Forum Pekerja Seni, dan Sidang Tim Perumus. Selain itu, ada pula sosok lain yang memainkan peran cukup penting dalam kongres ini, baik itu di Sidang Pleno, Sidang Kelompok, maupun Forum Pekerja Seni, yakni moderator.

Sebagaimana diuraikan dalam tata tertib kongres, moderator adalah orang yang bertugas untuk memimpin diskusi panel pada sidang pleno, diskusi/sidang kelompok, dan forum pekerja seni. Moderator ditunjuk oleh panitia. Namun moderator bukanlah pimpinan sidang, karena dalam tata



Peserta Kongres Kesenian Indonesia II beramah tamah (foto: dok Kompas)

tertib kongres juga disebutkan adanya unsur pimpinan sidang khususnya untuk Sidang Pleno dan Sidang Kelompok.

Dengan demikian, di samping empat alat kelengkapan yang secara eksplisit disebutkan dalam tata tertib, moderator pada dasarnya bisa juga dikategorikan sebagai “alat kelengkapan” kongres mengingat perannya yang cukup penting.

Sidang Pleno

Sidang Pleno adalah persidangan yang diikuti oleh seluruh peserta kongres. Sidang Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam kongres. Ada tiga kali Sidang Pleno dalam KKI II. Sidang Pleno I diselenggarakan untuk mengesahkan agenda kongres, menetapkan tata tertib kongres, dan membagi tim perumus. Baik agenda kongres, tata tertib, maupun susunan tim perumus sudah terlebih dahulu ditentukan oleh panitia.

Sidang Pleno II adalah persidangan yang sepenuhnya diisi dengan ceramah oleh nara sumber yang ditunjuk. Masing-masing diikuti dengan

tanya jawab/diskusi dengan peserta. Jadi, bentuknya bukanlah persidangan, melainkan diskusi panel.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, ada tiga topik yang dibicarakan dalam Pleno II ini. Pertama, "Kebijakan Kemitraan Perusahaan/Yayasan dalam Mendukung Kehidupan Kesenian" yang menghadirkan Linda Hoemar sebagai nara sumber. Kedua, "Produk Hukum yang Memihak kepada Sistem Keringanan Pajak Perusahaan yang Mendukung Kesenian" yang menampilkan Komisi XI DPR RI atau pejabat Departemen Keuangan sebagai nara sumber. Ketiga, "Eksplorasi Hubungan Mutualistik Seni dan Industri" dengan nara sumber Arswendo Atmowiloto. Namun, dari tiga topik itu, topik "Produk Hukum yang Memihak kepada Sistem Keringanan Pajak Perusahaan yang Mendukung Kesenian" batal dibicarakan karena nara sumber yang direncanakan tidak hadir.

Terakhir, Sidang Pleno III yang merupakan rangkaian persidangan terakhir sepanjang KKI II. Ada dua tahap persidangan pada Pleno III ini. Pertama, menyampaikan hasil-hasil Sidang Kelompok yang terdiri atas empat kelompok dan hasil Forum Pekerja Seni. Kedua, pengesahan Keputusan KKI II.

Sidang Kelompok

Sidang Kelompok adalah alat kelengkapan kongres berupa persidangan yang dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap peserta kongres wajib mengikuti dan masuk di salah satu kelompok. Pengelompokan peserta sendiri dilakukan sesuai minat khusus/permintaan peserta terhadap pokok bahasan yang didiskusikan dengan pertimbangan yang diatur oleh panitia kongres.

Sidang kelompok berlangsung secara paralel. Masing-masing kelompok bersidang pada waktu yang bersamaan di ruangan yang berbeda. Pembahasan topik pada tiap-tiap kelompok dilakukan secara berurutan sesuai susunan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Terdapat empat sidang kelompok dalam KKI II, yakni:

Sidang Kelompok A

Dengan pokok bahasan "Seni dan Industri dalam Perspektif Lokal, Nasional, dan Internasional" yang dibagi menjadi tiga topik, Sidang Kelompok A menampilkan nara sumber Benny Yohanner dan Sapto Rahardjo untuk topik "Proses Pewacanaan Seni pada Tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional"; Halilintar Latif dan Boy G. Sakti untuk

“Kolaborasi Seni, Peluang, dan Jebakan”; serta nara sumber Ben Pasaribu dan Sutanto Mendut untuk topik “Mengembangkan Gerakan Kesenian Lokal yang Mandiri dan Sinambung”.

Sidang Kelompok B

Mengangkat “Kajian dan Pendidikan Seni” sebagai pokok bahasan, terdapat enam topik yang dibicarakan dalam Sidang Kelompok B. Nara sumber yang tampil dalam pokok bahasan ini adalah Cut Kamali dan Sofyan Salam untuk topik “Optimalisasi Pendidikan Kesenian”; Sutarno dan Setiawan Sabana untuk “Pergeseran Paradigma Pendidikan Seni”; Adi Rosa dan Endo Suanda untuk “Menggali Pola Alternatif Pendidikan Seni Berbasis Tradisi”; Agus Burhan dan Yakob Sumardjo untuk “Apresiasi Terhadap Sejarah Seni di Tanah Air”; Dwi Marianto dan Radhar Panca Daahana untuk “Tradisi Kritik dan Riset Seni”; serta Hardiman dan Johannes Gluba Gebze untuk “Perluasan Pendidikan Formal Seni untuk Kawasan Timur Indonesia”.

Sidang Kelompok C

Pokok bahasan dalam Sidang Kelompok C adalah “Fungsi Kesenian di Masyarakat”. Dibagi menjadi enam topik, nara sumber yang dalam sidang kelompok ini masing-masing adalah Sirikit Syah dan Ademando untuk topik “Seni, Media Massa dan Ekses”; Arthur S. Nalan dan Krisna Mukti pada topik “Komodifikasi dan Substansi Seni”; Eko Prawoto dan Adhi Moersyid mengenai “Seni dan Perkotaan”; Fikar W. Edha dan Indra B. Wumbu “ untuk “Fungsi Terapeutik dan Katalisasi Seni di Wilayah Konflik”; Firman Venayaksa dan Gustaff Hariman membicarakan “Dinamika Kantung-kantung Budaya Sebagai Budaya Tanding”; serta “Putu Wirata dan Nungky Kusumaastuti untuk “Proteksi dan Advokasi Terhadap Seni Tradisi”.

Sidang Kelompok D

Sidang Kelompok D menyetengahkan pokok bahasan “Hukum, Profesionalisme Seni dan Pengelolaan Kesenian”. Dibagi dalam empat topik, nara sumber untuk kelompok terdiri atas Yesmil Anwar dan Eka Budianta untuk topik “Perumusan UU Kebudayaan/Kesenian dan Pembentukan Departemen Kebudayaan untuk Mendukung Konsistensi dan Profesionalisme Seni”; Wiwiek Sipala dan Asikin Hasan untuk “Kompetisi Sebagai Penunjang Kreativitas dan Profesionalisme Kerja Seni”; Saini KM



Ungkapan pernyataan sebagian seniman yang memprotes penyelenggaraan Kongres Kesenian Indonesia II (foto: dok Tempo)

dan Iriantine Kamaya bicara tentang “Perluakah Asosiasi Seniman di Indonesia?”; serta Taufik Ikram Jamil dan Jafar Rasuh dengan topik “Optimalisasi Peran Lembaga Kesenian”.

Forum Pekerja Seni

Forum Pekerja Seni adalah sebuah forum dialog yang bersifat terbuka antarseniman dan antara seniman dengan apresiator. Forum diikuti oleh seluruh peserta di bawah satu pokok bahasan “Dinamika dan Kreativitas Media Seni” yang kemudian diurai lagi dalam empat topik yakni “Dinamika dan Kreativitas Media Seni”, “Fenomena Kreasi Lintas Media dalam Situasi Kesenian Masa Kini”, “Peran dan Pengaruh Media Informasi bagi Proses Kesenian Masa Kini”, serta “Seni dan Penciptaan Ruang Publik”.

Setiap topik menampilkan pula pembicara / nara sumber. Namun berbeda dengan nara sumber pada sidang kelompok, nara sumber / pembicara pada Forum Pekerja Seni tidak tampil membawakan satu makalah. Melainkan, hanya menyampaikan semacam catatan ide atau *ideas note* yang merefleksikan eksplorasi dan inovasi kreatif dari karya atau proses karya yang sedang jadi orientasi estetika si nara sumber. Dalam hal ini, nara sumber atau pembicara dapat menyampaikan/memamerkan/mementaskan fragmen/cuplikan/elemen substantif dari karya kreatifnya sebagai salah satu teknik penyampaian catatan idenya.

Terhadap apa yang disampaikan pembicara, peserta lantas memberikan respon secara diskursif. Selain itu, kepada peserta diberikan ruang atau kesempatan untuk menguji *ideas note* yang disampaikan si pembicara. Peserta sendiri tidak dibatasi hanya berasal dari bidang penciptaan seni yang sama dengan si pembicara, tapi dapat berasal dari bidang yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk membuka kemungkinan bagi terjadinya dialog lintas estetika.

Forum Pekerja Seni tidak diarahkan untuk mengikat peserta dalam pandangan-pandangan yang konklusif, melainkan lebih untuk memacu eksplorasi pikiran dan metode kreasi yang lebih inspiratif dan bersifat lintas-disiplin estetik. Karena itu, tidak ada keputusan atau kesimpulan yang dihasilkan dari forum ini, tapi sekadar rekomendasi. Pelaksanaan Forum Pekerja Seni dilakukan secara berurutan berdasarkan pembagian topik. Dengan demikian, sesuai jumlah topik, terdapat empat forum. Masing-masing forum menampilkan pembicara yang berbeda dan dipimpin oleh seorang moderator yang juga berbeda.

Untuk topik "Dinamika dan Kreativitas Media Seni" yang tampil sebagai pembicara adalah Purwatjaraka dan Nindyo A. Poernomo. Topik "Fenomena Kreasi Lintas Media dalam Situasi Kesenian Masa Kini" menghadirkan Rizaldi Siagian dan Yudi Ahmad Tajudin sebagai pembicara. Selanjutnya, topik "Peran dan Pengaruh Media Informasi bagi Proses Kesenian Masa Kini" pembicaranya adalah Enthus Susmono, Devi Ferdianto, dan Ag. Kus "Jompet" Widananto. Terakhir adalah topik "Seni dan Penciptaan Ruang Publik". Topik ini menampilkan Restu Imansari Kusumaningrum dan Ade Darmawan sebagai pembicara.

Sidang Tim Perumus

Secara faktual, yang dimaksud dengan Sidang Tim Perumus sesungguhnya bukanlah sebuah arena persidangan tersendiri sebagaimana halnya Sidang Pleno dan Sidang Kelompok. Melainkan lebih sebagai sebuah majelis yang ditunjuk untuk menyusun rumusan dari suatu persidangan. Itu pun tidak untuk kelesuruhan persidangan, tapi terbatas hanya untuk Sidang Kelompok. Dengan demikian, istilah Sidang Tim Perumus untuk alat kelengkapan kongres yang satu ini, sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Tim Perumus saja, tanpa perlu diembel-embeli kata sidang.

Menurut tata tertib, wewenang Tim Perumus ada dua. Pertama, menyusun hasil perumusan dari diskusi kelompok yang menjadi pokok pembahasannya. Untuk yang ini, Tim Perumus diberi mandat penuh

sehingga tidak bisa “dicampurtangani” oleh siapapun. Kedua, melaporkan hasil rumusannya dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi pada Rapat Paripurna untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Keputusan Kongres. Dalam hal ini, Tim Perumus pada KKI II bukanlah sebuah tim yang bertugas untuk kongres secara keseluruhan, tetapi terkait dengan diskusi/sidang kelompok. Karena itu, jumlah Tim Perumus tidak hanya satu, tapi empat sesuai jumlah Sidang Kelompok yang ada dalam KKI II.

Berdasarkan tata tertib, setiap Tim Perumus beranggotakan lima orang dengan susunan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, serta 2 (dua) orang anggota. Tata tertib juga menetapkan bahwa keberadaan Tim Perumus ditentukan oleh Panitia Pengarah. Artinya, penunjukan personil Tim Perumus baik keanggotaan maupun posisinya dalam tim, sepenuhnya menjadi kewenangan panitia.

Namun, pada kenyataannya, aturan tata tertib ini tidak sepenuhnya bisa dijalankan. Skenario yang disusun panitia menyangkut Tim Perumus, baik itu susunan keanggotaan, posisi, bahkan jumlahnya, oleh peserta justru diubah saat berlangsung persidangan. Di sisi lain, panitia sendiri kelihatannya tidak berhasil mematuhi dengan baik ketentuan yang sudah dibuatnya sendiri dalam tata tertib tentang Tim Perumus, khususnya menyangkut jumlah personil. Meski tata tertib tegas menyatakan jumlah anggota Tim Perumus adalah lima orang, yang ditunjuk panitia hanya tiga orang.

Demikianlah, pada saat pelaksanaan persidangan, dinamika tak bisa dihindari. Sidang Kelompok A, misalnya. Semula panitia mengajukan nama-nama Budi Darma, Singgih Wibisono, dan Herry Dim sebagai Tim Perumus. Namun kemudian berubah menjadi Syarifudin Arifin (Ketua merangkap anggota), Frangky Sahilatua, Octovianus Rambaba, Budi Darma, dan CJ. Benny masing-masing sebagai anggota. Tidak ada Wakil Ketua dan Sekretaris.

Di Kelompok B, lain lagi ceritanya. Tim perumus yang disiapkan panitia untuk kelompok ini adalah Ratna Riantiarno, Nunus Supardi, dan Tisna Sanjaya. Saat persidangan, skenario ini berubah. Susunan Tim Perumus Kelompok B menjadi enam orang, terdiri atas Hamsad Rangkuti, Hapri Ika Poigi, Tisna Sanjaya, Nunus Supardi, Endo Suanda, dan Sofyan Salam. Tidak ada catatan siapa di antara yang enam orang ini sebagai ketua, wakil ketua, maupun sekretaris.

Sementara itu, di Kelompok C hal serupa juga terjadi. Tim perumus

yang disiapkan panitia adalah Eko Budihardjo, Jamal D. Rahman, dan Tubagus Andre. Saat persidangan, susunan ini kemudian berubah menjadi Didin Sirojudin (Ketua merangkap anggota), ditambah Ashar Yotomaruangi, Muh. Kamal Naser, Jamal D. Rahman, dan Tubagus Andre masing-masing sebagai anggota.

Terakhir, Kelompok D, lebih seru lagi. Tim perumus yang disiapkan panitia (Sardono W. Kusumo, Nirwan Arsuka, dan Uki Bayu Sejati), sama sekali "tak digunakan" oleh kelompok ini. Jumlahnya pun tidak hanya lima orang sebagaimana yang diatur dalam tata tertib, tapi bengkak menjadi tujuh orang, yang terdiri atas Soeparwan G. Parikesit (Ketua) dengan anggota-anggota Boediman Moenadjid, Rizaldi Siagian, Norrizal, Saini KM, Viddi AD Daery, dan Totok Sudarwoto.

Moderator

Seperti telah disebutkan, moderator bukanlah alat kelengkapan kongres pada KKI II. Namun, kehadirannya di kongres ini nampaknya sangat penting. Bahkan, mengingat posisi strategisnya, bisa dikatakan KKI II tak mungkin bisa berjalan tanpa kehadiran moderator, dan secara tidak langsung menjadi penentu lancarnya persidangan, khususnya pada persidangan yang bersifat diskusi seperti pada Sidang Pleno II, Sidang Kelompok, dan Forum Pekerja Seni..

Mereka yang tampil sebagai moderator dalam KKI II adalah Nirwan Arsuka, Sardono W. Kusumo dan Ratna Riantiarno di Sidang Pleno II. Nirwan menjadi moderator untuk nara sumber Linda Hoemar. Sardono sedianya untuk topik "Produk Hukum yang Memihak kepada Sistem Keringan Pajak Perusahaan untuk Mendukung Kesenian". Sedangkan Ratna Riantiarno menjadi moderator untuk pembicara Arswendo Atmowiloto.

Pada sidang kelompok, yang jadi modertaor adalah CJ. Benny (Kelompok A), Tisna Sanjaya (Kelompok B), Jamal D. Rahman (Kelompok C), Totok Sudarwoto (Kelompok D). Sementara pada Forum Pekerja Seni, Benny Yohanes menjadi moderator untuk topik "Dinamika dan Kreativitas Media Seni", Henry Nurcahyo untuk "Fenomena Kreasi Lintas Media dalam Situasi Kesenian Masa Kini", Irno Soekarnoputra memoderatori "Peran dan Pengaruh Media Informasi bagi Proses Kesenian Masa Kini", dan Darman Munir untuk topik "Seni dan Penciptaan Ruang Publik".

Persidangan

Seperti telah disebutkan, ada tiga jenis persidangan yang melibatkan seluruh peserta dalam KKI II berlangsung pada 26-30 September 2005 itu. Ketiga jenis persidangan itu adalah Sidang Pleno, Sidang Kelompok, dan Forum Pekerja Seni. Sidang Pleno berlangsung tiga kali, Sidang Kelompok satu kali dalam empat kelompok secara paralel, dan Forum Pekerja Seni dua kali.

Secara kronologis, rangkaian pelaksanaan persidangan dalam KKI II dimulai dengan Sidang Pleno I yang dipimpin Benny Yohannes dari Panitia Pengarah, berisi pengesahan agenda kongres, pengesahan tata tertib kongres, dan pembagian tim perumus. Sidang ini dilaksanakan setelah sebelumnya berlangsung upacara pembukaan. Setelah itu, kongres dilanjutkan dengan Sidang Pleno II yang berlangsung keesokan harinya. Berisi paparan atau ceramah dari pembicara yang ditunjuk, dengan urutan dan topik-topik: "Kebijakan Kemitraan Perusahaan/Yayasan dalam Mendukung Kehidupan Kesenian"; "Produk Hukum yang Memihak kepada Sistem Keringanan Pajak Perusahaan yang Mendukung Kesenian"; "Eksplorasi Hubungan Mutualistik Seni dan Industri". Usai Sidang Pleno II ini, dilanjutkan dengan Forum Pekerja Seni I yang membahas topik "Dinamika dan Kreativitas Media Seni" dan "Fenomena Kreasi Lintas Media dalam Situasi Kesenian Masa Kini".

Berikutnya adalah Sidang Kelompok yang berlangsung secara paralel dalam keempat kelompok, Rapat Tim Perumus dan Forum Pekerja Seni II dengan topik "Peran dan Pengaruh Media Informasi bagi Proses Kesenian Masa Kini" dan "Seni dan Penciptaan Ruang Publik". Kemudian dilanjutkan dengan Sidang Pleno III yang berisi penyampaian keputusan hasil-hasil Sidang Kelompok dan rekomendasi hasil Forum Pekerja Seni. Sidang itu dilanjutkan dengan Sidang Pleno III yang berisi pengesahan keputusan KKI II.

Perumusan

KKI II menghasilkan beberapa rumusan dan keputusan. Rumusan adalah hasil dari sidang-sidang kelompok, sementara keputusan adalah hasil akhir kongres. Keputusan didasarkan kepada rumusan dari sidang kelompok yang dirumuskan lebih lanjut oleh Tim Perumus Kongres. Tim ini beranggotakan wakil dari masing-masing kelompok ditambah dua orang dari unsur Panitia Pengarah.

Rumusan Sidang Kelompok A

Mengangkat pokok bahasan “Seni dan Industri dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Internasional”, bentuk rumusannya mengarah pada peningkatan pemberdayaan di bidang: studi potensi seni; studi komunitas seni; interaksi seniman dan publik; membangkitkan kewirausahaan dalam seni; melahirkan seniman bermutu; melahirkan produksi seni yang bermutu; pemunculan industri seni; manajemen industri seni; sistematika kerja yang cepat; dinamisasi gerakan kesenian daerah; membangun sistem informasi kesenian lintas daerah.

Selain itu juga ada usulan tentang berbagai penguatan dengan membina dan mengembangkan kesenian lokal sejak dini dan menjadi tanggung jawab daerah masing-masing; alokasi dana kesenian melalui APBN dan APBD; *community services* dari perusahaan-perusahaan asing dan BUMN terhadap daerah setempat; membangun fasilitas kesenian di daerah masing-masing oleh pemerintah daerahnya; kalender tetap aktivitas kesenian di daerah; promosi, publikasi dan pendokumentasian kesenian daerah; menumbuhkembangkan produser kesenian dan impresario. Hal itu dilengkapi dengan rumusan ketiga berupa aspek pengamanan: perlu secepatnya dibuat Undang-undang perlindungan terhadap kesenian; perlu adanya Kode Etik Kesenian.

Rumusan Sidang Kelompok B

Membahas masalah “Kajian dan Pendidikan Seni”, Kelompok B mengajukan rumusan sebagai berikut:

Paradigma Baru Pendidikan Seni

Upaya mengoptimalkan dunia pendidikan seni hanya bisa dilakukan jika disertai semangat untuk mengubah pola pikir (*mind-set*), yang tidak terus menerus bersandar pada paradigma lama, di mana guru mengajarkan sesuai dengan bahan dan metodologi yang dipelajarinya. Sasaaran dan persepsi pendidikan seni –yang bersifat unik, ditandai oleh pemberian pengalaman ekspresif, kreatif, estetik dan kultural – harus mengarah pada terciptanya situasi kehidupan multikultural, yang menjadi bagian penting dari tuntutan kehidupan kemanusiaan masa kini, baik dalam lingkup local, nasional, maupun global.

Karena itu paradigma baru pendidikan seni harus mengarah pada pembangunan dialog antarsubkultur yang beragam, peningkatan pemahaman serta penghargaan lintas etnik dalam hubungannya dengan

perspektif kultur lain (inklusif) dan orientasi akademik yang berkonsekuensi terhadap sistem dan piranti pendidikan. Bahan ajar yang berdasar pada keberagaman kesenian dari berbagai budaya lokal sebagai bahan ajar, dengan memperhatikan relevansinya terhadap dunia pendidikan dan kehidupan kekinian, harus disampaikan pada anak didik, untuk meningkatkan daya apresiasi, ketertlibatan, dan kepedulian peserta didik pada kebudayaan bangsa. Dengan persepsi plural, maka pendidikan seni berbasis tradisi akan menyumbang pada penumbuhan rasa kebangsaan, peningkatan daya toleransi sosial perilaku saling menghormati – dan bukan – sebaliknya menumbuhkan fanatisme masyarakat terhadap kebudayaannya sendiri – karena itu bahan-bahan ajar seyogyanya tidak hanya mengacu kepada kesenian dari suatu local saja, melainkan dapat mencakup seluas mungkin secara proporsional, baik dari khazanah budaya dominant maupun marginal (“dialek”-“idiolek”), baik dari cakupan wilayah lokal, nasional maupun global.

Dengan itu pula pendidikan seni menjadi instrument pendidikan keterbukaan, yang sesuai dengan sifat mendasar dari pendidikan (akademis) itu sendiri, yang akan meningkatkan kepekaan rasa (estetis) dan daya talar (*critical thinking*), yang akan membangun tanggung jawab moral sebagai makhluk sosial dan makhluk beragama. Karena itu, bahan



Suasana persidangan Kongres Kesenian Indonesia II (foto: dok Gatra

ajar yang berdasar pada realitas kehidupan kesenian itu harus disusun bukan sekedar penyampaian fenomena kesenian yang dangkal, melainkan harus mengarah pada pembangunan kecerdasan rasa (EQ), intelektual (IQ), dan spiritual (SQ). Dengan menunjukkan makna penting dari pendidikan seni, maka pandangan masyarakat umum terhadap kesenian hanya sebagai hiburan, sektor sampingan, dan bukan konotasi yang negatif akan terpebis. Untuk itu, pandangan universalisme nilai keindahan dan kemajuan, yang sampai mendasar pada kaidah estetika Barat dan sikap evolusionis-developmental, harus dihindari. Lomba-lomba kesenian antartradisi dan/ atau doktrin-doktrin kesenian yang bersifat hirarkis-hegemonis yang dilakukan oleh instrumen pemerintahan (daerah) ataupun akademisi terhadap masyarakat local harus dihindarkan.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa dalam seni tradisi selalu terjadi pergeseran, perubahan sehingga tradisi tidak dianggap sebagai sesuatu yang "diam" (statis), melainkan yang "bergerak" (dinamis), tumbuh dari proses negosiasi terus menerus antara semangat melestarikan dan kebutuhan penyesuaian dengan keadaan. Pendidikan seni harus juga bersifat demokratis, pada anak didik berusaha untuk mengakomodasi minat siswa, sehingga ada demokratisasi pendidikan juga, tidak berupa paksaan. Tujuan pendidikan seni di sekolah umum harus lebih mengarah pada apresiasi yang mencakup multiple intelligent tersebut di atas, daripada kepada keseniman.

Optimalisasi Pendidikan Seni

Kurikulum pendidikan seni di sekolah umum seyogyanya mempertimbangkan keunikan seni sebagai idiom ekspresi estetis, serta filsafatnya di setiap wilayah yang akan membuka peluang terhadap keberagaman kurikulum, metoda, dan tujuannya. Untuk memaksimalkan pendidikan seni, selain melalui kurikulum baku, harus pula memanfaatkan pendidikan seni, selain melalui kurikulum baku, harus pula memanfaatkan potensi kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) melalui kegiatan pembiasaan (seperti *background music*, hiasan ruang kelas, majalah dinding, dll) dan/ atau melalui mata pelajaran lain. Pendidikan seni di Sekolah Dasar harus diperhatikan agar para siswa mendapat akses pendidikan seni yang lebih baik, seperti halnya pendidikan agama dan olah raga. Pendidikan kesenian di sekolah tinggi harus diupayakan untuk dapat memenuhi kualitas standar, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan ekonomi. Rancangan pendidikan harus berubah dari basis isi ke basis kompetensi,

dengan pendekatan sinergis antara pengalaman seni (empiris) dan pengayaan abstraksi (filosofis) dan berdasar pada multi-kultural, sehingga mengarah kepada potensi pelestari budaya yang juga sebagai *agent of change*.

Kebijakan kurikulum pendidikan seni harus disusun dalam rancangan strategi jangka panjang, agar program-program pengembangannya tidak dilaksanakan secara temporer (*ad hoc*) dan arena itu harus menyertakan orang-orang yang kompeten. Guru adalah ujung tombak pendidikan, karena itu kualitas guru harus mendapatkan perhatian besar dalam program makro pendidikan. Selain diperlukan adanya perbaikan kurikulum di perguruan tinggi pendidikan, bisa juga diadakan program-program pelatihan yang relatif singkat, sehingga distribusi guru yang kompeten bisa terlaksana secara lebih merata. Pendirian sekolah-sekolah kesenian di kawasan yang belum memilikinya, seperti kawasan Timur, perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kelayakannya yang komprehensif.

Sosialisasi dan Advokasi

Kesenian bukanlah sektor yang berdiri sendiri, melainkan terjalin dengan sektor-sektor lain (seperti adat, ekonomi, kepercayaan, sosial politik, dll.), karena itu pemaknaannya tidak bisa disikapi secara sederhana hanya dari satu kaca-pandang saja. Para pendidik perlu membangun komunitasnya yang memiliki kapasitas untuk lebih mampu meningkatkan kualitas dan perannya, baik yang mengenai bidang profesinya maupun kemampuan advokasi sosialnya. Untuk tujuan itu, forum-forum/organisasi pendidik seni perlu didirikan dan diberdayakan. Jika badan sertifikasi didirikan, agar pendidikan seni diajarkan oleh orang-orang yang kompeten, pendirian badan tersebut harus melibatkan komunitas pendidik seni.

Kajian

Kegiatan penelitian dipentingkan dalam semua bidang: pendidikan, budaya, sejarah maupun kritik. Sejarah seni Indonesia sampai sekarang masih berdasar pada sudut pandang tunggal, yakni dari perspektif sejarah seni Barat, sehingga perlu adanya pengkajian dan penulisan ulang. Sejarah seyogyanya tidak menjadi cerita linear, melainkan merujuk pada akumulasi peristiwa. Sejarah merupakan suatu konstruk pemikiran, agar tidak menjadi rumusan romantisme atau nostalgia, sejarah harus dapat mengartikulasikan paradigma estetika dalam konteks ruang dan waktu.

Kritik seni hendaknya berpijak pada riset, yakni melalui pencarian data actual dan factual tentang seni, seniman, dan kesenian, karena dengan itu

akan menghasilkan 4 hal: (1) akan secara lebih menempatkan gejala kebudayaan yang ada; (2) mendorong kritik lebih dekat dengan realitas public yang memang hendak dijembatannya; (3) hasil riset memungkinkan munculnya cara pandang analisis atau metodologi alternatif dalam memahami produk Kultural yang unik; dan (4) kritik berbasis riset akan lebih kredibel, sehingga ia bisa dikedepankan dalam fora kritik yang lebih luas.

Rumusan Sidang Kelompok C

Sidang Kelompok C yang mengangkat pokok bahasan “Fungsi Kesenian di Masyarakat” menghasilkan rumusan bahwa kesenian memiliki 5 (lima) fungsi dalam masyarakat, yaitu: 1) Fungsi sosial-politik. Kesenian memainkan peran sosial-politik sebagai pemersatu keanekaragaman Indonesia. Kesenian telah mempertemukan perbedaan bangsa Indonesia; 2) Fungsi moral. Kesenian membawa pesan-pesan moral untuk menggugah hati nurani masyarakat guna menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat universal. 3) Fungsi pendidikan. Kesenian memainkan fungsi pendidikan untuk mentransformasikan masyarakat menuju kehidupan bersama yang lebih baik; 4) Fungsi ekonomi. Kesenian merupakan modal kebudayaan yang dapat ditukar dengan modal ekonomi, atau bahkan mendatangkan keuntungan ekonomi; 5) Fungsi hiburan. Kesenian memainkan fungsi hiburan bagi masyarakat umum, baik kesenian tradisi maupun kesenian populer.

Melihat pentingnya fungsi kesenian bagi masyarakat, maka memajukan dan mengembangkan kesenian merupakan keharusan. Memajukan kesenian berarti juga meningkatkan fungsinya bagi masyarakat. Untuk memajukan kesenian demi maksimalnya fungsisosial kesenian itu sendiri, Kelompok C mengajukan rekomendasi yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah, masyarakat kesenian dan dunia usaha, sebagai berikut: 1) Pemerintah perlu melakukan dan membiayai riset tentang selera/kebutuhan masyarakat (pasar) terhadap tayangan seni budaya di televise; 2) Membangun kerja sama secara sinergis antara pemerintah, masyarakat kesenian dan dunia usaha untuk memajukan kesenian; 3) Memberikan perhatian dan bantuan terhadap berdirinya kantung-kantung budaya sebagai pertanda tumbuhnya benih-benih kesenian dari akar rumput (*grass root*) dan menjadi wadah untuk menyeimbang budaya populer serta pengembangan jejaring antarpelaku seni; 4) Memberi jaminan dan peluang seluas-luasnya bagi pengembang kesenian di daerah-daerah konflik; 5)

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan terhadap *content programming* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. 6) Pemberdayaan seni tradisional dengan menciptakan ruang apresiasi seluas-luasnya melalui sekolah, tayangan televisi, festival, pertunjukan dan pameran; 7) Dalam perencanaan dan pembangunan daerah tentang pengaturan tata kota, para pemimpin daerah (gubernur, bupati, walikota) agar melibatkan para seniman dan budayawan setempat secara aktif, mengingat bahwa kota adalah hasil karya seni sosial (*a city as a social work of art*).

Rumusan Sidang Kelompok D

Kelompok D mengangkat pokok bahasan tentang "Hukum, Profesionalisme Seni dan Pengelolaan". Dalam Mukadimah rumusan kelompok tersebut dijelaskan bahwa peranan kebudayaan telah menjadi perdebatan dan bagian yang sangat penting jauh sebelum Indonesia merdeka. Kesadaran terhadap pluralisme, peran, dan fungsi kesenian di dalam kebudayaan telah menjadi dasar pemikiran kaum pergerakan nasional menuju berdirinya Negara Republik Indonesia. Mempertimbangkan perubahan masyarakat yang terjadi di tengah perkembangan yang ada, maka fungsi pembangunan kesenian di dalam kebudayaan merupakan salah satu cara untuk dapat menghadapi tantangan masa depan bangsa di tengah fenomena globalisasi dan masa depan.

Untuk mencapai amanah yang dicita-citakan sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan guna melindungi segenap tumpah darah dan wilayah Indonesia termasuk melindungi hak-hak, harkat, martabat pelaku dan produk kesenian serta mengembangkan kesenian Indonesia sebagai bagian yang integral dengan pembangunan nasional, maka Kongres Kesenian Indonesia II 2005 mengusulkan agar dilakukan langkah-langkah untuk menuju terciptanya Undang-Undang Kesenian yang akan menjadi dasar hukum bagi kemajuan kesenian dan kebudayaan Indonesia serta sarana dan prasarannya.

Mengingat dan berdasarkan makalah dari para nara sumber yang terdiri dari Yesmil Anwar, Asikin Hasan, Saini KM, Iriantine Karnaya, Taufik Ikram Jamil dan Ja'far Rassuh dan setelah melalui proses diskusi dan perdebatan maupun sumbang saran dari peserta kongres, Kelompok D menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: pembentukan Departemen Kebudayaan Republik Indonesia, penacangan Undang-undang Kesenian yang mencakup: Mukadimah; Batang tubuh; bab-bab dan pasal-pasal yang

mencerminkan pluralisme kesenian di dalam kebudayaan Indonesia; bersifat ramping, efektif dan menyeluruh; Perlindungan kepada karya-karya kesenian dan pelakunya; Mengatur hak dan kewajiban seniman; Mengatur kelembagaannya yang terkait; Tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah ada; Memiliki semangat kebangsaan dan persatuan nasional; Memberikan ruang kepada pendanaan dari sector pemerintahan dan swasta, baik melalui APBN, APBD maupun sumber pendanaan lain yang sah dan selaras dengan perkembangan otonomi daerah dan mencakup pemecahan masalah kesejahteraan umum. Selain itu juga harus dibuat sanksi dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam pelaksanaannya pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator dan motivator termasuk untuk terbentuknya institusi "social security system" bagi kemajuan kesenian, juga menampung aspirasi bagi seluruh cabang kesenian.

Adapun usulan berikutnya adalah: sambil menunggu lahirnya Undang-undang di atas Kongres Kesenian Indonesia II mengusulkan segera dibentuk PP (Peraturan Pemerintah) yang memotivasi dan memfasilitasi pembentukan asosiasi-asosiasi profesi seni di pelbagai bidang seni yang membutuhkannya. Hal itu dilengkapi dengan usulan tentang Tim Konsultasi Hukum (dari ahli hukum dan masyarakat seniman) untuk menyiapkan Rancangan Undang-undang Kesenian; Wadah masukan dan saran dari berbagai pihak baik masyarakat seniman maupun dari luar; Tim Advokasi untuk sosialisasi perlunya Undang-undang Kesenian dan keputusan-keputusan kongres lainnya.

Setelah masing-masing kelompok menyusun rumusan, hasilnya kemudian disampaikan pada sidang pleno. Selanjutnya, rumusan sidang kelompok tersebut, dirumuskan lagi oleh Tim Perumus Kongres untuk dijadikan "Keputusan Kongres Kesenian Indonesia II Tahun 2005", sebagai berikut:

Keputusan Kongres Kesenian II/2005

Mukadimah

Bahwa kehidupan sosial di Indonesia telah mengalami penurunan kualitas yang memprihatinkan, yang berdampak pada munculnya berbagai kekerasan, menguatnya perangai massa, dan menurunnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa praktik pembangunan nasional yang mengandalkan sumber daya alam, telah mengalami bentuk eksploitasi yang berlebihan, dan berdampak pada kemerosotan kemanusiaan dan ketidakadilan ekonomi. Dalam tahap ini, kesenian dan kebudayaan haruslah dikembalikan perannya menjadi perekat keanekaragaman dan pemulih kesadaran berbangsa.

Saat ini, kehidupan kesenian di Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan industrialisasi, yang berdampak kepada penyeragaman dan komersialisasi produk budaya. Fungsi kesenian bukan hanya untuk komersialisasi, namun tujuan luhurnya adalah menjaga daya hidup, mempertajam pengalaman kemanusiaan, dan memperkuat nilai-nilai kebudayaan. Oleh sebab itu, Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 berpendapat, bahwa kehidupan kesenian sudah semestinya mendapat tempat dalam system hukum nasional.

Rekomendasi

Dalam menghadapi tantangan industrialisasi, sangat diperlukan pemberdayaan seniman dan kesenian melalui: 1) Dinamisasi gerakan kesenian daerah dan menyiapkan infrastruktur kesenian untuk memunculkan manajemen industri kesenian yang fungsional; 2) Penguasaan pengembangan kesenian lokal dengan dukungan pendanaan APBN dan APBD, dan dukungan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta melalui penggalangan dana pelayanan dan biaya operasional publik (*community services*); 3) Menerapkan paradigma baru pendidikan seni yang berbasis kompetensi untuk memberikan pengalaman ekspresif, kreatif, estetik, dan cultural, yang mengarah pada terciptanya situasi kehidupan multicultural; 4) Optimalisasi pendidikan seni dan penguatan pendidikan seni di wilayah Timur Indonesia; 5) Sosialisasi dan advokasi terhadap hasil profesional seni dan fungsi sosial seni; 6) Kajian seni yang berorientasi pada akar sejarah seni Indonesia; 7) Membentuk balai-balai penelitian seni

untuk melakukan riset-riset yang berkaitan dengan keunikan-keunikan potensi lokal dan dampak negative dari produk-produk komersialisasi seni; 8) Menyokong peran kantung-kantung budaya untuk menumbuhkan benih-benih kesenian akar rumput (grass root) dan pengembangan jejaring antarpelaku seni sebagai wadah penyeimbang dominasi seni populer; 9) Melibatkan peran aktif seniman dalam turut menentukan perencanaan dan pelaksanaan perubahan tata kota dan ruang publik; 10) Untuk memperkuat posisi dan fungsi kesenian dalam kebudayaan, diperlukan paying hokum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat keputusan Bersama (SKB) untuk mengatur kejelasan fungsi pengelolaan kesenian; 11) Perlu dibentuk tim konsultasi dan advokasi Hukum RUU Kesenian, yang difasilitasi oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh masyarakat kesenian dan tenaga professional hukum.

Tuntutan: 1) Memperhatikan seluruh rekomendasi yang sudah dirumuskan di atas, maka Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 menuntut kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk merealisasikan Undang-Undang Kesenian; 2) Untuk mendukung implementasi Undang-Undang Kesenian dan merealisasikan seluruh rekomendasi hasil kongres, maka Kongres Kesenian Indonesia ke-2 menuntut dibentuknya Departemen Kebudayaan yang sudah diusulkan sejak 31 Desember 1945 pada Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi, Kongres Kebudayaan tahun 1948 di Magelang, tahun 1951 di Bandung, tahun 1954 di Surakarta, tahun 1957 di Denpasar, tahun 1960 di Bandung, tahun 1991 di Jakarta, dan tahun 2003 di Bukittingg, yang hingga kini belum pernah diperhatikan oleh pemerintah.

Rencana Aksi: 1) Menyerahkan seluruh dokumen ketetapan Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 kepada Presiden, Ketua DPR RI, Ketua DPD, untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti; 2) Menyerahkan dokumen Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 kepada MENKO KESRA, MENKOMINFO, MENBUDPAR, MENDIKNAS, MENDAGRI, MENKEU, BAPPENAS, MENBUMN, MENHANKAM, dan KAPOLRI, untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti; 3) Menyerahkan seluruh dokumen Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti; 4) Meminta kepada Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film, untuk memfasilitasi terlaksananya rencana aksi di atas; 5) Mengajak seluruh peserta Kongres Kesenian Indonesia II 2005 untuk turut mensosialisasikan seluruh hasil ketetapan kongres; 6) Mengajak seluruh pihak media massa untuk turut mendukung Kongres Kesenian Indonesia ke-2 2005 untuk

mempublikasikan hasil-hasil kongres; 7) Untuk merealisasikan rencana aksi di atas, akan dibentuk tim delegasi yang terdiri dari unsure Panitia Pengarah (SC), Panitia Pelaksana (OC), dan perwakilan peserta yang mencerminkan kepentingan wilayah Barat, Tengah, dan kawasan Timur Indonesia.

Rumusan tersebut dibuat oleh tim yang terdiri dari: Franky Sahilatua (Kelompok A), Hapri Ika Poidi (Kelompok B), Ashari Yotomaruangi (Kelompok C), Soeparwan G. Parikesit (Kelompok D) bersama Tim Pengarah yaitu Benny Johanes, Nunus Supardi dan saksi-saksi yakni Budi Darma, Singgih Wibisono, Saini KM, Ratna Riantiarno dan Tubagus Sukmana.

Kepanitiaan

Penyelenggara KKI II adalah Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang diwujudkan dalam suatu susunan kepanitiaan yang terdiri atas Tim Penasehat, Panitia Pengarah (*Steering Committee*), dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) yang ditangani oleh sebuah EO dengan Direktur Kesenian ketika itu, Drs Surya Yoga, sebagai Ketua Umumnya.

Tim Penasehat terdiri dari: Fuad Hassan, Koesnadi Hardjosoemantri, A. Mustofa Bisri, Pia Alisjahbana. Sedangkan Panitia Pengarah terdiri dari: Sri Hastanto (Ketua mengakap anggota, Surya Yoga (Sekretaris merangkap anggota), Bakrie (anggota), Benny Johanes (anggota), Budi Darma (anggota), Edi Sedyawati (anggota), Eko Budihardjo (anggota), Garin Nugroho (anggota), Jamal D. Rahman (anggota), Jim Supangkat (anggota), Mukhlis PaEni (anggota), Mira Lesmana (anggota), Nunus Supardi (anggota), Nyak Ina Raseuki (anggota), Putu Wijaya (anggota), Rahayu Supanggah (anggota), Ratna Riantiarno (anggota), Saini KM (anggota), Sardono W. Kusumo (anggota), Singgih Wibisono (anggota), Tisna Sanjaya (anggota) dan Trie Utami (anggota)

Ringkasan Makalah Kongres Kesenian Indonesia II/2005

Strategi Kemitraan untuk Kesenian

Oleh Linda Hoemar Abidin

Kehidupan kesenian dan kebudayaan yang sehat adalah faktor yang bisa mempertahankan bahkan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi. Dari Singapura, kita bahkan mendapat penegasan bahwa nilai tambah dari industri yang berbasis kegiatan seni budaya memperlihatkan angka efek pelipat-gandaan (multiplier effect) sebesar 1,66: yaitu lebih tinggi dari industri perbankan (1,4) atau industri petrokimia (1,35).

Dua Pola Dasar

Tulisan ini mengangkat beberapa contoh kemitraan untuk mendukung kesenian yang sudah diterapkan di negara-negara lain, yaitu di Amerika Serikat (AS), Singapura, dan Jerman. Ada dua pola dasar Strategi Kemitraan untuk kesenian, yaitu melalui subsidi pemerintah, dan mekanisme subsidi tidak langsung. Contoh strategi yang sangat unik diterapkan di AS, di mana anggaran dana pemerintah untuk kesenian sangat minim. Tapi pemerintah AS, secara tidak langsung, memberikan subsidi yang luar biasa besarnya melalui sistem perpajakan yang mendorong sektor swasta untuk berperan aktif dalam pendanaan kesenian.

Singapura merupakan contoh sebuah negara di mana pemerintahnya, tidak tanggung-tanggung mensubsidi kesenian. Di negara Jerman kewenangan dan tanggung jawab untuk kebijakan kebudayaan dan implemenasinya ada pada masing-masing pemerintah daerah dan kota. Prinsip kompetitif merupakan pendorong bagi semua kegiatan seni budaya di Jerman untuk bersaing secara sehat. Sehingga bagian terbesar anggaran dana kesenian di Jerman berasal dari masing-masing pemerintah daerah—sebuah contoh sukses kemandirian otonomi daerah.

Kita ketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu aset besar sebuah negara. Dalam dunia kesenian, SDM merupakan satu-satunya aset. Negara Singapura menyadari potensi SDM selangkah lebih maju: sumber daya terbesar sebuah Negara adalah daya kreatif warganya.

Penguatan kelompok kreatif melalui, antara lain, sistem pendidikan seni terpadu di sekolah-sekolah di Singapura diyakini mampu membangun keterampilan yang dibutuhkan SDM, misalnya berpikir kreatif untuk memecahkan masalah, toleransi, mampu bekerjasama dalam tim, motivasi, dan rasa percaya

diri.

Tidak terelakkan, di lembaga kesenian yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah, kebanyakan pekerja seni yang berwenang adalah pegawai negeri sipil. Hal ini cenderung menumbuhkan perkubuan: kelompok seni kubu orang dalam dan kubu orang luar. Hasilnya, seringkali kelompok seni yang termasuk kubu orang dalam dapat subsidi, sedangkan kelompok seni dari kubu luar condong termarjinalisasi.

Oleh karena itulah sistem yang diterapkan di AS menarik untuk dipelajari karena peran pemerintah diimbangi dengan keberadaan begitu banyak lembaga nirlaba/yayasan untuk seni yang independen. Terlebih lagi, ada insentif pajak, yang mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta untuk menyumbang demi kebaikan dan peningkatan kualitas hidup para warga sendiri.

Watak sponsorship

Tidak ada insentif khusus berupa keringanan pajak bagi perusahaan ataupun perorangan yang menyumbangkan sejumlah dana bagi organisasi-organisasi kesenian mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesenian di Indonesia. Yang lazim terjadi di Indonesia adalah praktek sponsorship untuk kesenian, di mana perusahaan menyumbangkan sejumlah dana sebagai bagian dari strategi pemasaran produk.

Keterlibatan perusahaan di Indonesia masih terbatas pada penyelesaian masalah sesaat. Menurut penelitian PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) di Indonesia 80% kegiatan sosial perusahaan bersifat incidental dan sarat muatan promosi. Bahkan ada kasus komersialisasi kegiatan sosial, di mana jumlah biaya promosi kegiatan jauh lebih besar dari jumlah bantuan dana yang diberikan. Kebanyakan, sumbangan dana sponsor untuk kesenian di Indonesia cenderung bersifat jangka pendek. Bukan sebagai peluang kemitraan yang berkelanjutan, berjangka panjang demi mencapai kepentingan bersama!

Bukti bahwa tempat-tempat kegiatan seni budaya di AS menarik minat begitu banyak penonton mencerminkan kesuksesan tujuan masing-masing organisasi seni budaya dalam memberi nilai tambah dalam kehidupan masyarakat, memberi pencerahan dalam pendidikan anak-anak, dan pada akhirnya, menarik pengunjung dan wisatawan kota tersebut.

Pengurangan Pajak

Di AS, praktek pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang mencakup setiap jenis layanan publik, dijalankan oleh sektor nirlaba, misalnya universitas, rumah sakit, perpustakaan, museum, lembaga pendidikan, organisasi sosial dan seni

budaya. Kenyataan tersebut mencerminkan keyakinan nasional dalam falsafah pluralisme dan betapa pentingnya prakarsa individu dalam masyarakat.

Pengaturan sektor nirlaba ini dilakukan di bawah pengawasan badan Perpajakan Pemerintah, yang memiliki kewenangan untuk memberikan status bebas pajak bagi organisasi yang memenuhi kriteria klasifikasi sebagai organisasi nirlaba yang tidak hanya bebas pajak, tapi juga sumbangan pada organisasi-organisasi ini dapat diperhitungkan dalam pengurangan pajak.

Bagi kelompok seni AS yang menginginkan status bebas-pajak, kriteria kualifikasi, peraturan, prosedur pengajuan dan petunjuk pengisian formulir pengajuan sangat mudah diakses. Ini sebuah contoh transparansi dalam tata-laksana organisasi pemerintah. Proses pengajuan ini disentralisasi pada sebuah badan Perpajakan pemerintah AS yang bernama *Internal Revenue Service (IRS)*, tanpa membedakan jenis dan tujuan organisasi yang mengajukan permintaan. Hanya IRS yang berwenang mengadakan regulasi, akreditasi dan perijinan serta menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan sektor nirlaba. Birokrasinya tidak rumit.

Sistem ini penting dicatat karena beda dengan praktek yang dilakukan di negara-negara lain, di mana organisasi yang mengajukan permintaan disyaratkan melakukan pendekatan pada satu atau lebih kementerian sesuai dengan bidangnya, misalnya kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya untuk mendapatkan status nirlaba bebas pajak. Juga, organisasi yang mengajukan status bebas pajak tidak perlu mendatangi Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, pejabat pemerintah di AS tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam tata laksana lembaga nirlaba/yayasan, seperti membubarkan atau menyerahkan asetnya.

Semangat Otonomi

Lain halnya dengan mekanisme kemitraan untuk kesenian yang diterapkan di Jerman. Dengan semboyan *Diversity in Unity* (Keberagaman dalam Kesatuan), Negara Jerman mengandalkan otonomi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah khusus kota.

Keberagaman berarti tidak ada satu lembaga pusat yang mengkoordinasikan kegiatan seni budaya. Hal ini justru mendorong kompetisi yang sehat antar daerah/kota. Masing-masing daerah/kota berlomba dalam aspek kreatif, artistik, dan keuangannya. Kesatuan berarti adanya sebuah jejaring kemitraan informal antara kota, daerah, dan Pemerintah Jerman untuk saling berbagi informasi untuk saling memperkuat program seni budaya masing-masing. Keberhasilan program seni budaya di masing-masing daerah/kota

bergantung pada komitmen dan kreativitas departemen kebudayaan tiap Pemerintah Daerah, dan peran aktif masyarakatnya.

Tawaran Langkah

Apa yang bisa dibangun bersama agar terwujud sebuah Sistem Kemitraan untuk Kesenian di Indonesia? pertama, perlu ada kesadaran pihak-pihak yang berkepentingan akan perlunya komitmen untuk memperkuat kesenian Indonesia. Langkah berikutnya, perlu ada pemetaan kebutuhan baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang, yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba/yayasan untuk seni, seniman, dan pekerja seni. Kemudian penting dibangun sebuah jejaring antara pekerja seni dan pelaku seni, entah tingkat perkotaan ataupun daerah, yang saling berbagi informasi dan bersinergi. Sehingga fragmentasi, dan kecenderungan untuk bekerja sendiri-sendiri dalam sektor kesenian tidak terjadi.

Selain itu, komunitas kesenian bersinergi dengan jejaring di luar sektor kesenian, antara lain: Prakarsa penguatan filantropi, yang menunjang pengembangan filantropi sebagai bagian dari upaya memperkuat masyarakat sipil, melalui penguatan infrastruktur, kapasitas kelembagaan serta ruang gerak bagi sektor nirlaba dan kegiatan filantropi di Indonesia. Kemudian, ada baiknya membangun kemitraan untuk melakukan penelitian *Economic Impact* untuk mengukur kontribusi sektor kesenian kepada perekonomian. Hasil studi ini penting untuk meraih komitmen pemerintah demi terwujudnya sebuah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan tiap unsur masyarakat di Indonesia.

Tantangan berikutnya adalah menemukan sistem yang bagaimanakah yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Apakah menerapkan salah satu dari model negara lain, atau kombinasi terbaik dari model-model yang ada, yang sesuai dengan kondisi lingkungan, dan karakter masyarakat Indonesia? potensi filantropi masyarakat Indonesia sangatlah besar.

Dalam upaya menemukan strategi kemitraan yang terbaik, yang cocok diterapkan di Indonesia, masyarakat seni budaya dituntut memiliki komitmen terhadap akuntabilitas, integritas, dan penghargaan atas keunggulan artistik agar diakui sebagai mitra yang sejajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan semakin banyaknya informasi mengenai sektor kesenian, dan terdidiknya masyarakat akan peran dan nilai kesenian, akan tercipta sebuah sistem kemitraan yang strategis atas dasar kesetaraan, untuk penguatan kesenian di Indonesia- demi sebuah kepentingan bersama.

Ditakar dari segi kelimpahan khazanah seni budaya, keluasan wilayah dan jumlah penduduk, Indonesia jauh lebih besar dari Malaysia dan Singapura

digabung jadi satu. Tapi tidak dari visi seni budayanya. Ketimpangan itu terjadi agaknya bukan karena negara tetangga berkembang terlalu pesat, tetapi karena Indonesia yang menolak tumbuh sehat dan terus menerus menelantarkan potensi-potensinya sendiri. Pengakuan atas ketimpangan visi seni budaya, dapat menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan yang diciptakannya sendiri.

Merokok Dapat Menyehatkan Kesenian – Juga Menghuni Apartemen

Oleh Arswendo Atmowiloto

Secara sederhana, peristiwa berkesenian melalui dua tahapan: pertama, proses kreatif penciptaan. Tahap di mana seniman sebagai pencipta bergelut habis-habisan dengan seluruh kemampuan, seluruh harga diri, untuk melahirkan karya. Kedua, proses kreatif komunikasi. Tahap kedua ini, terjadi komunikasi intensif dengan melibatkan orang-orang lain, dengan segala strategi dan kompromi.

Secara sederhana, industri memerlukan promosi. Hampir tidak mungkin produk industri sekarang ini yang tidak membutuhkan promosi, karena tuntutan dasar industri adalah penyebaran produk ke segala tempat tanpa batasan geografis, kemudahan konsumen menemukan, memperoleh citra yang tepat bagi produknya. Dan dengan demikian, akan memungkinkan menjual dengan harga satuan yang lebih murah. Sarana promosi apapun akan dipergunakan selama memenuhi dan sesuai targetnya. Secara sederhana, semakin menjangkau publik semakin banyak, lebih dipilih.

Pengalaman empiris membuktikan, industri rokok mampu menyehatkan peristiwa berkesenian. Dua grup industri rokok, Sampoerna dan Djarum, memainkan peran menentukan dalam peta perkembangan kesenian. Bukan hanya dari bentuk-bentuk iklan yang disajikan atau iklan display saja, melainkan juga dalam bentuk sponsorship kegiatan kesenian.

Pengalaman pribadi membuktikan kerja dalam kerjasama ini menyenangkan, sekurang-kurangnya masih berkelanjutan. Dan sesungguhnya, bukan hanya industri rokok yang butuh tampilan lain karena dibatasi, melainkan usaha lain. Sebuah apartemen, The Pakubuwono Residence, sering menjadi pentas ajang kesenian yang nasional, bahkan internasional. Tiba-tiba menjadi unik, menggelitik sebuah apartemen—di tengah persaingan properti yang ketat, menampilkan 45 penyair membaca puisi.

Pengalaman empiris maupun pribadi di negeri lain, bisa memperjelas kerja

sama ini. Acara televisi Amerika Serikat di mana lagi, untuk contoh-contoh pertelevisuan dunia, kita menemukan bentuk kerja sama yang berjaya. Ini adalah zaman di mana pertelevisian di Amerika disebut "zaman emas". Di mana kerja sama industri dan seniman menemukan bentuknya yang pas. Hal yang sama, saat ini terjadi di Korea dan Thailand.

Program International Creative Writing dari University of Iowa, lebih unik lagi. Mereka mengundang para sastrawan atau teaterawan, dari seluruh dunia untuk berkumpul dan menciptakan karya selama di Amerika. Salah satu sponsornya adalah perusahaan traktor, tapi program ini menjadi unik, kesohor, dan menang pamor dibandingkan perusahaan sejenis yang lain.

Sesungguhnya bentuk kerja sama seperti ini telah terjadi dengan sendirinya, berdasarkan perpaduan kepentingan bersama yang sama-sama menguntungkan. Masalahnya akan kembali kepada seberapa jauh para pelaku industri mengenali dan mengakui harga sebuah karya seni. Masalah kedua, seberapa dekat para pelaku seni mengenali bahwa sasaran yang terarah- segmented, bisa menyatu dengan produk-produk yang terarah. Bukan hanya yang bisa berurusan langsung, seketika dengan nama besar dalam pengertian jumlah.

Pola komunikasi ini yang lebih mendesak untuk dimengerti, dipahami, dikreatifi, sehingga suasana lahirnya penciptaan, lahirnya penerbitan-pentas-penyebaran, secara berkelanjutan. Pola hubungan seni dan industri bisa diibaratkan rokok dengan asap, atau apartemen dengan penghuni, yang akan menemukan dinamika yang menyempurnakan keduanya.

Pewacanaan Seni dan Gerak Lateral Kebudayaan

Oleh Benny Yohanes

Pentingnya mengakomodir aspek lokal dalam aktivitas kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Kelokalan mempunyai bentuk yang majemuk. Meskipun yang majemuk tersebut mempunyai potensi konflik, tapi sisi lainnya aspek integratifnya pun tetap ada. Aspek itulah yang mesti terus digali dalam praktis kesenian dan kebudayaan Indonesia. Hal tersebut berguna untuk menjauhkan kesenian dan kebudayaan kita dari model kebudayaan yang horizontal, selera-tunggal, terpusat, ala Orde Baru. Penekanan pada aspek lokal bukan berarti kembali memperkuat dikotomi pusat-daerah, melainkan untuk menghindari tercipta suatu pusat yang tunggal itu sendiri. Keberbagaian wacana lokal diharapkan menciptakan perekat budaya satu sama lain. Inilah yang akan memperkuat "Indonesia".

Menyikapi realitas kesenian di Indonesia adalah upaya membaca kondisi dan

pertumbuhan seni, dalam hubungannya dengan kondisi faktual keindonesiaan itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa basis pertumbuhan masyarakat Indonesia secara umum, yang hanya berorientasi pada progres ekonomi dan politik, nyatanya telah menyuguhkan timbunan eksekusi yang akumulatif, berupa: antagonisme kekuasaan, merapuhnya kejujuran intelektual, kemandekan pemikiran visioner, dan menguatnya kembali perangai manusia dalam tabiat sosial masyarakat.

“Sistem harapan” (system of hope) adalah perangkat kesadaran yang telah efektif berfungsi sebagai perekat sosial, untuk membangun rasa utuh secara kolektif (to unite collective awareness). Sumber terbentuknya perangkat kesadaran ini adalah “common grounds”, dasar-dasar persamaan, yang diwujudkan menjadi seruan bagi terbentuknya regulasi sosial dan identitas kolektif sebuah komunitas.

Cedera “common grounds” sebagai bentuk “luka kultural” tidak selalu menunjuk pada kondisi berakhirnya suatu kohesi sosial. Memang, cedera “common grounds” di Indonesia telah menyebabkan desain besar Indonesia tidak lagi efektif sebagai ideologi normative berbudaya. Namun, cedera “common grounds” juga telah membantu merevitalisasi fungsi dari desain-desain budaya lokal, untuk menemukan kembali sumber-sumber identitas yang masih kohesif. Kita melihat sejumlah gerakan kesenian dan penyadaran kolektif dari aras lokal dengan cara menjelmakan kembali bentuk-bentuk episteme lokal, yang diwujudkan melalui sejumlah praksis seni, yang sinambung dan mandiri.

Episteme lokal adalah jaringan pengetahuan dan gagasan yang terbentuk dari “common grounds” lokal, sebuah infrastruktur kognitif, yang memungkinkan pemikiran-pemikiran yang terkonstruksi di dalamnya dapat mengorganisasi dirinya. Wacana adalah praktik, berupa cara-cara menghasilkan dan mengartikulasikan pengetahuan, yang diwujudkan bukan saja sebatas refleksi epistemik tapi sekaligus bentuk praksis sosialnya. Local turn sebagai gejala budaya adalah refleksi dan menguatnya potensi “the will to regulate” dari akar komunitas setempat. Dalam konteks ini, kesenian dalam arti luas sebagai sarana komunal untuk memperdalam pengalaman humanistik dan artistik bisa menjadi basis alternatif.

Melalui program preskriptif, forum KKI 2005 seyogyanya memiliki optimisme untuk mempromosikan bentuk-bentuk “sistem harapan” lokal yang masih berfungsi efektif dan konsumtif, yang berkembang di wilayah-wilayah budaya integrative, yang terekspresikan lewat praksis kesenian lokal. Dari wilayah budaya integrative ini pula dapat dipelajari bagaimana praksis kesenian (tradisional dan kontemporer) mampu menciptakan mekanisme *cultural glue*, mekanisme perekat

budaya, sebagai bagian dari sarana pemulihan cedera sosial. Bagaimana pula dapat ditemukan suatu mekanisme edukasi sosial seni yang lebih fundamental, seperti sistem donasi, sistem festival sistem kodifikasi dan sosialisasi wacana seni, sistem awarding, yang seluruhnya berkaitan dengan tujuan pengautan infrastruktur seni, untuk memberi isi yang lebih substantive terhadap kehidupan kesenian nasional.

Jika seluruh konfigurasi nilai-nilai reflektif dan program penguatan infrastruktur seni dapat diformulasikan secara komprehensif, maka aplikasi dan realisasi dari program diagnosis dan program preskriptif di atas diharapkan dapat menjadi pondasi “common grounds” baru, yang dapat disumbangkan masyarakat kesenian, untuk perbaikan “system harapan” Indonesia ke depan. Inilah wacana yang harus dikompetesikan dalam gerak lateral kebudayaan.

Kolaborasi Seni, Peluang dan Jebakan

Oleh Halilintar Lathief

Pertentangan identitas lokal/nasional/global mewarnai identifikasi diri dari suatu komunitas seperti Indonesia terus berlanjut. Identitas lokal seperti identitas yang didasarkan suku bangsa, ras, kesenian, agama di satu sisi ditekan luar biasa, sehingga identitas nasional “Indoensia” sebagai *collective identity* tidak berkembang dengan cara-cara demokratis. Pemaksaan diri terhadap loyalitas identitas nasional dan memarginalkan identitas lokal mengakibatkan pertentangan yang bisa mengarah pada kekerasan seperti memisahkan diri dari *collective identity* Indonesia.

Secara praksis, meletakkan kesenian lokal dalam konteks nasional dan global bukan tidak membawa masalah, karena adanya berbagai intervensi seperti misalnya kepentingan pemerintah dan adanya friksi antara generasi muda yang ingin melakukan perubahan serta generasi tua yang mempertahankan “sifat otentik” dari suatu kesenian.

Ada suatu persoalan teoritis yang dapat dimunculkan dari realitas itu: Yaitu identitas dan representasi. Para penganut pendekatan identitas menganggap bahwa kesenian itu dikonstruksikan oleh komunitas pemilik identitas, yang pada gilirannya melahirkan konsep jati diri. Apa yang dikenal sebagai jati diri itu sebenarnya tidak ada karena yang ada adalah cipta diri. Penciptaan seni adalah penciptaan ke-Indonesiaan.

Globalisasi menegaskan global atau korporasi multinasional. Secara sosiologis, globalisasi menegaskan perbedaan identitas lokal di tingkat global dan signifikansi pola perilaku sebagai simbol-simbol material.

Pada tataran kesenian Indonesia, dekade terakhir ini marak terjadi kerjasama (kolaborasi) antara seniman tradisional dengan seniman modern, atau seniman dari disiplin seni yang berbeda, atau seniman antara negara. Terjadi pro dan kontra atas peristiwa kesenian semacam ini. Untuk mengkaji proses dialektika antara globalisasi dan kebudayaan lokal, perlu dicermati adanya keterkaitan dan ketergantungan antara nilai estetika di tingkat internasional, nasional dan lokal. Dalam kajian tersebut akan nampak bagaimana interaksi pada ketiga nilai-nilai estetika tersebut terwujud, baik dalam bentuk kompetisi maupun harmonisasi.

Masalahnya adalah bagaimana berbagai seniman dan kesenian lokal dengan karakteristik masing-masing mampu bertahan serta dapat berperan dan bersaing global sebagai subjek yang aktif berdasarkan akar kebudayaan sendiri.

Mengembangkan Gerakan Kesenian Lokal yang Mandiri dan Sinambung: Pengalaman di Medan dan Kawasan Pan-Sumatran

Oleh Ben M. Pasaribu

Pada dasarnya sebuah kawasan memiliki karakter yang khas dalam berekspresi kesenian, biasanya pada ragam kesenian etnikal maupun yang bersifat regionalistik (termasuk varian-varian genre). Namun sejalan dengan perkembangan zaman, elemen industri dan upaya-upaya eksperimental, termasuk juga apabila kawasan tersebut memiliki institusi pendidikan kesenian. Sehingga pengembangan kesenian yang bersifat kebutuhan lokal akan berkembang dalam gerakan-gerakan yang sporadis sesuai dengan kebutuhan komunitas masing-masing, baik untuk kreativitas pendukungnya maupun untuk kebutuhan apresiatif penikmatan.

Dalam konteks ini biasanya secara tidak langsung akan memunculkan elemen kompetitif, sehingga pola-pola aktivitas semacam ini akan selalu *survive*. Gerakan seperti ini akan berjalan terus dengan atau tanpa dukungan dari luar, meskipun skala kegiatannya relatif kecil.

Dalam tahapan ini, perkembangan kesenian dapat saja meluas dalam arah gerak yang sangat bervariasi: Tradisi dan transisi. Modernisasi dan konstelasi. Revitalisasi dan kolaborasi. Neotradisi dan eksperimentasi.

Dalam perkembangan lanjutan, gerakan kesenian membutuhkan manajemen untuk pelaksanaan aktivitas yang membutuhkan perluasan audiens menjadi interdisiplin dan inter-regional.

Kemampuan memilih tema dan sisi pandang yang orisinal akan sangat

menentukan kesinambungan aktivitas kesenian ini, misalnya, dari pengalaman di kawasan Sumatera, biasanya dasar pertimbangannya dapat dari berbagai pendekatan, misalnya:

1. Geo- Kultural: Dialog Utara (Sastra Malaysia-Indonesia-Thailand), Bintang Arts Festival (Archipelago Arts Forum), Pan Sumatran Ensemble, Malacca Strait Ethnomusic-Composers Forum, Gelanggang Tari Sumatra, dan lain-lain.
2. Geo- Enviromental: Pesta Budaya Pesisir, Eco-Arts. Gathering Lake Toba, Krakatau Festival, Festival Kesenian Ujung Pulau, dan lain-lain.
3. Diasporikal: Dunia Islam Dunia Melayu, Kenduri Seni Melayu se-Dunia, dan lain-lain.
4. Edukasional: IMT- GT Varsity Convocation, Inter-Univer Sities Performing Festival, dan lain-lain.
5. Eksperimental: Pasar Tari Kontemporer, Medan Eksperimental Eksposisi, dan lain-lain.
6. Segmental: Undergorund Festival, piano, gitar klasik, dan lain-lain.

Kebanyakan aktivitas kesenian memiliki *schedule* yang regular, khususnya yang telah memiliki komunitas masing-masing, namun di luar aktivitas kesenian bersifat kontinu yang dikelola oleh masyarakat maupun komunitas kesenian secara swakelola, unsur yang mendukung dalam mempertahankan kesinambungan aktivitas adalah:

1. Konteks komersial dan industrial.
2. Program Community dari suatu perusahaan.
3. Penyertaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
4. Bagian dari kegiatan institusi pendidikan

Beberapa komunitas kesenian yang menekankan pada aspek kreativitas, menempuh prosedur yang lebih meluas dengan mengusahakan funding maupun grants dari badan-badan donor. Problematika di kawasan-kawasan tertentu, yang kerap muncul dalam mempertahankan kesinambungan sebuah aktivitas kesenian, di samping kesiapan pendanaan, adalah dinamika masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (termasuk juga pendukung keseniannya) yang berkenaan dengan persepsi dan apresiasi terhadap ragam kesenian cenderung mengalami fluktuasi estetika.

Kesederhanaan Wacana Gunung: Seni, Industri, Apalagi, dan Perspektif Ruang Waktu yang Ruwet

Oleh: Sutanto Mendut

Pada awal mulanya, seni itu tidak ada. Yang ada sekedar deskripsi yang kelak mungkin saja disebut berbau liberal, plural, indigenous, kiri, industrial, kapital, universal, lokal, global, tradisional, klasik kontemporer dan seterusnya.

Ada atau tidak ada, kita lalu bicara situs purbakala, artefak, batu canggal, candi, relief greek, lentur meditasi, pendeta, silang menyilang tangan pastur, adzan orang memanggil sembahyang suh, gamelan Sunan Kalijaga, mantra dukun, keris pusaka, kamasutra, dongeng cebolan yang seksi, ziarah sukuh dan lain-lain.

Seni itu tidak ada, hanya ada kesederhanaan orang-orang berbicara tentang barang-barang fisik dan visual dan orang mengisi waktu menafsirkan kehidupan mental-psikologis mereka, lalu ritual dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Secara sederhana ya memang seolah paralel dengan kearifan lingkungan.

Yang pasti ada, cuma sederhana, yaitu kumpulan atau benturan persepsi yang tidak sama, dan inilah yang penting, dibanding persepsi tertentu yang dominan lalu menandakan yang lain: Apresiasi silang tentang seni juga sederhana.

Yang tidak sederhana dari dulu sampai sekarang cuma datang dari imajinasi orang tertentu terhadap orang lain, bahwa imajinasinya penting dan perlu dan harus dibutuhkan dan diterapkan pada orang lain tersebut. Inilah realitas yang merupakan negosiasi penting sepanjang hidup budaya wacana manusia.

Seni wajib setahun 5 kali, wayang kulit wajib sebelum tanam dan sesudah panen (aum tandur dan panen), pentas rakyat di bulan Jawa ruwah dan lain-lain, sesaji tompah sebelum idul fitri, nyadran kali yang pentas ditonton penunggu mata air setahun sekali.

Pentas di kaldera Gunung Sumbing setiap ada bisikan atau impian lewat dukun lokal. Pentas ratusan grup kataman pesantren Tegalrejo. Wajib nabuh gamelan setiap kamis malam. Pentas setiap sewindu untuk wafatnya tokoh lokal. Ritual saat seseorang memenuhi hadir sekian lama. Itu contoh yang berkaitan waktu kapan, durasi, dan waktu tak terduga.

Optimalisasi Pendidikan Kesenian (Paradigma Baru Pendidikan Tinggi Seni

Oleh Soetarno

Seni merupakan ekspresi individu dan ekspresi kultural yang dilandaskan pada latar sosial budaya yang khas. Seni di Indonesia lahir dalam konteks ragam latar sosial budaya yang plural dan multikultural.

Pendidikan seni, khususnya pendidikan tinggi seni diharapkan dapat menjadi wadah pengkajian, pengembangan, dan pelestarian seni Indonesia secara berimbang dan terus-menerus, baik dalam tataran praksis maupun epistemologis.

Perjalanan panjang pendidikan tinggi seni di Indonesia sejauh ini menemukan bahwa pemenuhan fungsi edukasional dan kultural oleh pendidikan tinggi seni di Indonesia masih belum optimal.

Sementara itu, perubahan sosial yang terjadi ialah membawa pengaruh yang tidak terhindarkan, baik bagi kehidupan pada umumnya maupun bagi dunia seni itu sendiri, dalam berbagai aspek seperti makna proses kreatif, cita rasa, konsep, komunikasi, sosialisasi fungsi dan lain sebagainya.

Sudah saatnya paradigma tinggi seni diperbaharui agar mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensi pendidikan tinggi seni, dan menjadikan pendidikan tinggi seni di Indonesia lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan-perubahan serta kecenderungan-kecenderungan yang sedang terjadi, baik secara internal dalam dunia kesenian maupun secara eksternal dalam kaitannya dengan kehidupan yang mengondisikannya.

Paradigma baru pendidikan tinggi seni

Paradigma baru pendidikan tinggi seni di Indonesia menawarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan tinggi seni di Indonesia pada umumnya sampai dengan tahun 1974 masih melanjutkan model pendidikan seni di sanggar-sanggar. Tujuan pendidikan pada masa itu adalah untuk melahirkan seniman-seniman terampil di bawah bimbingan para empu. Dengan diberlakukannya Sistem Kredit Semester yang menonjolkan bobot akademik, diharapkan keseimbangan antara bobot kesenian dan bobot keilmuan tercapai.
2. Paradigma pendidikan tinggi seni hingga kini lebih menekankan kurikulum yang berbasis isi (Content Based Curriculum), sedangkan paradigma baru pendidikan tinggi seni lebih menekankan kurikulum yang berbasis kompetensi (Competence Based Curriculum).

3. Paradigma pendidikan tinggi seni hingga kini lebih menekankan basis tradisi budaya tertentu, baik lokal maupun modern-global, sedangkan paradigma baru pendidikan tinggi seni bersifat multikultural, sehingga dialog antar budaya lebih dimungkinkan, baik loka-lokal maupun lokal-global.
4. Paradigma pendidikan tinggi seni hingga kini lebih menekankan pengkayaan pengalaman seni (empiris), tetapi kurang dalam hal pengkayaan abstraksi (filosofis).
5. Paradigma pendidikan tinggi seni hingga kini lebih cenderung menghasilkan lulusan yang lebih berpedan sebagai pewaris budaya, sedangkan paradigma baru di arahkan untuk menghasilkan lulusan yang berperan sebagai agen perubahan budaya (Agent of Change).

Visi dan Misi Pendidikan Tinggi Seni

Berdasarkan paradigma baru, maka visi pendidikan tinggi seni Indonesia mampu menciptakan, memelihara, dan mengembangkan seni: mampu memperkaya nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup dengan berbagai dimensi kultural dan spiritual kehidupan, serta peka dan tanggap terhadap fenomena perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Secara khusus misi pendidikan tinggi seni Indonesia adalah hal-hal berikut:

1. Memunculkan dan mengembangkan potensi pluralitas dan multikulturalitas budaya lokal nusantara agar menjadi daya saing dalam percaturan global dan diapresiasi secara wajar.
2. Menciptakan tatanan kehidupan multikultural yang dapat membangun kualitas, harkat, martabat, serta jati diri manusia, masyarakat dan Bangsa Indonesia.
3. Menyikapi dan peka terhadap berbagai tantangan perubahan dan perkembangan zaman, serta memiliki kepedulian terhadap permasalahan dalam masyarakat dan lingkungan hidup.
4. Menyikapi secara kritis, reflektif, dan fleksibel terhadap beragam pergeseran paradigmatis keilmuan dan keprofesionalitas dalam bidang seni.
5. Melakukan pengembangan metodologis tentang penciptaan pengkajian, penyajian, pengelolaan, pembelajaran, serta pemahaman dan penghargaan karya seni.

Tujuan Pendidikan Tinggi Seni

Berdasarkan visi dan misinya, pendidikan tinggi seni di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan sarjana/ilmuwan/tenaga profesional/guru di bidang seni

yang peka dan tanggap terhadap masalah sosial budaya melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan tinggi, dengan pemilikan kompetensi berikut ini:

1. Mampu mencipta dan mengekspresikan beragam gagasan ke dalam berbagai bentuk karya seni
2. Mampu mengkaji dan menganalisis beragam fenomena seni dan budaya
3. Mampu menyajikan karya seni secara kreatif, inovatif dan profesional
4. Mampu melaksanakan proses belajar mengajar di bidang seni dan budaya secara efektif
5. Mampu mengelola beragam kegiatan seni dan budaya

Sistem Pendidikan Tinggi Seni

Dalam upaya perwujudan visi dan misinya, sistem pendidikan tinggi seni merupakan suatu sistem pendidikan bidang seni yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut ini:

1. Kelembagaan yang bermutu, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi berlangsungnya proses pendidikan tinggi seni
2. Tenaga pengajar seni yang kompeten di bidangnya an memiliki komitmen yang tinggi terhadap pendidikan tinggi seni
3. Mahasiswa yang berkemampuan akademik memadai, bermotivasi tinggi serta minat dan bakat yang mendukung
4. Kurikulum dan materi ajar yang bermutu, relevan, kontekstual, tepat guna dan sasaran
5. Dukungan kelembagaan dan dukungan masyarakat yang memadai.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma baru pendidikan tinggi seni di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dialog antar subkultur budaya Indonesia yang beragam dan peningkatan pemahaman serta penghargaan lintas-etnik dalam hubungannya dengan perspektif kultur lain (inklusif).
2. Orientasi akademi yang berkonsekuensi terhadap sistem dan piranti pendidikan tinggi seni yang diarahkan pada terciptanya situasi kehidupan multikultural mengutamakan sikap toleransi dan perilaku saling menghormati antar sesama, baik melalui pendidikan dan pengajaran penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Menggal Pola Alternatif Pendidikan Seni Berbasis Tradisi

Oleh Ady Rosa

Pendidikan seni di Tanah Air, masih mengandung banyak persoalan. Mulai dari apresiasi masyarakat, jam ajar di sekolah-sekolah yang belum memadai, laboratorium kesenian yang boleh dibilang tidak ada di masing-masing sekolah. Karenanya pendidikan seni di sekolah-sekolah (SD, SLTP, dan SMU), lebih kepada “sekadar” mengisi dari bagian kurikulum.

Persoalan ini menjadi tantangan, manakala disodorkan satu persoalan baru yaitu menggal pola alternatif pendidikan seni berbasis tradisi. Inilah suatu pembuktian, di mana persoalan pendidikan seni yang berbasis tradisi, mestinya sudah sejak lama dikurikulumkan. Sehingga jelas arah pembangunan pendidikan seni di Tanah Air, yang berbhineka tunggal ika, dalam rangka menemukan Indonesia baru.

Memberdayakan pendidikan seni

Upaya pembenahan dalam kerangka memberdayakan pendidikan seni, mesti ditinjau dari beberapa aspek: (1) menciptakan suasana yang memungkinkan potensi pendidikan seni bisa berkembang. Dengan prediski bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi untuk dapat beradaptasi dengan seni serta bisa dikembangkan.

Persoalan tersebut merupakan sebuah tantangan yang mesti disikapi seara bijak, dalam sistem pendidikan seni masih belum menemui basis yang dapat dijadikan parameter secara nasional. Yang berdasar pada akar tradisi masing-masing wilayah, kekondisian tersebut ada baiknya dikaji kembali, sebab banyak prasyarat-prasyarat yang mesti dipenuhi. Seperti peninjauan kurikulum, pendukung sistem pendidikan seni, pengajar yang memadai dan beberapa prasyarat lainnya.

Pada aspek (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh peserta didik. Kerangka ini diperlukan langkah-langkah positif, yang dapat menciptakan iklim dan suasana berkarya yang kondusif. Artinya antara pendidik dan peserta didik mesti punya korelasi, yang bermuara pada penguatan langkah-langkah positif, yang dapat menciptakan iklim dan suasana berkarya yang kondusif. Artinya antara pendidik dan peserta didik mesti punya korelasi, yang bermuara pada penguatan langkah-langkah konkrit dari pendidik. Ini merupakan pembuktian yang berwujud pada karya, sebagai tuntutan bahwa pendidik dapat memperagarakan kemampuan berolah seni.

Menggali pola alternatif pendidikan seni berbasis tradisi

Ciptaseni yang diwujudkan masyarakat adat (Indigenous people), sebagai wahana komunikasi merupakan peruntukkan bagi tata kehidupan masyarakatnya, yang dijadikan simbol-simbol budaya sebagai institusi tradisional lewat kovensi. Oleh sebab itu cipta seni seperti motif ukir yang terdapat di rumah-rumah adat di Tanah Air, merupakan bagian dari pendidikan masyarakatnya. Sebab motif-motif ukir merupakan “buku ajar” atau “buku pintar”, yang berisi tata tentang aturan tata kehidupan masyarakat.

Ciptaseni tradisional yang komunal, merupakan sebagai bahasa rupa melalui motif (ragam hias), yang tertata di rumah adat. Merupakan suatu bentuk kesinerjian dengan sastra lisan (oral) berupa petata-petiti, pantun, maupun mantera-mantera, yang punya kemanunggalan arti.

Ciptaseni lewat motif sulobayung yang distilasi dari bentuk kepala kerbau, tidak lain adalah suatu bentuk representatif dari bagian kedelapan titah adat Melayu tentang makna dari simbol pembawa kesuburan.

Local genius lewat ciptaseni sulobayung merupakan kreativitas yang bersumber dari alam berkembang jadi guru, yang diikat dengan keyakinan masyarakatnya sebagai acuan hidup. Ragam motif yang dibangun oleh masyarakat adat, merupakan pendidikan seni yang ditransfer melalui perilaku, yang berhubungan dengan etik tentang moralitas yang emsti dijalankan dalam segala aspek kehidupan, seperti kelimabelas titah adat Melayu dalam seni ukir.

Kelokalan Dalam Proses Ciptaseni

Bila pendidikan seni di Tanah Air berupaya untuk memiliki identitas kebhinekaan tunggal ika, maka perlu ditinjau melalui berbagai aspek penunjangnya. Sebab tidak dengan serta merta menggali pola alternatif pendidikan seni berbasis tradisi, begitu mudahnya, seperti dikemukakan dalam ciptaseni adat Melayu, yang memiliki fungsi sosial, makna budaya serta implikasinya pda perilaku masyarakatnya. Tetapi dalam menggali pola alternatif pendidikan seni berbasis tradisi, dapat ditinjau dari kebutuhan pokok untuk disiapkan, seperti:

Tinjauan kurikulum

Kurikulum Muatan Lokal (KML) yang memberi peluang untuk memunculkan seni tradisi, belum tergarap dengan baik dan memadai. Sebagai telah empirik di Sumatera Barat KML melalui Budaya Alam Minangkabau (BAM), masih sebatas pengenalan dangkal dalam pengajarannya di SMP-SMP. Mestinya dengan adanya KML BAM dapat memunculkan seni tradisi, yang bisa disinerjikan dengan

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang digelar pada kurikulum nasional. Antara KML dan KBK mesti punya standarisasi yang jelas, guna meningkatkan pembelajaran kemampuan dasar (kognitif, psikomotorik, dan afektif) dalam pendidikan seni.

Pendidikan seni berdasar KML belum memadai bisa juga disebut belum memenuhi persyaratan, manakala mengacu untuk kepentingan pendidikan berbasis tradisi. Oleh sebab itu, bila ingin menumbuhkan kualitas pendidikan seni berbasis tradisi, maka diperlukan pengajar yang memiliki kemampuan untuk itu. Di antaranya dengan memberikan sertifikasi yang menunjukkan kemampuan seseorang, dalam kerangka meningkatkan kualitas pendidikan seni berbasis tradisi. Karena seseorang yang mengajar pada pendidikan seni berbasis tradisi, mesti memahami kesenian yang hidup atau pernah hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang nantinya dijadikan sebagai patron, atau paling tidak bisa menggugah ciptaseni peserta didik dalam berolah seni.

Kesimpulan dari makalah ini adalah untuk menggali pola alternatif pendidikan seni berbasis tradisi, dapat diajukan melalui pendekatan kombinasi terstruktur:

1. KML yang berisi tentang seni-seni tradisi diajarkan lebih awal dari kertakers (kerajinan tangan dan kesenian) yang terdapat dalam KBK di SMP dan SMU. Sehingga memungkinkan peserta didik dalam berolah seni telah mengenali seni-seni tradisi.
2. Pada KBK yang menyangkut dengan apresiasi seni, sebaiknya besaran presentasi pengajarannya lebih dititik beratkan pada pengenalan seni-seni tradisi di Tanah Air.
3. Untuk pencapaian pola alternatif pendidikan seni berbasis tradisi, diperlukan pengajar yang berkualitas, yaitu dengan pemberian sertifikasi oleh badan resmi yang berkompeten.

Menulis Kembali Sejarah Seni Indonesia

Oleh Jakob Sumardjo

Sejarah seni Indonesia terdiri dari sejarah seni pra-Indonesia dan sejarah seni modern Indonesia. Sejarah seni pra-Indonesia berisi artefak-artefak seni Indonesia yang berkembang di berbagai wilayah budaya etnik Indonesia, juga berdasarkan estetika religi etnik. Sedangkan sejarah seni modern Indonesia berisi artefak-artefak seni yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang sudah *melting point*, berdasarkan estetika modern Barat.

Dengan menelusuri sejarah seni pra-Indonesia, besar kemungkinan akan

didapatkan estetika Indonesia yang berbeda dengan estetika modern Barat yang sekarang menguasai sistem pengetahuan Indonesia.

Sejarah seni modern Indonesia dapat ditulis berdasarkan masing-masing jenis dan cabang seni modernnya, seperti sejarah seni musik Indonesia, sejarah seni rupa Indonesia, sejarah sastra modern Indonesia dan lain-lain. Tetapi seni pra-Indonesia berlandaskan budaya pra-Indonesia dan cara berpikir etniknya. Karena dasarnya adalah cara berpikir budayanya, maka semua artefak sejarah seni pra-Indonesia dapat dibaca dari cara berpikirnya itu. Artefak-artefak seni itu muncul dari budaya mistis-spiritual-religinya. Selain itu, sejarah seni pra-Indonesia tidak linier tetapi paralel.

Artefak-artefak seni pra-Indonesia banyak yang tidak jelas waktu historisnya. Semua itu mereka warisi secara tradisi dan tradisi itu berubah-ubah dalam perkembangannya. Yang terjadi adalah dekonstruksi warisan tradisi. Batik dan wayang zaman sekarang adalah hasil dekonstruksi-dekonstruksi sepanjang sejarahnya. Dengan penemuan simbol-simbol seninya maka kita dapat mengenali sumber acuan budayanya dan religinya.

Pembacaan atas mitos-mitos suku amat penting dalam memahami artefak-artefak seni pra-Indonesia. Mitos adalah semacam "kitab suci" dari religi etnik yang menuntun kita mengenali simbol-simbol budaya dan seni masing-masing etnik.

Begitu pula seni pra-Indonesia setelah agama-agama India masuk dapat dipahami berdasarkan aliran-aliran pemikiran agama yang terbawa masuk ke wilayah-wilayah budaya etnik. Pada zaman Islam pun perlu ditelusuri masuknya pemikiran-pemikiran Islam, baik dari Timur Tengah maupun India, yang mengubah cara berpikir masyarakat etnik pra-Indonesia dari primordial ke Islam atau dari Indianisasi ke Islam, atau dari ketiga-tiganya.

Begitu pula pada zaman modern Indonesia, penelusuran pemikiran masyarakat Barat mana yang masuk ke Indonesia, sebelum dan sesudah perang dunia, akan dapat memberikan pemahaman mengapa karya-karya seni modern Indonesia bercorak demikian.

Sejarah seni adalah bagian dari sejarah pemikiran. Sejarah pemikiran bagian dari sejarah religinya. Itulah gejala pra-Indonesia. Pada seni modern, budaya religi sudah ditinggalkan, dan manusia Indonesia memasuki zaman sekulernya. Antara seni religi dan seni sekuler inilah yang memaksa kita memaknai artefak-artefak seni pra-Indonesia berbeda dengan artefak-artefak seni modernnya.

Risalah Sosiohistoris: Seni Lukis-Seni Rupa Modern Indonesia, Sebuah Model

Oleh M. Agus Burhan

Untuk melihat sejarah seni rupa Indonesia, langkah baiknya jika diungkapkan sedikit tentang kesadaran perspektif sejarah. Sejarah merupakan pengungkapan fakta perkembangan umat manusia dalam ruang dan waktu, yang sebagai makhluk sosial aktivitasnya merupakan sebab akibat psiko-fisik. Dalam rentang waktu tersebut berbagai fakta, seperti fakta mental (mentifact), fakta sosial (soicfact) dan fakta benda-benda (artifact) terus membangun sejarah.

Dari terminologi itu dalam perkembangan peradaban manusia, terdapatlah fakta-fakta yang berupa artifact, mentifact, dan socifac. Walaupun seni rupa secara faktual merupakan peninggalan artefak dalam peradaban manusia, namun dari jejak benda-benda itu dapat digali fakta-fakta mental dan fakta-fakta hubungan sosial di dalamnya. Dalam hal seni lukis misalnya, selain benda itu merupakan wujud visual yang estetik, di dalamnya bisa juga tercakup eksperisi intelektual, simbol, unsur-unsur religi, emosi dan nilai-nilai (Meyers, 1961: 158)

Pengertian sejarah sebagai penyajian cerita masa lampau, dalam pengungkapannya yang konvensional, cukup hanya bersifat deskriptif naratif. Diperlukan suatu pendekatan multidimensional. Ilmu-ilmu sosial dapat memberikan sumbangan teori dan konsep untuk alat analisis historis.

Seni rupa modern merupakan ungkapan dari pergulatan yang liat antara seniman dengan konteks-konteks sosial dan masyarakat pendukungnya. Untuk itulah sejarah seni rupa modern perlu dilihat secara analitik, yakni mencari kaitannya dengan konteks-konteks sosial itu.

Membaca sejarah dapat juga diartikan membaca fakta-fakta dalam kontinuitas dan perubahan. Dalam sejarah seni rupa modern, yang terpenting untuk dilihat, selain pencapaian-pencapaian estetik seniman, yang lebih mendasar lagi adalah perubahan-perubahan paradigma estetikanya.

Untuk melihat kompleksitas perkembangan paradigma estetik seni rupa modern Indonesia dalam uraian ini dapat diajukan cara pendekatan historis yang dialektis. Dalam perspektif perkembangan yang dialektis, paradigma estetik pada suatu periode dapat menjadi tesis yang disepakati bersama sesuai dengan konteks-konteks sosiokultural dan perjuangan ideologi yang berkembang (Hauser, 1982: 409-414). Namun demikian setiap kemunculan tesis, dengan sendirinya telah membawa benih potensi negasi dan kontradiksi.

Dengan berbagai perspektif itu, penjelasan fakta-fakta tumbuhnya Mooi indie, Persagi, gerakan Lekra, Manifes Kebudayaan, Gerakan Seni Rupa baru, dan Seni Rupa Kontemporer bisa mempunyai dimensi yang kaya.

Perkembangan Paradigma Estetik Seni Rupa Indonesia

Secara dialektikal, seni rupa modern Indonesia yang diawali dan didominasi oleh seni lukis memperlihatkan tesis-tesis sebagai berikut (Burhan; 2002). Pertama, pada awal abad ke-20 sampai akhir tahun 1930-an, berkembang pandangan atau konsep romantisme eksotisme Mooi Indie, dan seni lukis Bali baru yang berasal dari inovasi lukisan wayang tradisional gaya kamasan.

Kedua, pada kemunculan Persagi sampai Lekra, yang berkisar pada tahun 1937-1965 berkembang paradigma estetik yang bersumber dari paham kontekstualisme kerakyatan. Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial yang didorong oleh konteks-konteks politik. Selanjutnya munculnya nasionalisme yang bersumber pada moral perjuangan rakyat untuk kemerdekaan, imbasnya sangat berpengaruh pada perubahan estetika dalam seni lukis.

Ketiga, pada masa orde baru paradigma estetik humanisme universal menjadi menguat sehingga menggeser paradigma kontekstualisme kerakyatan. Seni rupa berusaha secara murni membebaskan penciptaan dari pengaruh-pengaruh politik. Munculnya wacana penghargaan pada kesadaran pribadi manusia dan semangat kebebasan berekspresi mendorong semangat penjelajahan individual untuk melahirkan ungkapan-ungkapan bentuk-bentuk yang beragam.

Keempat, pada tahun 1975 Gerakan Seni Rupa baru (GSRB) muncul dengan suatu paradigma yang melawan bentuk seni rupa yang personal dan liris. Paradigma estetik yang diperjuangkan oleh GSRB tersebut terus mengalami perkembangan, sehingga gejala-gejala pembaruan pada tahun 1980-an sudah mulai dicatat oleh para pengamat sebagai bentuk seni rupa kontemporer Indonesia.

Pada latar belakang sosiokultural, sejak fenomena Raden Saleh, munculnya seni lukis modern di Hindia Belanda niscaya melewati bagian-bagian yang tidak terelakkan, yaitu persentuhan dengan pendidikan Barat, tumbuhnya masyarakat penyangga kesenian, dan dampak-dampak dari perubahan sosial lainnya. Dengan demikian, keberadaan seni lukis tidak bisa dilepaskan dari konteks-konteks yang membentuknya.

Dalam kurun waktu tahun 1980-an sampai tahun 1990-an, mengikuti akibat pewacanaan dari Gerakan Seni Rupa baru dan reaksi dari kelompok

konvensional, maka terjadilah polarisasi sikap lirisme dan non lirisme dalam seni rupa Indonesia.

Dalam tahun 1990-an, paradigma yang ditawarkan Seni Rupa Baru berhasil mendapatkan implementasi pada karya-karya instalasi, performance art, ataupun karya lingkungan (environmental art). Kecenderungan karya-karya itu menunjukkan sebagian dari menguatnya karya seni kontemporer di Indonesia. Di samping itu, keterkaitan seni rupa kontemporer Indonesia dengan merebaknya isu postmodernisme merupakan fakta yang tidak terpisahkan.

Manifestasi dari postmodernisme itu adalah dorongan terjadinya tren pada penerimaan, penolakan, dan percampuran dari polarisasi pandangan dan sikap lirisme dan non lirisme. Percampuran pandangan seni rupa lama dengan seni rupa baru. Dengan demikian terjadilah proses sintesis dari pandangan-pandangan itu.

Di lain pihak, perupa-perupa muda yang berawal dari lirisme juga mulai bosan dengan kehalusan, imaji-imaji personal dan esoteris, maupun terhadap respon-respon sosial. Dalam kecenderungan ini banyak variasi yang dibuat para seniman muda. Mulai dari komentar sosial yang diungkapkan dengan berbagai gaya, dengan tetap memanfaatkan simbol-simbol tradisi, atau sampai pada sifat yang provokatif pada publik seperti karya-karya kelompok Taring Padi. Ditambah dengan penggalan-penggalan yang masih aktif dari seniman-seniman lirisme yang terus tumbuh, keberagaman seni rupa Indonesia pada dekade ke-10 menunjukkan keberadaan yang plural dan dinamis.

Dialek Rupa Tradisi (Sebuah Tawaran Alternatif Perluasan Pendidikan Seni untuk Kawasan Timur Indonesia)

Oleh Hardiman

Nyoman Mana, sebut saja begitu namanya, tentu saja Bali. Beberapa tahun yang lalu merampungkan pendidikan formal kesenirupaannya di Bali. Nyoman seperti malu menyandang profesinya sebagai pelukis tradisional. Di kampusnya, ketika ia masih bersekolah, memang selalu ragu untuk menjadi modern. Seni lukis Bali yang digaulinya sejak masa kanak-kanak telah menjadikan ia yakin pada satu pilihan bahasa rupa. Kebenaran estetik baginya adalah kebenaran yang diyakini secara kolektif, jadi untuk menjadi modern, di mana pencapaian identitas diri menjadi titik tujuan, bagi Nyoman Mana itu adalah hal yang sulit. Ia takut tercerabut dari lingkungan kulturalnya.

Nyoman Mana memang termarjinalkan. Oleh kalangan pemaham modernisme, seniman macam Nyoman Mana tak dianggap. Jejak akademik, yang adalah modernisme itu, masih terus dituntut pada karya Nyoman Mana. Sungguh

tak mengherankan kalau Nyoman Mana merasa terasing. Celakanya, Nyoman Mana tentu tak sendirian, di Bali masih ada puluhan, bahkan ratusan Nyoman Mana.

Bagi masyarakat tradisional Bali, bentuk dan makna seni rupa diyakini sebagai wilayah geokultural yang menjadikan masyarakat Bali terikat secara kolektif. Itu sebabnya pernyataan seni masyarakat Bali adalah pernyataan kolektif yang bersumber pada nilai-nilai yang dijaga bersama.

Sejak seni rupa tradisi Bali berhadapan dengan arus pemikitan modernisme yang diproduksi oleh bangku akademi, keberadaan mereka makin terkecilkan dan terkucilkan. Kendatipun banyak kalangan menilai bahwa di Bali, seni lama dan seni baru bisa hidup berdampingan. Namun kenyataannya, seni lama (tradisi) justru termarjinalkan. Medan sosial seni rupa Bali seolah tak mengabaikan keberadaan seni rupa tradisi. Pasar wacana dan wacana pasar juga tak pernah dimunculkan bagi seni rupa tradisi Bali.

Boleh jadi lantaran sebegitu kuatnya pengaruh ajaran modernisme yang diinjeksikan melalui pendidikan formal seni rupa, maka seni rupa modern di Bali, hari ini, kuat menghegemoni. Pendidikan formal yang mengajarkan ihwal estetika modernisme itu telah menjadikan pelaku seni rupa Bali memasuki wilayah (meminjam istilah Berman) transformasi diri. Eksplorasi dan eksperimen yang menjadi landasan motivasi gubah seni modern pada akhirnya telah menggiring bentuk, fungsi dan makna seni pada pencapai bahasa tertentu yang bersifat individu yang terukur oleh kaidah estetik modern.

Kini, ketika estetika modernisme bukan lagi satu-satunya kebenaran, dan tak lagi memiliki kemutlakan, ironisnya, di bangku sekolah masih juga modernism menjadi anutan utama. Bahkan porsi untuk mata kuliah tradisi bukan hanya sedikit tetapi juga kerap tak dianggap penting. Bangku sekolah hanya membawa para mahasiswanya ke wilayah tradisi sebatas mengenal belaka. Tak ada upaya untuk melakukan penggalan terhadap khasanah seni rupa tradisi.

Kalaupun seni rupa tradisi digali itu hanya terbatas pada praktik penelitian saja. Bahkan tak jarang penelitian seni rupa tradisi, terutama yang mengkaji persoalan kebetukan, menggunakan kacamata estetika modern. Tentu saja penelitian model ini hanya akan melahirkan pembacaan yang keliru terhadap seni rupa tradisi. Seni rupa tradisi dengan demikian dirugikan.

Jika di lingkungan tradisi bisa melahirkan idiolek-idiolek rupa tradisi, mengapa justru bangku sekolah tak melahirkan idiolek rupa tradisi? Bali, dan kawasan Timur Indonesia lainnya yang belum begitu sepenuhnya mempraktikkan estetika modern, sesungguhnya masih punya banyak peluang untuk menggali khasanah lokal. Salah satu khasanah yang bisa ditumbuhkembangkan adalah

dialek rupa tradisi menjadi idiolek-idiolek yang khas.

Di tengah-tengah pergaulan seni rupa dunia, idiolek rupa tradisi bukan hanya akan mendapat tempat yang baik, tetapi juga ini terkait dengan wacana kontemporer yang meragukan modernism itu. Dan, Nyoman Mana itu mungkin akan menemukan idioleknnya jika kemampuan keterampilan dan pemahamannya terhadap seni rupa tradisi terakomodasi dengan baik di kampusnya.

Seni, Media Massa dan Efeknya bagi Masyarakat

Oleh Sirikit Syah

Dampak buruk televisi bagi kehidupan masyarakat salah satunya disebabkan oleh kualitas sinetron yang menjadi program unggulan bagi perusahaan TV untuk mendapatkan laba yang maksimal. Sinetron, jangankan memberi nilai alternatif, malah menjerumuskan masyarakat pada tindakan-tindakan kriminal di dunai nyata yang dicontoh dari sinetron.

Oleh sebab itu dianjurkan agar seniman mempunyai solusi. Misalkan dengan tidak “menjual diri” ke kapitalis. Makalah ini juga menyarankan agar pemerintah memberi subsidi untuk pembuatan film yang berkualitas. Selain itu juga diperlukan pembatasan bagi siaran yang tak sesuai dengan budaya bangsa.

Berbicara masalah “pengaruh” dan “dampak” media massa, seringkali hal ini lebih ditekankan pada metode: bagaimana prosedurnya dan apa ukuran-ukurannya. Perhatian berlebihan di wilayah ini mengaburkan aspek “apa” yang tengah diteliti: apa mempengaruhi siapa, atau siapa terkena efek apa.

Melalui beberapa contoh dalam makalah ini merefleksikan bahwa televisi sendiri tidak peduli pada audience, televisi lebih peduli pada pemasang iklan. Sinetron kita tampaknya tidak mencerminkan diri kita, kalau dalam ilmu jurnalistik ada syarat “proximity” (kedekatan) agar sebuah informasi dapat disebut “layak berita”, untuk sinetron ini tidak. Semakin jauh ceritanya berjalan di atas awang-awang, semakin itu bukan tentang diri kita atau orang yang dekat dengan kita, semakin getol televisi menyangkannya karena semakin banyak orang menontonnya.

Para seniman mestinya tidak “menjual diri” kepada kaum kapitalis dengan membuat skenario sekadarnya dan menyutradarai sinetron kejar tayang, karena selain ini merugikan masyarakat, juga menurunkan martabat kaum seniman sendiri.

Pemerintah mestinya menerapkan proteksi atau perlindungan budaya nasional, antara lain dengan memberikan subsidi pada penggarapan-penggarapan karya seni yang akan disampaikan oleh media massa. Cara lain

dengan memberikan pembatasan pada invasi budaya asing melalui aturan kepemilikan radio/televiisi dan standar content programming.

Natur-Kultur-Nurtur Kesatuan Ruang-Waktu-Peristiwa

Oleh Arthur S. Nalan

Tafsir terhadap NKN (Natur-Kultur-Nurtur) menghasilkan beberapa pemikiran dasar. Natur atau Nature artinya alam. Alam itu terbagi dua, alam alamiah dan alam buatan. Keduanya menjadi kesatuan yang menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Culture artinya kebudayaan. Kebudayaan adalah nilai-nilai kepercayaan dan persepsi abstrak yang berada di balik perilaku manusia dan yang tercermin dalam perilaku. Sedangkan, nurture atau Nurture artinya pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok manusia melalui pengajaran dan pelatihan.

Dari ketiga keterangan tersebut, diyakini ada benang merah, ada kesatuan ruang-waktu-peristiwa yang mengikat satu sama lain. Lalu pemikiran dasar apa yang telah dihasilkan?

Alam-kebudayaan-pendidikan adalah tiga bagian yang sublime yang ditafsir siapapun, yang dikembangkan dalam pola-pola, yang dihasilkan dalam model-model, yang dihasilkan dalam bentuk-bentuk, pola-model-bentuk pada dasarnya hanya upaya peneguhan manusia di dalam keberadaanya.

Alam yang alamiah, ciptaan Tuhan tak diragukan lagi, tak bisa dibuat manusia, bahkan manusia cenderung merusaknya daripada memeliharanya. Alam buatan yang ada adalah alam buatan manusia, perekayasa yang tak pernah berhenti, untuk menciptakan alam-alam buatan, baik dalam bentuk peniruan alam (mimetic) maupun dalam melahirkan fungsi-fungsi buaatannya itu. Seniman adalah salah seorang kreator dalam penciptaan peniruan alam ini, sekaligus pelahir fungsi-fungsi dari buaatannya.

Kebudayaan yang ada adalah ciptaan manusia, menghasilkan peradaban-peradaban baru, berjalan melalui berbagai cara (enkulturasi-akulturasi-difusi dll) yang diproses oleh laku dan prilaku manusianya. Pendidikan sesungguhnya adalah proses pengembangan kepribadian manusia untuk mempelajari kebudayaan.

Konsep Kesenian di masyarakat

Konsep kesenian di masyarakat sebenarnya telah ada sejak masyarakat itu membentuk kesadaran kolektifnya, terutama di masyarakat lama. Masyarakat

lama memiliki *the way of life, life skills, dan local colour*-nya sendiri. Natur-kultur-nurtur tetap mereka jalankan dengan alamiah, tanpa banyak rekayasa, karena mereka hidup dalam konsep kebudayaan: alam bersama manusia.

Pendidikan yang tidak berbasis kebudayaan, akibatnya membuat generasi hanya jadi peniru dan pemulung, bukan generasi kreatif. Dialektika tidak pernah dijadikan proses, cara pandang (mindset) yang datang hanyalah tiruan atau pungutan belaka.

Kesenian selama ini di masyarakat perkotaan terutama dianggap sama dengan kebudayaan. Umumnya hal ini terjadi di mata para birokrat pemerintahan, melihat kesenian nampaknya menjadi ringan, baru sebatas asesoris.

Kesenian selama ini di masyarakat pendidikan (dasar-perguruan tinggi) dianggap sebagai bagian yang dipaksakan karena tuntutan kurikulum nasional, itupun setengah hati, karena sekolah-kampus sering dihadapkan pada tuntutan-tuntutan keperluan kesenian itu sendiri.

Karakteristik kesenian tradisional sangat rentan dengan waktu, terutama kesenian pertunjukannya. Banyak kesenian tradisional yang tidak terikat lagi oleh kesatuan waktu-ruang-peristiwa, karena sudah langkanya upacara-upacara yang mewadahnya.

Proses pembacaan ini perlu dipancang sebagai bagian yang integral dari proses renewed (pembaharuan) menciptakan yang berbeda, pangling dan kreatif. Kesatuan ruang-waktu-peristiwa yang ada di dalamnya perlu diikutkan sebagai konteks baru. Sebenarnya karakter kesenian memang dapat direkayasa ulang secara kreatif tanpa kehilangan substansinya. Misalnya saja rekayasa ulang dalam lakon-lakon lama menjadi baru, tanpa menghilangkan inti lakon yaitu konflik.

Sekali lagi, peneguhan terhadap kesatuang Ruang-Waktu-Peristiwa menjadi signifikan dalam memperlakukan proses komodifikasi kesenian apapun bentuk dan genre, untuk contoh yang baik dalam Kuantum Megalitikum.

Tulisan ini ditutup dengan aporisma Sunda: urang kudu bisa ngingelan zaman, oge kudu bisa ngigelkeun zaman. (kita harus bisa mengikuti zaman tetapi juga harus bisa mengatur zaman).

Mitos dan Demistifikasi dalam Seni

Oleh Krisna Murti

Membahas substansi dan komodifikasi seni tidak terlepas dari jebakan mitos. Mitos yang paling laten beredar di perkotaan, mengembangkan kesenian mesti

dimulai dari pengembangan infrastruktur. Di Barat (Ero-Amerika) seni bisa maju salah satunya karena berkembangnya jaringan yang kait-berkait antara institusi: Galeri dan museum, sejarawan-kritikus-kurator, penerbit/media, bienal/festival dan *art fair* hingga pelelangan. Di Indonesia hingga hari ini infrastruktur itu boleh dikata tidak pernah terwujud apalagi tertata.

Di tengah kevakuman ini, hadir infrastruktur seni semu (*pseudo art infrastructure*) yang membangun jaringan galeri, kurator, penerbitan hingga patron seni. Galeri secara genalogi tidak berakar di Indonesia. Namun di Indonesia institusi tradisi modernism ini segera dipinjam mitos “seni tingginya” oleh galeri untuk labelisasi karya-karya yang dipajang sebagai bagian komodifikasi. Di sisi lain mistifikasi “kesakralan” kata galeri senantiasa dirawat dalam promosi yang mengaburkan masyarakat antara gaya hidup dan kualitas hidup, serupa dengan takhayul kata mall yang menawarkan katarsis *fetihisme* dan gengsi kaum urban.

Dari telaah di atas sedikitnya ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, fenomena ini diasumsikan perkembangan infrastruktur itu bersifat dan berada di wilayah teritori fisik (nasional). Kedua, seolah perkembangan seni tidak terjadi bila tidak ada institusi (fisik) dan tiadanya inisiatif otentik yang independen dari masyarakat.

Dengan independensi (termasuk dana), inisiatif, dan bergerak dalam jaringan antar komunitas (bahkan melalui terobosan TI) mereka bekerja sama lintas negara dan budaya) mereka bekerja. Mereka seakan mendemistifikasikan infrastruktur seni perkotaan dengan menggabungkan fungsi-fungsi: seniman, kurator, penerbitan hingga organizer festival. Mendorong inisiatif otentik dari akar rumput ini tentu tidak menjadi pilihan absolut untuk mengembangkan seni di tanah air. Namun semestinya kita tidak perlu malu untuk mengadopsi spirit mereka dan tentu saja melakukan upaya-upaya konkrit untuk selalu jeli memfasilitasi inisiatif-inisiatif otentik semacam fenomena komunitas seni itu demi memperoleh pencerahan kebudayaan bersama.

Aceh, Kesaksian dan Seruan Perdamaian

Oleh Fikar W. Eda

Masyarakat Aceh seolah menemukan kembali “rohnya” manakala menyaksikan pertunjukan kesenian “Rapa’l Pasee” pada 7-8 September 2005, sepekan sebelum penandatanganan nota kesepahaman damai (MoU) di Helsinki, Finlandia. Ada 144 buah rapa’l yang ditabuh oleh 288 penabuh non stop selama 24 jam, sepanjang perjalanan 400 km, dari Banda Aceh menuju Peureulak, Aceh Timur. Itulah sebuah perhelatan kesenian spektakuler yang tidak pernah terjadi

selama Aceh dalam pergolakan.

Rapa'l Pasee adalah instrument perkusi -semacam rebana- yang terdapat di kawasan Pasee, Aceh Utara. Memiliki diameter 100 cm dengan 80-100 k. Kayunya berasal dari kayu tuwalang yang dilapisi dengan kulit lembu. Bagi masyarakat Aceh, Rapa'i Pasee bukan sebatas alat musik, melainkan mengemban spirit perdamaian. Ungkapan berbahasa Aceh dengan jelas menyiratkan hal itu:

Menyoe ji meusu rapa'i uroh

Lageum ji piyoh ji meusu beude

(Apabila telah ditabuh rapa'i uroh- rapa'i pasee

Maka berhentilah dentum senjata)

Sepanjang perjalanan Banda Aceh - Peurelak, masyarakat menyambut tabuhan konvoi rapa'i pasee itu dengan suka cita. Mereka berdiri di tepi jalan dan mengelu-elukannya. Ke- 144 rapai itu digantung berjejer di atas 10 buah truk bak terbuka. Masing-masing truk memuat 10 rapa'i. Para penabuhnya, terdiri dari dua pasang, menabuh instrument tersebut secara bergantian sepanjang perjalanan.

Rapa'i yang ditabuh itu seolah memberi kabar gembira kepada rakyat di Aceh bahwa perdamaian segera datang. Bahwa dentum senjata akan segera berakhir dan digantikan dengan dentum rapa'i.

Rakyat Aceh memang sudah sejak lama merindukan perdamaian itu. Selama 29 tahun Aceh berkebutakan dalam konflik berkepanjangan. Selama itu pula, rakyat di Aceh dicekam ketakutan. Selama hampir 10 tahun terakhir, aktivitas kesenian Rapa'i Pasee benar-benar hilang dari peredaran. Kalau pun ada yang memainkan jenis instrument itu, tidak lagi dalam format rapa'i uroh (rapai yang dipertandingkan), melainkan hanya pelengkap penderita dalam sebuah acara.

Akibat konflik berkepanjangan itu, masyarakat Aceh telah kehilangan ruang berekspresi. Di Aceh kegembiraan berubah menjadi rasa takut. Rapa'l Pasee yang biasa dipertunjukkan pada hari-hari selepas panen atau dalam peristiwa-peristiwa adat tertentu, digantikan oleh kemurungan.

"Kami kehilangan rasa kebebasan. Kami terkungkung dalam situasi yang pelik dan dilematis yang tidak memungkinkan kami memainkan kesenian ini," kata Muhammad Ubit pimpinan rapa'i dari Desa Buah, kecamatan Baktya, Aceh Utara.

Di Aceh, selain Rapa'i Pasee masih banyak jenis kesenian masyarakat yang mengakar sangat kuat. Seni didong di Aceh Tengah, Rapa'i Geleng di Selatan, Rapa'i Grimphong di Pidie, Seudati di sepanjang pesisir Aceh, Saman dan banyak lagi. Seperti halnya Rapa'i Pasee nasib kesenian itu juga tiarap. Didong yang dimainkan semalam suntuk, dalam suatu periode konflik, tak bisa lagi

dipentaskan. Pertunjukan Seudati yang biasanya tiap tahun diselenggarakan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, tak bisa lagi dilakukan lagi. Masyarakat Aceh selama dalam pusaran konflik tak punya ruang lagi untuk mengaktualisasikan keseniannya. Akibat yang paling kentara adalah mandegnya regenerasi.

Aceh memang berada dalam pasang surut kebudayaan sesuai dengan pasang surut aktivitas politik daerah itu. Apabila ditarik garis ke belakang, boleh jadi hanya sebentar saja masyarakat Aceh mengalami bulan madu dengan ruang ekspresi yang luas.

Diawali dari pernyataan perang Belanda pada 1873. Aceh berada dalam pergolakan terus menerus sepanjang 60-70 tahun dan diteruskan dengan kedatangan penjajah Jepang. Setahun setelah proklamasi kemerdekaan, muncul konflik sosial yang di Aceh disebut sebagai peristiwa Cumbok, yakni perselisihan antara kaum *uleebalang* dan ulama yang berujung pada pertikaian berdarah. Tiga tahun setelah peristiwa Cumbok, penjajah Belanda mencoba ingin menguasai Republik Indonesia melalui serangkaian agresinya lagi-lagi Aceh berhadapan dengan agresor-agresor itu di tahun 1949.

Ketika Indonesia mulai menata diri untuk membangun, di Aceh meletus lagi peristiwa DI/TII, yang merupakan respon dari kebijakan Pemerintah Pusat yang meleburkan Aceh dalam provinsi Sumatera Utara. Pada September 1953 meletus gerakan DI/TII. Konflik baru berakhir setelah pemerintah Jakarta memberi konsesi berupa keistimewaan pada bidang agama, pendidikan dan adat istiadat. Masalah ini selesai pada 1962.

Tapi di tahun 1965, muncul pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Lagi-lagi peristiwa berdarah. Pembantaian di mana-mana. Korban berjatuhan. Sebelas tahun setelah peristiwa 1965, muncul gerakan Aceh Merdeka pada Desember 1976. Gerakan ini tak berhasil dikikis malah makin membesar setelah Aceh diterapkan Daerah Operasi Militer (DOM). Sejak itu, sampai penandatanganan Helsinki, praktis Aceh tak pernah nyaman lagi. Berbagai bentuk operasi militer diterapkan dengan berbagai sandi. Operasi Jaring Merah, Operasi Cinta Meusanah, lalu Darurat Sipil dan Darurat Militer. Kalau ditarik garis, maka periode kebebasan berekspresi di Aceh sangat terbatas sekali. Perjalanan waktu di Aceh nyaris didominasi oleh konflik terus menerus.

Berangkat dari catatan-catatan ini, maka jelaslah bagaimana sebenarnya fungsi kesenian di wilayah konflik seperti Aceh. Bahwa kesenian telah mencatatkan kesaksian-kesaksiannya tentang sebuah peristiwa traumatis. Kesenian dengan dorongan daya gugahnya yang kuat berusaha sekeras mungkin menyampaikan pesan-pesan perdamaian itu.

Maka, Muhammad Ubit dan para penabuh Rapa'i Pasee dan juga seluruh rakyat di Aceh, menaruh harapan besar kepada MOU Helsinki. Apabila gagal, maka akan sulit Aceh menemukan kebebasannya lagi.

Fungsi Sosial Seni Rupa Indonesia: Sebuah Studi Komparasi

Oleh Gustaff H. Iskandar

Dalam artikelnya yang berjudul "Kelahiran Seni Rupa Modern Indonesia". Sanento Yuliman menyatakan bahwa apa yang dinamakan sebagai seni rupa modern Indonesia bukanlah lanjutan dari seni rupa tradisional dari kelompok-kelompok etnis yang ada di Indonesia. Seni rupa modern Indonesia adalah sebuah corak estetik yang mewakili corak identitas kebudayaan baru Indonesia, yang membedakannya dengan corak ekspresi masa kolonial, ataupun masa-masa sebelumnya.

Dalam sebuah buku yang berjudul "Nusa Jawa: Silang Budaya", Denys Lombard menuliskan bahwa pada masa kolonial- setidaknya sejak sekitar tahun 1629- lukisan merupakan alat transaksi yang penting untuk menjalin hubungan dengan para penguasa setempat di wilayah Nusantara. Selain itu, lukisan juga berfungsi untuk mengabadikan para pembesar-pembesar dan pejabat pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Dalam uraiannya, ia juga menyatakan bahwa dalam perkembangan seni lukis, Barat tidak dapat dikatakan sebagai pembawa pengaruh, karena "yang terjadi adalah keterputusan-keterputusan dalam hal teknik"

Berikut adalah beberapa perbandingan positif/ fungsi sosial seni rupa dari berbagai periode sejarah di Indonesia, di mulai dari periode kolonial:

- Berawal dari proyek dokumentasi ekspedisi Belanda di Pulau Jawa, perkembangan awal seni rupa era kolonial sangat diwarnai oleh corak seni rupa yang naturalistik Selain untuk kepentingan ekspedisi dan diplomasi, lukisan dengan corak naturalistik ini juga menjadi barang kepemilikan yang penting bagi turis-turis Eropa yang berkunjung ke Indonesia.

- Dalam buku yang berjudul *Reizen Door Oost- Indie, Prenten en Verhalen Uit 19r Euw* yang disusun oleh Bea Brommer, kita dapat melihat beberapa gambar hasil ekspedisi Jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang dilakukan oleh Jendral Maarschalk H.W. Daendles pada tahun 1809. Di situ diperlihatkan sebuah gambar lanskap yang sangat indah namun proyek yang digambarkan secara indah ini, juga telah menghabiskan banyak sekali korban jiwa dari pihak pribumi. Dalam catatan yang disusun oleh Haryoto Kunto, proyek ini menelan korban sebanyak 30.000 "koeli pribumi".

·Koleksi lain yang dapat kita lihat sebagai corak estetika masa kini adalah beberapa gambar yang dihasilkan oleh ekspedisi Thomas Stamford Raffles, yang menjadi Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 s/d 1816. Raffles beserta kelompok pelukis dan penelitinya berhasil menyingkap berbagai macam data sejarah dan kebudayaan di Jawa secara sistematis.

·Di kota Bandung kita mengenal nama Tuan A.A.J Payen (1792-1853), seorang pelukis Belgia yang tinggal di kota ini pada sekitar tahun 1825-1835. Melalui Tuan A.A.J Payen ini kita kemudian berkenalan dengan Raden Saleh (1814-1880), yang mendapatkan pelatihan khusus melukis sehingga kemudian dikenal sebagai salah satu maestro penting yang menandai perkembangan seni rupa di era kolonialisme Hindia Belanda, yang memadukan corak realisme dan simbolisme yang khas dan populer pada masa itu disebut lukisan *Mooi Indie* atau Indonesia Indah.

Periode 1945

·Pada tahun 1938 berdirilah PERSAGI (Persatuan Ahli Gambar Indonesia), yang dipimpin oleh Sudjojono (1913-1986) dan Agus Djaja (1913-?). Melalui kelompok ini, kita kemudian bertemu dengan corak ekspresi estetik yang kental dengan isu politik. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai seniman yang menentang keras corak *Mooi Indie*, yang dianggap sebagai corak kesenian kolonial.

·Pada masa perang dunia ke-II di masa pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan, tujuan utama dari karya mereka adalah mengembangkan kepribadian Bangsa Indonesia. Pada masa ini, corak lukisan romantik mulai bergeser kepada tema "pemberontakan" dan semangat nasionalisme.

·Pada tahun 1945 dikenal sebuah kelompok bernama Pelukis Front. Kelompok yang terdiri dari Sudjana Kerton, Affandi dan Hendra Gunawan ini tercatat ikut aktif melukis peristiwa perang dengan Belanda di sekitar Kota Bandung pada saat itu.

Pasca 1945

·Tahun 1945 s/d 1949 kemunculan sanggar-sanggar seni rupa menandai permulaan babak baru seni modern Indonesia. Pada periode ini Sanento memberikan catatan sebagai berikut: *"Identifikasi dengan perjuangan bangsa, tiadanya pranata penyangga kecuali pelukis dan perkumpulan pelukis, pergolakan situasi militer, politik dan sosial, serta pandangan seni lukis adalah ungkapan diri dan kehidupan, menumbukan seni lukis yang emosional, tegang, dinamis, dan mencitrakan dunia sekeliling"*.

·Beberapa seniman yang sangat aktif pada periode ini adalah Sudjojono, Affandi, dan Hendra Gunawan. Kusnadi mencatat bahwa selain tema perjuangan fisik, diantara anggota sanggar waktu itu telah ada pula yang memikirkan tujuan seni sebagai perjuangan kemajuan estetika yang murni.

·Pemikiran yang spesifik di bidang estetika rupa-rupanya juga bergolak di Universitaire Leergang voor Takenlearen (Sekolah Guru Gambar) di Bandung, yang didirikan pada tahun 1947. Sekolah ini bertransformasi menjadi Departemen Seni Rupa ITB pada tahun 1956.

·Dalam artikel Seni Lukis Kontemporer Indonesia 1950-1990, Agus Darmawan T. mengomentari perkembangan seni rupa di Bandung dengan catatan sebagai berikut: "Perkembangan selanjutnya adalah penyederhanaan bentuk yang mulai dilakukan oleh Ahmad Sadali pada tahun 1953. Para pelukis (Bandung) kemudian mulai merombak obyek-obyek menjadi motif yang datar, yang terdialeksi perpotongan sejumlah garis lurus dan lengkung"

Ketegangan 1963-1965

·Dalam catatan Sudjoko, pada tahun 1962, Menteri Pendidikan Prof. DR. Priyono mengeluarkan pernyataan keras terhadap mereka yang bersimpati pada kesenian Barat. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: "Musuh-musuh revolusi kita adalah imperialisme dan kolonialisme yang harus kita lawan dalam segala lapangan. Musuh-musuh kita bukan hanya imperialisme Belanda, tapi juga imperialis-imperialis lain yang mencoba-coba memperdayakan Republik Indonesia, yang membantu kaum kontra-revolusioner dan menjalankan sabotase. Seterusnya musuh-musuh rakyat Indonesia juga golongan-golongan blandis, golongan-golongan kontra-revolusioner, golongan-golongan bunglon dan cecunguk.

-Selanjutnya, sekitar tahun 1963-1965 situasi politik di Indonesia mulai memanas. Gerak-gerak seniman di Bandung mulai dibatasi. Seniman-seniman LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) pada waktu itu sempat ditakuti, karena dianggap dekat dan mendukung kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Sampai kemudian terjadi proses peralihan kekuasaan politik, yang menyebabkan ruang gerak seniman Bandung kembali terbuka.

·Mengomentari situasi ini, Denys Lombard menguraikan catatan sebagai berikut: "Kendati demikian, pada tahun 1963 keadaan memburuk. Konflik pecah dengan adanya "manifesto kebudayaan" (Manikebu), yang ditandatangani oleh sejumlah pengarang dan beberapa pelukis. Para partisan "l'art pour l'art" menyatakan perang terhadap para seniman Lekra yang kekuasaannya mereka takuti. Pada tahun 1965-1966, lengkaplah sudah kemenangan mereka. Henk

Ngantung, waktu itu walikota Jakarta disingkirkan, Hendra Gunawan dipenjara. Aliran realis di Yogyakarta dibubarkan: sementara di Jakarta dan Bandung, aliran nonfiguratif menegakan kepala”

Dominasi Orde Baru

·Sikap sebagian seniman Bandung yang dianggap apolitis ternyata membawa berkah tersendiri bagi perkembangan seni rupa di masa ini. Dari tahun 1968 sampai tahun 1970, berbagai macam pameran dilakukan oleh seniman Bandung. Agus Darmawan T. menuliskan bahwa, pada masa ini “Kebebasan kreatif yang merupakan dasar bagi penciptaan individual sudah sepenuhnya diperoleh. Politik pemerintah melepas segala beban tema kanvas seni lukis Indonesia.”

·Melanjutkan perbincangan di bidang seni rupa, tidak terlihat alternatif yang mencolok dalam perkembangan estetika di Bandung pada masa itu, sehingga yang ada adalah kecurigaan bahwa abstrak Bandung menjadi seni formalis yang semakin elitis. Sementara itu, seni yang bermuatan sosial (politik) mulai terpinggirkan di Bandung, walapun di sebagian seniman ITB aspirasi estetik seperti ini juga masih ada.

·Berbagai sokongan politik yang diberikan oleh pemerintah kemudian menjadikan seni abstrak yang dianggap apolitis itu menjadi corak yang dominan di era Orde Baru.

1970: Lahirnya Budaya Tandingan

·Pergolakan aspirasi estetik di Kota Bandung juga terjadi di luar kampus ITB. Di Bandung, pada tahun 1972 sebuah kelompok teater yang bernama teater 23761 pimpinan Remy Silado mengadakan pementasan Genesis II-Melabrak Tabu. Pementasan ini diklaim oleh Remy Silado sebagai sebuah ungkapan yang diupayakan untuk menentang berkembangnya feodalisme Jawa pada saat itu.

·Tak dapat disangkal, aspirasi estetik yang lahir dan berkembang di sebagian kalangan anak muda Bandung, adalah apa yang juga diakomodasi oleh majalah Aktuil yang lahir di kota ini sejak awal tahun 1970-an. Majalah ini mengetengahkan perkembangan selera artistik terkini dari anak muda pada masa itu.

·Melalui rubrik Galeri Pop Art Aktuil, Sanento Yuliman memberikan pengantarnya yang menarik: “Galeri ini memanggil kepekaan baru, mata baru. Mata yang lugu, yang segar bugar, yang terbelalak oleh tampang dunia sekeliling, terkesima oleh botol minuman dan potret artis pujaan. Tiap orang

tersenyum-senyum di ribuan bungkus jamu dan sabun, terlongoh-longoh oleh mobil dan barang kelontong. Oleh iklan di tiap tikungan dan gambar majalah di saban trotoar". Selain itu, Sanento Yuliman juga mencatat kemunculan seni gagasan atau seni konsep ketika berhadapan dengan karya milik Bernardus Subekti S. pada majalah *Aktuil* edisi 188 (Maret 1976).

Peristiwa Malari pada tahun 1974 menunjukkan perlawanan terhadap gejala rezim yang mulai otoriter. Ada kecurigaan pada saat itu, arah pembentukan kebudayaan baru mengarah pada bentuk feodalisme yang sempat mewarnai corak kebudayaan Indonesia pada masa kolonial. Meskipun tidak terlihat hubungan yang jelas, pada tahun yang sama kita kemudian bertemu dengan sebuah peristiwa yang bernama "Peristiwa Desember Hitam". Sampai pada akhirnya muncul pameran Seni Rupa Baru (GSRB) pada tahun 1975.

Pada tahun 1979 gerakan ini membubarkan diri. Salah satu alasannya menurut Jim Supangkat karena "telah dipaksa untuk menghentikan kegiatan-kegiatan mereka...". Tetapi alasan ini agak berbeda dengan keterangan yang disusun Jim Supangkat dalam tulisan "Indonesia New Art Movement", yang menuliskan bahwa salah satu penyebab bubarinya GSRB adalah, "the existence of a gap between the philosophy of Indonesian New Art Movement and its work...".

1980: Kawin Lagi Dengan Politik

Sejak tahun 1978 di Kampus ITB ternyata sudah diterapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), yang oleh Supriyanto dikomentari sebagai bentuk kontrol negara terhadap kehidupan universitas. Konon pada saat itu suasana kampus jadi agak tegang. Di bidang seni rupa sendiri terjadi kegelisahan, karena ada pretensi bahwa perkembangan estetika yang ada pada saat itu hanya melayani kebutuhan kaum "borjuis" baru yang lahir di masa itu.

Dalam tesis yang disusun oleh Chandra Johan, karya Semsar yang berjudul "Oleh-oleh dari Desa II" dianggap sebagai sebuah penyimpangan dari, "...arus yang mendambakan kesempurnaan estetis dan kesempurnaan nilai". Beberapa gagasan estetik yang ditandai sebagai penyimpangan dari tesis yang disusun oleh Chandra Johan adalah antara lain:

1. Munculnya aspirasi untuk mendapatkan kebebasan kreativitas yang lebih terbuka.
2. Menolak seni sebagai komoditas
3. Menolak membuat karya seni hanya sebagai pajangan
4. Adanya gejala eksplorasi untuk mendapatkan bahasa rupa yang baru

5. Kembalinya intensi untuk menjadikan seni sebagai instrument kritik (sosial).

·Kira-kita sekitar tahun 1986/1987, di Seni Rupa ITB muncul sebuah kelompok yang menamakan dirinya Sumber Waras. Kelompok ini merupakan gabungan dari beberapa mahasiswa ITB, mahasiswa ASTI, dan beberapa alumni Studiklub Teater Bandung (STB), yang sering melakukan kegiatan di lapangan tengah Seni Rupa ITB pada sore hari.

·Melalui kelompok Sumber Waras, kita kemudian mengenal istilah perengkel jahe, dan seniman-seniman seperti Arahmaiani, Diyanto, Andar Manik, Marintan Sirait, Tita Rubiyanti, Isa Perkasa, dkk, yang pada perkembangannya kemudian, seniman-seniman ini juga aktif berkarya melalui medium instalasi dan *performance art*.

·Represi politik Orde Baru pada saat itu semakin menjadi-jadi. Di kampus ITB peristiwa penting yang kemudian menjadi gambaran dari kondisi yang represif saat itu adalah apa yang kemudian kita kenal sebagai Peristiwa 5 Agustus 1989. Dalam peristiwa ini, sekelompok mahasiswa ditangkap karena melakukan demonstrasi menentang kehadiran Menteri Dalam Negeri Rudini, yang akan bicara pada acara Penataran Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) di ITB.

1990: Masa Pancaroba

·Masuk ke tahun 1990, kita mulai mengenali istilah-istilah seperti seni instalasi, *performance art* dan *video art*. Selain itu, ruang-ruang presentasi karya seni sudah tidak lagi melulu di ruang kongkrit seperti galeri seni. Banyak seniman Bandung mulai berkarya di ruang-ruang publik.

·Mulai dari tahun 1970 s/d 1990-a, dapat dikatakan sudah muncul gejala pluralisme di bidang gagasan estetika dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Sementara itu, di Bandung, pada periode 1990-an muncul istilah "Jeprut", yang diterjemahkan oleh Heri Dim sebagai berikut ini: "Jeprut, sebuah istilah yang dijumpai dari kosa kata bahasa Sunda, dan berkembang di kalangan seniman Bandung khususnya di penghujung tahun 1990-an. Lazimnya sebutan bagi seseorang/seniman dengan perilaku tak wantah di dalam suatu presentasi karya (seni rupa pertunjukan). Padanan harafiahnya seperti aliran listik yang mengalami korsleting, dalam bahasa Sunda disebut ngajeprut. Ia menjadi semacam medium ekspresi yang lepas sama sekali dari konteks atau ketentuan seni apapun.

·Di era 1990-an, istilah seniman jeprut bukanlah istilah yang asing bagi sebagian masyarakat Bandung. Para seniman yang dianggap jeprut biasanya adalah mereka yang sering ikut terlibat dalam demonstrasi politik pada tahun

1998. Istilah jeprut juga muncul pada peristiwa penyegelan gedung YPK Naripan pada tahun 1996. Peristiwa ini diawali dengan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Pemda Kota Bandung dan PD Kertawisata atas rencana pameran yang berjudul "Lolos Sensor", sebuah pameran bersama yang merupakan inisiatif dari Nandang Gawe, Dodi Rosadi dan Edi Tole. Peristiwa ini memancing grakan solidaritas seniman di Bandung, sebagai bentuk resistensi terhadap kebijakan Pemda Kota Bandung pada saat itu. Berkat berbagai aktivitas politik selama demonstrasi tahun 1998, sebagian orang Bandung mulai terbiasa bertemu dengan seniman yang menggunakan karya seni sebagai alat untuk menyatakan sikap politiknya.

Kantung-kantung Kebudayaan sebagai Penyeimbang Populer Culture

Oleh Firman Venayaksa

Pada proses mencipta, manusia membentuk pula sebuah penciptaan baru yang dinamakan "pemilahan mencipta", yang terdapat dua kubu yaitu *populer culture* (budaya populer) dan *high culuture* (budaya tinggi) yang digambarkan memiliki jurang yang cukup menganga. Benarkah demikian?

Dalam dunia kekinian di mana banyak sekali fasilitas yang mempermudah kehidupan manusia timbullah bermacam logika instan sebagai respon dari stimulan transformasi radikal yang dikaitkan dengan bangkitnya jenis-jenis produksi industri mekanis dan berskala besar. Segala sesuatu menjadi serba mudah, serba cepat. Amerika sebagai sebuah negara adikuasa, mempunyai berbagai otoritas kuasa untuk membuat sebuah hegemoni kebudayaan. Orwell menitikberatkan pada unsur akulturasi budaya, di mana setiap ruang lingkup budaya mempunyai *local genius* dan hal tersebut akan terbentuk dengan sendirinya sebagai proses dari kehidupan.

Kesenian dalam perspektif apapun pada akhirnya tak bisa lepas dari ruang lingkup masyarakat yang notabene meng-ada-kan kesenian dan men-jadi-kan kesenian. Masyarakat sebagai ruang komunal memiliki andil dalam proses mencipta sang seniman yang pada akhirnya hasil dari keterciptaan diperuntukan kembali keapda ruang komunal tersebut.

Dalam berkesenian, tak sedikit para seniman yang membuat sebuah komunitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya selain membuat para seniman memiliki wadah juga sebagai sarana untuk lebih membuka diri dengan masyarakat.

Rumah Dunia yang didirikan oleh Gola Gong adalah salah satu komunitas

yang concern untuk membuat budaya tanding. Lambat laun ketika komunitas ini berjalan, nampaknya tak hanya buku-buku yang disediakan untuk masyarakat (terutama anak-anak dan remaja) tatapi mulai merambah pula pada bidang-bidang kesenian.

Intinya, Rumah Dunia sebagai kantung kebudayaan tidak sekadar bermain-main dalam ranah kesenian, tetapi menjadi sebuah *learning center* bagi masyarakat. Bisa dibayangkan jika kantung-kantung kebudayaan terdapat di berbagai tempat, maka komunitas semacam ini bisa diandalkan untuk menjadi budaya tanding atas kehadiran *popular culture* yang sekarang ini begitu dahsyat mengepung sendi-sendi kehidupan kita.

Budaya populer, dalam penjabarannya, membuat selera masyarakat menjadi sama. Sebab, hakikat budaya populer adalah budaya massa. Segalanya, termasuk estetika, dan selera, diciptakan untuk bisa dikonsumsi oleh segala lingkup masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memberi penyeimbang terhadap budaya populer tersebut, perlu dibentuk kantong-kanong alternatif. Kantong tersebut mesti menjadi alternatif dari selera umum yang sedang diberikan budaya populer.

Kantong tersebut mesti berada pada khazanah *high culture* budaya tinggi. Pengertian budaya tinggi di sini yaitu suatu produk budaya yang tidak diciptakan untuk menyamakan selera masyarakat, bahkan justru hanya untuk kalangan tertentu. Rumah Dunia Gol A Gong merupakan contoh alternatif terhadap budaya populer yang dikatakan penulis makalah. Di Rumah Dunia, masyarakat bisa mendapat informasi, pendidikan, dan hiburan yang berbeda dengan budaya populer. Bahan bacaan, pertunjukan seni, dan acara lainnya dirancang berbeda dengan nilai arus utama.

Proteksi dan Advokasi terhadap Seni Tradisi Kajian Empirik dari Realitas Bali

Oleh Putu Witara Dwikora

Realitas empirik yang ada di Bali menggambarkan bagaimana suatu masyarakat begitu kuat mempertahankan dan melestarikan tradisi sembari berhadapan dengan perkembangan baru yang tak terbantahkan. Invasi dari budaya global yang datang bersamaan kemajuan komunikasi global (internet) selain persentuhan langsung dengan budaya Barat melalui pariwisata.

Di Bali tradisi berkembang secara dinamis dan masyarakatnya melestarikan tradisi sejalan dengan budaya hidup mereka. Ada nilai-nilai yang jadi perekat untuk berlangsungnya terus tradisi, sebaliknya ada pula nilai-nilai baru yang

membuat orang meninggalkan tradisi yang ada, menggantinya dengan “tradisi baru” yang dianggap lebih sesuai.

Adapun yang mampu menjadi ruang perekat bertahannya tradisi kreatif terdiri dari beberapa hal. Perekat pertama adalah ritual agama dan ritual kepercayaan lainnya. Ritus-ritus keagamaan sudah berlangsung sangat lama di Bali. Salah satu warisan kreatif yang bisa dicatat sebagai peradaban kuna Bali adalah patung megalitik Batara Da Tonta di Desa Trunyan, Kintamani, usianya telah mencapai 1094 tahun. Unikny, tradisi memuliakan “Batara Da Tonta” tetap hidup dan sangat terkenal dengan Barong Brutuk-nya dan bisa bertahan sebagai seni ritual, tidak lain karena masyarakat setempat tetap pada keyakinan agamanya sepanjang beratus-ratus tahun.

Dalam konteks yang mirip, puluhan jenis kreasi tradisi di Bali -seni tabuh, seni tari, seni tembang, seni ukir, seni masak, dan lain-lainnya- tetap bertahan sepanjang berabad-abad, karena dipegang oleh satu faktor ini: fungsinya sebagai elemen ritualistik dalam upacara agama Hindu. Tarian sakral semacam Sang Hyang dan Rejang, sampai sekarang tetap bertahan di beberapa desa. karena masyarakat secara turun-temurun mewarisi dan melestarikannya.

Pis bolong, misalnya, salah satu ikon sangat populer dalam “infrastruktur ritual” Hindu, tetap diproduksi dan dilestarikan sampai sekarang -serta merangsang ciptaan-ciptaan baru- antara lain karena fungsinya sebagai salah satu perlengkapan ritual. Nilai-nilai feodal dalam konteks seni dan ritual, bisa saja tetap ada, sementara di sisi lain bentuk visualnya memberikan satu citarasa estetik yang mempesona.

Perekat kedua, inkulturasi, akulturasi, asimilasi. Masyarakat Bali tidaklah statis dan stagnan. Mereka tidak hanya berhenti pada “Tradisi megalitik”. Migrasi penduduk luar, yang kemudian bersentuhan dengan penduduk Bali di masa megalitik tersebut telah menghasilkan satu kreasi kebudayaan yang merepresentasikan percampuran; asimilasi serta adaptasi, yang kiranya di masa lampau merupakan resultan dari kompromi-kompromi politik dan ekonomi para penguasa pada zaman itu. Seperti *pipis bolong* (uang kepeng) bertahta huruf Cina yang menjadi bagian penting dalam sesajen ritual Hindu di Bali, konon merupakan hasil kompromi antara Raja Jayapangus sekitar abad ke-13 dengan seorang pedagang Cina yang Putri Kang Cing Wi-nya dipersunting sang raja.

Asimilasi kultural yang diperlihatkan dalam komunitas-komunitas Muslim berbudaya Bali -seperti Muslim Pegayaman di Buleleng, Muslim Desa Banyubiru di Jembrana, Muslim Desa Kepaon di Badung dan lainnya- memperlihatkan perkawinan tradisi Bali dengan pemeluk Islam. Begitupun dengan komunitas Nasrani di Desa Palasari dan Desa Belimbingsari di Jembrana, memperlihatkan

satu metode bagaimana mereka melestarikan dan merawat tradisi dari asal-usul budayanya di Bali.

Perekat ketiga: Kesadaran Akan Pentingnya Kontinuitas. Sekitar tahun 1970-an, beberapa dosen dan pemuda Bali memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah, belajar di Universitas di Amerika. Mereka menyaksikan seni-seni modern yang dibangun di atas basis kultural masyarakat Amerika yang heterogen, individual, efisien dan individualistik. Anak-anak muda Bali, mulai sekitar tahun 1960-an, sudah keranjingan seni-seni pop yang datang dari Barat, dan di sisi lain dirasakan mulai emoh pada seni tradisi. Dokter AA Made Djaelantik yang berkecimpung dalam seni dan kebudayaan prihatin akan hal itu lalu menggagas festival gong gede yang waktu itu dikhawatirkan mulai punah. Masyarakat Bali mesti punya kesadaran dan *pride* pada kekayaan seni dan budayanya, sembari tetap terbuka secara filtratif pada budaya eksternal yang masuk ke Bali.

Semangat dan kesadaran inilah rupanya yang mengantarkan Made Bandem dan Listibya pada tahun 1970-an sampai pada formulasi kreasi seni tradisi di Bali menjadi seni wali (kesenian dengan fungsi ritual), bebali (kesenian yang bisa difungsikan untuk kebutuhan religius tapi bisa juga untuk profan) dan balih-balihan (seni profan, semata-mata hiburan). Hadir kreasi Cak Ramayana (diadaptasi tari Sang Hyang dan dimasukan epos Ramayana) dan Barong Kuntisraya (diadaptasi dari Baron Sakral di pura).

Kekayaan tradisi-sesajen, tari-tarian, simbol, filsafat, dan sebagainya muncul sebagai transformasi baru dalam karya Nyoman Tusan, Nyoman Gunarsa, Nyoman Erawan, Made Djirna, Nyoman Sukari dan lainnya. Dalam ajaran filsafat Hindu, konsep kontinuitas dirangkum dalam siklus antara penciptaan (*utpeti*), pertumbuhan (*sthati*), kehancuran (*praline*), dan begitu selanjutnya dalam reinkarnasi. Masa lalu, masa kini, masa depan dan yang di depan itu kelak akan menjadi "masa lalu", begitulah siklus abadi berputar-putar.

Perekat keempat: Kapitalisme pariwisata. Seni-seni yang diproduksi untuk kepentingan paket tur bisa dipandang semata-mata sebagai kemasan wisata sementara seni-seni ritual maupun seni-seni religius yang dikreasi tidak dalam konteks pariwisata dan tidak bisa tunduk pada paket tur, tetap punya ruang eksistensinya sendiri. Sepanjang hajatan seni, budaya maupun agama itu berdiri sebagai satu seremoni ritual yang apa adanya -bukan kemasan untuk melayani turis- pariwisata memberikan multiplier efek yang penting dalam perekonomian dan pada gilirannya mendorong kreasi-kreasi ritual yang lebih semarak lagi.

Perekat kelima: Komitmen pemerintah. Provinsi Bali yang mengkreasi Pesta Kesenian Bali sejak lebih dari seperempat abad yang lalu, pada suatu masa memang pernah menstimulasi munculnya kompetisi kreatif yang dinamis. Terlepas

dari model-model pemanfaatan yang aji mumpung, setidaknya pemerintah bisa memberikan perhatian dengan bantuan dana melalui jalur ritual, di mana kesenian tetap hidup.

Masyarakat pedesaan masih membutuhkan patronase, penguasa dan lazimnya perhatian pemerintah model itu punya makna penting dalam keseharian masyarakat desa. Beberapa kepala daerah di Bali telah melaksanakan program bantuan dana kepada sekeha-sekeha tertentu di pedesaan, dengan tujuan pokok pelestarian dan pengembangan.

Selain potensi yang merekatkan seni tradisi untuk bertahan dan dirawat dengan kecintaan sepenuh-penuhnya, dalam perkembangan dan perubahan sosial yang semakin dinamis sekarang ini, tak pelak seni tradisi tertentu juga terancam: mengalami kepunahan. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab, mengapa seni tradisi tertentu merosot untuk akhirnya punah.

Pertama, perubahan sosial dan mobilitas penduduknya. Di desa Wongaya Gede kaki Gunung Batukaru, sekarang ini tidak ada lagi tarian Sang Hyang Jaran. Nagahuci, seorang peneliti Jepang meneliti bahwa faktor penting kepunahan Sang Hyang Jaran adalah tidak ada lagi gadis-gadis perawan yang bersedia menjalani tradisi tari tersebut antara lain karena mereka sudah pindah ke kota, untuk menempuh pendidikannya di sekolah menengah.

Kedua, faktor kerumitan dan menurunnya relevansinya dengan kehidupan masyarakatnya. Seni tari Gambuh dan Wayang Wong adalah dua contoh seni tradisi klasik yang sudah terancam "punah". Anak-anak muda mulai kehilangan semangat untuk menekuni teater tradisional ini, karena ia membutuhkan penguasaan teknik dan vokal yang rumit. Model-model teater yang memerlukan personalia sangat banyak -puluhan penari dan penabuh- menjadi semakin kompleks untuk dimobilisasi dan diatur dalam konteks zaman yang semakin individualistik, cepat dan praktis.

Ketiga, perubahan minat dan selera masyarakat. Komunikasi visual yang canggih dalam bentuk video, lebih khusus lagi televisi, menjadikan dunia ini semacam ruang terbuka yang bisa ditonton dari seluruh penjuru bumi. Kreasi-kreasi modern yang merupakan terobosan inovatif, menawarkan tayangan visual yang memukau, lebih mudah ditangkap dan dinikmati juga lebih efisien.

Keempat, eksploitasi oleh kekuatan kapital. Satu sisi, kapital memang bisa menjadi salah satu sumber energi kreatif, bilamana material tidak mengkontaminasi penciptaan maupun pelestarian seni yang sudah ada. Namun, bilamana pengendali dan pemilik kapital mengeksploitasi seni tradisi dan mempelakukannya melulu sebagai "komoditas ekonomi", maka kapital bisa menjadi salah satu sumber dekstruksi serta degradasi seni tradisi.

Kelima, faktor-faktor lain seperti munculnya kreasi-kreasi modern yang memanfaatkan pesona dan eksotisme tradisi, sementara di pihak lain muncul sikap yang semakin protektif dan mengkrystal dalam semangat primordialistik. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan dari kedua pihak memang bisa menjadikan seni tradisi sebagai “komoditas mati yang stagnan dan tidak bisa dikutak-katik”. Memang ada relevansi untuk mempertahankan dan menjaga nilai-nilai tradisi dari kontaminasi serta eksplotasi material secara berlebihan, tetapi kreativitas tetap memerlukan ruang bebas untuk mencipta, merespon khasanah budaya yang telah ada, untuk diperkaya secara terus menerus, karena masyarakat dan manusia bukanlah entitas statis.

Adapun solusi atas permasalahan seni tradisi di antaranya kebijakan pemerintah, kemerdekaan kreatif. Niscaya pemerintah mesti memiliki strategi dan kebijakan untuk merawat seni tradisi, mengalokasikan anggaran yang cukup dan menyiapkan program dalam konteks pelestarian dan perawatan seni tradisi.

Kedua, kebijakan dari pengusung budaya dan agama, wawasan luas dan jiwa terbuka. Ritual-ritual agama yang memerlukan dukungan beragam hasil karya seni, memang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Bagaimanapun juga, pemerintah Bali dan seluruh Pemda Kabupaten/ Kota di Bali, antara lain memperoleh penghasilan pariwisata dari “penjualan” karya-karya budaya komunitas yang terus menerus melestarikan seni budayanya. Oleh sebab itulah pemerintah tidak bisa berpangku tangan dan membiarkan masyarakat desa secara tidak langsung mendapat “beban” untuk merawat seni-seni tradisi mereka. Ritus-ritus keagamaan itulah salah satu hajatan budaya di mana seni-seni tradisional dibutuhkan secara hampir mutlak.

Fungsi Kesenian di Masyarakat

Oleh Nungki Kusumawati

Kesenian tidak akan pernah tercipta dan berkembang, jika tidak berfungsi bagi masyarakatnya. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Umar Kayam (1981: 52). “Kesenian tidak pernah berdiri lepas dari masyarakat. Sebagai salah satu bagian yang penting dari kebudayaan, kesenian adalah ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri. Masyarakat yang menyangga kebudayaan- dan dengan demikian juga kesenian- mencipta, memberikan peluang untuk bergerak, memelihara, menularkan dan mengembangkan untuk kemudian menciptakan kebudayaan baru lagi.”

Memahami perubahan, ketika terjadi transformasi kebudayaan agraris menuju industri, hampir di seluruh wilayah kebudayaan (kultural) Indonesia,

kesenian tradisi mengalami perubahan. Setidaknya ada dua hal penting yang bisa dijabarkan di sini sebagai penanda dair perubahan itu.

Pertama, seni tradisi mengalami peores (apa yang disebut dengan) komodifikasi. Kesenian tidak lagi dipandang sebagai bentuk ekspresi tunggal, yang mewakili entitas kebudayaan tertentu. Melainkan diperlakukan sebagai komoditas yang pada tingkat tertentu akan mendatangkan keuntungan secara material. Realitas kebudayaan seperti ini terutama di daerah-daerah yang menempatkan pariwisata sebagai 'jalan hidup'. Di sini kegiatan kesenian tradisi dikembangkan bahkan mengarah kepada kesenian demi pariwisata, kesenian yang turistik.

Realitas ke dua, ketika berbagai institusi kesenian mulai didirikan, kemudian seni tradisi memasuki gerbong baru, diperlakukan sebagai materi pembelajaran, kajian dan penelitian dengan berbagai asumsi tentang kandungan spiritualitasnya. Di situ seni diwariskan bukan mewakili entitas kultural, tetapi diperlakukan sebagai pengetahuan, bahan penggarapan karya "baru" dan juga kadang-kadang sebagai "hiburan" kaum urban.

Kedua perubahan ini pada dasarnya memandang seni sebagai cultural heritage, warisan budaya, yang patut dilestarikan dengan pertimbangan yang sangat fungsional (azas guna). Seni tradisi dianggap tidak sanggup mewadahi ekspresi manusia urban (modern), yang di Indonesia mulai tumbuh sejak abad ke-19. Akibat perubahan peradaban ini, seni tradisi tidak lagi menjadi artefak ritual atau semacam simbol keadiluhungan sebuah entitas kultural tertentu. Seni tradisi mendapat fungsi baru sebagai komoditas dan objek penelitian.

Hal yang sangat mustahil mengharapakan kesenian tradisi tetap tumbuh subur sebagaimana terjadi pada masa-masa dahulu. Perubahan peradaban telah membuat kita mencari rumusan-rumusan baru untuk tetap memberikan ruang terhadap *cultural heritage*. Perubahan boleh terus berjalan, tetapi nilai-nilai harus tetap diwariskan dengan berbagai pola. Jika kemudian kesenian yang berasal dari masa lalu (tradisi), "hanya" dianggap sebagai hiburan oleh masyarakat urban kota, bukanlah sebuah gejala punahnya kesenian. Perlu dilakukan upaya-upaya rekonstruksi, apresiasi, pentas yang terus menerus, sehingga seni tradisi tumbuh menjadi semacam tontonan yang berkelas. Sebuah tontonan yang juga ditonton oleh orang-orang dengan kelas sosial dan intelektual memadai. Kesenian tradisi tidak lagi dianggap sebagai seni marginal, minoritas, yang hidup segan mati pun tak mau.

Strategi Pembinaan Kebudayaan/Kesenian dalam Konteks Hukum di Era Otda

Oleh Yesmil Anwar

Strategi pembinaan kebudayaan kesenian Indonesia dalam konteks Hukum, Profesionalisme dan pengelolaan Kesenian di era Otonomi Daerah (Otda) dikaitkan dengan kemungkinan dirumuskannya sebuah undang-undang yang akan mengatur kebudayaan, kesenian dan pembentukan Departemen Kebudayaan untuk mendukung konsistensi dan profesionalisme seni itu sendiri.

Dalam pembuatan undang-undang peranan pembuat rancangan dalam proses penyusunan dibutuhkan beberapa langkah dan pertanyaan-pertanyaan mendasar, antara lain: (1) Bagaimana cara menyusun gagasan mengenai undang-undang yang masuk dalam suatu sistem dan berasal dari siapa? (2). Siapa yang pada awalnya menjelaskan gagasan tersebut dan bagaimana caranya? (3). Siapa yang memutuskan, dengan kriteria serta prosedur yang bagaimana, dalam upaya menggunakan sumber daya manusianya? (4). Siapa yang memastikan bahwa hal tersebut memenuhi prosedur dan memenuhi standar resmi, serta tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya? (5). Bagaimana caranya lembaga-lembaga tersebut memberi masukan dan umpan balik pada beberapa orang yang tepat, dan bukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rancangan menyusun undang-undang, fakta-fakta, teori-teori serta aspirasi dan tuntutan dari “berbagai macam kelompok”. Jika boleh dirumuskan secara lebih kental untuk membuat undang-undang yang “baik” dibutuhkan tiga perspektif yaitu, perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis.

Persoalan kesenian dan kebudayaan bukan hanya urusan masyarakat seni saja. Bicara soal seni dan budaya berarti bicara soal masyarakat. Maka, itu artinya, semua elemen masyarakat mesti terlibat dalam urusan pengembangan seni dan budaya. Oleh sebab itu, adanya “Departemen” tersebut diharapkan dapat menjadi suatu tempat bagi seniman dan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya tentang seni-budaya sekaligus sebagai ruang pertanggungjawaban dari aktivitas menjalankan strategi-strategi kebudayaan.

Disarankan untuk membentuk wadah bagi para seniman, budayawan dan masyarakat Indonesia agar dapat menyalurkan aspirasi dan saran-saran bagi terciptanya iklim koordinatif yang guyub. Dimohonkan pada pemerintah apabila telah disusun suatu konsep strategi pembinaan kebudayaan/kesenian di Indonesia dilakukan upaya memasyarakatkan secara luas dan jelas dengan cara yang sederhana sehingga mudah tercerna oleh masyarakat kebanyakan. Dengan demikian partisipasi bebas dari masyarakat, serta sikap kritis yang membangun

diharapkan tumbuh subur dalam masyarakat akan lebih mudah menjadi kenyataan.

Asosiasi Profesi Seniman di Indonesia

Oleh Saini KM

Masyarakat Indonesia berubah dan bergerak dengan cepat dari gaya hidup kampung pertanian (rural-agricultural) ke arah gaya hidup kota-industri-perdagangan (urban-industrial). Perubahan sudah tentu menuntut berbagai penyesuaian, meliputi penyesuaian sikap, cara berpikir, cara perilaku dan penggunaan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam keadaan baru. Cara bersikap, berpikir dan berperilaku serta kemampuan mempergunakan perangkat-perangkat (dalam bidang pekerjaan tertentu) yang sesuai dengan tuntutan gaya hidup masyarakat industri itu biasa disebut dengan istilah profesionalisme.

Karena berbagai faktor, di antaranya karena perubahan yang terlalu cepat itu, tampak gejala-gejala yang menengarai bahwa dunia kesenian di beberapa daerah di Indonesia belum dapat menyesuaikan diri kepada gaya hidup industri itu. Menelusuri lebih jauh tentang masalah-masalah yang tersirat di balik gejala-gejala yang di antaranya telah diuraikan tadi, untuk kemudian membuat kesimpulan tentang perlu atau tidaknya asosiasi seniman dibentuk di Indonesia. Untuk itu berturut-turut akan dibahas pokok-pokok sebagai berikut, yaitu (1) profesionalisme, (2) Keragaman kehidupan kesenian, dan (3) Penerapan profesionalisme di Indonesia.

Perbedaan gaya hidup kampung-agrikultur dengan kota-dagang-industri di antaranya terletak dalam pola hubungan-kerja. Dalam masyarakat kampung-agrikultur yang bersifat komunal lalu-lintas barang dan jasa di antara sesama warga berada dalam kerangka kepentingan bersama.

Ada enam syarakat untuk terselenggaranya profesionalisme, yaitu: Pertama, adanya pendidikan yang baku. Kedua, adanya sertifikasi. Ketiga, adanya mutu yang baku. Keempat, adanya imbalan yang baku bagi barang dan jasa yang diberikan. Kelima, adanya kode etik profesi. Keenam, adanya asosiasi penghasil barang dan jasa (sejenis).

Keragaman

Perubahan masyarakat Indonesia dari gaya hidup kampung-agrikultur ke gaya kota- dagang-industri, tidaklah merata. Demikian pula halnya dalam gaya berkesenian. Dalam masyarakat kampung-agrikultur kegiatan kesenian terutama berhubungan dengan kegiatan upacara-upacara tradisional.

Para seniman yang berperan serta dalam kegiatan seperti itu tidak menganggap diri mereka sebagai “kelompok profesi”. Mereka menganggap diri mereka seperti warga kampung yang lain yang berperan serta dalam upacara itu di berbagai bidang. Imbalan yang lebih penting adalah kepuasan yang didapat karena mereka telah berperan-serta. Dengan demikian mereka merasa diakui dan mendapat status sosial yang sama dengan warga kampung yang lain.

Ada daerah-daerah yang memiliki komunitas-komunitas yang masih hidup dalam gaya kampung agricultural yang masih kokoh, sebaliknya, ada daerah-daerah yang sangat terindustrialisasikan. Di antara keduanya terdapat komunitas-komunitas yang hidup dalam keadaan transisional dalam berbagai tahapnya. Di samping itu, sikap para senimanpun beragam terhadap pergeseran kedudukannya dalam masyarakat yang berubah itu.

Penerapan

Penerapan profesionalisme, dan dengan demikian pembentukan asosiasi seniman, tidak serta merta dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan di semua bidang seni. Hal itu diakibatkan oleh beberapa hal, seperti perubahan gaya berkesenian yang tidak seragam dari suatu wilayah ke wilayah lain, dari jenis seni yang satu kepada jenis yang lain, adanya kantong-kantong budaya yang khas, bahkan timbulnya kantong-kantong budaya baru yang tidak merujuk kepada gaya hidup kota-industri walaupun berada di wilayah perkotaan.

Suatu kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan profesi ini bahwa, pertama, tuntutan akan profesionalisme tidak sama mendesaknya di berbagai wilayah dan jenis seni; kedua, pembentukan asosiasi seniman tidak perlu dipaksakan dan dibiarkan tumbuh secara alamiah di kalangan para seniman sendiri. Dengan meminjam istilah dari bidang politik dapatlah dikatakan, bahwa demokrasi dan azas desentralistik kiranya layak pula dilaksanakan dalam bidang kesenian.

Perlukah Asosiasi Profesi di Indonesia

Oleh Iriantine Karnaya

Dengan dua istilah seni; Apresiasi dan Persepsi yang sering dibicarakan oleh komunitas Seni Rupa, bahwa istilah tersebut berkaitan dengan penilaian suatu karya seni. Apresiasi mempunyai makna bahwa karya-karya tersebut memberikan suatu kesan yang membuat orang bersimpati dan mengerti akan nilai suatu karya seni. Sedangkan persepsi, suatu penilaian yang diberikan oleh

seorang seniman kepada pengamat, pencinta, masyarakat luas dengan kebebasan untuk menguatkan maka karya seni tersebut.

Di sini dua-duanya memberikan pengajaran kepada masyarakat luas untuk sama-sama memberikan arti positif atau negatif juga diberikan ruang kebebasan untuk mengerti, mencintai, memahami kehadiran suatu karya seni sebagai ungkapan rasa. Jadi sebenarnya seni itu sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai rasa seni, hanya ada prosentasi lebih bagi yang benar-benar menggeluti dunia ini yaitu para seniman. Di sini penulis ingin mengajak masyarakat umum untuk bersama-sama mencoba mengukur suatu penilaian dari sebuah karya seni.

Menanggapi permasalahan dan perbincangan antar seniman, bahwa profesi seniman sulit untuk dikategorikan dengan disiplin lain dan lainnya di lingkungan masyarakat. Ini disebabkan karena jumlah peminat seni setiap hari bertambah, tapi kualitas sangat terbatas. Juga perkembangan seni rupa begitu cepat dan pesat, dibarengi dengan kemajuan teknologi, seni rupa sangat luas ruang gerakannya, sehingga sulit untuk dipisah-pisahkan, bersifat integrasi, saling berkaitan satu dengan lainnya. Maka perlu untuk mencoba mulai membenahi satu-persatu dahulu.

Sebagai contoh adanya Asosiasi Pematung Indonesia, yang berdiri tahun 2000, yang tepatnya lahir tanggal 7 Juli tahun 2000 di kota Yogyakarta. Kelompok dan komunitas pematung memang tidak sebesar jumlah pelukis, jadi dengan mudah mereka bersatu dan berkumpul untuk menjadi sebuah "asosiasi". Asosiasi ini mempunyai keinginan bersama untuk saling mengenal, membantu dan menyebarkan informasi secara terbuka.

Dengan adanya sebuah asosiasi merupakan suatu wadah yang mempunyai akses ke institusi yang terkait, misalnya: Pemerintah, Pemda, Urusan Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri dan akan lebih baik untuk menjadi sebuah mitra kerja. Dan dengan kekuatan sebuah Asosiasi akan lebih didengar eksistensinya, juga memudahkan untuk membuka jaringan kerja, terlebih dengan derasnya arus informasi, sudah saatnya membuka diri bagi kemajuan.

Mereka menghimbau agar lebih banyak asosiasi-asosiasi profesi seni lain yang tumbuh di negeri ini, untuk membuka jaringan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga secara professionalism terikat dengan kode etik dan mempunyai AD/ART yang menjaga eksistensi keseniman secara utuh dan profesional. Dan sudah saatnya bagi para seniman untuk mulai bekerja secara profesional, karena itupun merupakan tuntutan yang perlu diamati dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Optimalisasi Peran Lembaga Birokrasi Kesenian Sehamparan Makalah Singkat

Oleh Taufik Ikram Jamil

Persepsi seorang seniman masih melentingkan pernyataan keraguan terhadap lembaga birokrasi kesenian. Bahkan dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu dan mengekang kreativitas seniman.

Gambaran faktual bagaimana sosok kesenian dipandang secara tidak utuh. Kesenian pada awal dan akhirnya adalah karya seni itu sendiri, tetapi setiap karya seni, masih memerlukan alat lain untuk dapat dimunculkan sebagai karya.

Dengan kenyataan itu, apa yang disebut sebagai kepengurusan karya seni atau sederhananya dapat disebut sebagai mengurus kesenian, menjadi satu sosok tersendiri pula. Mungkin hal ini timbul dari berbagai komunitas, tetapi sudah pada tempatnya, pemerintah juga mengambil bagian dalam sosok ini.

Memerlukan komunitas-komunitas atau lembaga kesenian di luar birokrasi pemerintahan, tetapi tidak dapat mengabaikan peran pemerintahan dalam hal ini. Jika dalam beberapa tahun belakangan, lembaga tersebut dipisahkan dari Departemen Pendidikan, hal itu merupakan suatu langkah yang memiliki alasan kuat -tentu saja dengan pertimbangan kesenian itu sendiri.

Lembaga birokrasi kesenian dalam pengertian suatu lembaga pemerintahan memiliki beberapa ciri: 1.) Lembaga ini memiliki kekuasaan politik. 2.) Memiliki hak dan wewenang dalam anggaran pendapatan belanja negara, 3.) Sikap sebagian besar masyarakat yang masih paternalistik. Jadi, lembaga birokrasi kesenian bisa saja tumbuh dan nyatanya memang sudah tumbuh, tetapi latar belakangnya amat berbeda dengan lembaga birokrasi kesenian yang diciptakan pemerintah, dengan sebab-sebab tertentu pula.

Dengan tiga sebab di atas, lembaga birokrasi kesenian tersebut akan "berisiko" ganda. Lembaga itu dapat memasung semangat, tetapi juga sebaliknya. Oleh karena itu, lembaga birokrasi kesenian, agar menjaga hal-hal sebagai berikut:

1. Menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan memproduksi.
2. Melaksanakan upaya lobi ke berbagai sudut- tak hanya ke atas, tetapi ke samping dan ke bawah.
3. Mengembangkan manajemen seni.

Optimalisasi Peran Lembaga Birokrasi Kesenian

Oleh Ja'far Rassuh

Secara umum pandangan masyarakat tentang birokrasi diidentikkan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah dengan struktur organisasi yang berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Pandangan ini mengacu dari pola pikir ahli administrasi negara. Namun, jika mengacu pada pandangan Max Weber, maka pengertian Lembaga Birokrasi Kesenian tidak terbatas pada lembaga pemerintahan, tetapi juga lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang kesenian yang struktur organisasinya memiliki hirarki dan jenjang jabatan.

Terlepas dari pro-kontranya pandangan seniman terhadap birokrasi kesenian, jika kita sadari sesungguhnya terdapat mata rantai yang saling terkait antara seniman, masyarakat umum serta pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan kelangsungan kehidupan berkesenian.

Ketiga mata-rantai ini masing-masing memiliki peran sinergis. Seniman sebagai penghasil karya membutuhkan fasilitator yang dapat menghubungkan dengan masyarakat luas sebagai konsumen. Peran pemerintah di sini dapat dijadikan sebagai fasilitator dan motivator. Jika demikian maka peran pemerintah menjadi strategis dan penting.

Sebagai bahan dialog, penulis mencoba menyampaikan beberapa pemikiran untuk mengoptimalkan peran lembaga birokrasi kesenian sebagai fasilitator dan motivator dalam menjaga dan mengembangkan kesenian di daerah sebagai berikut:

- Pengelola lembaga birokrasi kesenian hendaknya ditunjuk orang yang memiliki kemampuan, kemauan dan dedikasi tinggi terhadap pengembangan kesenian di daerah.

- Tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut adalah melestarikan kesenian daerah dengan bekerjasama para tokoh masyarakat, seniman dan organisasi kesenian dalam bentuk penggalan, pengolahan, kaderisasi dan penyebarluasan informasi.

- Melaksanakan kegiatan pengembangan kesenian dalam bentuk peningkatan wawasan dan pengetahuan teknis seniman dan pengelola seni, temu seniman, workshop, pertunjukan dan pameran.

- Memberikan penghargaan kepada seniman yang berprestasi dan menciptakan peluang serta pangsa pasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja seni

- Memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya seni yang dihasilkan

oleh seniman

·Memberikan kesempatan bagi pekerja seni untuk melaksanakan kegiatan misi kesenian, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sebelum otonomi daerah berlaku, lembaga birokrasi kesenian memiliki struktur organisasi berjenjang dari pusat hingga ke kecamatan dengan menggunakan sistem perencanaan berjenjang pula (bottom up dan top down). Namun pola ini dianggap belum mampu mengakomodir kebutuhan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, karena program kegiatan dirancang secara terformat dengan ketuk palu sentralistik.

Dengan bergulirnya konsep otonomi daerah, maka pelestarian dan pengembangan kesenian dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan memperhatikan potensi yang dimiliki. Harapan bergulirnya konsep otonomi daerah, kehidupan berkesenian semakin hidup dan munculnya kekuatan baru dengan ciri dan identitas tersendiri.

Setelah empat tahun bergulirnya konsep otonomi daerah, di wilayah tertentu ternyata muncul kendala baru dalam menerapkan dan menetapkan kebijakan pola pembinaan dan pengembangan kesenian di masing-masing kabupaten. Dari hasil pengamatan, kendala terberat yang dihadapi di daerah adalah sumber daya manusia sebagai pengelola lembaga kesenian. Wawasan dan pemahaman pengambil kebijakan di bidang kesenian, baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif tidak merata, sehingga perlu adanya dialog dan pemaparan konsep secara detail.

Agar lembaga birokrasi kesenian yang ada di daerah dapat berfungsi dengan baik, maka dibutuhkan standarisasi kualitas tenaga pengelolanya. Di samping itu supaya kehidupan berkesenian di daerah tetap tumbuh dan berkembang, maka diperlukan standar minimal yang perlu dijadikan sebagai acuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom, maka diharapkan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai lembaga yang menangani pengembangan kesenian secara nasional perlu membuat standar acuan.

Lembaga birokrasi kesenian yang ada di masing-masing daerah perlu dipertegas, bahwa dalam menjalankan aktivitasnya tidak mengganggu kebebasan kreatif seniman dalam berkarya. Lembaga yang ada hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan berkesenian. Bahan masukan ini juga merupakan salah satu cara untuk merangsang dan mencari titik temu, terutama dalam meningkatkan peran lembaga birokrasi kesenian di wilayah persada nusantara.



Menteri Kebudayaan dan Pariwisata membuka Kongres Kesenian Indonesia II (atas), suasana Kongres Kesenian Indonesia II (bawah)

BAGIAN III

Kongres Kesenian Indonesia III/2015

Kongres Kesenian Indonesia (KKI) III diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, 1-5 Desember 2015. Secara kontinyuitas, kongres ini tentu tidak bisa dipisahkan dari dua kongres sebelumnya. Oleh sebab itu penyelenggaraan KKI III 2015 tidak beranjak dari apa yang telah menjadi semangat penyelenggaraan KKI I (1995) dan KKI II (2005).

KKI adalah forum pertemuan para seniman, kritikus, aktivis kesenian, akademisi, para pemangku kepentingan dan segenap pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam kehidupan kesenian, untuk meninjau kembali segala pencapaian dan dinamika kehidupan kesenian dengan berbagai isu atau permasalahan di dalamnya. Juga bagaimana kemudian seluruh hasil forum perbincangan itu dapat merekomendasikan rumusan pikiran atau gagasan yang diandaikan menjadi cetak biru bagi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan politik pembangunan kesenian.

Bahkan lebih dari sekadar sebagai kontinyuitas, secara tematik juga terdapat tautan antara KKI III 2015 dan dua kongres sebelumnya itu. Dalam hal ini, "Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan" yang menjadi tema KKI III 2015, setidaknya merupakan penajaman atau penguraian kritis dari apa yang termaktub dalam tema KKI II (2005), "Realitas, Dinamisasi, dan Kesadaran Nasional dalam Kesenian". Demikian pula hubungannya dengan apa yang menjadi tema KKI I (1995), "Retrospeksi dan Ancangan Ke Depan".

Setelah rentang waktu sepuluh tahun sejak pelaksanaan KKI II 2005, diyakini telah terjadi berbagai perubahan dalam segala bidang. Bahkan, sulit disangkal bahwa kuasa perubahan makin melahirkan berbagai kompleksitas baru yang "memaksa" setiap hal harus kembali diperiksa dan dipertanyakan. Lebih jauh kuasa perubahan tersebut kerap meniadakan segenap identifikasi dan kategori seraya juga mengukuhkan berbagai paradoks. Di dalamnya fenomena sosial politik, agama, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan seni-budaya saling berkelindan.

Fenomena perubahan itu tentu saja memasuki ranah kesenian yang mempengaruhi proses kreasi karya seni, strategi berkesenian, dinamika pertumbuhan komunitas seni, pendidikan seni, juga posisi kesenian di tengah masyarakat. Di sisi lain, berawal dari Reformasi 1998, fenomena perubahan yang sama derasnya juga terjadi dalam kehidupan negara dan bernegara. Arus yang tak hanya membawa pengaruh besar dalam kehidupan dan polarisasi kekuasaan, friksi-friksi politik, pergantian



Rapat persiapan Kongres Kesenian Indonesia III

kekuasaan, atau politik hukum. Melainkan juga yang terasa benar memengaruhi tata kelola pemerintahan hingga landasan desain politik pembangunan.

Dalam konteks hubungan kesenian dan Negara, perubahan yang terjadi tentu tak hanya memengaruhi dinamika yang saling menyendiri atau terpisah. Keduanya jelas saling bersinggungan sebagaimana kesenian merupakan bagian integral dari politik pembangunan Negara dan bernegara. Sayangnya hal itu tak terjadi sebaliknya. Dinamika perubahan di jagat Negara selalu sekadar mengubah polarisasi kuasa politik.

Alih-alih demi meneguhkan peran dan fungsi Negara, dalam dinamika perubahan yang terjadi tampak Negara makin kehilangan peran dan fungsinya. Termasuk di tengah perluasan dinamika kesenian dengan berbagai permasalahannya. Mulai dari hak cipta, pemalsuan lukisan, nasib berbagai ritual dan seni tradisi Indonesia, dinamika seni urban yang kehilangan ruang habitusnya akibat politik pembangunan kota, atau ragam kesenian yang dihantui ketakutan pada sensor segolongan masyarakat.

Ringkasnya, arus besar perubahan yang terjadi ternyata tidaklah mengubah perspektif Negara terhadap kesenian. Tak ada desain politik pembangunan kesenian yang menjelaskan bagaimana sebenarnya Negara memosisikan peran dan fungsinya di tengah perkembangan kesenian. Termasuk batas-batas kehadirannya. Terlebih manakala dinamika kesenian terus menggejala ke berbagai arah dan isu.

Dalam situasi serupa itu amat mustahil membayangkan tercapainya apa yang dalam tema KKI II dikatakan sebagai “Kesadaran Nasional”. Ketiadaan landasan politik pembangunan yang jelas semacam itu juga tentu saja memustahilkan apa yang dalam tema KKI I disebut sebagai “Ancangan Ke Depan”.

Dalam hal ini, tema dan kerangka acuan yang mengemuka pada KKI III 2015 berangkat dari pertanyaan bagaimana semestinya Negara memosisikan kesenian dalam politik pembangunan, serta bagaimana pula semesti atau sejatinya hubungan kesenian dan Negara di tengah berbagai arus perubahan? Pertanyaan itu pelik sekaligus mendesak, baik sebagai suatu “Ancangan Ke Depan” atau demi menumbuhkan “Kesadaran Nasional dalam Kesenian.”

Meski terdapat pertautan, namun KKI III 2015 tidak bisa dianggap sama dengan dua KKI sebelumnya. Sebaliknya, di luar hubungan kontinuitas dan pertautan tematiknya, KKI III 2015 memiliki garis pembeda yang tegas. Baik pembeda di tataran teknis pelaksanaan ataupun dalam desain substansinya sebagai sebuah kongres. Sejak gagasan awal pelaksanaan, proses pelaksanaan, hingga langkah-langkah strategis pasca kongres, garis pembeda itu jelas mengemuka dalam KKI III 2015. Sehingga KKI III 2015 seakan menjadi kontruksi bangunan tersendiri yang desain bentuk dan isinya terpisah dari dua urutan bangunan sebelumnya.

Garis pembeda itu berasal dari semangat melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan KKI I 1995 dan KKI II 2005. Evaluasi ini penting dilakukan agar KKI III 2015 tidak mengulangi apa yang terjadi pada dua kongres sebelumnya itu. Sebagaimana diketahui, tak ada jejak apapun yang ditinggalkan oleh KKI I 1995 dan KKI II 2005. Evaluasi kritis inilah yang kemudian melahirkan berbagai ide perubahan dalam pelaksanaan KKI III 2015.

Di sisi lain, berbagai ide perubahan tersebut diniscayakan juga oleh berbagai sebab berikutnya. Di antaranya, perubahan yang terjadi dalam praktik tata kelola serta semangat birokrasi pemerintahan yang peran dan fungsi tak lebih sebagai regulator dan fasilitator. Dalam hal ini, peran dan fungsi Direktorat Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI, sebagai penyelenggara KKI. Kendati begitu, pelaksanaan penyelenggaraan KKI III 2015 diserahkan sepenuhnya pada komunitas seniman dan aktivis kesenian. Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dalam hal ini lebih berperan sebagai fasilitator sekaligus penanggungjawab anggaran. Sementara ide perubahan lainnya merupakan

semacam konsistensi sebagaimana tema yang diusung oleh KKI III 2015, “Kesenian dan Negara Dalam Arus Perubahan”.

Itulah yang membedakan KKI III 2015 dengan dua kongres sebelumnya. Dan dalam pelaksanaannya kongres ketiga ini dapat berlangsung lebih dinamis, terbuka, dan demokratis. Setelah tak bisa diselenggarakan di tahun 2010 sebagaimana diamanatkan oleh rekomendasi KKI II 2005, ide pelaksanaan KKI III 2015 memang muncul dari Direktorat Kesenian. Melalui sebuah Tim Kecil yang terdiri dari para seniman dan aktivis kesenian, ide tersebut kemudian dibawa ke sebuah forum pertemuan bertajuk “Persiapan Kongres Kesenian Indonesia III” yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, 10-12 Desember 2014, setahun sebelum pelaksanaan KKI III 2015.

Forum pertemuan itu diikuti oleh 60 seniman dan aktivis kesenian dari seluruh Indonesia. Ke dalam forum pertemuan tersebut gagasan tentang keperluan menyelenggarakan KKI III 2015 diperbincangkan, sebelum akhirnya secara aklamasi seluruh peserta sepakat bahwa KKI 2015 perlu diselenggarakan. Lewat forum itu kemudian disepakati pula tema KKI 2015, yakni, “Kesenian dan Negara Dalam Arus Perubahan” dengan tiga subtema. Rumusan pemikiran dari forum pertemuan itu kemudian dituangkan dalam sebuah rekomendasi, yang dalam salah butirnya mencantumkan pula kota tempat penyelenggaraan kongres, yaitu, di luar Pulau Jawa.

Pertemuan “Persiapan Kongres Kesenian Indonesia III” itu merupakan forum yang menjadi penting sebagai fondasi awal proses penyelenggaraan KKI III 2015. Sekaligus pula bisa dibaca sebagai “legitimasi simbolik” bagi gagasan keperluan menyelenggarakan KKI III 2015. Legitimasi itu juga beralasan sebab forum tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh para seniman dan aktivis kesenian. Sebuah forum yang dalam penyelenggaraan dua KKI sebelumnya tak pernah ada.

Dalam proses-proses berikutnya, seperti juga dalam pertemuan “Persiapan Kongres Kesenian Indonesia III”, mulai dari pemilihan anggota Tim Pengarah (*Steering Committee*), penyusunan Kerangka Acuan Kongres (KAK), penyusunan perubahan mekanisme kongres, tata tertib, perluasan serta penajaman beberapa subtema, pemilihan pembicara utama, pemilihan peserta kongres, agenda acara selama kongres, penyusunan rekomendasi; seluruhnya menjadi ranah atau domain kerja para seniman dan aktivis kesenian. Demikian pula manakala pemilihan anggota Tim Kerja KKI III 2015 demi mengawal implementasi dan rekomendasi kongres (*Deklarasi Bandung*). Semuanya berlangsung tanpa arahan, pengaruh, apalagi campur



Peresmian pembukaan Kongres Kesenian Indonesia III: Anies Baswedan dan Dedy Mizwar memencet tumbol

tangan pemerintah.

Direktorat Kesenian atau Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai badan penyelenggara, dalam hal ini, hadir dalam batas keterlibatan mereka sebagai regulator dan fasilitator, yang berkenaan dengan teknis anggaran. Batas kehadiran tersebut bahkan demikian ekstrem. Seraya mengecualikan Mendikbud, Anies Baswedan, yang tampil sebagai pembicara kunci – yang sifatnya lebih seremonial – dalam acara pembukaan, tak seorangpun wakil pemerintah, pejabat Negara, atau birokrat, yang tampil sebagai pembicara utama atau fasilitator sidang.

Artinya, pemerintah di sini hanya bertindak sebagai fasilitator kongres. Oleh karena itu para pekerja seni lebih leluasa memperdebatkan berbagai masalah dengan sudut pandang yang bermacam-macam. Dalam salah satu butir rekomendasi hasil pertemuan “Persiapan Kongres Kesenian Indonesia III” di Bandung, memang terdapat usulan agar kongres diselenggarakan di kota di luar Pulau Jawa. Namun karena penetapan kota penyelenggara lebih pertimbangan hal-hal teknis, maka keputusan tepat dan waktunya diserahkan kepada Direktorat Kesenian sebagai penanggungjawab anggaran. Dan akhirnya diputuskan bahwa KKI III 2015 diselenggarakan di Kota Bandung.

Hal lain yang patut dicatat, kegiatan dalam KKI III 2015 lebih menitik beratkan pada persidangan peserta, dan bukan pemaparan atau ceramah

oleh banyak pembicara. Jika pada KKI I & II, sebagian besar kegiatan berupa ceramah para pembicara yang memaparkan makalahnya, dalam KKI III jumlah pembicara jauh lebih sedikit. Para pembicara diberikan kesempatan untuk memaparkan makalahnya sebagai referensi atau bahan acuan bagi peserta yang akan melaksanakan persidangan dalam kelompok-kelompok. Dalam KKI III terdapat dua jenis sidang kelompok, yakni Sidang Komisi dan Sidang Komite. Sidang Komite merupakan persidangan cabang-cabang seni; Sastra, Seni rupa, Teater, Film, Musik, Tari, dan Lintas-media. Berbagai pemikiran yang dirumuskan dalam rekomendasi masing Sidang Komite dibawa dan digodok kembali dalam Sidang-sidang komisi yang dibagi dalam beberapa sub tema.

Setelah melakukan Sidang Komite, peserta disebar ke dalam Sidang Komisi. Setiap rumusan dalam Sidang Komite kemudian dibahas dan dimatangkan lagi dalam Sidang Komisi, dan dari rumusan yang telah digodok di Sidang Komisi itu kemudian diserahkan kepada Tim Perumus Rekomendasi. Tim Perumus membuat rumusan Kongres berdasar pada keputusan Sidang Komisi. Setelah itu, dilakukan Sidang Pleno untuk menetapkan keputusan Kogres berupa rekomendasi-rekomendasi. Dengan mekanisme semacam itulah KKI III 2015 diselenggarakan.

Kerangka Acuan Kongres

Latar Belakang

Perubahan iklim dan situasi politik yang terjadi lewat gerakan reformasi 1998, tak ayal telah membawa begitu banyak perubahan bagi hampir semua tatanan kehidupan di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir, kita menyaksikan betapa perubahan itu berlangsung sedemikian cepat dan dinamisnya sehingga banyak yang terperangah dan terkaget-kaget dibuatnya.

Desentralisasi dan demokratisasi sebagai akar utama perubahan di bidang politik, misalnya, tak bisa dipungkiri telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Hadirnya otonomi daerah sebagai implementasi desentralisasi, pertama-tama telah menyebabkan posisi pemerintah (pusat) tidak lagi tunggal. Akibatnya, pemerintah pusat kini tak lagi memiliki otoritas yang dominan dan satu-satunya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara seperti yang terjadi di masa lalu, sebab dengan adanya otonomi pemerintah daerah diberi peluang memiliki keinginannya sendiri.

Pada sisi lain, proses demokratisasi yang berlangsung secara bersamaan telah membuat posisi publik/warga lebih menguat dan lebih bebas untuk menyatakan sikap, pikiran, serta menentukan pilihannya dalam hampir segala aspek kehidupan. Bertemu dengan kemajuan teknologi digital yang melahirkan berbagai fenomena baru melalui media dan jaringan internet (baca: media sosial) yang makin intensif, publik lantas cenderung makin independen dan memiliki kekuatan sendiri dalam berhadapan dengan pihak lain di luar dirinya.

Maka, yang kita saksikan adalah bagaimana kemudian di tengah-tengah publik muncul komunitas-komunitas baru yang terlepas dari pengaruh dan campur tangan lembaga resmi pemerintah serta bagaimana kemudian lembaga-lembaga resmi yang ada mulai dipertanyakan dan dianggap tidak lagi relevan. Pada sisi negara sendiri, kita pun menyaksikan terjadinya berbagai perubahan dan upaya reformasi, baik di tataran suprastruktur, infrastruktur, kelembagaan, maupun kebijakan (aturan perundang-undangan) sehingga berbagai aspek itu menjadi benar-benar kompatibel dengan tuntutan dan fenomena perubahan yang ada.

Dalam konteks kesenian dan kegiatan berkesenian di Indonesia, berbagai gerak perubahan juga sangat terasa. Bahkan, khusus dalam kaitannya dengan perubahan yang terjadi di tengah publik atau masyarakat, terlihat sekali praktik-praktik kesenian dan kegiatan berkesenian saat ini menunjukkan kecenderungan yang lebih independen, urban, mengglobal, serta makin terlepas dari pengaruh dan intervensi institusi formal (pemerintah maupun nonpemerintah) yang sebelumnya ada.

Di pihak lain, dalam konteks hubungan kesenian dan kegiatan berkesenian dengan negara, sejak lama sebenarnya belum jelas politik kesenian seperti apa yang hendak dijalankan pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara. Bahkan, di tengah arus perubahan dan berbagai reformasi kelembagaan, kebijakan, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlangsung belakangan ini, ketidakjelasan itu juga berlanjut.

Demikian pun halnya dengan kehadiran Joko Widodo sebagai Presiden baru Indonesia, belum ada gambaran yang jelas di mana dan bagaimana posisi kesenian dalam Nawacita yang merupakan program utama Pemerintahan Jokowi-JK? Adakah bidang kesenian tercantum eksplisit maupun implisit dalam program yang notabene didasari oleh Trisakti (kedaulatan dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan) itu? Di manakah posisi kesenian

dalam konteks tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting dan menggelitik diajukan karena faktanya di tengah ketidakjelasan politik kesenian yang selama ini dijalankan negara, kesenian dan kegiatan berkesenian toh terus berlangsung. Dalam pada itu, meski terasa ada ketidakjelasan, negara sepertinya tak hendak alpa dan berkeinginan untuk terus hadir bagi kesenian atau sekurang-kurangnya dirasakan kehadirannya oleh kesenian dan kegiatan berkesenian.

Dalam konteks ini, maka penyelenggaraan Kongres Kesenian Indonesia (KKI) III –setelah yang pertama pada 1995 dan kedua 2005– patutlah dipandang sebagai sesuatu yang niscaya harus berlangsung pada 2015 ini. Keniscayaan itu sekurang-kurangnya didasarkan pada berbagai kecenderungan perubahan yang sudah diuraikan di atas serta bagaimana seharusnya hubungan Negara dan Kesenian berlangsung, bila dikaitkan dengan tantangan masa depan, terutama upaya pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, kompetitif, terbuka dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain serta mampu memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban dunia.

Tema

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, Direktorat Kesenian Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, selaku satuan kerja yang diberi tanggungjawab menyelenggarakan KKI III-2015, telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai kalangan untuk mencari masukan sebagai bahan bagi Panitia untuk pelaksanaan KKI III. Serangkaian pertemuan itu berlangsung sepanjang 2014, yang puncaknya berupa “Persiapan Kongres Kesenian Indonesia III 2015” yang digelar di Hotel Savoy Homan, Bandung, Jawa Barat, 10-12 Desember 2014. Kurang lebih 50-an seniman, kritikus, pengamat, serta pegiat seni lainnya dari berbagai bidang seni (sastra, teater, tari, musik, seni rupa, film dan lintas media) mengikuti pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, peserta mencoba mengelaborasi, mengidentifikasi, serta menginventarisasi berbagai persoalan kesenian dan kegiatan berkesenian Indonesia mutakhir maupun berbagai kemungkinan di masa depan lewat serangkaian pembacaan dan evaluasi. Hasil pertemuan tersebut adalah sebuah rumusan menyangkut pokok bahasan berupa tema dan subtema yang disarankan digunakan dalam kongres. Rumusan ini kemudian disampaikan kepada Panitia Pengarah (*Steering Committee*) untuk

dibahas dan dieksplorasi lebih lanjut. Hasilnya adalah materi final KKI III-2015 berupa tema dan subtema.

Tema: **“Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan”**. Tema ini dipilih didasarkan kepada beberapa pertimbangan. Pertama, fakta bahwa berbagai perubahan yang sangat dinamis kini tengah berlangsung di tengah-tengah kita, baik dalam konteks kehidupan bernegara maupun kesenian. Kedua, bahwa selama ini politik kesenian yang dijalankan pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara sesungguhnya belum jelas. Ketiga, dari kecenderungan yang berkembang, terbaca betapa sesungguhnya gerak perubahan akan sangat mungkin menjadi didayagunakan oleh bangsa ini terutama bagi upaya pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, kompetitif, terbuka dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, serta mampu memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban dunia.

Dalam konteks ini, kesenian dan negara pertama-tama haruslah dilihat sebagai pihak yang masing-masing berdiri sendiri yang lalu saling berhubungan di tengah arus perubahan yang terjadi. Khususnya dalam konteks “negara”, arus perubahan dimaksud bukanlah perubahan di tataran konstitusi atau ideologi, melainkan menyangkut kebijakan, tata kelola pemerintahan, aturan perundang-undangan, dan lain sebagainya sebagai suatu politik kesenian yang hendak dijalankan negara.

Secara garis besar, tema di atas mengandaikan adanya sebuah kondisi yang sedang berubah dalam dinamika kesenian dan negara, yang meliputi: 1) Perubahan di tataran praktik kesenian dan berkesenian yang belakangan berkembang, baik karena makin intensifnya pengaruh media dan teknologi digital, serta gejala makin meratanya pertumbuhan wilayah-wilayah geografis yang dahulu didominasi oleh masyarakat rural kini makin menjadi urban. Juga tumbuhnya komunitas-komunitas seni yang marak di berbagai wilayah dan makin dipandang tidak lagi relevan institusi formal kesenian yang ada (warisan masa sebelumnya) dalam menjawab gejala ini. 2) Perubahan pada tataran sosial, ekonomi dan politik dalam konteks kehidupan bernegara (transisi demokrasi pasca Reformasi 1998, reformasi infrastruktur demokrasi, seperti kelembagaan, perundang-undangan, sistem pemilihan presiden langsung maupun pilkada, otonomi dan desentralisasi, program reformasi birokrasi, strategi nasional pemberantasan korupsi, dan seterusnya).

Kondisi di atas memunculkan sejumlah pertanyaan yang mendesak: 1) Apakah atau benarkah perubahan yang terjadi di kedua tataran tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi? 2) Apakah hubungan saling

memengaruhi ini bersifat positif atau saling mendukung, atau sebaliknya bersifat negatif atau menghambat perubahan dinamika pengembangan kesenian sebagai salah satu aset penting dalam pembangunan manusia Indonesia? 3) Kemudian bagaimana seharusnya hubungan negara dan kesenian berlangsung, bila dikaitkan dengan tantangan masa depan? Terutama upaya pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, kompetitif, terbuka dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain serta mampu memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban dunia.

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, ada beberapa soal yang harus diperiksa secara cermat, yakni: Apakah kesenian dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan manusia Indonesia; atau sebaliknya kesenian masih dianggap tidak terlalu penting? Jika kesenian dianggap penting, maka: a) Apakah hal tersebut tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan negara terkait dukungan terhadap kesenian? b) Apakah kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam tata kelola dan institusionalisasi (kelembagaan) yang tepat untuk menjalankannya? c) Apakah wujud tata kelola dan institusionalisasi itu tercermin dalam alokasi dan dukungan anggaran yang memadai?

Berdasarkan tema tersebut, kemudian muncul 4 (empat) subtema sebagai *breakdown* untuk dibahas lebih lanjut dalam KKI III-2015, sebagai berikut:

Politik Kesenian dalam Perspektif Negara

Seperti sudah disebutkan, selama ini politik kesenian yang dijalankan negara (melalui pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara) pada hakikatnya belum jelas. Sementara itu, kita pun menyaksikan betapa perubahan yang terjadi belakangan ini, utamanya karena Reformasi 1998 serta makin kuatnya pengaruh media dan kemajuan teknologi digital, disadari atau tidak telah mengakibatkan pergeseran fungsi negara dalam menjalankan otoritasnya di satu pihak dan pada sisi lain memberi penguatan bagi peran publik untuk turut serta mengelola perubahan secara lebih aktif.

Dalam konteks kehidupan kesenian, situasi ini jelas membawa implikasi yang tidak sederhana. Makin kuatnya peran publik itu secara ekstrim bisa saja berdampak pada “tidak diperlukannya lagi negara” oleh kesenian/ kalangan kesenian –yang dalam beberapa kasus gejalanya mulai tampak belakangan ini. Di sisi lain, kita mengetahui, negara memiliki obligasi yang harus ditunaikan kepada kesenian yang tidak boleh diabaikan apalagi

dinafikan semata-mata karena peran publik yang makin menguat. Artinya, dalam kondisi seperti apapun, negara tetap dituntut selalu hadir dan memberi perhatian kepada kesenian melalui politik kesenian yang lebih jelas.

Untuk itu, dalam kerangka makin kuatnya keterlibatan publik mengelola perubahan di satu sisi serta tetap adanya jaminan kepastian kehadiran negara bagi kehidupan kesenian, pemerintah pertama-tama wajib melakukan reposisi fungsi sehingga terjadi intensitas partisipasi publik yang lebih luas. Reposisi ini harus dijalankan melalui sebuah desain kebijakan, peran kelembagaan dan politik anggaran yang berpihak, serta peningkatan kompetensi birokrasi kesenian dan pengelolaan berbagai aktivitas berkesenian secara menyeluruh.

Di sini, kalimat kuncinya adalah: Politik kesenian seperti apa sebenarnya yang perlu diambil dan dijalankan oleh negara dalam kaitan dengan terjadinya berbagai perubahan itu baik untuk kepentingan masa kini maupun masa datang?

Kesenian, Negara, dan Tantangan di Tingkat Global

Sudah barang tentu, perubahan tidak hanya terjadi dan terkait dengan berbagai aspek yang sifatnya internal (lokal-nasional). Bahkan, banyak di antara perubahan itu yang terjadi karena faktor eksternal baik dalam konteks pengaruhnya terhadap aspek internal maupun pada tataran posisi Indonesia dalam lanskap pergaulan internasional, utamanya yang terkait dengan fenomena perubahan politik dan isu-isu ekonomi di tingkat global.

Untuk itu, melalui subtema ini pertama-tama akan coba ditelisik besaran potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia di tengah persaingan investasi kultural di antara berbagai negara serta konstruksi wacana pasar bagi produk-produk budaya. Pembacaan dan pemetaan menjadi kata kunci dalam penelidikan ini. Selanjutnya, suatu evaluasi yang diikuti prognosa perihal apa yang telah dan harus dilakukan oleh politik kesenian Indonesia demi menyiapkan strategi bagi investasi kultural yang sistematis, kompetitif, dan berkesinambungan.

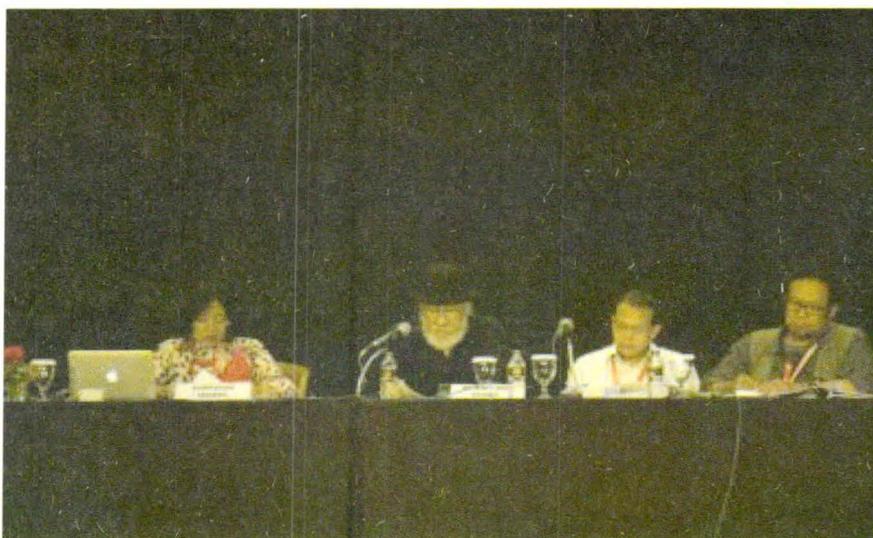
Dengan demikian, pembahasan dalam subtema ini menjadi lebih dari sekadar mencari jawaban atas pertanyaan apa dan siapa dalam konteks perebutan pasar bagi berbagai produk kebudayaan yang mungkin ditawarkan Indonesia. Melainkan, bagaimana Indonesia seyogyanya berperan dalam menjawab tantangan dan mengambil posisi atas tantangan

di tingkat global itu.

Pendidikan Seni, Media, dan Kreativitas

Tentu saja, di samping berbagai perubahan yang terkait dengan berbagai faktor dan fenomena eksternal, berbagai perubahan juga terjadi di tataran internal praktik-praktik kesenian –baik itu yang terjadi sebagai konsekuensi lagi dari pengaruh perubahan dari luar itu maupun karena memang adanya tuntutan kebutuhan yang kuat dari kesenian itu sendiri. Perluasan medium ekspresi seni dan perkembangan teknologi media –baik media teknologi digital maupun media sosial – misalnya, telah membuka banyak kemungkinan baru bagi eksplorasi kreatif yang kerap tak terduga, dan menawarkan pemikiran berikutnya ke dalam wacana epistemologi seni.

Fenomena perubahan dalam praktik-praktik seni ini tentu saja membawa konsekuensi ke bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan praktik-praktik seni dan berkesenian, misalnya pendidikan seni. Salah satunya adalah bagaimana paradigma pendidikan seni mampu menjawabnya, terutama mengaktualisasikannya ke dalam materi dan metode ajar, baik dalam konteks pendidikan formal (sekolah) atau komunitas dan sanggar. Itu artinya, pendidikan seni baik dalam pengertian formal maupun normal harus betul-betul memiliki pemahaman yang paripurna dalam memberi pengertian terhadap istilah media (dalam artian medium) dan perubahan dikaitkan dengan makna kreativitas yang



Jim Supangkat menyampaikan presentasi sebagai pembicara dalam Kongres Kesenian Indonesia III



Suasana sidang pleno Kongres Kesenian Indonesia III

sesungguhnya.

Masalahnya, seni dan pendidikan seni itu sendiri bukanlah entitas yang otonom yang tidak terkait dengan bidang. Bahkan, sejak lama, ada semacam kesadaran sekaligus kebutuhan bagi dunia seni untuk selalu berkelindan dengan sektor lain, khususnya media massa. Sejarah memperlihatkan, suatu pergaulan yang intens antara media massa dengan kesenian dan kegiatan berkesenian, memainkan peran yang besar dalam mengembangkan kreativitas seni. Tapi, agaknya, perkembangan mutakhir memperlihatkan, peran media massa itu makin surut. Di sisi lain, kehadiran media sosial yang sedemikian masif dan dahsyat dalam satu dekade terakhir, tentu saja tak bisa diremehkan pengaruhnya terhadap perkembangan kreativitas itu sendiri.

Dalam hal ini, sekurang-kurangnya kita bisa melihat, peran dan fungsi media massa (konvensional) untuk menuliskan sejarah bagi orang lain, telah diambil oleh media sosial di mana si pemilik sejarah bisa menuliskan sejarahnya sendiri. Artinya, ada kecenderungan orang kemudian tak lagi merasa membutuhkan media (massa) untuk aktualisasinya. Hal ini pada gilirannya berdampak pada perubahan perilaku media menjadi semakin market oriented yang sungguh-sungguh kapitalistik sembari melupakan peran idealnya sebagai “pembawa kecerdasan”.

Seni Dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian

Dalam posisinya sebagai entitas yang tidak otonom, kita pun menyaksikan bagaimana berbagai fenomena perubahan yang terjadi itu

pada kenyataannya juga telah membawa realitas kesenian ke dalam perkembangan bahwa ranah kesenian bukan lagi bagian yang terisolasi dari dinamika disiplin keilmuan yang berkembang melintasi batas-batas disiplin primordialnya. Karenanya, terdapat keperluan baru bagi dunia seni untuk dapat memperluas horison pengalamannya dengan memanfaatkan fungsi dan pertumbuhan disiplin ilmu lain yang relevan sebagai alat penelaahan bagi fenomena kesenian dan praktik seni itu sendiri.

Artinya, dunia seni masa kini harus bersedia meletakkan dirinya di hadapan realitas interdisipliner. Ia tidak lagi cukup dipahami dalam konteks seni itu sendiri. Tapi, sangat mungkin, misalnya dilihat sebagai gejala sosial, politik, bahkan antropologis, sehingga telaah terhadapnya harus pula dilakukan tidak semata-mata dengan menggunakan pendekatan seni, tapi juga sosial, politik, atau antropologis.

Kebutuhan terhadap situasi ini menjadi semakin penting dikaitkan dengan berbagai perkembangan terkini dalam arus perubahan yang terjadi itu. Sebab, dengan berbagai kompleksitas yang berkembang karena perubahan tersebut, sesungguhnya juga berkembang suatu kondisi yang saling terkait atau tergantung antara satu bidang dengan bidang lain yang terkadang bahkan bersifat permanen.

Format Persidangan

Lazimnya sebuah kongres, KKI III-2015 adalah sebuah kegiatan yang



Suasana sidang komite Kongres Kesenian Indonesia III

diisi dengan serangkaian persidangan. Ada 4 (empat) jenis persidangan, yaitu Sidang Pleno dan Sidang Komisi, Sidang Komite, dan Sidang Tim Perumus.

Sidang Pleno

Sidang Pleno adalah sidang atau rapat yang dihadiri oleh seluruh peserta kongres secara lengkap. Semua yang tercatat hadir sebagai peserta kongres, wajib mengikuti sidang ini. Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Kongres. Sidang Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam kongres. Keputusan-keputusan itu sendiri meliputi: 1) Pengesahan Agenda KKI III-2015; 2) Pengesahan Tata Tertib KKI III-2015; 3) Penjelasan Panitia Pengarah tentang Materi Kongres; 4) Pemilihan Pimpinan Kongres; 5) Pembentukan Komisi dan Komite; 6) Pemilihan dan Penetapan Tim Perumus; 7) Penetapan Keputusan Kongres

Selain itu, Sidang Pleno juga diselenggarakan untuk mendengarkan paparan Pembicara Kunci (*Keynote Speaker*) dan Pembicara Utama. Sidang Komisi adalah sidang atau rapat yang dihadiri oleh peserta berdasarkan pengelompokan yang dilakukan sesuai jumlah komisi yang ada. Semua yang tercatat dan hadir sebagai peserta kongres, wajib masuk dalam satu komisi dan mengikuti sidang komisi di mana yang bersangkutan tergabung.

Sidang Komisi

Sidang komisi dilakukan untuk membahas dan mempertajam berbagai permasalahan yang muncul dan dirumuskan dalam sidang komite yang diselenggarakan sebelumnya. Jadi, Sidang Komisi bisa dikatakan semacam lanjutan dari sidang komite yang khusus membahas permasalahan yang sebelumnya dibahas di tingkat komite subtema komisi dalam perspektif bidang seni. Targetnya adalah merumuskan rekomendasi hasil-hasil konklusif komisi yang akan disampaikan di dalam sidang pleno untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Keputusan Kongres.

Pembagian komisi sendiri dilakukan dengan mengacu kepada subtema yang digunakan dalam kongres. Dengan demikian, akan terdapat 4 (empat) komisi dalam KKI III-2015, yaitu: Komisi A tentang "Politik Kesenian dalam Perspektif Negara"; Komisi B tentang "Kesenian, Negara dan Tantangan di tingkat Global"; Komisi C tentang "Pendidikan Seni, Media dan Kreativitas"; dan Komisi D tentang "Seni Dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian".

Sidang Komisi dipimpin oleh Koordinator Komisi yang bertindak



Suasana sidang komisi Kongres Kesenian Indonesia III

sebagai Moderator. Koordinator Komisi ditunjuk oleh Penyelenggara atau Panitia Pengarah. Sementara penetapan seorang peserta dalam suatu komisi, dilakukan oleh Panitia dengan mempertimbangkan usulan/ permintaan peserta serta keseimbangan antar komisi.

Sidang Komite

Sidang komite adalah sidang atau rapat yang diselenggarakan berdasarkan bidang seni. Dalam hal ini, semua peserta kongres akan dibagi dalam 7 (tujuh) komite sesuai latar belakang dan atau minat bidang seni peserta yang bersangkutan. Seluruh peserta wajib masuk dalam salah satu komite dan mengikuti sidang komite tersebut. Adapun ke 7 (tujuh) komite itu adalah: Komite Sastra; Komite Seni Rupa; Komite Teater; Komite Tari; Komite Musik; Komite Film/Sinematografi; dan Komite Lintas Media.

Sidang komite diselenggarakan untuk membahas, mengidentifikasi, sekaligus melakukan pembacaan atas berbagai persoalan kesenian dan kegiatan berkesenian terkait dengan tema dan subtema kongres dalam lingkup perspektif bidang seni komite bersangkutan. Hasilnya berupa rumusan permasalahan terkait tema dan subtema yang ditetapkan sesuai bidang seninya untuk kemudian dibahas dan dipertajam lebih lanjut bersama permasalahan dari bidang seni lain di tingkat komisi sesuai subtema komisi bersangkutan. Jadi, dalam setiap Sidang Komite akan ada pembahasan menyangkut 4 subtema yang ada.

Sidang komite dipimpin Koordinator Komite yang bertindak sebagai moderator. Koordinator Komite ditunjuk oleh Penyelenggara atau Panitia Pengarah.

Sidang Tim Perumus

Sidang Tim Perumus adalah sidang atau rapat bersifat terbatas yang hanya diikuti oleh Tim Perumus yang ditunjuk/ ditetapkan dalam kongres melalui keputusan Sidang Pleno. Sidang Perumus dipimpin oleh Ketua Tim Perumus, dan diselenggarakan untuk menselaraskan dan memperbaiki aspek redaksional rumusan keputusan kongres berdasarkan keputusan/ rumusan yang berasal dari tiap-tiap komisi.

Alur Persidangan

Berdasarkan format persidangan tersebut di atas, maka alur persidangan dalam KKI III-2015 dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama-tama adalah Sidang Pleno yang diselenggarakan untuk Pengesahan Agenda KKI III-2015, Pengesahan Tata Tertib KKI III-2015, Penjelasan Panitia Pengarah tentang Materi Kongres, Pemilihan Pimpinan Kongres, Pembentukan Komisi dan Komite, Pemilihan dan Penetapan Tim Perumus, serta untuk mendengarkan paparan Pembicara Kunci (Keynote Speaker) dan Pembicara Utama. Sidang Pleno ini kemudian diikuti dengan Sidang Komite yang



Penyerahan rekomendasi kongres dari Pimpinan Kongres kepada Dirjen Kebudayaan, Kacung Marijan

terdiri atas 6 Komite dan berlangsung secara paralel. Dari Sidang Komite berlanjut ke Sidang Komisi yang terdiri atas 4 Komisi dan juga berlangsung secara paralel. Usai Sidang Komisi, kembali masuk ke Sidang Pleno dengan agenda penyampaian keputusan dari tiap-tiap komisi berupa rumusan keputusan kongres. Rumusan tiap-tiap komisi yang disampaikan di Sidang Pleno tersebut, lantas diserahkan kepada Tim Perumus untuk diselaraskan dalam Sidang Tim Perumus menjadi draf Keputusan Akhir kongres. Hasil Sidang Tim Perumus ini lantas dibawa kembali ke Sidang Pleno untuk ditetapkan sebagai Keputusan Kongres.

Peserta

Yang dimaksud sebagai Peserta dalam Kongres Kesenian Indonesia III-2015 adalah mereka yang diundang oleh penyelenggara untuk menghadiri serangkaian kegiatan baik persidangan maupun non persidangan yang diselenggarakan dalam KKI III-2015. Terdapat 2 (dua) kategori peserta, yakni Peserta Biasa dan Peserta Peninjau.

Peserta Biasa merupakan peserta yang diundang oleh Penyelenggara berdasarkan kriteria dan penetapan yang dilakukan Panitia Pengarah. Ada dua mekanisme penetapan sebagai peserta biasa. Pertama, melalui penetapan yang dilakukan langsung oleh Panitia Pengarah berdasarkan berbagai masukan dan informasi yang dimiliki pengarah. Kedua, berdasarkan permohonan dari peserta yang bersangkutan yang kemudian diteliti dan ditetapkan oleh Panitia Pengarah. Peserta Biasa diberi hak suara dan bicara, serta wajib mengikuti semua rangkaian persidangan yang diselenggarakan dalam KKI III-2015 dan harus tergabung di dalam satu Komite maupun Komite yang ada.

Peserta Peninjau adalah seseorang yang mengajukan diri untuk diundang oleh Penyelenggara sebagai peserta. Setiap orang diberi kesempatan menjadi Peserta Peninjau dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan terlebih dahulu dan disetujui oleh Panitia yang ditandai dengan adanya undangan menjadi Peserta Peninjau yang diterima yang bersangkutan.

Peserta Peninjau hanya memiliki hak berbicara tapi tidak memiliki hak suara, diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian persidangan namun tidak wajib harus menjadi salah satu anggota Komite maupun Komisi.

Pembicara

Selain peserta, KKI III-2015 juga menghadirkan pembicara yang

sekaligus berstatus sebagai Peserta Biasa. Ada dua kategori pembicara, yakni Pembicara Kunci (*Keynote Speaker*) dan Pembicara Utama. Pembicara Kunci adalah seseorang yang diminta secara khusus oleh panitia untuk menyampaikan paparan terkait tema utama KKI III-2015. Pembicara Kunci tampil di depan seluruh peserta dalam forum Sidang Pleno. Direncanakan, Pembicara Kunci dalam KKI III-2015 adalah Presiden Republik Indonesia atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan Pembicara Utama adalah seseorang yang diminta secara khusus oleh panitia untuk tampil mengemukakan pandangan, gagasan, dan pemikirannya secara mendalam dan komprehensif berdasarkan subtema kongres. Pembicara Utama berbicara di depan seluruh peserta kongres dalam forum Sidang Pleno. Pandangan, gagasan, dan pemikiran yang disampaikan bersifat *overview*. Tiap-tiap subtema menampilkan 2 (dua) orang Pembicara. Dengan demikian, dalam KKI III-2015, seluruhnya akan terdapat 8 (delapan) orang pembicara.

Fasilitator

Fasilitator adalah peserta yang diminta secara khusus oleh Penyelenggara untuk menggairahkan, menghidupkan, serta mengarahkan diskusi dan atau pembahasan berbagai persoalan pada sidang komite maupun komisi terkait subtema dalam kongres. Fungsi fasilitator terutama untuk menjaga dan menjadikan diskusi atau pembahasan dalam sidang komite maupun komisi berlangsung lebih efektif, efisien, serta terarah sesuai subtema yang dibicarakan, sehingga persidangan senantiasa berlangsung secara kondusif.

Setiap komite memiliki 4 (empat) orang fasilitator sesuai jumlah subtema yang ada. Fasilitator komite selanjutnya akan bertindak sebagai fasilitator pada sidang komisi. Dengan demikian, pada sidang komisi akan terdapat 7 (tujuh) fasilitator bersifat lintas bidang yang berasal dari 7 (tujuh) komite.

Ringkasan Makalah Kongres Kesenian Indonesia III

Politik Kesenian Dalam Perspektif Negara

Oleh Hilmar Farid, PhD

Sudah ada dua Kongres Kesenian di Indonesia sejauh ini yakni pada 1995 dan pada 2005. Dari dua kongres ini, rekomendasi atau mandat darinya belum benar-benar mampu dijalani. Contoh yang paling gampang adalah harusnya kongres tersebut diadakan 5 tahun sekali. Nyatanya, kongres tersebut baru diadakan 10 tahun kemudian. Dari kedua kongres itu, rekomendasinya terkait negara dan kesenian atau politik kesenian sudah sangatlah jelas. Namun, sering kali hal tersebut diulang-ulangi lagi. Perlu kiranya para peserta kongres menerima hasil dari kedua kongres tersebut sehingga Kongres Kesenian Indonesia III ini tidak mengulangi lagi apa-apa yang sudah dibahas di Kongres Kesenian Indonesia I dan II.

Perihal bahwa rekomendasi yang baik dari dua kongres terdahulu tidak dijalani sepenuhnya oleh pihak-pihak yang berwenang. Padahal, di dalam program-program pemerintah—dalam hal ini Ditjen Kebudayaan, khususnya Direktorat Kesenian—serta di dalam *Rencana Kerja Pemerintah 2016* bisa ditemukan banyak sekali kegiatan-kegiatan atau program-program menyangkut kesenian. Bisa dikatakan, kita tidak kekurangan ide dan tindakan. Namun demikian, yang perlu diperiksa adalah apakah ide dan tindakan itu *nyambung* satu dengan yang lainnya? Pertanyaan berikutnya adalah apakah benar instansi pemerintahan yang terkait dengan kesenian benar-benar menjalankan rekomendasi dari kongres-kongres kesenian ini? Lebih jauh, apakah berbagai kegiatan dan tindakan itu terkait satu sama lain dan menjadi bagian dari sesuatu (strategi) yang lebih besar? Ataukah hanya merupakan himpunan kegiatan atau proyek yang padam segera setelah dilaksanakan (atau dalam beberapa kasus, bahkan sebelum selesai dilaksanakan)?

Akar dari masalah-masalah yang terjadi ini bukan hanya karena watak dan kultur birokrasi (saja), tapi juga—atau mungkin terutama—karena kedua kongres dan acara sejenis itu tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam tata kuasa di negeri ini. Sejauh ini, tidak ada kementerian atau lembaga yang dapat menindaklanjuti berbagai rekomendasi penting tersebut karena tidak punya kekuatan politik dan sumberdaya cukup. Bagaimana mungkin misalnya, Direktur Seni dan Film di Ditjen Kebudayaan memastikan dukungan APBN, APBD, dan

PKBL (BUMN) dan CSR (swasta) untuk kesenian, seperti diamanatkan Kongres 2005? Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam kongres ini harus dipikirkan mekanisme kelembagaan yang akan menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dari kongres ini. Masalahnya kemudian, mekanisme kelembagaan apa yang diperlukan?

Jawaban atas pertanyaan itu sangat terkait dengan program pemerintah secara umum dan aransemen kelembagaan yang ada di bidang kesenian. Setelah Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 lalu, program politik Jokowi-JK yang berjudul *Jalan Perubahan* meningkat statusnya menjadi amanat rakyat untuk dilaksanakan. Program politik itu menetapkan visi pemerintah untuk lima tahun ke depan adalah “membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Visi ini dijabarkan menjadi 31 agenda pokok dengan 9 agenda prioritas yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Dalam kaitannya dengan kesenian, program itu secara eksplisit menyebut; (1) pembentukan lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, (2) pembangunan pusat-pusat kebudayaan, kesenian, dan museum.

Ada beberapa butir lain dari dokumen *Jalan Perubahan* itu yang penting diperhatikan dalam kaitannya dengan kesenian. *Pertama*, soal negara hadir untuk menjamin keamanan warga terutama terhadap sikap sektarian yang intoleran. *Kedua*, soal membangun Indonesia dari pinggiran, khususnya daerah dan desa. Dalam kaitannya dengan kesenian, artinya lembaga kebudayaan atau pusat kesenian, harus diarahkan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif baik dari segi sosial maupun geografis. *Ketiga*, soal tempat kesenian di dalam peningkatan kualitas hidup. Kesenian selama ini dianggap sebagai kemewahan dan bukan elemen dasar dari kehidupan. Perlu ada reorientasi yang tercermin, antara lain, di dalam sistem pendidikan. *Keempat*, penguatan modal sosial, terutama kepedulian, gotong royong, dan kepercayaan sosial. Semua ini adalah arah kebijakan yang strategis sifatnya.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana menjaga supaya rekomendasi-rekomendasi yang baik dari Kongres ini tidak menguap. Untuk itu perlu kiranya mempertimbangkan nomenklatur di dalam birokrasi yang berkaitan dengan kesenian. Untuk bisa sampai ke situ, kongres ini perlu benar-benar menemukan apa yang sesungguhnya, paling krusial, masalah yang dihadapi dunia kesenian kita. Tentu saja banyak hal yang kita inginkan untuk memperbaiki dunia kesenian kita. Tetapi hal itu bisa terlaksana apabila bisa ditempatkan di dalam sebuah kerangka sistem yang jelas. Lebih lanjut, kita perlu memahami kerangka sistem itu, unsur-unsur apa saja yang membentuknya, serta bagaimana saling hubung di

antara unsur-unsur itu. Pendek kata, kesenian perlu dilihat sebagai sebuah ekosistem.

Titik berangkat dari kongres ini adalah kesenian yang hidup di dalam sebuah ruang sosial. Ada kondisi di luar karya itu sendiri yang memungkinkan adanya kesenian. Untuk mudahnya, kita bagi saja menjadi pengetahuan dan fasilitas. Paduan di antara keduanya memungkinkan orang mencipta sebuah karya, menikmati karya yang diciptakan, mengkomunikasikannya kepada orang lain, sehingga menjadi satu siklus kesenian atau *art cycle*. Dampak dari keseluruhan siklus ini bisa bersifat individual (kita berbahagia karena mengalami peristiwa seni yang indah) dan bisa juga bersifat kolektif (masyarakat menjadi lebih toleran terhadap perbedaan karena sering terpapar pada karya dan peristiwa kesenian).

Di tingkat yang paling awal, ada pengetahuan dan fasilitas. Pengetahuan dapat dibentuk melalui lembaga pendidikan formal maupun melalui sanggar atau dengan berguru kepada seorang ahli/empu. Keseluruhan hubungannya cukup kompleks dan membentuk sebuah sub-sistem tersendiri. Demikian pula fasilitas atau infrastruktur kesenian yang mencakup *art venue*, organisasi kesenian, lembaga dan jaringan lembaga, dan kebijakan publik mengenai kesenian. Keseluruhan hubungan berbagai unsur ini pun membentuk sebuah sub-sistem yang memiliki daya hidup dan permasalahannya sendiri. Pertanyaannya kemudian, apakah aransemen seperti ini mendukung siklus kesenian yang mencakup kreasi, produksi, distribusi, dan konsumsi? Apakah lembaga yang bertanggungjawab mengurus *art venue* sudah memadai? Apakah didukung dengan anggaran cukup? Berapa jumlah sekolah seni sekarang? Bagaimana distribusinya secara geografis agar bisa 'membangun Indonesia dari pinggiran'?

Pekerjaan besar di sini adalah menandai kekosongan di tingkat aturan, kelembagaan dan juga anggaran. Peran negara lebih jauh adalah berfokus kepada apa yang tidak mungkin disediakan oleh publik sendiri. Seperti misalnya sekolah seni. Begitu pula halnya dengan *art venue*. Negara hadir menyediakan *art venue* dengan dukungan dana yang cukup. Tingkat selanjutnya adalah siklus kreasi-produksi-distribusi-konsumsi kesenian yang masing-masing bagiannya bisa dibaca sebagai sub-sistem tersendiri. Kreasi misalnya, walau bersifat individual tapi juga punya dimensi sosial. Distribusi dan konsumsi kesenian juga merupakan proses sosial karena menyangkut seleksi karya yang akan ditampilkan, promosi dan komunikasi, serta partisipasi publik. Kehadiran negara di tingkat ini kerap mengundang perdebatan. Di satu sisi kehadiran negara dirasakan perlu sebagai fasilitator, tapi di sisi lain kehadiran negara dicurigai akan melakukan intervensi.

Dalam prakteknya, sekarang ada beberapa K/L (Kementrian-Lembaga) yang

mengurus siklus kesenian ini i—walau parsial dan dengan fasilitas sangat terbatas— seperti Kemendikbud, Kemenpar, dan juga Badan Ekonomi Kreatif. Melihat skala dan jangkauannya selama ini, belum lagi kecurigaan adanya intervensi, aransemen kelembagaan ini mungkin tidak lagi efektif. Kita perlu mekanisme kelembagaan independen yang punya kekuatan dan sumberdaya cukup, semacam lembaga atau dewan kesenian di tingkat nasional, sementara K/L lebih bertindak sebagai fasilitator. Khususnya dalam interaksi dengan seniman dan tenaga kreatif, seleksi karya yang hendak ditampilkan, dan berbagai dimensi 'intelektual' dari proses ini sebaiknya diserahkan kepada mekanisme kelembagaan yang independen tersebut. Mengingat kedudukan dan fungsinya untuk melakukan koordinasi lintas-K/L, maka kewenangannya perlu diperkuat oleh setidaknya Peraturan Presiden. Di samping itu, perlu dibentuk badan independen lain yang mengurus segi finansial dari siklus kesenian ini agar tidak bergantung pada anggaran negara.

Tingkat yang terakhir menyangkut manfaat dan dampak dari siklus kesenian terhadap individu maupun masyarakat yang lebih luas. Ukuran yang dipakai di sini adalah peningkatan kualitas hidup seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Kehadiran negara di tingkat ini tentu sangat diperlukan dan sudah melibatkan berbagai unsur dan cabang birokrasi yang tidak terkait langsung dengan kesenian, seperti misalnya Dirjen Pajak, Kemendag, Kemenperin, Kemenhan, dan lainnya. Sudah ada sejumlah peraturan khususnya untuk menarik manfaat ekonomi dari siklus kesenian. Belum ada peraturan yang memungkinkan kontribusi pelaku ekonomi secara langsung kepada siklus kesenian seperti misalnya aturan *tax-deductible donations*, yang mengkonversi pajak menjadi sumbangan bagi kesenian. Untuk manfaat yang *intangibile* diperlukan institusi kritik yang solid. Negara bisa berperan dengan menerbitkan (kembali) jurnal sastra dan seni yang sangat marak pada 1950an tapi padam sama sekali hari ini. Media elektronik juga perlu menjadi bagian dari ekosistem ini dengan memperbesar ruang untuk kritik dan kajian yang sangat diperlukan.

Gambaran mengenai ekosistem kesenian ini masih perlu dilengkapi dengan rincian aktor dan lembaga serta perangkat aturan hukum yang membentuk hubungan di antaranya. Diperlukan berbagai keahlian; mulai dari kajian hukum, manajemen dan politik, sampai pada ekonomi dan keuangan, di samping tentunya berbagai bidang kesenian dan kebudayaan. Untuk memastikan bahwa berbagai temuan dan hasil kajian bermuara pada tindakan, diperlukan keterlibatan dari berbagai K/L terkait di tingkat pusat maupun daerah, DPR/D, dewan kesenian dan organisasi kesenian, serta tentunya seniman sendiri. Kesepakatan dan kerjasama yang terbentuk di dalam prosesnya akan menjadi

jalan untuk memecahkan tumpang-tindih kewenangan dan kelembagaan yang ada selama ini. Saya berharap kongres ini menjadi langkah penting menuju ke arah itu.

Pelbagai Dunia, di Dalam dan di Luar, Sebuah Pamflet

Oleh Nirwan Dewanto

Forum-Kongres yang kita hadiri untuk tiga hari ke depan mengandung ironi yang begitu besar. Dalam hubungannya dengan produksi seni, penyebaran hasil-hasil seni, pemeliharaan sumber-sumber kreatif, pembinaan masyarakat pemirsa, dan perhubungan internasional antar-pekerja seni, serta segala hal yang bertali-temali dengan itu, sudah lama kita tak melihat peran Negara. Pada hematsaya, kesenian kita dalam tiga dasawarsa terakhir ini adalah cerminan kebebasan dan segala cadangan kreatif yang ada di luar ranah Negara. Dengan demikian, kita bertanya-tanya, mungkinkah suara-suara yang tercetus dari forum ini sampai ke telinga Negara—dan, kemudian, apakah Negara sanggup menggerakkan tubuh dan jiwanya untuk menjadi bagian dari kehidupan kesenian mutakhir.

Saya tekankan “kehidupan kesenian mutakhir”. Sebab, visi kebudayaan dari pihak Negara—jika visi semacam itu ada; dan tentu saja “ada” bukan hanya sebagai cetak biru, tetapi juga sebagai cermin dari sikap umum masyarakat “pascakolonial”—adalah “kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah”.

Tapi siapakah Negara itu sebenarnya? Benarkah orientalisme baru—orientalisme untuk diri sendiri itu—yang menempel pada “kepribadian nasional” adalah proyek negara yang sadar sesadar-sadarnya? Tampaknya tidak. Saya cenderung mengatakan bahwa “fundamentalisme Timur” adalah ilusi tentang “berdiri di atas kakisendiri” dalam menghadapi tekanan global, sebuah “politik identitas” yang menjadi substitusi bagi begitu banyaknya kelemahan kita dalam memelihara dan mengembangkan berbagai institusi budaya di dalam negeri.

Sementara kerja memperbaiki, merawat, dan membangun berbagai institusi yang mampu terlibat secara organik dalam kreativitas dan penyebaran kesenian mutakhir adalah kerja maha besar yang tak punya batas waktu, mungkin kita bisa melihat Negara melalui aktor-aktornya, pemain-pemain tangguh yang bisa berimprovisasi di luar skenario Negara. Saya sebut “improvisasi” karena mereka itu, dengan segenap bakat alam dan wawasan pencerahan yang mereka miliki, sanggup melawan arus dan menangkap kesempatan sejarah untuk berbuat besar. Ali Sadikin (Gubernur Jakarta Raya; almarhum), Edi Sedyawati (Direktur

Jenderal Kebudayaan), Murtidjono (Kepala Taman Budaya Surakarta; almarhum), misalnya—semuanya adalah “orang pemerintah”—pada masa masing-masing adalah sedikit dari para aktor penting yang pernah kita miliki. Ali Sadikin mendirikan Taman Ismail Marzuki di Jakarta, situs terpenting yang bisa menampilkan hasil eksperimentasi seni mutakhir di Indonesia sejak 1968 sampai pertengahan 1980-an (dan bersamaan dengan itu, ia juga tokoh utama di balik pendirian Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta/Institut Kesenian Jakarta, Sinematek Indonesia, Balai Seni Rupa dan Keramik, Lembaga Bantuan Hukum); Edi Sedyawati mendirikan *Art Summit*, forum tiga tahunan bagi seni pertunjukan internasional, dengan masa cemerlang sejak 1995 sampai awal 2000-an; Murtidjono menjadikan Taman Budaya Surakarta sebagai situs penampilan terpenting—di luar Jakarta—bagi kesenian baru di Indonesia sepanjang 1980-1990-an.

Pada masa kejayaan masing-masing, Taman Ismail Marzuki, *Art Summit*, dan Taman Budaya Surakarta menjalankan tiga hal yang kait-berkaitan: mendorong eksperimentasi seni, membina penonton seni, dan mengembangkan jejaring seni nasional/internasional. Dan persis di titikinilah saya mau mengatakan bahwa apa yang bernama tantangan globalitu sejak dulu berada di dalam tubuh kesenian Indonesia, yaitu bahwakreativitas seni dan penyebaran seni selalu mengandung wawasantranskultural dan internasional. *Art Summit* membawa Sankai Juku, Kazuo Ohno, dan Henrietta Horn ke Indonesia, dan menyandingkan mereka dengan hasil-hasil seni pertunjukan kita yang terbaik. Dan bersamaan dengan itu, penonton kita pun memperbaharui selera dan wawasan—dan demikianlah kita percaya bahwa eksperimentasi seni adalah juga cara untuk mengajak khalayak meningkatkan diri.

Aktor-aktor Negara yang saya sebut di atas adalah anomali yang sangat langka—dan saya kira belum ada lagi di zaman Reformasisekarang ini. Rupa-rupanya, birokrasi Negara kita begitu kaku sehingga tidak bisa mengadopsi kebajikan dan gagasan yang tumbuh dari dalam, oleh eksponen-eksponennya sendiri. Maka makin besarlah ironi yang ada di Forum ini: apakah telinga Negara sanggup mendengar suara-suara dari luar, suara-suara kita, yang hendak mendorong kebajikan jadi kebijakan.

Art Summit yang telah kita perbicangkan sedikit-banyak sudah menetapkan asas-asas internasionalisme baru yaitu, antara lain, bagaimana pihak dalam negeri merumuskan kembali kriteria seni “universal” dengan meninggalkan lingkup “kebudayaan nasional” yang kaku dan mempersandingkan-mempertandingkan diri dengan karya-karya dari bangsa-bangsa lain. Secara lebih radikal lagi, internasionalisme baru adalah tumbuhnya berbagai pusat budayabar di

“dunia ketiga” untuk menyaingi pusat-pusat lama di “duniapertama”. Dalam internasionalisme baru, seni modern di “dunia ketiga” berjuang—atau diperjuangkan—menjadi “senikontemporer” yang bersifat global, yang tidak lagi universal namun transcultural.

ArtJog, sebuah *art fair* tahunan di Yogyakarta, misalnya, sangat berhasil bukan hanya dalam menjaring karya-karya nasional dan internasional berdasarkan kekhasan tema yang diusungnya, tetapi juga menjadikan dirinya peristiwa yang dinanti-nantikan oleh para pemirsa Yogyakarta maupun Indonesia. Biennale Jakarta yang sekarang sedang berlangsung juga bermain di kancah internasionalisme baru. Setelah bertahun-tahun berada dalam situasi hidup segan mati tak mau, Biennale Jakarta kali ini tampaknya mencoba mengadopsi salah satu prinsip moda produksi yang dikerjakan oleh berbagai biennale penting di dunia, yaitu kurasi yang dikerjakan oleh seorang kurator “bintang” internasional. Dalam hal ini Charles Esche. Menggunakan seorang kurator-bintang tentu saja adalah bagian dari usaha untuk menempatkan Biennale Jakarta di peta dunia.

Dunia yang kita maksud itu tidaklah akan melenyapkan yang nasional maupun yang lokal; bahkan sebaliknya. Bahkan dunia itu mesti kita letakkan di antara Pusat dan Daerah: sebab wawasan internasional bukanlah cakrawala *pasca-nasional*. Kita harus percaya bahwa internasionalisme-baru akan menyingkirkan berbagai penghambat integrasi nasional. Misalnya saja kompleksitas rendah diri Daerah terhadap Pusat atau keangkuhan Pusat terhadap Daerah. Dan itulah yang terjadi dengan berbagai peristiwa seni yang kita percontohkan di atas. Khazanah seni rupa Yogyakarta pada dua dasawarsa terakhir, misalnya, berlingkup internasional: dengan itulah ia leluasa mengatasi Pusat Nasional seraya memperbaharui kualitas nasional yang tidak dikerjakan oleh Negara.

Di titik ini saya ingin mengatakan bahwa wawasan internasional akan membuat kita mengutamakan kembali kontinuitas dalam sejarah kebudayaan kita, yaitu kontinuitas antara warisan-warisan Nusantara, kreativitas hari ini, dan warisan-warisan bangsa-bangsa lain. Terlalu banyak mulut yang memuja warisan budaya leluhur: sikap irasional yang membiarkan sang warisan teronggok di sudut dan akhirnya terkubur menjadi milik masa silam. Sementara si empunya mulut ternyata menjadi sekadar pemeluk kebudayaan massa. Sangat ironis bahwa nasionalisme kebudayaan justru menghasilkan diskontinuitas yang memandulkan warisan-warisan Nusantara ke dalam berbagai dongeng berbau kemenyan.

Secara harafiah, beginilah jadinya: bila anda mau membantu kesenian dalam

jangka panjang, anda *tidak melulu* perlu memberikan dana produksi kepada kaum seniman. Memelihara dan menegakkan museum arkeologi, museum etnografi, museum seni rupa modern, museum-museum yang lain, itu lebih penting. Sebab, inilah tugas pendidikan (dan) kebudayaan yang akan melahirkan bakal-bakal seniman, ilmuwan dan cendekiawan cemerlang. Mendukung festival-festival internasional di dalam negeri itu juga sangat penting. Sebab, jalan inilah yang akan memperbesar lingkaran pemirsa berkualitas tinggi yang pada gilirannya akan merangsang ciptaan seni yang lebih menantang lagi. Menegakkan taman-taman budaya di berbagai daerah dan mendudukkan “orang-orang gila” seperti Murtidjono di pucuk pengelolaan, itu harus dilakukan. Sebab, Indonesia bukan hanya Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Sebab, hanya “kegilaan” yang bisa membuat Negara hadir dalam kerja kesenian. Dan seterusnya, dan sebagainya. Semoga jelaslah di titik ini, bahwa melindungi sumber-sumber kreatif, membina penonton seni, dan internasionalisasi seni itu adalah satu paket pekerjaan mahabesar.

Tetapi satu paket pekerjaan mahabesar itu masih terlalu ringan jika anda membanding-banding diri dengan negara-negara yang sudah ada di depan sana. Bila anda melihat Korea Selatan, misalnya, maka anda akan tahu bahwa ada hubungan erat antara ekspor K-Pop dan pemain sepakbola Korea dengan ekspor sastra modern Korea, antara kreativitas sastra dalam negeri dengan pemantapan Pusat Penerjemahan Sastra Korea, antara ekspor sinema mereka dengan penyelenggaraan Festival Film Busan, antara penerimaan seniman-seniman rupa mereka oleh Dunia dengan penyelenggaraan Biennale Gwangju dan kekokohan museum-museum seni mereka, antara ekspor kesenian mereka dengan tingginya mutu pendidikan seni mereka dan dengan lajunya industrialisasi mereka. Singkatnya, ledakan berbagai sektor seni dan industri kreatif itu saling bertalian sebagai hasil kerja keras berdasarkan “politik kebudayaan” yang dasar-dasarnya sudah mereka letakkan dua dasawarsa lalu. Pelajaran penting: sebuah bangsa punya komitmen—setelah mengatasi berbagai trauma masa silam—untuk hal yang fundamental untuk jangka waktu sangat panjang, dalam hal ini pembangunan kebudayaan, terlepas dari siapa yang berkuasa. Dan karena Korea Selatan hanya satu dan tak bisa digandakan, anda tentu bisa mencari model-model lain dari belahan dunia yang lain, yang lebih berterima dan masuk-akal.

Dan karena Indonesia adalah negeri yang istimewa oleh keanekaragamannya dan pengalaman sejarahnya yang takt erbandingkan, anda mungkin akan menyarikan pelajaran terburuk dari semua model-model itu. Sebab, yang baik-baik akan menina-bobokan dan yang buruk-buruk akan

membuat anda sangat menyadari konteks domestik. Atau justru anda tidak perlu mencari jauh-jauh ke luar sana. Sebab, anda hanya bisa berbuat yang kecil-kecil saja, yang tidak mendasar. Sebab, birokrasi Negara memang tidak bisa diubah secara fundamental. Maka anda akan menemukan model, misalnya, tentang hibah seni bagi berbagai seniman, kelompok seni, komunitas seni, festival seni, lokakarya seni: sesuatu yang kecil dan “mudah” tapi sangat vital dan tak bisa ditunda. Apa pun itu, bagaimanapun tafsir anda atas model-model “strategi kebudayaan” itu, toh akhirnya anda bertanya juga, bagaimana mungkin birokrasi kita—atau birokrasi *mereka*—bias menganggapnya masuk-akal dan bisa dikerjakan, jika mengatasi mediokritasnya sendiri saja ia tidak mampu? Atau akan datangkah tokoh-anomali, satu atau beberapa, yang berkiperah dengan revolusi mental atau revolusi besi baja. Bila jawabnya adalah tidak, maka tulisan ini—pamflet ini—adalah sebuah elegi terhadap peran Negara dalam kehidupan kesenian kita.

Creativity dalam Science dan Art Education Menuju Prosperity

Oleh Dr. Sutanto

“Sewaktu duduk di Taman Kanak-Kanak, anak-anak yang bersekolah di manapun sepanjang masih di bangku TK di Indonesia pasti akan melakukan hal yang sama tatkala diminta untuk menggambar pemandangan; dimulai dengan menggambar 2 gunung yang bersebelahan, dilanjutkan dengan jalan di tengah-tengahnya, lantas matahari di antaranya, tidak lupa sawah dan rumah, serta pohon berjajar di sepanjang jalan. Beberapa ada yang menambahkan tiang listrik berjajar rapih di jalan. Ada pula yang menambahkan awan dan gerombolan burung-burung.”

Seakan seperti pendidikan seni musik, semua dimulai dengan belajar tangga nada dan mencoba berulang-ulang not angka lagu Ibu Kita Kartini. Dan seakan ada pula standarisasi dalam seni melukis yang menjadi kesepakatan secara kolektif, meski tidak tertulis dalam sebuah satuan kurikulum pendidikan seni lukis TK di Indonesia.

Menurut *British Dictionary*, kata *creative* berasal dari suku kata *create* + *-ive*, sebagai *adjective*, yang bermakna “*having the quality of creating*”. Berdasarkan *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, *creative* bermakna *involving the use of skill and the imagination to produce something new or a work of art*. Pelibatan atau penggunaan skill dan imajinasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau pekerjaan seni membutuhkan suatu aktifitas kerja: berfikir. Ada dua terminologi

berbeda dalam aktivitas kreatif.

Pertama, *associative*, berpikir secara rutin menurut aturan yang berlaku pada satu sistem. Operasi berpikir tersebut hanya *compatible* pada “pesawat terbang” tunggal. Dalam matematika aturan *associative* dapat dituliskan sebagai berikut:

Jika dimiliki $d = a+(b+c)$ maka secara *associative* kita akan mempunyai $d = (a+b)+c$.

Pola berpikir *associative* berada pada sebuah ruang baku yang dibangun oleh satu basis aturan. Hasil operasi dari elemen di dalam ruang *associative* masih merupakan elemen dalam ruang tersebut.

Terminologi kedua, *Bisociative*, mungkin tidak lazim digunakan. *Bisociative* adalah proses berpikir untuk melakukan kombinasi atas dua aturan yang ada untuk diberlakukan atau *compatible* pada beberapa “pesawat terbang”. Tindakan kreatif tidak menciptakan sesuatu dari ketiadaan seperti yang dilakukan Tuhan. *Creative act* lebih pada *combines, reshuffles* sesuatu yang sudah ada hubungan tapi terpisah secara ide, fakta, *frame of perception*, dan *associative contexts*.

Menurut Walter Sargent, menggambar adalah alat untuk mengungkapkan pikiran. Menggambar suatu obyek berarti menerjemahkan persepsi ke dalam bahasa virtual. Persepsi yang berhasil dituangkan dalam media lukis akan membuka ruang kreativitas.

Bertemuinya logika dan kreativitas adalah salah satu tujuan dari pembelajaran seni di mana gambar adalah bahasa yang dipakai untuk menemukan dan mengeksplorasi ide-ide. Ide ini yang kemudian menjadi pondasi untuk merumuskan sebuah inovasi. Dengan demikian, menggambar merupakan kegiatan berpikir yang dapat membentuk konsep yang berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang. Berikut adalah beberapa korelasi antara logika yang dibangun dari kreativitas:

Dari pemikiran Koestler dapat dibuat **Kuadran Logic-Creativity** sebagai model pemetaan produk kreatif. Ia pun dapat digunakan sebagai *setting goal* dari sebuah penciptaan produk atau layanan jasa yang belum mempunyai unsur kreatif, menjadi produk kreatif yang mampu menyetuh dan berkompetisi di pasar.

Berpikir *bisociative* adalah menciptakan apa yang disebut *engine* kreativitas, sebuah mesin yang bisa menggeser masing-masing produk atau layanan jasa yang berada di kwadran III menuju kwadran II, IV, bahkan kwadran I.

Cournot di dalam *Chapitre IV La Loi de Demande* mengatakan, “*admettons donc que le débit ou la demande annuelle D est, pour chaque denrée, une fonction particulière F(p) du prix p de cette denrée. Connaître la forme de cette fonction, ce*

serait connaître ce que nous appelons la loi de la demande our du debit". Revolusi industri yang berkelanjutan menyebabkan produksi barang dengan mesin menghasilkan jumlah barang yang semakin melimpah di pasar. Menurut Bertrand kelimpahan barang di pasar akan menekan harga pasar.

Kedua teori diatas dapat diterima secara logika matematika. Namun, memasuki era millennium ini, harga biaya margin semakin tertekan, bahkan jatuh di titik NOL. Anderson berpendapat bahwa dengan kemajuan teknologi di bidang informasi, barang atau jasa yang dilemparkan ke pasar berharga nol, *free* atau gratis (kurva B). Ia menerangkan mengapa teknologi yang berevolusi dengan sangat cepat, terutama kehadiran internet, menyebabkan biaya produksi dan distribusi dalam banyak sektor mengalami penurunan yang tajam. Padahal, barang atau jasa yang diberikan ke pasar berkualitas tinggi (produk premium). Istilah Bertrand, *freemium*.

Dengan pergeseran ini, untuk memenuhi permintaan jasa *Freemium*, sebuah usaha mesti bergerak dengan 4 (empat) pilar utama yaitu *Openness, Share, Peer, Act Globaly*. Kembali ke contoh kegiatan kreatif mahasiswa bidang penalaran Wikimatika tadi. Sebagai *freemium service*, mereka akan memenuhi 4 pilar ini:

1. *Users* siapapun dapat memperoleh akses (Sistem terbuka)
2. *Users* tidak dikenakan biaya konsultasi melalui media sosial (Membagi sumber daya)
3. *Users* membangun komunitas (*Peer Group*)
4. *Users* tidak dibatasi posisi geografis (*Action-nya global*)

Ke-empat pilar tersebut adalah Wikinomics: pilar-pilar berbasis kolaborasi massal yang saat menggerakkan ekonomi. Kecepatan terbangunnya kolaborasi massal berbanding lurus dengan penciptaan komunitas. Dan penciptaan komunitas di dunia virtual bergantung pada *traffic* pengunjung ke website. Lantas, siapakah katalisator atau pemanggil *users* secara masif untuk klik ke web site kita selain *freemium*? Kehadiran seni, animasi, dan efek visual dalam format digital adalah media yang *mem-boosting* kampanye website di Sosial Media.

Freemium service ini juga punya konsekuensi yakni ruang bisnis menjadi lebih sempit dan memunculkan banyak kompetitor. *Comfort Zone* tidak lagi ada sehingga dibutuhkan sumber daya kreatif yang bekerja secara terus menerus.

Era ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam sudah selesai dan akan digantikan dengan era ekonomi kreatif dan gagasan. Maka jelaslah bahwa penting sekali untuk memperkuat pendidikan seni yang berujung pada penciptaan kreatifitas/inovasi dengan mengubah *landscape* bekerja dari transaksional menuju kolaborasi massal. Case untuk Indonesia, ranking yang diperoleh dari pengukuran Global Innovation Index (GII) yang mendasarkan

pada Creativity input dan Creativity output, sangatlah rendah. Indonesia ada pada ranking 100an dunia.

Sangatlah paradoks bahwa orang Indonesia yang punya genetika kreatif dalam struktur DNA-nya menjadi tidak atau belum kreatif ketika dibandingkan dengan kreativitas bangsa lain didunia. Sebuah usulan pembentukan Indonesia Creative City dengan sebuah roadmap yang jelas akanbisa membawa orang Indonesia menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Pendidikan Seni, Media & Kreativitas

Oleh Dr. Lono L. Simatupang

Konseptualisasi Seni

Pembahasan pendidikan seni mau tidak mau harus berangkat dari pertanyaan yang sudah sering diajukan sejak berabad silam, “apakah seni itu?” Banyak keputakaan klasik memberikan batasan seni dengan mengaitkannya pada ciri yang diasumsikan terdapat dalam gejala seni, yaitu keindahan. Melalui asumsi semacam itu dibangun paham obyektivitas dan universalitas seni dan keindahan. Cara pandang seni dan estetika klasik semacam itu telah menuai banyak kritik dan diperbarui. Kritik terhadap paham obyektivitas estetika antara lain mengatakan bahwa pengalaman estetik bukanlah kualitas suatu obyek ataupun sensasi; itu adalah gejala psikologis transisional yang serentak muncul di saat manusia terlibat secara kreatif dengan dunia. Pengalaman estetis bukanlah sekedar sensasi inderawi alamiah, namun pengolahan lebih lanjut (kreatif) atas sensasi inderawi alamiah tersebut.

Kritik yang dilancarkan terhadap pandangan klasik membawa Alfred Gell, seorang antropolog, pada pemikiran bahwa untuk memperoleh batasan seni yang universal kita harus melepaskan (sejenak) muatan estetika dari seni dan akhirnya merumuskan seni sebagai “*the technology of enchantment*” (teknologi pesona). Dengan menyebut seni sebagai teknologi (bukannya teknik) pesona, Gell menekankan dimensi teknis (*techne*) sekaligus gagasan (*logos*) dalam seni. Antropolog lain, Bruce Kapferer, menyebut efek pesona dengan istilah “*heightened experience*” (peningkatan intensitas pengalaman).

Seni dengan demikian dapat dipahami sebagai media peningkatan intensitas dan pengayaan pengalaman manusia (pikiran, perasaan, dan ketubuhan) melalui penciptaan dan penikmatan pesona realitas terindra (amatan, dengarannya, bauan, cecapan, rabaan, gerakan). Dalam batasan ini, ‘peningkatan intensitas dan pengayaan pengalaman manusia’ bisa disetarakan dengan dimensi isi (*content*) dasariah seni. Sedangkan ‘pesona realitas terindra’ merupakan

dimensi bentuk (*form*) seni dan keduanya saling terkait: tidak ada seni tanpa pesona bentuk dan tidak ada seni tanpa peningkatan intensitas dan pengayaan pengalaman.

Sistem Pendidikan Seni

Pendidikan seni berlangsung dalam pranata pendidikan non-formal maupun lembaga pendidikan formal. Sejatinya, kedua macam sistem pendidikan seni itu hadir dalam kehidupan kita hari ini.

A.Sistem Pendidikan Seni Non-Formal

Pengamatan pribadi atas keberadaan sistem pendidikan seni non-formal dewasa ini menampilkan dua kecenderungan: pranata pendidikan non-formal dalam bidang seni tradisi cenderung melemah, sementara pranata pendidikan non-formal dalam bidang seni modern tampak mulai bergerak menguat di kalangan anak muda perkotaan. Sanggar-sanggar seni tradisi cenderung bekerja dalam dan mengikuti sistem sosial yang sudah mapan, sementara komunitas-komunitas seni modern biasanya berjuang menciptakan ruang sosial alternatif yang batas-batasnya mereka tentukan sendiri. Kedua jenis pranata non-formal tersebut sebenarnya berperan dalam pendidikan seni; namun seringkali tidak terbangun kerjasama di antara keduanya.

B.Sistem Pendidikan Seni Formal

Dalam sebuah penelitian kecil tentang Pendidikan Karakter Berbasis Pendidikan Seni di beberapa SD di kota Solo terungkap bagaimana kebijakan negara untuk menyelenggarakan pendidikan seni sebagai media pembentukan karakter 'bertabrakan' dengan praktik pendidikan seni yang cenderung berorientasi pada pencapaian ketrampilan teknik seni dan presentasi ketrampilan di arena publik, baik lewat lomba, pameran, dan pementasan. Pendidikan seni sebagai media peningkatan intensitas dan pengayaan pengalaman batin siswa (pembentukan karakter) tidak diutamakan. Diduga kondisi serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah umum lainnya.

Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan seni terselenggara dalam bentuk program studi yang tersebar di berbagai jenis lembaga pendidikan formal: institut, akademi, sekolah tinggi, dan universitas. Sistem program studi menerapkan prinsip spesialisasi lanjut, serta melakukan penjenjangan pula (dari DIII hingga S3). Berapa jumlah program studi yang terkait bidang seni di perguruan tinggi Indonesia? Pertanyaan sederhana ini ternyata tidak mudah

dijawab. Tentunya Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi & Ristek memiliki data tersebut, namun akses data jumlah program studi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia tidak gampang dijangkau publik. Yang bisa diakses adalah data yang tersedia di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan datanya terbatas pada program studi yang sedang dan pernah diakreditasi oleh BAN PT.

Berdasarkan pengamatan pribadi terlibat dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa, dulu IKIP Surabaya), tampaknya program studi pendidikan seni membentuk sebuah forum antar perguruan tinggi pendidikan. Program studi yang berorientasi pada pendidikan guru seni diperkirakan adalah program studi terbanyak di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Perkiraan ini tidak selaras dengan wacana tentang sedikitnya jumlah guru seni di lembaga pendidikan rendah hingga menengah. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya permasalahan antara program pendidikan guru kesenian di perguruan tinggi dan penyerapan lulusan program pendidikan guru seni di SD, SMP, dan SMA. Mengapa terjadi kesenjangan serupa itu? Apa yang perlu dibenahi?

Program studi yang tidak berorientasi pada penyiapan guru seni biasanya menamakan diri dengan mencantumkan kata 'Seni' diikuti nama bidang seni yang menjadi spesialisasinya; misalnya Seni Rupa Murni, Seni Musik, Seni Karawitan, Seni Kriya, Seni Tari, Seni Pedalangan, Seni Teater, dan sebagainya. Ada pula program studi yang menyelenggarakan pendidikan spesialis bidang seni tertentu tetapi tidak mencantumkan kata seni, misalnya program studi Desain Komunikasi Visual, Kriya, Animasi, Film dan Televisi, dan sebagainya. Informasi dan pengamatan pribadi menunjukkan bahwa kalangan perguruan tinggi seni juga telah membentuk forum di tingkat lembaga dan guru besar. Forum ini aktif memberi masukan pada penentu kebijakan pendidikan seni di Direktorat Pendidikan Tinggi. Salah satu gagasan yang pernah dihasilkan forum tersebut adalah pengelompokan program-program pendidikan seni ke dalam lima arah konsentrasi/minat pendidikan: a) kesenimananan, b) penciptaan, c) pengkajian, d) pendidikan, dan e) tata kelola. Meskipun demikian, gagasan forum tersebut tampaknya belum dapat diterapkan sepenuhnya.

Menarik untuk disimak keberadaan program studi yang mencantumkan nama spesialisasi ganda; yaitu program studi Musik Gereja di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon, program studi Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu, dan Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu di Universitas Hindu Indonesia, Denpasar. Masih belum jelas apakah program studi mereka berorientasi pada penciptaan

atau pengkajian, atau yang lain. Namun setidaknya, program studi semacam ini mempertimbangkan spesifikasi ruang lingkup penerapan studinya.

Media dan Kreativitas

Di sini akan disampaikan beberapa catatan kritis terhadap kehadiran dan penggunaan media, khususnya dalam kaitannya dengan proses kreatif dan peningkatan pengalaman manusia.

Catatan *pertama* adalah setiap media dan teknologi niscaya terarah pada tujuan-tujuan tertentu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tertentu. Di dalam teknologi dan media selalu terkandung kelebihan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu namun sekaligus keterbatasan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Tidak ada media dan teknologi yang sempurna untuk semua tujuan. Kesadaran akan kelebihan dan kekurangan setiap media dan teknologi perlu dimiliki setiap pengguna, termasuk ketika sarana tersebut digunakan dalam pendidikan seni.

Steve Feld memaparkan gejala yang disebutnya *schizophonia* dan *schizmogogenesis* sebagai akibat dari hadirnya teknologi rekam bunyi dan mesin pengolah bunyi dalam industri musik. Yang dimaksud dengan *schizophonia* adalah gejala terpisahnya bunyi dari sumber bunyi' asali yang dimungkinkan oleh kehadiran teknologi rekam. Tentu saja, penemuan teknologi rekam sangat menguntungkan industri musik.

Perkembangan teknologi pengolahan bunyi (*editing*) juga memungkinkan dilakukannya pengolahan data bunyi yang telah berhasil dipisahkan dari sumber bunyi asalnya sehingga menghasilkan bunyi-bunyi baru, yang 'lebih indah dari aslinya,' atau bahkan bunyi-bunyian yang sebelumnya tidak pernah dihasilkan secara manual. Gejala penciptaan (*genesis*) yang dimungkinkan oleh kondisi keterpisahan (*schizm*) bunyi dari sumber bunyi asalnya itulah yang disebutnya *schizmogogenesis*. Mereka yang menguasai teknologi *schizmogogenesis*-lah yang memiliki hak istimewa menentukan jenis dan kualitas bunyi yang dihasilkan. Sementara mereka yang menerima produk akhir teknologi tersebut hanya diberi kewenangan membunyikan hasil olahan bunyi tersebut.

Analisis Steve Feld saya baca sebagai catatan kritis yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan penggunaan teknologi dan media dalam pendidikan seni. Karena teknologi informasi komunikasi dan media dibikin dalam sistem industri yang berideologi akrab pemakai (*user friendly*), efisien harga maupun tenaga; maka kecenderungannya kemudahan yang diberikannya meminta bayaran berupa pemangkasan proses menjadi instan serta peminggiran pengalaman interaktif antar manusia secara langsung oleh interaksi antar manusia yang diperantarai mesin. Dua harga yang harus dibayar tersebut pada

hakikatnya berpotensi mengubah pengalaman manusia. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi dan media lain dalam pendidikan seni.

Pada Batas Setiap Masakini

Oleh Afrizal Malna

Apakah “masa kini” itu? Durasinya bisa diperpendekkan lagi dengan memunculkan istilah “kekinian”. Medannya juga bisa kita ringkus menjadi lebih ringkas lagi hanya “yang-disini dan yang-kini”. Meninggalkan provokasi tentang “masa depan” yang dibawa dengan gagah (tetapi memalukan) oleh keangkuhan modernisme menjadi “masa kini” yang lebih cair dan bisa dibawa oleh “siapa pun”. Di manakah masa kini sebuah karya (seni maupun sastra)? Di sisi lain, tradisi (etnisitas) yang telah dikorbankan oleh modernisme, melalui medan masa kini, seperti mendapatkan momentumnya untuk mengambil kembali masa-kininya yang hilang. Implikasi etis dari medan masa kini dalam konteks sejarah kemajemukan kita adalah mendorong Bergeraknya bandul proses-proses kualifikasi seni dari estetika vertikal ke estetika horisontal. Di mana kemajemukan lebih menjadi target medan sejarah seni masa kini daripada visi tentang pencapaian estetika. Masa kini mulai kita pahami sebagai “masa-kini-yang-majemuk”, di mana setiap wilayah representasi sejarah memiliki ruang luar maupun ruang dalam yang medannya bisa kita elaborasi kembali ke masa kini.

Karya sastra memiliki medan teks yang khas karena ia secara fisik bisa disimpan. Karya sastra selalu memiliki peluang menciptakan medan masa kini dengan cara yang tidak terduga. “Kita bergembira bukan karena memotong padi; kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri.” Kutipan ini, yang diambil dari novel *Maxhavelaar* karya Multatuli (Douwes Dekker, 1820-1887), rasanya, cukup mewakili bagaimana sengitnya setiap persimpangan masa kini yang harus kita lalui, antara memotong padi yang tidak kita tanam sendiri dengan memakan nasi yang bahkan kita tidak tahu bagaimana wujud padi dan sawahnya.

Sisipan Dari Setiap Masa Kini atau Hantu di Ujung Kutipan

Kota selalu gelisah antara mencari-memiliki dan mencari lagi. Kota menantang dirinya terus-menerus untuk mewujudkan apa yang dimaksud dengan “masa depan”. Lantas, apakah desa memiliki agenda untuk masa depan? Kalau ada, tentu yang disebut kota sebagai lembaga sosial yang baru tidak perlu ada. Yang dibutuhkan desa bukanlah masa depan, melainkan keajaiban,

kelanggangan, ketentraman, dan kesinambungan produksi maupun tradisi. Ketika lembaga sosial yang paling tua ini telah hilang, walaupun secara fisik masih berdiri, maka dari wilayah kehilangannya, kota mulai dilihat sebagai hantu yang mengancam maupun sebagai hantu yang menjadi tumpuan hari esok. Sebaliknya, kota juga mulai melihat desa sebagai hantu yang mereproduksi kemiskinan maupun ketertinggalan.

Penggunaan istilah hantu mengisi cukup banyak wilayah representasi dalam berbagai fungsinya. Hantu menjadi bungkus untuk mengangkut hal lain di luar lingkungan hantu itu sendiri. Setiap jaman membawa hantunya masing-masing. Jaman modern merupakan hantu terbesar yang mengubah tradisi, juga sebagai hantu yang kian kehilangan wilayah reproduksinya. Tradisi menjadi lembaga yang gentayangan. Tradisi hanya menjadi tradisi kalau ia telah dibekukan dan kehilangan aksesnya ke realitas masa kini, kecuali sebagai upacara maupun sebagai hiburan dalam industri pariwisata. Dan Indonesia, dalam politik kebudayaan global yang dihadapinya, terlanjur larut atau telah tenggelam dalam politik pembekuan atas tradisi seperti ini.

Teritori identitas atas tubuh mengalami fragmentasi, membuat hubungan-hubungan baru di luar wilayah tubuh. Tubuh digunakan sebagai wilayah paling dekat dalam menciptakan medan representasi. Teritori identitas tubuh di atas 80 tahun sebelumnya mempunyai sebuah gambaran yang jauh berbeda. Pertumbuhan ekonomi, salah satu di antaranya, bisa dilihat melalui tumbuhnya percetakan dan desain yang mengiklankan berbagai produk industri. Yang menarik dari berbagai desain iklan yang ditawarkan, segmen Jawa (sebagai mayoritas dalam demografi Hindia Belanda), mendapatkan tubuh-identitas sebagai usaha melembagakan sekaligus mengiliskan bagaimana tubuh-Jawa memasuki kehidupan modern melalui produk-produk industri modern yang dilempar ke pasar. Melalui iklan-iklan produk industri modern, ilusi tubuh-Jawa sebagai tubuh-modern sekaligus tubuh-masa-kini mulai diintegrasikan antara pasta gigi (yang menggunakan bahasa Jawa), sabun mandi, dan sabun cuci. Semua ini berlangsung bersamaan dengan lembaga penerbitan *Balai Pustaka* yang kian banyak menerbitkan narasi di sekitar legenda-legenda Jawa, saling menyerapnya bahasa Melayu dan Jawa. Tubuh-Jawa yang ditawarkan melalui realitas pasar ini lengkap dengan penawaran peralatan pertanian. Konstruksi tubuh-Jawa-masakini ini putus pada masa pendudukan Jepang dan memasuki realitasnya yang paling ekstrim (1943-1945).

Hantu yang diciptakan di luar adalah juga hantu yang ditanamkan ke dalam diri kita. 64 Tahun setelah novel Achdiat, *Atheis* terbit, kita bisa melihat hantu lain dalam novel *Pasung Jiwa* karya Okky Madasari (Gramedia, 2013). Dalam novel

ini, *hantu* itu bernama *ketakutan*. “Seluruh hidupku adalah ketakutan itu sendiri,” sebagai narasi biografis saat tokoh utama novel ini, Sasana, menjelaskan dirinya. Dia dididik dan dibesarkan dalam ilusi tentang kemajuan melalui musik piano, dunia lelaki sebagaimana dengan namanya (*Sasana*, tempat latihan tinju) dan sekolah yang terbaik. Sejak kecil, orang tuanya telah membangun narasi bipolar antara musik yang baik (piano) dan musik yang buruk (dangdut) sebagai kategori etik.

Semua kekerasan merupakan hantu yang bekerja dalam teritori horisontal, tetapi mendapatkan hak melakukan kekerasan dalam hirarki vertikal. Di dalam lingkungan kolonial Jepang, alur kekerasan seperti ini tidak dihadapi oleh Hasan (novel Achdiat), ketika dia mulai mempertanyakan alur kehidupannya yang harus eksis antara alur dirinya atau alur tradisi maupun agama. Pertanyaan ini lebih menjadi “siksaan internal” yang membawa Hasan jatuh sakit dan kemudian mati. Sementara alur yang dihadapi Sasana (novel Okky) yang hidup dalam transisi antara pemerintahan Orde Baru dan Reformasi 1998 (50 tahun setelah kemerdekaan) justru merupakan “siksaan eksternal”.

Dalam waktu 50 tahun itu, semuanya telah menjadi terbalik antara novel Achdiat dengan novel Okky. Novel Achdiat dalam lingkungan kolonial Jepang telah menghadirkan manusia-manusia baru yang hidup sebagai seorang-masa-kini (Rusli, Kartini, maupun Anwar) yang kemudian membingungkan Hasan. Sementara dalam novel Okky, muncul tokoh dari kalangan rakyat miskin kota, Cak Jek, mantan preman yang tergabung dengan laskar yang membela agama. Cak Jek mendapat upah sebesar Rp. 50.000 setiap selesai melakukan tugas membubarkan kafe-kafe penjual minuman keras (walau mereka sendiri konsumen dari minuman ini) maupun tempat-tempat pelacuran. Peran yang kemudian membuat dirinya dikelilingi oleh ilusi tentang kekuasaan. Akses ekonomi maupun politik kemudian dengan mudah dapat diperolehnya.

Dee (Dewi Lestari) pada cerpennya, *Filosofi Kopi* (1996), membuka alur lain yang dialami tokohnya, Ben, dalam ruang urban dengan latar yang lebih khusus, yaitu dunia kopi. Alur ini memperlihatkan ruang urban yang tidak lagi mengandaikan dinding-dinding seperti tradisi atau agama. Kopi digunakan sebagai metafor bagaimana tubuh-urban membangun dunianya antara kerja keras, penelitian dari hilir ke hulu tentang kopi, hingga membangun kafe sebagai ruang narasi bagaimana budaya tentang kesempurnaan terus diinvestigasi dengan cara yang ekstrim. Ben tidak mengenal waktu mengolah racikan kopi untuk mendapatkan kesempurnaan sebagai representasi yang bisa diwujudkan dalam bentuk bau maupun rasa kopi. Hingga Ben kemudian menemukan racikan itu dan membungkusnya dengan nama, “Kopi yang anda minum hari ini: Ben’s

Perpecto. Artinya: Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup". Ben tidak terluka oleh faktor-faktor eksternal di luar kopi ketika ilusi maupun bungkusannya mengenai "kesempurnaan" itu porak-poranda setelah ia menemukan kopi lain yang menandingi racikan kopinya.

Bahasa Indonesia (yang pada masanya dianggap Multatuli sebagai "kemanisan yang tidak bisa diungkapkan bahasa lain") pernah menjadi ruang terbuka, agen utama yang membawa Indonesia mulai menciptakan masa-kininya, di mana bahasa ini seolah-olah memang hadir tanpa tuan rumah atau penjaga. Akan tetapi budaya politik yang dibawa Orde Baru, yang mengukuhkan lagi hubungan hirarkis maupun politik militerisme ke dalam bahasa Indonesia, membuat bahasa ini mulai menyimpan ruang traumatik baru. Traumatik untuk menggunakan sebutan Komunis, Marx, China, keadilan sosial dan seterusnya. Kini, orang juga mulai cemas menggunakan istilah "liberal", lebih lagi sebutan "teroris" atau "haram". Padahal, semua sebutan ini bukanlah bahasa Indonesia. Semuanya merupakan nama-nama import. Bahasa Indonesia mulai menyimpan apa yang disebut Ook Nugroho dalam puisinya sebagai "hantu-hantu kata".

Gesekan antara bahasa Indonesia dengan berbagai bahasa-ibu ini menghasilkan *noise* sejarah yang unik. *Noise* ini menjadi medan kreatif yang kaya untuk seniman seperti dilakukan perupa Eko Nugroho. Eko pernah meluncurkan sebuah proyek kesenian dalam 7 edisi yang disebutnya sebagai *Komik Dagingtumbuh*; dimulai sejak 2000. Lihatlah pengantar editorial pada edisi ke 5 proyek ini:

Selamat datang ha ha ha ha ha

Kraaaakkk....! Halo kembali lagi kita di edisi ke-5 ini, salam hangat-hangat tai ayam. Dan di sini dagingtumbuh lagi-lagi nggak bawa apa-apa kecuali kunci rumahmu sebelum tidur, makanlah yang banyak sebelum kamu dimakan, sering-sering-sering goyangkan pinggulmu sebelum patah tulang, kenapa hari ini musti ayam goreng, jangan lengah lihat di belakangmu! Awasi televisi!

Kutipan teks di atas seperti batu besar yang dilemparkan ke dalam tubuh bahasa. Bahasa kemudian pecah menjadi serpihan visual yang menyusun maknanya sendiri di luar gramatika. Gramatika maupun logika diperlakukan seperti susunan laci sambung-menyambung, mirip permainan anak-anak yang saling menyambung untuk mendapatkan kepanjangan tubuh ular. Ruang traumatik yang dikandung bahasa, diubah menjadi ruang kreatif untuk memuntahkan berbagai imajinasi yang sebelumnya terkungkung dalam dunia normatif yang telah terbekukan.

Peran kamera untuk mengkonstruksi fotografer sebagai hantu di belakang kamera, maupun objek pemotretan sebagai hantu kenangan, di masa kini pecah

dan porak-poranda, karena setiap orang bisa menjadikan dirinya sebagai hantu untuk dirinya sendiri melalui foto *selfi*; menggunakan telfon selular yang juga berfungsi sebagai kamera. Seorang supir yang mengendarai mobil, juga bisa terkonstruksi sebagai hantu yang bisa melihat kartografi seluk-beluk jalan dari ketinggian tertentu melalui media *gadget* yang terdapat dalam kendaraannya. Masa kini mulai berubah menjadi *template*. Siapakah aku dalam ruang tanpa identitas latar seperti ini? Aku adalah "seorang manusia palsu". Kesimpulan ini saya ambil melalui seorang tokoh dalam cerpen Yusi Avianto Pareanom, "Cara-Cara Mati yang Kurang Aduhai", di dalam bukunya, *Rumah Kopi Singa Tertawa* (Banana, 2011).

Agus Taswin, tokoh dalam cerpen Yusi ini, menderita kanker dan mendapatkan vonis dokter bahwa hidupnya tinggal enam atau tujuh bulan lagi. Untuk mengisi waktu 7 bulan ini (masa kini sebagai menunggu kemartian), Agus Taswin mulai memilih apa saja yang ingin dia nikmati sebelum kematian datang merenggutnya. Berbagai daftar pilihan dicari dan didiskusikan dengan orang-orang dekat di sekitarnya. Akhirnya, Agus memilih keinginan untuk menikmati dirinya sungguh-sungguh sebagai "orang palsu". Inilah cara untuk ke luar dari hantu kematian (masa kini) yaitu memperlakukan dirinya sebagai "manusia palsu". Cara yang datang seperti arus balik atas premis-premis identitas maupun eksistensi dan menghilangnya gerak alur waktu ke depan dalam bayangan kematian.

Alur Pendek dan Masa Kini Sebagai Mata Rantai Teks

Masa kini seperti bayi yang tidak pernah lahir ketika setiap terjadinya perubahan kekuasaan maupun pergeseran pasar hampir selalu dirayakan dengan penjarahan dan kekerasan. Tahun 1811, ketika Inggris menjatuhkan pemerintahan Belanda, Raffles memprovokasi "pengusiran Belanda". Di Palembang (dalam pemerintahan Sultan Badaruddin), 86 mayat penduduk Belanda mengambang di sungai Musi, istri mereka diperkosa. Pola ini (apa yang terjadi dengan kita?) terus kita lembagakan hingga kini, termasuk munculnya mall baru kemudian terjadi kerusuhan di Mataram (Lombok), 17 Januari 2000. Masa kini yang terus dikorbankan melalui banyak tindakan dari logika pendek yang terus merobek medan sejarah kita: kriminalisasi atas pornografi maupun kriminalisasi kalangan generasi muda melalui hubungan seks yang mereka lakukan dan digelandang dari hotel ke hotel atau dari tempat kos mereka. Logika pendek yang mendesak medan seks menjadi kekuasaan dan komoditi, sementara generasi muda sebagai kriminal.

Logika pendek dalam melihat medan sejarah menghasilkan alur pendek

pada cara kita berpikir, bertindak, maupun memutuskan persoalan. Alur pendek ini bekerja seperti epidemi sejarah yang memutus rangkaian panjang sebuah cara berpikir, menjadi arus pendek untuk mengkerdilkannya. Masa kini menjadi korban ketika ditempatkan dalam alur yang pendek ini, justru ketika ia juga mulai diterapkan pada cara-cara kita membuat peraturan dalam lembaga konstitusi kita.

Di Indonesia, seniman maupun sastrawan, seperti gelandangan dalam medan sejarah yang harus bekerja pontang-panting menghadapi banyak arus pendek yang bercokol pada bagaimana sejarah kita dikonstruksi. Menghadapi medan seperti ini, alih-alih kita mendapatkan sebuah karya yang ampuh untuk mengatasi alur pendek ini, yaitu melalui film Joshua Oppenheimer (*The Act of Killing*). Film yang melakukan pelapisan peran bolak-balik antara pelaku yang pernah membantai korban yang dianggap komunis sekaligus memerankannya sebagai korban dengan latar peristiwa 1965. Pembalikan dan pelapisan peran bolak-balik ini dilengkapi dengan kostum maupun make-up yang saling terbalik, membawa efek cermin yang diberikan dari realitas yang masih kita hadapi hingga kini. Cermin yang melanjutkan budaya bisu melalui industri budaya pop dalam bentuk tarian campur sari dengan latar keindahan pemandangan alam yang sering kita saksikan dalam siaran TV masa kini. Film yang menggunakan psikoanalisa sejarah untuk membongkar alur pendek konstruksi sejarah yang membentuk budaya bisu yang panjang ini membuka medan sejarah melalui alam *mooi indie*, masyarakat yang penuh senyum, tetapi di dalamnya menyimpan banyak sejarah tragik. Film ini berhasil merajut kembali mata rantai teks pada setiap alur pendek dalam sejarah.

Apa yang dilakukan Joshua Oppenheimer dalam filmnya kini banyak disebut sebagai transformasi teks maupun mutasi teks. Seniman yang bekerja melalui riset, konsep, dan strategi teks untuk mengangkut banyak hal dalam permainan teknologi imajinasi antara konteks maupun referennya. Hal yang banyak dilakukan di seni rupa, film dan video, maupun performance art. Sebuah kerja kesenian yang mengangkat kembali bentuk yang pernah ada dalam sastra sebagai “sastra berbingkai” ke dalam bentuknya yang paling efektif: menempatkan materi dan media dalam ruang dialektika hingga gesekan antara keduanya memunculkan resonansi medan seni yang luas.***

Kekinian, Kesenian dan UU Kebudayaan

Oleh Jim Supangkat

Saya tidak bisa menghindari kesan bahwa Kongres Kesenian ini ada hubungannya dengan pembahasan RUU Kebudayaan yang ternyata memperlihatkan tanda-tanda kemacetan. Karena itu, sebelum saya mempersoalkan topik yang disodorkan pada saya, saya merasa perlu menyampaikan lebih dulu pendapat tentang RUU Kebudayaan.

Kesadaran yang tercermin pada kongres ini bahwa “pemerintah adalah penyelenggara negara”, saya rasa signifikan untuk dibawa ke pembahasan RUU Kebudayaan. Kesadaran ini yang seharusnya melengkapi pembacaan amanat UUD, bahwa negara mempunyai tugas dan tanggung jawab memajukan kebudayaan bangsa. Ini yang seharusnya menjadi bingkai penyusunan RUU Kebudayaan.

UU Kebudayaan memang sebuah wilayah yang sulit yaitu bagaimana pemerintah menunjang kegiatan yang banyak dan beragam untuk mengembangkan kebudayaan. Namun, ada persoalan pada UU Kebudayaan yang mudah dipahami, mudah disepakati, dan bisa digunakan untuk membayangkan bingkai RUU Kebudayaan. Persoalan ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah mengelola, dengan benar, Museum Nasional, Perpustakaan Nasional, Galeri Nasional, dan Pusat-pusat Arkeologi di berbagai situs peninggalan sejarah. Di negara mana pun, lembaga-lembaga ini adalah lembaga Negara yang kedudukan dan pengelolaannya diatur UU.

Mengacu pada konvensi internasional, UU Kebudayaan seharusnya mewajibkan juga pemerintah menempatkan pengelola yang kompeten di lembaga-lembaga negara itu seperti halnya LIPI—Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia—yang ditangani para ilmuwan. Dasarnya, lembaga-lembaga negara seharusnya berperan membangkitkan pemahaman budaya di kalangan masyarakat.

Untuk menjadikan lembaga-lembaga negara punya peran budaya, UU Kebudayaan seharusnya mewajibkan pemerintah menggariskan Politik Kebudayaan Nasional. Kebijakan nasional ini adalah alat untuk melaksanakan komitmen mengembangkan kebudayaan yang disepakati pada UU dan merupakan ujung tombak pengembangan kebudayaan karena berkaitan dengan program-program.

Hasil Kongres Kesenian yang sekarang berlangsung selayaknya diperhitungkan bila pemerintah mau menyusun Politik Kebudayaan Nasional. Namun tidak sebagai “Politik Kesenian”, tapi sebagai persoalan-persoalan

kesenian yang di tingkat Politik Kebudayaan Nasional bisa dikaitkan dengan UU Kebudayaan yang pada dasarnya mempersoalkan kepentingan negara dan kebudayaan bangsa. Jadi, pandangan yang percaya bahwa kesenian sudah tidak lagi memerlukan negara tentunya tidak bisa dibahas pada penyusunan Politik Kebudayaan Nasional.

Menimbang kesadaran itu, topik yang disodorkan pada saya, “Seni Dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian,” bagi saya bukan persoalan pada teori-teori sosial budaya yang bisa dibahas tanpa konteks. Saya melihatnya sebagai tegangan perkembangan kesenian kita dengan perkembangan global yang sama-sama hadir di depan pintu kita.

Saya cenderung mulai dari kekinian. Gambaran kekinian yang paling jelas pada saya adalah pandangan yang muncul pada 1989. Ramalan ini dikemukakan Peter Schwartz, presiden *Global Business Network* di *World Economic Forum* (WEF) pada 1989. Sebagai ahli media komunikasi, Schwartz mengemukakan bahwa kemajuan media komunikasi akan memunculkan jaringan komunikasi global pada dekade 2000. Dari kajian ini, Schwartz meramalkan kemunculan *global youth culture* pada dekade 2000.

Ramalan Schwartz memang menjadi kenyataan dan bisa dilihat sebagai kekinian. Pada ramalannya, dua pengertian “*contemporaneity*” yaitu kemutakhiran dan kesezamanan menyatu. Jaringan komunikasi global yang sekarang dikenal sebagai jaringan sosial media mencerminkan kekinian. Sementara itu, perasaan terbebas dari kecemasan akan terjadinya Perang Dunia III membentuk kesezamanan global pada generasi muda sekarang ini yang tidak bisa ditemukan juga pada satu abad terakhir perkembangan dunia. Fusi kedua pengertian *contemporaneity* inilah yang menjadi seperti pusara, *Black Hole* yang menyerap generasi muda di seluruh dunia.

Pusaran kekinian itu masih punya kekuatan lain. Karena gejala kekinian global tidak bisa ditemukan di masa lalu, muncul kesadaran bahwa kekinian terputus dari sejarah. Saya rasa kesadaran ini yang mendasari pandangan bahwa kesenian di zaman sekarang tidak lagi memerlukan negara karena telah muncul generasi seniman dunia yang lepas dari sejarah, negara, dan bangsa masing-masing.

Keyakinan seni itu berawal pada pemberontakan mahasiswa yang muncul di Jerman pada akhir dekade 1960. Pangkalnya adalah ketegangan di antara para teknokrat—birokrat kampus—dan para ilmuwan di berbagai perguruan tinggi Eropa yang memunculkan pemberontakan mimbar. Para ilmuwan mengemukakan rasa tidak puas pada kuliah-kuliah yang sudah tentu mempengaruhi mahasiswa. Namun, para mahasiswa punya agenda

pemberontakan sendiri dan mengusung pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni. Pemikiran itu berhubungan dengan kesadaran untuk membangkitkan pemberontakan masyarakat untuk menentang pengaruh para teknokrat di pemerintahan, di mana ilmu-ilmu yang rumit digunakan untuk membenarkan program-program di bidang ekonomi dan industri. Pada 1968, sejarawan Theodore Roszak mencatat gerakan mahasiswa ini sebagai *the making of a counter culture*.

Pemberontakan masyarakat memang kemudian terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Pada pemberontakan ini lahir kesadaran lingkungan pada dekade 1970 yang berhasil membatasi gerak industri. Ketika Suzan Sontag pada 1970 mengajak masyarakat Amerika Serikat membangkang membayar pajak untuk memprotes perang Vietnam, pemberontakan masyarakat menunjukkan tanda-tanda perkembangan kehidupan demokratis. Dari kalangan masyarakat terdengar suara, "*we are the people*", yang membuat politisi tidak bisa lagi menjual kebohongan atas nama rakyat.

Perkembangan kesenian berada di tengah arus pemberontakan itu karena pemikiran tentang seni rupa modern pada dekade 1960 mendekati diri ke ilmu pengetahuan. Namun, *thesis* pemikiran ini justru mengandung kelemahan yang membangkitkan kekuatan negasi bagi kemunculan *anti-thesis*-nya. Hampir semua keyakinan tentang dunia modern kena bias ketika *anti-thesis* ini muncul. Dampaknya, pemikiran kritis pada keyakinan tentang dunia modern ini mengalami mediasi dengan pemikiran yang menentang rasionalitas dan ilmu pengetahuan serta pemberontakan masyarakat.

Diskontinuitas akibat perubahan *platform* itu punya pengaruh pada pemikiran tentang kesenian, khususnya pemikiran seni rupa. Pemikiran filosof Arthur Danto tentang *the end of art* yang muncul pada 1964 memperlihatkan gejala ini. Pada 1981, pemikiran ini mendasari perkembangan seni rupa kontemporer yang mau tidak mau memperlihatkan pula gejala *anti-thesis*. Hampir semua aspeknya yang serba kebalikan dari pemikiran seni rupa modern harus dijelaskan dengan menguraikan seni rupa modern. Sepengetahuan saya, sampai sekarang masih sulit menjelaskan seni kontemporer sebagai kesenian berdasarkan sebuah *thesis* baru.

Di era globalisasi, keyakinan seni kontemporer itu mengalami mediasi dengan *global youth culture*. Karena itu, muncul suara keras di kalangan seniman, "*we are the people*", yang menganggap semua penilaian dari luar lingkungan seniman sebagai otoritas yang harus dikritik. Karena populasi seniman selalu lebih banyak dari populasi kurator, kritikus, dan sejarawan seni rupa, pendapat seniman secara demokratis harus dibenarkan.

Seperti kita ketahui, globalisasi paling nyata terlihat pada perkembangan ekonomi. Munculnya *global art market* memunculkan pandangan yang percaya bahwa globalisasi telah muncul di sektor budaya. *Global art market* menjadi tanda penting.

Apa kata Danto tentang perkembangan seperti itu. Sebelum ia meninggal pada 2013, Irene Caesar—fotografer dan performer provokatif—mewawancarainya dan menanyakan, apa pendapatnya sekarang tentang *the end of art* karena seni ternyata tidak mati dan berjalan terus sekarang. Danto memberi jawaban diplomatis tapi cermat. Filosof ini mengemukakan bahwa, selama seni tidak punya jarak lagi dengan realitas, seni memang sudah mati. Irene Caesar tidak memburu jawaban ini. Namun bagi saya, jawaban ini bernada apologi. Danto tidak memperkuat pernyataan *the end of art*. Jawabannya bisa dibaca demikian, seni sebetulnya tidak mati meski gejala kematiannya sekarang terlihat. Dengan pemikiran yang cermat, Danto kembali ke pemahaman seni yang mendasar bahwa ungkapan seni adalah bagian dari transendensi rasionalitas dalam upaya membentuk persepsi yang utuh tentang realitas.

Pembacaan sejarah kemunculan paham seni kontemporer itu menunjukkan dengan jelas keterikatan paham ini dengan konteks negara maju; Eropa Barat dan Amerika Serikat. Namun seperti paham seni modern yang ditentanginya, seni kontemporer membawa juga isu-isu universal seperti demokrasi, hegemoni kelompok berkuasa, dan hubungan masyarakat dengan kebudayaan yang dengan segera terkesan relevan dipersoalkan di seluruh dunia. Berbagai kesamaan di seluruh dunia yang muncul akibat globalisasi memperkuat kesan ini.

Pemberontakan masyarakat yang menunjukkan perkembangan kehidupan demokratis misalnya adalah gejala yang tidak sesungguhnya bisa kita temukan di depan pintu kita. Tanda-tandanya yang bisa ditemukan di tanah air tidak bisa dilihat sebagai gejala budaya. Suara, "*we are the people*", yang disuarakan juga oleh seniman-seniman muda terdengar cuma pada sekelompok masyarakat urban di beberapa kota besar. Menimbang masih ada 31,4 juta masyarakat miskin di Indonesia, populasi kaum urban ini bisa dipastikan jauh lebih kecil dari jumlah *the silent people* yang tidak bersuara karena tidak punya saluran untuk menyampaikan aspirasi.

Pada pembahasan persoalan yang spesifik tentang kesenian, perlu juga dikaji seberapa jauh kontradiksi dan perubahan *platform* pemikiran yang memunculkan seni kontemporer kita pahami. Perlu juga dibahas secara kritis mana yang relevan dan mana yang tidak. Pandangan Danto menjelang meninggal selayaknya dikaji sebagai gejala "pemutihan" berbagai dampak

hegemoni pada perkembangan pemahaman seni dunia dan mengajak kita mempertanyakan lagi apa pemahaman mendasar tentang seni pada masyarakat kita.

Selaku penutup, saya ingin mengutip pandangan Kiyai Mustofa Bisri pada pengantar pembukaan pameran di Magelang, persis sebulan lalu. Gus Mus mengemukakan, "kita ini bangsa yang tidak kreatif. Dulu kita menempatkan politik sebagai panglima, sesudah itu ekonomi sebagai panglima. Sekarang kita kembali lagi menjadikan politik sebagai panglima sementara ekonominya sudah menjadi semakin pintar berpolitik.... Mengapa tidak ada pemimpin yang berpikir menjadikan kebudayaan sebagai panglima?" Pandangan Gus Mus membangkitkan kesadaran kita bahwa kebudayaan kita sekarang ini sedang menghadapi hegemoni politik dan ekonomi. Hal ini tercermin antara lain pada sikap politisi, birokrat, dan pengusaha yang bahkan sudah tidak mengenal lagi budaya malu.

Pandangan Gus Mus selayaknya dipertimbangkan pada pembahasan RUU Kebudayaan sebagai upaya memaknai kepentingan negara dan bangsa.

Hasil Persidangan

Kongres Kesenian Indonesia III menelurkan sejumlah hasil berupa keputusan dan rekomendasi yang berasal dari serangkaian persidangan yang dilaksanakan, baik Sidang Komite, Sidang Komisi, maupun Sidang Pleno. Berikut adalah hasil-hasil persidangan tersebut:

SIDANG KOMITE

Komite Sastra

“Politik Kesenian dalam Perspektif Negara”

Dinamika perubahan sosial politik pasca 1998 berimplikasi pada pergeseran fungsi negara dalam menjalankan otoritasnya. Pada sisi lain, berlangsung penguatan peran publik yang lebih aktif dalam pengelolaan perubahan. Dalam konteks kehidupan kesenian, negara harus melakukan reposisi fungsi untuk mengelola partisipasi publik yang lebih luas. Reposisi ini harus dijalankan melalui sebuah desain kebijakan, perankelembagaan dan politik anggaran yang berpihak, serta peningkatan kompetensi birokrasi kesenian dan pengelola komunitas-komunitas seni. Pertanyaannya, apa saja pilihan politik kesenian yang selama ini dijalankan oleh negara dan bagaimana yang semestinya?

Untuk menjalankan politik kesenian yang relevan dengan perubahan fungsi negara tersebut, beberapa usulan program dari Komite Sastra adalah, dari aspek Regulasi di antaranya: menyediakan payung hukum yang memiliki otoritas cukup kuat, setidaknya setingkat Keppres, mengevaluasi RUU Kebudayaan, membuat regulasi di dunia perbukuan yang bisa memudahkan peningkatan minat baca dan apresiasi sastra, misalnya kebijakan pajak yang berpihak pada kegiatan penerbitan buku sastra sehingga harga buku tersebut menjadi lebih terjangkau.

Dan pada aspek tata kelola kelembagaan birokrasi kesenian: meningkatkan kompetensi SDM birokrasi kesenian (dalam hal ini sastra) dalam bentuk-bentuk diklat, dialog, atau gerakan pemahaman sastra lainnya; pengelolaan pengetahuan lembaga-lembaga kesenian yang transparan; menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga penerbitan negara dan pendokumentasian, seperti Balai Pustaka dan Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin dan lain-lain. Sedangkan pada aspek penguatan faslitas: memfasilitasi kegiatan-kegiatan sastra di berbagai wilayah, merevitalisasi

dan merestrukturisasi lembaga-lembaga kesenian untuk mendapatkan pengelolaan dan kepengurusan yang lebih bertanggung jawab, penguatan komunitas-komunitas sastra di berbagai daerah, pengembangan kompetensi sastrawan dengan kegiatan-kegiatan seperti residensi.

Dari sisi anggaran: membuat regulasi (minimal setingkat Keppres) yang bisa menjamin tersedianya anggaran rutin yang memadai dari APBN/APBD, memberikan kemudahan kepada lembaga-lembaga untuk mendapatkan anggaran tambahan semacam hibah atau sponsor dari pihak-pihak lain, menyediakan anggaran untuk menjamin kesejahteraan para sastrawan, misalnya dalam bentuk asuransi. Dan pada aspek pendidikan: melakukan penerbitan buku-buku sastra, mendorong penerjemahan karya-karya sastra (lokal/Indonesia/asing), mengadakan program-program peningkatan minat baca melalui regulasi perbukuan yang memudahkan peningkatan minat baca dan apresiasi sastra, misalnya pengurangan pajak, subsidi, harga buku, dan lain-lain. Negara juga harus membuat penghargaan berupa anugerah sastra untuk para maestro atau Sastrawan Negara, juga mengadakan kegiatan sastra seperti Festival Sastra Indonesia.

“Kesenian, Negara dan Tantangan Global”

Sub-tema ini mencoba melihat posisi Indonesia dalam lanskap kehidupan Internasional, terkait perubahan politik dan ekonomi tingkat global, menengarai kompetisi investasi kultural berbagai negara serta perebutan “pasar” bagi produk-produk kulturalnya. Pertanyaannya: apa yang sudah dan harus dilakukan politik kesenian Indonesia dalam menyiapkan investasi kultural yang sistematis, kompetitif dan berkesinambungan.

Dunia bergerak dalam perubahan yang sangat cepat. Orang menyebutnya sebagai internasionalisasi atau globalitas (bukan sekadar globalisasi). Perubahan ini digerakkan oleh perdagangan, pergerakan modal, perpindahan manusia, dan ilmu pengetahuan. Bagaimana mengatasi persoalan ini. Bagaimana Indonesia mengambil posisi atas tantangan di tingkat global itu? Bagaimanapun perubahan ekonomi dan politik di tingkat global akan sangat memengaruhi apa pun yang bergerak di lingkaran politik dan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, beberapa usulan program yang harus dijalankan oleh negara adalah: pembentukan lembaga kuratorial dan pemasar sastra yang memungkinkan munculnya karya-karya sastra terbaik setiap tahun untuk diterjemahkan, dipromosikan, dan dipasarkan di tingkat

global. Pembentukan institusi jaringan global yang memungkinkan karya sastra Indonesia mendunia. Pembentukan pusat penerjemahan yang difasilitasi Negara. Penyelenggaraan festival-festival internasional dengan kandungan budaya dan bahasa Indonesia. Pembentukan pusat dokumentasi dan museum dunia, nasional, maupun regional. Menjadikan sastra sebagai juru bicara diplomasi kebudayaan di kancah internasional. Pembentukan forum sastra internasional yang dikelola oleh Negara. Pembentukan Komisi Kesenian. Memunculkan aktivitas-aktivitas sastra yang dilakukan oleh masyarakat untuk memasuki pergaulan sastra global.

“Pendidikan Seni, Media dan Kreativitas Sastra.”

Dalam subtema ini, hal pertama yang harus digaris bawahi adalah masalah kurikulum di dunia pendidikan yang harus menambah dan mempertajam konten sastra dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalau perlu mengganti mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi pelajaran mengarang di jenjang SD. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya guru dengan memperbanyak program *workshop* sastra di sekolah. Penguatan infrastruktur dan perpustakaan dengan penyediaan buku-buku sastra yang memadai, menghidupkan program buku Inpres Sastra, menyelenggarakan Program Sejuta Buku Sastra dan mendirikan pusat dokumentasi sastra di daerah di seluruh Indonesia. Pelibatan Sastrawan dalam Pendidikan: program sastrawan masuk sekolah, program residensi sastrawan di dalam dan luar negeri, juga program Indonesia Mengarang.

“Seni dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian.”

Realitas kesenian terkini menunjukkan bahwa wilayah kesenian bukan lagi bagian yang terisolasi dari dinamika makro disiplin keilmuan yang telah berkembang melintasi batas-batas disiplin primordialnya. Karena itu, ada kebutuhan baru bagi dunia seni untuk dapat memperluas horizon pengalamannya dengan memanfaatkan fungsi dan pertumbuhan disiplin ilmu lain yang relevan sebagai alat baca bagi fenomena kesenian. Artinya, dunia seni harus memposisikan dirinya dihadapan realitas inter dan bahkan multi disipliner.

Dengan strategi tersebut dunia seni dapat menunjukkan kontribusi dan ikut terlibat untuk menyuarakan pengalaman-pengalaman yang lebih kompleks dalam kehidupan kekinian. Pertanyaannya: apa yang harus diberdayakan dan strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh pelaku seni,

komunitas seni, dan organisasi seni dalam proses inklusi disiplin tersebut?

Sastrawan kerap terlanggar haknya, misalnya pelanggaran hak cipta (pembajakan, plagiat) hak kebebasan kreatif (tekanan kekuasaan sipil maupun negara) dan hak ekonomisnya (royalti dan honor yang tak terbayar oleh penerbit). Dan pelanggaran hak-hak ini sering dibiarkan, terkandung, tanpa ada penyelesaian meski secara hukum sudah ada instansi resmi yang mestinya menanganinya, misalnya kepolisian dan penegak hukum lainnya. Apa yang harus dilakukan negara berkaitan dengan kehidupan sastrawan yang memiliki hak hukum seperti kebebasan mencipta, hak-hak atas kekayaan intelektual dan hak ekonominya yang wajib dijaga dan dilindungi oleh masyarakat dan negara?Maka, perlu dibentuk Komisi Nasional kesenian untuk merespon berbagai permasalahan hak-hak sastrawan yang berkaitan dengan hukum. Juga berbagai permasalahan substansial seperti pelanggaran dan hambatan kebebasan mencipta, dan lain-lain.

Secara umum, karya sastra merupakan literatur yang tak diminati masyarakat pembaca ketimbang literatur lain—laporan penjualan di toko buku bisa menjadi salah satu indikator utama. Diduga keras, hal ini merupakan dampak jangka panjang dari “kegagalan” pendidikan sastra di sekolah. Produksi karya sastra berlimpah ruah. Namun respon intelektual dan kaum kritikus sangat minimal sehingga laju perkembangan estetika dan kebudayaan karya sastra tak “terbina”.

Karya sastra diproduksi untuk (dibaca) masyarakat. Tanpa masyarakat karya sastra akan kehilangan fungsi sosialnya. Melalui karya sastra kepentingan estetika juga dapat termanifestasikan sehingga masyarakat dapat melihat diri mereka melalui berbagai renungan kehidupan manusia sebagai individu atau bagian dari alam maupun komunitas besar bangsa dan negara. Karya sastra, dengan demikian, secara cultural memiliki fungsi yang sangat strategis. Karya sastra juga dapat dijadikan rujukan atau cermin pengembangan kemanusiaan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa wilayah Indonesia sangat luas dengan masyarakat yang hidup di banyak pulau. Kondisi geografis ini menjadi kendala atas informasi dan akses karya sastra. Namun faktanya, pusat perbukuan (penerbit dan toko buku) terkonsentrasi di pulau Jawa. Maka, negara harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mempermudah perluasan distribusi sastra di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibuat pusat informasi dan data karya sastra yang melakukan pengumpulan karya sastra, penyebaran informasi karya sastra

ke instansi literatur (sekolah/perpustakaan) yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Juga perlu dibuat program penyeleksian karya sastra melalui pengkajian oleh kritikus di bidang sastra maupun melalui disiplin ilmu-ilmu lain yang hasilnya diterbitkan secara berkala baik dalam bentuk buku maupun jurnal yang disebar luaskan ke seluruh wilayah Indonesia.

Komite Seni Rupa

“Politik Kesenian dalam Perspektif Negara”

Akar segala permasalahan dari hubungan kesenian dan negara yang tidak sehat adalah birokrasi pemerintahan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Maka, rekomendasi utama yang harus dijalankan adalah “Reformasi dan Restrukturisasi Birokrasi dalam Bidang Seni-Budaya.” Beberapa hal yang harus ditantadaskan adalah:

Pertama, kami menyetujui usulan Hilmar Farid mengenai pembentukan suatu lembaga independen atau komite yang dipayungi oleh keputusan presiden RI dengan peran utama menjadi mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam bidang kesenian. *Kedua*, kami mengusulkan disusunnya suatu aturan atau perundangan-undangan yang memiliki kekuatan untuk mewajibkan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk memfasilitasi kegiatan kesenian.

Ketiga, kami mengusulkan revitalisasi lembaga-lembaga kesenian yang sudah terbentuk. Dewan Kesenian yang sudah ada harus dipastikan dapat berfungsi dengan baik. Daerah-daerah yang belum memiliki Dewan Kesenian didorong untuk membentuk Dewan Kesenian. Kami juga mengusulkan Dewan Kesenian dibentuk hingga level daerah tingkat II. Secara khusus kami menuntut agar Taman Budaya tidak lagi berada di bawah kendali pemerintah provinsi, melainkan dikembalikan kepada Dirjen Kebudayaan. Lembaga-lembaga yang sudah ada tersebut perlu dikontrol dengan sistem yang transparan. Salah satu cara agar sistemnya transparan, kami mengusulkan, untuk kasus Taman Budaya, agar diadakan lelang pemilihan kepala-kepala Taman Budaya.

Sebagai catatan tambahan, *pertama*, kami menganggap bahwa dalam bidang kesenian, semua penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga daerah, sebaiknya menempati posisi sebagai fasilitator. Adapun mengenai perumusan kebijakan, perlu digalang kemitraan dengan pelaku-pelaku dalam medan sosial seni. *Kedua*, kami mendorong diadakannya program-program preservasi dan konservasi karya-karya seni yang telah dihasilkan

oleh seniman-seniman Indonesia.

“Kesenian, Negara dan Tantangan Global.”

Pokok-soal dalam sub-tema ini adalah kebijakan penyelenggara negara dalam menghadapi tantangan global. Selama ini, selain kebijakannya tidak tegas, juga tidak ada suatu rancangan yang sifatnya menyeluruh menyangkut diplomasi kebudayaan kita. Maka penyelenggara negara harus menyusun kebijakan untuk menghadapi tantangan global yang berlandaskan strategi kebudayaan yang dirancang dengan baik. Kami merekomendasikan beberapa program. *Pertama*, promosi karya-karya seni dari Indonesia ke dunia internasional. Dan sebaliknya, mendatangkan karya-karya dari mancanegara yang dianggap bermutu ke dalam negeri untuk memperkaya pengalaman estetik kita. Dalam hal ini, kami menganggap perlu adanya jalur kerjasama khusus antara pelaku-pelaku dalam medan sosial seni dengan atase-atase kebudayaan di kedutaan-kedutaan kita.

Kedua, penyelenggara negara harus rutin menyelenggarakan perhelatan internasional untuk menjadikan Indonesia dipandang sebagai subjek, bukan objek dari “proyek” internasionalisme. *Ketiga*, dalam kaitannya dengan tantangan di tingkat global, makin mengemuka kebutuhan kita untuk terus merumuskan cara kita mengartikulasi diri. Dalam konteks ini, penyelenggara negara harus membentuk lembaga pengarsipan dalam bidang kesenian. Lembaga ini juga harus mampu menyelenggarakan program-program riset berkala dan berskala nasional. Dan *keempat*, membuat kebijakan khusus dalam hal bea-cukai dan pajak, menyangkut karya-karya seni.

Komite Teater

“Politik Kesenian dalam Perspektif Negara”

Ada beberapa permasalahan utama dalam dunia teater di Indonesia, di antaranya: kurangnya kehadiran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan kesenian. Ketiadaan lembaga independen yang bisa mendorong pengembangan, pembinaan, pengelolaan, proses dan sistem kuratorial serta monitoring dan evaluasi kebijakan negara yang berkaitan dengan kesenian. Ketidakpastian dana yang menyebabkan program-program lembaga-lembaga kesenian yang tidak bisa diwujudkan. Kurangnya perhatian terhadap peningkatan kompetensi birokrasi kesenian dan

pengelola komunitas-komunitas seni. Ketidak tegasan pemerintah untuk mengharuskan BUMN dan BUMD untuk mengalokasikan dana CSR bagi kegiatan teater.

Selain itu perlu dicatat bahwa selama ini tidak ada program temu teater tingkat nasional. Keikutsertaan kelompok teater anak di tingkat internasional ternyata hanya kelompok teater yang itu-itu saja. Tidak adanya gedung kesenian dan ruang-ruang publik untuk berkreasi seni di tingkat kota/kabupaten. Sulitnya menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan negara di kota/kabupaten yang ada. Dan dari aspek regulasi umum, RUU Kebudayaan yang sedang digodog DPR saat ini, ternyata akan merugikan kehidupan kesenian di Indonesia.

Beberapa program yang harus dijalankan adalah: *pertama*, pembentukan Lembaga Seni Independen atau dengan nama yang lain, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan lembaga tersebut harus dengan Keputusan Presiden. Lembaga ini memiliki fungsi: pengembangan, pembinaan, pengelolaan, kurasi, dan monitoring evaluasi kebijakan Pemerintah menginstruksikan BUMN dan BUMD untuk mengalokasikan dana CSR bagi kegiatan teater. *Kedua*, pemerintah membuat tim seleksi untuk memilih calon anggota Lembaga Independen. Anggota Lembaga Independen: pelaku seni (seniman) yang mewakili tujuh bidang seni. Lamakeanggotaan 3 tahun dan tidak bisa dipilih kembali. *Keempat*, pemerintah harus menjadi fasilitator dari penyelenggaraan kegiatan kesenian dengan menetapkan 20 % dana pendidikan dan kebudayaan pada APBN dan APBD sebagai dana kesenian. *Kelima*, peningkatan kompetensi birokrasi kesenian dan pengelola komunitas-komunitas seni.

Keenam, memfasilitasi Temu Teater Tradisional, Temu Teater Pelajar (SMP dan SMA), Temu Teater Anak Nasional, yang diadakan dua tahun sekali secara nasional. Pemerintah harus memfasilitasi pemenang Festival Teater Anak Nasional tampil di Festival teater Anak internasional di luar negeri. *Ketujuh*, pemerintah perlu mengadakan gedung kesenian dan ruang-ruang publik untuk berkreasi seni di setiap kabupaten/kota. Harus ada kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan negara. *Kedelapan*, secara khusus KKI dapat mencetuskan sikap seniman terhadap RUU Kebudayaan yang meminta pemerintah membentuk tim untuk mengkaji kembali RUU Kebudayaan karena RUU tersebut memuat hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kehidupan kesenian.

“Kesenian, Negara dan Tantangan Global.”

Beberapa pembicara utama dalam kongres, di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan menyatakan bahwa teater harus menjadi “tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tamu yang mempesona di seluruh negeri di dunia”. Hilmar Farid mengatakan bahwa aktivitas teater perlu didorong menjadi gerakan politik dengan membentuk lembaga independen yang mengurus kegiatan-kegiatan teater dan memiliki kekuatan hukum dari negara. Sedangkan Nirwan Dewanto menegaskan bahwa pemberian bobot politik atas aktivitas teater perlu dilakukan secara hati-hati dan lebih memperhatikan peran teater sebagai ‘jendela’ Indonesia. Dan Afrizal Malnamenandakan bahwa perlu dibangun jembatan komunikasi yang lebih baik antara seniman teater dengan negara sehingga seniman bisa mengidentifikasi apa saja yang diperlukannya dari negara dan sebaliknya.

Hal-hal tersebut di atas perlu disadari untuk membangun sinergi yang kuat di antara pelaku teater dengan negara. perlu dicatat bahwa dunia teater di Indonesia harus menghadapi fakta-fakta baru, yakni berbagai perubahan konstelasi kehidupan di tingkatan global, yang ditandai oleh laju globalisasi budaya dan perkembangan teknologi komunikasi yang menghubungkan berbagai belahan dunia dengan cara dan gerak yang belum terbayangkan sebelumnya. Perubahan konstelasi kehidupan global di masakini niscaya akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di tanah air. Hal itu akan mengubah ruang sosial-kultural bagi teater untuk tumbuh. Salah satu dampak yang tak terelakkan dalam keterhubungan global adalah pertemuan-pertemuan dan pertukaran antar budaya, yang akan turut mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan praktik artistik teater. Maka, teater di tanah air perlu mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan tantangan dan peluang dalam perubahan konstelasi kehidupan global, terutama terkait dengan terbukanya kompetisi dan peran teater sebagai bagian dari representasi Indonesia dalam pergaulan internasional. Untuk itu negara harus hadir terutama sebagai fasilitator dan pelindung hak-hak para aktivis teater sebagai warga negara.

Tapi selama ini belum ada pembacaan dan respons yang memadai dari aktivitas teater di tanah air terhadap isu-isu global, antara lain yang berkaitan dengan pasar bebas, pertukaran budaya, kemajuan teknologi, terorisme-radikalisme dan ekologi. Negara belum menjadi fasilitator yang baik bagi seniman teater dalam hal perhadapan mereka dengan kehidupan global. Negara juga belum menggalang ‘diplomasi budaya’ melalui teater

dalam segala dimensinya. Sebagian besar seniman teater di tanah air belum punya kesiapan dan kecakapan yang memadai untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang relevan terhadap kerja-kerja artistik di tingkat global. Seniman teater belum berhasil menemukan kerangka artistik yang dapat menautkan antara ruang sosial-kultural yang menjadi basis produksinya di tanah air dengan perubahan konstelasi kehidupan global.

Maka, untuk mengantisipasi berbagai persoalan di atas, harus dibuat beberapa program, di antaranya: *Travel Grant*; *Collaborative Work and Research Grant*; Festival Teater Internasional yang Bermartabat; Pertemuan Teater Nasional dengan agenda untuk menjawab Tantangan Global; The National Theatre of Indonesia (Pusat Informasi, Dokumentasi, Arsip, dan Kurasi).

"Pendidikan Seni, Media dan Kreativitas"

Sebagaimana diketahui bersama dan juga banyak disinggung para pembicara kunci, di banyak negara, pendidikan kesenian tidak dipandang sebelah mata; ia menempati posisi penting. Hal ini terjadi lantaran posisi penting pendidikan kesenian bukan hanya dilihat dari demi memajukan dunia kesenian itu sendiri, lebih jauh, ia dilihat sebagai kunci untuk membangun manusia yang kreatif dan dengan demikian berkarakter. Di lain pihak, kita tahu bahwa teater adalah salah satu cabang kesenian yang mencakup cabang-cabang kesenian yang lainnya. Lebih jauh dari itu, teater adalah salah satu cabang kesenian yang diajarkan (baik di dalam kurikulum mau pun ekstra kurikuler) di segala jenjang pendidikan; mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Dengan latar belakang demikian di atas, maka perlu dilakukan beberapa hal sembari mengingat pentingnya kesenian secara umum dan teater secara khusus di dalam pendidikan. *Pertama*, memastikan adanya perbaikan kurikulum pendidikan seni pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta perlu dipastikan pelaksanaannya dengan baik. Bersamaan dengan itu maka hal *kedua* yang penting adalah harus dipastikan ketersediaan guru teater yang berkualifikasi baik secara merata di seluruh Indonesia.

Sebagai penunjang, hal *ketiga* adalah pengadaan buku-buku bahan ajar seni teater yang berkualitas. *Keempat*, selain buku bahan ajar, perlu juga pengadaan buku-buku referensi dan naskah-naskah drama secara cetak dan elektronik yang dikurasi oleh tim ahli. Pengkurasian oleh tim ahli penting kiranya mengingat agar tepat guna dan tepat sasaran buku dan naskah yang disediakan itu. Untuk mempermudah komunikasi antar

daerah dan daerah dengan pusat di dalam permasalahan ini, maka, *kelima*, perlu dibangun jaringankomunikasi internet (website) yang memuatinformasi, gagasan, arsip, dan bank data seniteater.

Fasilitasi berkesenian di Indonesia saat ini sesungguhnya sudah cukup tersedia, meski tidak terlalu diperhatikan. Oleh karena itu, *keenam*, perlu merevitalisasi Taman-taman Budaya dan memperbanyak ruang publik yang layak digunakan untuk pertunjukan teater. Untuk menjaga kualitas, maka perlu, *ketujuh*, membuat standardisasi dan kualifikasi bagi guru dan pelatih teater di sekolah-sekolah. Sebagai bentuk apresiasi peserta didik setelah mempelajari semuanya itu, maka, *kedelapan*, perlu diadakan festival-festival teater di tingkatdaerah (provinsi), nasionaldaninternasional. Yang *terakhir*, perlu diadakan pelatihan teater di daerah-daerah secara periodik.

“Seni dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian”

Kesenian pada perkembangan dewasa ini semakin kentara sebagai hal yang tidak bisa dibicarakan terpisah dari realitas keseluruhan. Ia bersilang-sengkarut dengan masalah-masalah kehidupan lainnya. Bukan itu saja, kesenian di Indonesia di dalam perkembangannya punya tantangan perihal berdialog dengan kesenian di luar wilayahnya. Dengan demikian kesenian butuh memahami dunia; dalam soal ilmu-ilmu lain atau pun perkembangan seni di wilayah-wilayah yang lain. Dengan dua hal itu, seni yang tanggap pada situasi bisa kita bayangkan.

Untuk melangkah jauh demikian itu, pertama-tama, seni kita perlu mengetahui jati dirinya terlebih dahulu. Realitas terkini menunjukkan bahwa seni teater di Indonesia begitu lemah secara data base dan pendokumentasian. Sebagai sebuah seni pertunjukan, kerapnya kenangan akan sebuah pertunjukan teater mengandaikan ingatan dari pelaku-pelakunya. Oleh karena itu, hal *pertama* yang perlu dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi pembentukan data base naskah dan dokumentasi karya.

Hal berikut yang perlu diperhatikan adalah luasnya Indonesia dan di setiap wilayah punya tantangan-tantangan sendiri terhadap masalah kesenian secara khusus dan masalah sosio politik secara umum. Pada titik ini, perlu kiranya komunikasi yang lebih intens di antara pelaku-pelaku kesenian. Oleh karena itu, *kedua*, pemerintah perlu memfasilitasi penyelenggaraan festival di satuan-satuan wilayah Indonesia sebagai bagian dari pembentukan pusat jaringan kerja seniman teater dan institusi

pendukungnya. Satuan wilayah dimaksud adalah: Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Madura, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua. Setelah adanya satuan wilayah tersebut, perlu pula pertemuan nasional. Sehingga, perlulah, *ketiga*, pemerintah menghidupkankembali temu teater nasional. Kuatnya dunia teater nasional kita perlu diuji dalam taraf yang lebih jauh; taraf internasional. Maka, *keempat*, perlu adanya festival teater internasional yang difasilitasi pemerintah. Jika kita mulai melihat teater kita duduk sejajar dengan dunia teater internasional, maka *kelima* perlu ada alat pendukung teater yang berstandar global. Di mana pemerintah bisa melakukannya dengan merenovasi, melengkapi dan menyediakan alat-alat pendukung panggung yang representatif sesuai dengan standar global. Yang terakhir, pemerintah perlu memfasilitasi program-program residensi nasional dan internasional untuk para pekerja teater.

Komite Tari

“Politik Kesenian dalam Perspektif Negara”

Otonomi daerah sebagai buah reformasi mewarnai kehidupan perpolitikan di negara kita kini. Dengan demikian, kesenian serta kebudayaan mendapatkan juga imbasnya. Tampak betul betapa adanya naik turun perihal kesenian dan kebudayaan di wilayah-wilayah. Ada daerah yang kesenian dan kebudayaannya begitu diperhatikan, ada yang tidak. Selain itu, kebijaksanaan kesenian kebudayaan yang terpecah-pecah di setiap daerah ini menimbulkan kebingungan dan tidak sinkronnya perkembangan kesenian dan kebudayaan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah, terkhusus di bidang kesenian dan kebudayaan perlu ditinjau ulang. Perlu kiranya ada kebijakan kebudayaan-kesenian di tingkat nasional yang jelas sebagai panduan penerapan dan batas-batasan untuk kebijakan di bidang serupa di daerah-daerah.

Sebagai mitra pemerintah daerah, kerapnya dibentuk dewan kesenian-dewan kesenian di daerah-daerah. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa, dewan kesenian-dewan kesenian ini dibuat pertama-tama bukan untuk kebutuhan kesenian-kebudayaan, tetapi untuk kebutuhan politik praktis—sekadar menjadi alat politik para politikus atau didominasi segelintir orang yang mendominasi program dan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga negara yang independen yang bertugas mengurus kesenian, yang anggotanya memang dipilih dari para pemikir, pemerhati

dan praktisi kesenian. Lembaga di atas didanai langsung dari APBN.

Banyak pula kebijakan, peraturan dan perundang-undangan di tingkat nasional mau pun daerah yang justru menghambat kerja-kerja kesenian. Sebagai contoh, pungutan Disparbud setempat yang terjadi di Indramayu untuk membuat 'buku grup' – semacam ijin bekerja yang berlaku secara tahunan bagi sebuah kelompok kesenian. Posisi seniman seringkali lemah, terutama mereka yang tidak berani bernegosiasi. Seniman yang berani, bisa menghindari dari kewajiban yang tidak jelas ini.

Berhubungan dengan itu, banyak asosiasi kesenian yang tumbuh, berkembang, layu dan lalu mati karena kehabisan nafas. Salah satu contohnya, dalam konteks seni pertunjukan, adalah MSPI (Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia). MSPI sangat bagus sebagai sebuah lembaga yang membuat penelitian dan pendokumentasian perihal seni pertunjukan. Ia lantas hilang karena kehabisan dana dan dukungan. Seni tari Indonesia oleh karena itu perlu memiliki sebuah pertemuan berkala secara nasional di mana di situ para pelaku tari Indonesia bisa bertemu dan bertukar pikiran, pengalaman, dan membangun jaringan. Pertemuan yang demikian ini perlu difasilitasi oleh pemerintah.

Disadari juga oleh sidang bahwa kerapnya usulan-usulan kepada pemerintah hilang begitu saja. Maka, perlu ada tindakan konkret untuk mengawal usulan dan rekomendasi ini sehingga bisa diwujudkan. Sehubungan dengan itu, selain insan tari, pihak birokrasi bidang kesenian-kebudayaan pun perlu ditingkatkan kompetensinya dengan baik. Dan yang terpenting, birokrasi harus bersinergi dengan masyarakat kesenian dalam menyusun program-programnya (misalnya Taman Budaya). Sehubungan dengan itu, politik anggaran di bidang kesenian-kebudayaan perlu diketahui oleh para pekerja kesenian-kebudayaan. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme transparansi kebijakan seni-budaya, terkhusus terkait bagaimana seniman mengakses dana-dana yang dapat membantu proses keseniannya (dari kreasi hingga distribusi). Yang terakhir, yang kiranya bisa menjadi hulu dari semua itu adalah adanya UU Kesenian yang mendukung proses kesenian dan memihak kepentingan masyarakat kesenian.

"Kesenian Negara di Tingkat Global"

Perkembangan kesenian di tingkat global begitu pesatnya. Di saat yang sama, pengetahuan dunia global perihal kesenian Indonesia masih itu-itu saja. Perlu adanya sebuah politik diplomasi kebudayaan yang kuat. Jika

dilihat contohnya di dalam negeri saja, kita lihat bagaimana negara-negara tertentu bisa menancarkan pengaruh keseniannya begitu kuat lantaran memiliki pusat kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu perlu kiranya Indonesia memiliki pusat-pusat kebudayaan di mancanegara sebagai corong diplomasi kesenian dan kebudayaan Indonesia. Perlu didirikannya Rumah Budaya Indonesia di negara-negara terpilih sebagai sarana diplomasi kebudayaan ini.

Para pelaku seni tari sebenarnya adalah mitra yang potensial untuk kerja-kerja dipolmasi kebudayaan ini. Pasalnya, mereka kerap mendapat kesempatan, diundang menghadiri festival tari di mancanegara serta perjalanan atau kunjungan perihal itu lainnya. Namun kendala kerapnya sangat praktis. Seperti perkara kelebihan bagasi dll, yang kecil namun sangat menghambat. Oleh karena itu, perluperaturan yang mendukung upaya seniman yang berkesempatan pentas ke luar negeri seperti dibebaskannya kelebihan bagasi untuk kepentingan pertunjukan serta bea-bea terkait lainnya.

Secara bersama, pemerintah dan pelaku seni tari, perlu memikirkan hal ini secara serius dan juga memikirkan strategi untuk mengatasinya. Berhubungan dengan itu, pengertian 'global' perlu juga dilihat kembali. Jangan sampai 'global' selalu identik dengan turing ke luar negeri. Namun perlu juga dipikirkan bagaimana menghadirkan yang global ini di tengah konteks lokal/nasional kita. Salah satu caranya adalah mendukung atau membuat festival taraf internasional di dalam negeri.

"Pendidikan Seni, Media, dan Kreativitas"

Di dalam konteks pendidikan, kesenian sebenarnya memiliki dua isu yakni "seni untuk pendidikan" dan "pendidikan seni". Dua hal yang tampaknya tak terlalu penting perbedaannya tetapi hal ini sesungguhnya krusial. Kedua hal ini nantinya berhubungan dengan perkara turunan lainnya; perihal institusi pendidikan, perihal kurikulum, perihal teori, perihal praktek pendidikan, dsb. Berangkat dari dua hal itu, rekomendasi sidang sebagai berikut.

Perlunya kejelasan wacana tentang perbedaan kurikulum untuk 'pendidikan tinggi seni' dan 'seni untuk pendidikan' (pendidikan keguruan). Dengan kejelasan wacana tersebut, maka kurikulum mata ajar kesenian di sekolah-sekolah umum harus diperlakukan sama penting dengan mata ajar lainnya, sehingga guru-guru seni pun harus kompeten, yaitu mereka yang memang berlatar-belakang pendidikan seni atau seni

untuk pendidikan. Dalam konteks ini pula, kita pernah punya SMKI yang lantas berubah menjadi SMK. SMK yang dahulunya dari SMKI perlu dikembalikan menjadi SMKI. Bersamaan dengan itu, penekanan kurikulum dari 30% praktik - 70% teori menjadi 30% teori - 70% praktik. Sehingga, penekanan pendidikannya ada pada keterampilan.

Sekolah-sekolah tingkat pendidikan tinggi di bidang kesenian masihlah sangat minim di Indonesia. Untuk itu perlu didirikan sekolah-sekolah seni di tingkat pendidikan tinggi di kota-kota besar tertentu di luar Jawa. Dalam hubungannya dengan itu, perlunya ditinjau kembali kurikulum pendidikan seni secara menyeluruh yang menghargai konteks dan muatan kesenian lokal (vernakularitas) seperti tidak lagi mengajarkan tentang pemahaman tari di Sumatra dengan kosa-kata yang diserap dari terminologi tari Jawa (*wiraga, wirama*).

Perlunya menyadari perbedaan transmisi pendidikan dari model *cantrik-mantrik* di alam kesenian tradisional yang seringkali berlangsung seumur hidup, dan transmisi di pendidikan tinggi modern yang terbatas waktunya, terutama bagaimana agar pengajaran tidak melulu berfokus pada hal-hal yang terlihat (teknik menari) namun juga menyentuh muatan spiritualitas di baliknya. Berkaitan dengan pengajaran, buku ajar kesenian (terutama tari) yang diterbitkan oleh Depdikbud untuk sekolah dasar dan menengah perlu direvisi karena tidak memiliki mutu yang baik dan bahkan menyesatkan. Misalnya definisi ragam genre tari untuk kelas 9 yang cenderung rasis (kata-kata seperti 'negro' dan lain sebagainya).

Masih di dalam konteks pendidikan, terkhusus pendidikan tinggi, perlu ada kejelasan kurikulum tentang pendidikan untuk mencetak seniman (konservatori) dan wacana (kajian). Baru-baru ini meruak kontroversi perihal ISBI. Dari segi kurikulum bagaimana menjustifikasi pengajar ISBI Papua yang justru banyak berasal dari Bali, atau ISBI Kalimantan yang berasal dari ISI Jogja misalnya? Pendidikan seni (sarjana seni) harus mewarnai birokrasi kesenian karena hal ini terkait dengan minat dan kompetensi, namun juga harus diperhatikan jika birokrat bukan menjadi subjek dari kebijakan seni seperti yang selama ini terjadi.

Selain pendidikan di sekolah-sekolah (dasar, menengah, mau pun tinggi), perlu pula dipikirkan pendidikan untuk publik perihal seni tari. Kiranya perlu didirikan Museum Tari sebagai area pembelajaran publik yang tidak melulu berisi arsip tentang tari Indonesia tapi juga menjadi sarana pameran dan pertunjukan. Bersamaan dengan pendidikan untuk publik, perlu juga difasilitasi peningkatan kompetensi seniman tari itu

sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui fasilitasi terhadap program residensi serta penelitian seniman dalam membuat karya.

Komite Musik

“Politik Kesenian dalam Perspektif Negara”

Sidang melihat ada beberapa masalah di dalam konteks regulasi kesenian, kelembagaan kesenian, dan strategi kesenian. Di bidang regulasi kesenian, perlu disahkannya Undang-Undang Kesenian, termasuk PERDA untuk tingkat daerah. Selain itu RUU Kebudayaan perlu dibatalkan atau diganti dengan rumusan yang menjadi payung bagi pemerintah sebagai fasilitator, bukan pelaksana tunggal. Hal ini lantaran perlu diingat bahwa otoritas kesenian bukan milik pemerintah, tetapi milik seniman. Masih di dalam konteks RUU, perlu pembagian nomenklatur yang jelas antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pariwisata.

Pada aras kelembagaan kesenian, peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini Direktorat Kesenian) sebagai fasilitator perlu dimaksimalkan. Perlu dibuat lembaga pendanaan kesenian yang independen. Perlu juga dipikirkan untuk melembagakan peristiwa kesenian yang sudah ada dan mapan yang digagas oleh badan-badan masyarakat. Hal ini agar peristiwa kesenian tersebut bisa lebih bertahan. Pemerintah perlu membiayai dan memperkuat kelembagaan lembaga kesenian yang sudah ada yang digagas oleh badan-badan masyarakat.

Di dalam aras strategi kesenian, perlu dipikirkan hal-hal yang berkaitan dengan isu pendidikan seni. Selain itu, perlu menghasilkan atase-atase Kebudayaan KBRI/ KJRI yang memiliki pemahaman seni yang baik. Tentu saja penyediaan infrastruktur (ruang publik dan ruang pertunjukan), pendidikan, pendanaan pun perlu dipikirkan. Yang terakhir, politik anggaran kesenian dan skema pendanaan kesenian perlu diperjelas, diperkuat, dan transparan.

“Pendidikan Seni, Media dan Kreativitas”

Pada perkembangan terkini praktik-praktik seni selalu berhadapan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, seperti eksplorasi persilangan medium ekspresi dan juga perkembangan teknologi media (termasuk teknologi digital dan media sosial). Situasi ini mengharuskan paradigma pendidikan seni untuk menjawab fenomena tersebut dengan

menerapkan model dan pendekatan kreativitas, terutama dalam hal mengaktualisasikan materi dan metode ajar, baik dalam konteks pendidikan formal (sekolah) maupun non formal (komunitas atau sanggar). Hal ini berhubungan juga dengan fungsi media sosial untuk edukasi publik.

Beberapa masalah dalam konteks ini sangat mengemuka di dalam keseharian kita. *Pertama*, kurikulum pendidikan (dasar) khususnya hanya membelajarkan konten musik Barat dan cenderung digeneralisir, sehingga ada kesan musik etnik yang berkembang di wilayah-wilayah etnik tidak dikenal oleh masyarakatnya (terutama siswa). *Kedua*, karena keterbatasan SDM yang mengajar di wilayah pendidikan seni (musik), maka hampir sebagian besar sekolah memanfaatkan guru yang bukan berpendidikan formal seni (musik, tari, teater, dan seni rupa) dijadikan sebagai guru seni. Hal ini berhubungan juga dengan, *ketiga*, kendala dengan ketiadaan sarana prasarana yang berkaitan dengan kelengkapan alat-alat kesenian yang menghambat pendidikan seni di wilayah-wilayah tertentu. Masalah *keempat* adalah alokasi waktu yang tersedia untuk pendidikan seni sangat terbatas (musik, tari, teater dan seni rupa hanya 2 jam per-minggu), sehingga target dalam kurikulum tidak tercapai.

Terpusatnya kurikulum pendidikan seni mengakibatkan peta kekuatan budaya lokal nyaris tidak sempat dipelajari oleh generasi penerus. Dampak yang lebih memprihatinkannya, kebudayaan lokal teralienasi dari pemiliknya sendiri. Hal ini sebenarnya akibat dari visi dan misi pendidikan seni yang belum menyentuh kepada pembangunan karakter peserta didik yang berbasis pada budaya Nusantara. Di provinsi tertentu kurang berkembang kreativitas terhadap pengembangan seni-seni etnik yang perlu diapresiasi oleh siswa sangat tampak. Indikatornya, rendahnya apresiasi terhadap seni etnik tersebut.

Jelaslah bahwa kurikulum kurang mampu menampilkan muatan lokalnya. Sekolah-sekolah sangat terbatas dengan penyediaan referensi yang berkaitan dengan pendidikan seni, sehingga materi ajar hanya berputar-putar dari yang ada di benak pengajarnya. Maka, ketimpangan di dalam target capaian kurikulum pendidikan seni di sekolah dasar diakibatkan guru yang mengajar bukan guru bidang dan atau guru yang sesuai dengan kompetensinya. Masalah perihal kurikulum ini pun punya sisi lainnya. Kurikulum pendidikan seni yang terakomodir secara formal masih sebatas di wilayah pendidikan formal, sehingga potensi lain untuk mengembangkan pendidikan seni di luar pendidikan formal belum berdampak terhadap tumbuhnya nilai-nilai apresiasi seni bagi siswa sebagai

pembelajar.

Dari permasalahan-permasalahan yang demikian itu, direkomendasikanlah beberapa hal. *Pertama*, pemerintah harus memperhatikan pemenuhan referensi untuk pendidikan seni (wawasan Nusantara) dan lebih jauh perlu membuat lembaga tersendiri yang fungsinya sebagai Perpustakaan Musik Nusantara. *Kedua*, kurikulum pendidikan seni (musik) perlu diubah kontennya dengan memasukkan musik etniksetempat dan harus diberlakukan di semua satuan pendidikan (dasar, menengah dan tinggi). Rekomendasi di atas bisa berjalan dengan baik apabila dilaksanakan bila bersamaan dengan itu, *ketiga*, dimanfaatkannya keberadaan seniman (empu) untuk dijadikan sebagai nara sumber utama pendidikan seni di daerah yang memiliki keterbatasan SDM. Program ini setara dengan pengangkatan Empu di perguruan tinggi seni. Kemendikbud punya program “Seniman Mengajar” yang perlu dikembangkan lagi. Selain itu cakupan program.

Sehubungan dengan fasilitasi dan waktu pengajaran, pemerintah berkewajiban memenuhi sarana dan prasarana belajar (terutama alat-alat kesenian) di wilayah-wilayah (provinsi) tertentu. Perlu ditambah alokasi waktu untuk pendidikan seni, sekurang-kurangnya 4 jam per-minggu perbidang seni (musik, tari, teater, serta seni rupa). Diupayakan untuk pengajar seni harus sesuaidengan kompetensinya (kalau di suatu daerah hanya ada guru musik, maka tidak perlu dipaksakan untuk mengajar bidang seni lainnya). Kurikulum pendidikan seni (terutama muatan lokal) harus diserahkan kepada wilayah kebudayaan masing-masing untuk mendorong tumbuhnya apresiasi terhadap kebudayaan Nusantara.

Tampaklah bahwa visi dan misi kurikulum pendidikan seni harus direvisi. Perlu didorong untuk diperbanyaknya pendirian sekolah menengah seni di provinsi-provinsi tertentu, dan bila perlu sampai kependirian pendidikan tinggi. Pemerintah harus mengangkat guru seni sesuai dengan kompetensinya dan tidak harus lagi terjadi guru kelas (yang bukan ahlinya) mengajar bidang seni. Perlu mensinergikan antara pendidikan formal, pendidikannon formal serta pendidikan informal dalam pendidikan seni.

“Seni dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian”

Realita kesenian terkini menunjukkan bahwa wilayah kesenian bukan lagi bagian dari yang terisolasi dari dinamika makro disiplin keilmuan yang telah berkembang melintasi batas-batas disiplin primordialnya. Oleh karena

itu, ada kebutuhan baru bagi dunia seni untuk dapat memperluas horizon pengalamannya dengan memanfaatkan fungsi dan pertumbuhan disiplin ilmu lain yang relevan sebagai alat baca bagi fenomena kesenian. Atinya, dunia seni harus memosisikan dirinya di hadapan realias inter-disiplin, bahkan multidisipliner.

Dengan strategi tersebut, dunia seni dapat menunjukkan kontribusi untuk ikut terlibat dan menyuarakan pengalaman-pengalaman yang lebih kompleks dalam kehidupan kekinian. Pertanyaannya, apa yang harus diberdayakan dan strategi apa yang bisa dilakukan pelaku seni, komunitas seni, dan organisasi seni, dalam proses inklusi disiplin itu?

Hubungan bipolar antara seniman dan pemerintah tidak kondusif. Perlu dicari batas cair di antara kedua belah pihak. Perlu adanya politik kebudayaan untuk memperjelas Undang-undang Kebudayaan. Kebudayaan hendaknya dijadikan basis bagi peraturan dan kebijakan-kebijaran pemerintah

Di dalam keadaan dan konteks yang demikian, kita menghadapi pelbagai masalah yakni apresiasi terhadap seni musik global belum diakui negara dan belum adanya politik kebudayaan yang berorientasi global. Selain itu, perkembangan musik independen yang begitu pesat belum diakui Negara, batas-batas antara pelaku musik profesional dan amatir tidak jelas, dan tidak tereksposnya pelaku kreatif musik di daerah tidak terekspos. Kolaborasi pemusik lokal dengan global belum mendapat dukungan pemerintah, belum memadainya sarana dan prasarana kreativitas bagi seniman, dan belum terbinanya secara optimal apresiasi masyarakat (penonton) terhadap musik. Di dalam keadaan yang demikian, masalah kita masih ditambah dengan kebijakan pemerintah tentang upaya-upaya untuk memajukan kehidupan seni musik belum jelas dan pemerintah belum memiliki politik kebudayaan yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan seni musik yang lebih baik.

Sampai hari ini pemerintah belum serius menangani pembajakan karya musik walaupun sudah ada undang-undang baru. Pengetahuan tentang Undang-undang Hak Cipta di kalangan seniman pun belum merata. Hal ini lantaran Undang-undang Hak Cipta belum disosialisasikan secara gencar kepada masyarakat. Di kalangan musisi, ada fenomena eksklusivisme musisi. Selain itu, masih ada prangka buruk antara seniman otodidak dan seniman pendidikan.

Dari masalah demikian ini, muncullah beberapa rekomendasi yang berkonsentrasi pada fasilitasi pemerintah terhadap masalah-masalah di atas.

Pertama, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karya musik, pemerintah harus menyosialisasikan secara lebih gencar Undang-undang Hak Cipta di kalangan para pelaku seni musik. *Kedua*, harus ada lembaga seperti BMKN (Badan Musyawarah Kesenian Nasional) untuk merangsang kreativitas musik secara individual/seniman yang berprestasi. Pengalokasian dana untuk internasionalisasi seni musik, *ketiga*, perlu dilakukan pemerintah. Dalam rangka memberi pembinaan terhadap masyarakat penonton, *keempat*, harus dibangun gedung-gedung pertunjukan yang representatif, terutama di daerah-daerah. Yang terakhir, pemerintah harus membuat desain program kegiatan untuk kemajuan seni musik.

Komite Film

“Politik Kesenian dalam Perspektif Negara”

Dasar politik kebudayaan Indonesia adalah Kebhinekaan. Oleh karena itu, usaha pengembangan kebudayaan masa depan harus berdasar pada keberagaman dan pengetahuan. Usaha itu juga harus selalu menjaga kesinambungan pertemuan kebudayaan-kebudayaan lama, asli, dan asing yang terus-menerus berdialektika menuju ke arah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan. Usaha pengembangan kebudayaan adalah usaha yang juga tidak menolak bahan-bahan baru dari perkembangan budaya global yang dapat menyempurnakan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia, serta harus berperan aktif dan berkontribusi signifikan dalam perkembangan kebudayaan dunia.

Melihat latar belakang pemikiran yang demikian, maka penting kiranya merevisi UU No.33/2009 tentang Perfilman. Revisi ini perlu menitikberatkan pada peninjauan ulang posisi perfilman sebagai produk budaya dan kesenian. Oleh karena itu, ia seharusnya ditempatkan di bawah legislasi Komisi X DPR RI dan inisiatif revisi harus dilakukan oleh Komisi X. Kelembagaan BPI (atau lembaga independen sejenis – Dewan/Komisi Film Indonesia) di tingkat nasional dan daerah perlu dikuatkan. Tugas pemerintah (pusat dan daerah) perlu ditegaskan hanya sebagai fasilitator dengan proses birokrasi yang seefektif dan seefisien mungkin. Di dalam hubungan dengan itu, sistem birokrasi pun perlu direvisi. Kedudukan pengurusan film di Pemerintah Pusat haruslah setara Eselon 1 dan kedudukan pengurusan perfilman di daerah perlu setara Eselon 2.

Tata edar film yang berpihak pada film Indonesia dengan menjalankan skema prosentase jam tayang film Indonesia perlu dikuatkan. Alokasi anggaran harus berpihak pada pengembangan perfilman nasional secara proporsional. Perlu [ula dukungan dan pengelolaan kekuatan-kekuatan komunitas. UU yang dimaksud perlu diperiksa lebih teliti dan perlu ada upaya pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut dan lebih mendetil tentang UU ini.

Selain UU No.33/2009 tentang Perfilman perlu direvisi, perlu pula sinkronisasi antara UU Perfilman dengan UU lainnya. Perlu dibuat Dana Abadi Perfilman (*Film Endowment Fund*) di tingkat nasional dan daerah yang ditujukan untuk skema hibah atau pembiayaan pembuatan film atau kegiatan perfilman. Dana Abadi Perfilman ini harys memiliki mekanisme yang transparan, mudah diakses oleh publik, serta dikuatkan melalui Perpres atau menjadi bagian dari UU Perfilman.

Program-program yang berkaitan dengan perfilman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah haruslah bisa terukur dalam peningkatan kapasitas subjek pemanfaatnya. Selain itu ia juga harus bersifat berkelanjutan dan bukan *eventual* atau berbasis proyek semata. Program-program yang dimaksud juga harus bisa dievaluasi untuk pengembangan strategis dan jangka panjang. Berkaitan dengan itu, perlu ada penguatan pada birokrasi pusat mau pun daerah yang berkaitan dengan perfilman. Harus ada kompetensi di bidang perfilman pada birokrasi bidang perfilman di Pemerintah Pusat maupun Daerah dan mereka perlu senantiasa mengembangkan pengetahuannya mengenai perkembangan dunia perfilman.

Selain itu, kiranya perlu penambahan dan pengembangan secara signifikan jumlah ekshibitor atau ruang-ruang putar film untuk publik sebagai "*cultural distribution hub*" yang berpihak kepada film-film lokal daerah dan nasional. Ruang-ruang publik yang sudah ada (Taman Budaya, Taman-taman Kota, Alun-alun, Gedung-gedung bersejarah, dsb.) harus diaktivasi secara maksimal untuk kepentingan di atas. Televisi lokal dan televisi komunitas perlu dimanfaatkan secara maksimal demi perfilman nasional. Perlu pula dipikirkan dan diciptakan pengembangan jalur-jalur distribusi baru yang berbasis pada pengembangan teknologi IT, kecenderungan konsumsi media baru, serta perlindungan HAKI.

"Kesenian, Negara dan Tantangan di Tingkat Global"

Internasionalisasi perfilman membuat Indonesia harus pula menjadi

wadah perkembangan perfilman dunia. Untuk itu, perlu diadakan program-program berskala internasional di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan potensi film sebagai soft power dalam kebijakan diplomasi bermatra budaya.

Untuk itu, dperlu aktivasi Kedutaan, Konsul Jendral, dan Atase Kebudayaan sebagai pucuk penyebaran budaya Indonesia lewat film. Pemerintah juga harus mendukung keikutsertaan aktif dalam program-program perfilman internasional

“Seni dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian”

Melihat perkembangan dunia dewasa ini umumnya dan dunia perfilman khususnya, pemerintah perlu memfasilitasi penguatan jejaring komunitas. Bantuan dana untuk pembuatan film dan pengembangan komunitas film di tingkat lokal pun perlu difasilitasi baik oleh pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah. Perkara distribusi film Indonesia adalah perkara yang cukup serius. Jika tidak didukung, niscaya perfilman Indonesia tak mampu bersaing. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi pembuatan rencana distribusi film lokal serta pelaksanaannya perlu difasilitasi dan didukung pemerintah.

Dalam konteks mendekatkan film nasional kepada publik, penguatan venue dan penambahan venue serta program-program perfilman nasional perlu difasilitasi oleh pemerintah bekerja sama dengan komunitas-komunitas film yang sudah ada. Pajak adalah juga salah satu penghambat berkembangnya perfilman nasional. Oleh karena itu, pajak perfilman nasional perlu diturunkan atau sama sekali dibebaskan. Program-program festival perfilman yang berskala internasional, nasional, mau pun daerah perlu diadakan dan sepenuhnya perlu difasilitasi oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi pembuatan program-program perfilman baik di festival atau pun program-program lainnya yang berorientasi pada penguatan perfilman nasional.

Perfilman tidak mungkin berkembang tanpa kritik dan pengarsipan. Dua hal ini sangat sulit jika mengandalkan masyarakat atau pun pihak swasta. Sebagai sebuah produk kebudayaan, aktivitas kritik film dan pengarsipan film perlu dilakukan, atau minimal difasilitasi, oleh pemerintah.

“Pendidikan Seni, Media dan Kreativitas”

Dunia pendidikan perfilman kita menghadapi ketidak-jelasan rumpun

keilmuan yang membawahi bidang Film di Direktorat Pendidikan Tinggi. Selain itu, kita tidak memiliki SMK jurusan film. Yang ada adalah SMK jurusan *broadcasting* dan multimedia yang membuat film. Bersamaan dengan itu, SDM tenaga pendidik film belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyebaran sekolah film formal di Indonesia pun sangat terbatas dan sangat sedikit jumlahnya. Kurikulum pendidikan film yang ada tidak memenuhi kebutuhan industri film. Pengetahuan perihal perfilman pun sangat tidak merata antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Non-Barat (Tengah dan Timur).

Selain itu, minimnya ruang apresiasi film di Indonesia juga menambah permasalahan ini. Pengetahuan perfilman pun tidak terintegrasi dengan kurikulum pendidikan umum. Dan yang lebih tampak lagi, sebagai muara dari semua itu, adalah kurangnya apresiasi masyarakat mengenai film.

Menghadapi permasalahan yang demikian itu pemerintah perlu memfasilitasi pemaksimalan peran Asosiasi Program Studi Film dan Televisi (APROSFISI) untuk mendorong revisi nomenklatur dan kurikulum pendidikan film ditingkat strata dari "FTV" menjadi "Screen Culture". Revisi ini perlu mencakup tiga sub-nomenklatur yakni produksi dan kajian film, penyiaran (mencakup televisi, radio dll), dan multimedia.

Kemendikbud perlu membangun SMK Jurusan film yang capaian pendidikannya berfokus pada keahlian operasional yang berkaitan dengan teknis produksi film. Kemendikbud juga perlu mengadakan beasiswa pendidikan formal bagi tenaga pendidik film agar dapat meningkatkan mutu pendidikan film di daerah masing-masing. Kemendikbud perlu memfasilitasi pelatihan tenaga pendidik film di SMK bekerjasama dengan praktisi perfilman dan asosiasi profesi.

Bersamaan dengan itu, DIKTI juga harus membuka program studi film di wilayah-wilayah yang memiliki potensi penonton film yang besar dan ekosistem film yang mulai terbentuk (contoh: Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur). Selain itu, DIKTI juga perlu memfasilitasi forum yang menghubungkan para dosen film dan guru SMK dengan praktisi film agar tercipta *linkage* antara dunia pendidikan film dan perfilman itu sendiri. *Workshop* dan pendampingan yang intensif perihal pengembangan naskah, pra-produksi, produksi, pasca produksi, distribusi dan ekshibisi film di daerah-daerah perlu diadakan oleh Kemendikbud. Talenta berbakat perlu difasilitasi untuk mendapatkan beasiswa oleh Kemendikbud untuk belajar secara formal di sekolah-sekolah film yang sudah ada. Di dalam Program Belajar Bersama Maestro dari Dirjenbud Kemendikbud, perlu

dimasukan juga perihal film.

Selain hal-hal itu, Kemendikbud juga perlu memfasilitasi pembentukan konsorsium/forum pendidikan film. Jejaring ini nantinya menjadi penghubung kantung-kantung pengetahuan mengenai film yang mencakup sekolah film formal, lembaga pendidikan informal film, lembaga kursus, komunitas film, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan, pusat arsip, asosiasi profesi, dll. Pembentukan wahana yang dapat memutarakan film-film produksi daerah-daerah yang dibagi menjadi beberapa wilayah (misalnya Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur) yang mengarah pada perkembangan budaya sinema yang parallel perlu difasilitasi oleh Kemendikbud.

Film juga perlu digunakan oleh Kemendikbud sebagai media proses belajar dan konten ajar di dalam kurikulum pendidikan umum. Dalam hubungan dengan itu, Kemdikbud wajib membeli hak siar dan hak distribusi film-film yang dianggap relevan dengan kebudayaan dan pendidikan di Indonesia secara berkala. Selanjutnya, Kemendikbud perlu memastikan keaksesibelannya baik secara offline maupun online terhadap lembaga pendidikan umum maupun publik secara umum. Sehubungan dengan itu, Kemdikbud wajib mengakuisisi film yang memiliki nilai penting dalam sejarah perkembangan film Indonesia. Inisiatif penelitian mengenai film yang mencakup kajian produksi film, kajian sejarah dan teori film, kajian teknologi film, kajian kebijakan publik mengenai film serta kajian ekonomi film perlu difasilitasi oleh Kemendikbud.

Pemutaran film dari para pembuat film di daerah-daerah dan bersamaan dengan itu juga pertemuan langsung pembuat film dengan penonton perlu difasilitasi Kemendikbud. Dalam hubungannya dengan pengembangan budaya kritik film, Kemendikbud perlu memfasilitasi lokakarya penulisan kritik film di semua wilayah Indonesia. Kemdikbud memfasilitasi pembentukan/pengembangan media yang mencatat perkembangan wacana film di Indonesia, bukan sebagai produk komersil, melainkan sebagai produk gagasan kebudayaan. Media ini akan disebarakan secara online dan offline yang dewan redaksinya terdiri dari kritikus, akademisi dan sejarawan film.

Komite Lintas Media

“Politik Kesenian dalam Pespektif Negara”

Tampak bahwa pemerintah tidak punya agenda maupun strategi

ekonomi dan politik yang cukup kuat untuk mendukung dan melindungi praktik kesenian. Hal ini berimbas pada minimnya payung hukum/*legal standing* yang melindungi dan mendukung praktik kesenian. Bersamaan dengan itu, keraplah dilihat bahwa jargon pemerintah/negara sebagai fasilitator pada praktiknya sering menyimpang, karena mereka malah sering bertindak sebagai eksekutor. Berhubungan dengan itu, para seniman selalu dianggap sebagai 'pengemis' (anggaran) yang selalu memohon belas kasihan pemerintah.

Hal-hal di atas adalah pandangan umum hari-hari ini di dalam konteks kesenian dan negara. Masalah-masalah pun menyeruak dan bisa diidentifikasi dari pandangan umum yang demikian itu.

Politik anggaran kesenian masih sangat sektoral, ditempatkan dalam kementerian-kementerian yang tidak terkoordinasi satu sama lain. Hal ini diperparah pula oleh adanya hambatan-hambatan implikasi kebijakan nasional oleh karena Otonomi Daerah (tercermin pada masalah yang dihadapi oleh Taman Budaya di tingkat Provinsi). Ketiadaan lembaga atau badan yang secara independen melindungi dan mendukung praktik kesenian menjadi momok menakutkan pada insan seni yang terkadang aktivitasnya bersinggungan dengan perihal hukum. RUU Kebudayaan yang dianggap bisa menjadi salah satu jawabannya justru tak kunjung selesai perumusan dan pengesahannya. Hal ini sangat merugikan karena kesenian memerlukan payung hukum yang permanen agar bisa berkembang dan berkesinambungan. Bersamaan dengan itu, perspektif negara dalam memandang dan meletakkan kesenian masih terlalu condong kepada pariwisata. Yang mana, semua itu tampak efeknya pada program-program kesenian dari pemerintah yang selalu terhambat oleh orde pemerintahan (ganti pejabat, ganti kebijakan).

Melihat permasalahan-permasalahan demikian, dibuatlah tiga rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi jangka pendek, rekomendasi jangka menengah dan rekomendasi jangka panjang. Rekomendasi jangka pendek terdiri dari, *pertama*, mendesak terbitnya payung hukum dalam bentuk KEPPRES Kesenian yang memuat suatu *roadmap* untuk 25 tahun ke depan. KEPPRES Kesenian diharapkan dapat mempertemukan kepentingan prosedur formal dengan proses kreatif seniman. Isi *roadmap* itu, *kedua*, perlu mengandung aspirasi agar kongres kesenian ini berjalan secara rutin dan ditindaklanjuti, menganggarkan dana pemerintah untuk kegiatan kesenian yang seimbang dengan kegiatan pendidikan, dan diadakannya revitalisasi kelembagaan dewan-dewan kesenian di daerah,

dst.

Rekomendasi jangka menengah adalah pembentukan badan independen (komisi kesenian nasional dan komisi kesenian daerah) yang beranggotakan unsur-unsur seniman, pemerintah, akademisi, institusi kesenian. Sedangkan rekomendasi jangka panjang adalah menyusun RUU kesenian sebagai acuan politik kesenian nasional.

“Pendidikan Seni, Media, dan Kreativitas”

Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan kesenian di Indonesia masih miskin kreativitas. Di dalam keadaan yang demikian, penjurusan pendidikan seni di sekolah seni terjebak pada paradigma, filosofi dan praktik pendidikan yang lebih ke arah keterampilan atau spesialisasi sebagai seniman. Pendidikan kesenian kita pun masih terpilah-pilah pada bidang seni-bidang seni. Padahal keadaan perkembangan kesenian sekarang tidak bisa lagi dibaca dalam pengkotak-kotakan itu. Ia adalah dialog antar bidang seni bahkan berdialog dengan bidang-bidang di luar kesenian itu sendiri.

Di bangku pendidikan pun pengajaran sejarah seni sangat miskin referensi, sementara dokumentasi dan pengarsipan seni di Indonesia yang sudah ada belum terakses oleh lembaga pendidikan secara optimal. Ada kebutuhan bagi sebuah jejaring kerja dokumentasi seni di Indonesia. Bersamaan dengan itu pula, SDM (Sumber Daya Manusia) dan perangkat pendidikan dalam lembaga pendidikan resmi tidak memadai. Sehingga, banyak fungsi pendidikan berkesenian dipenuhi oleh prakarsa warga, komunitas, dan lembaga di luar lembaga pendidikan resmi. Berhadapan dengan teknologi informasi yang baru, SDM dan perangkat kesenian belum siap. Mereka belum mampu menjawab tantangan lintas media. Misalnya, kemampuan para guru menggunakan Teknologi Informasi sebagai alat pendidikan berkesenian masalah sangat minim.

Jarak antara kebijakan di level pemerintah pusat dengan daerah (kabupaten, dan desa) sangat berpotensi menjadi hambatan. Padahal, potensi dana dan sumberdaya di tingkat kabupaten dan desa untuk pengembangan seni dan kebudayaan masyarakat sangat besar. Hal ini wajar pula karena belum ada payung yuridis untuk menjamin pengembangan seni dalam masyarakat di tingkat kabupaten dan desa. Keluasan wilayah Indonesia berkonsekuensi pada kayanya kesenian dan kebudayaan Indonesia. Namun demikian, tak ada pihak yang berinisiatif memeliharanya secara sistemik.

Dari permasalahan-permasalahan itu, diajukanlah beberapa usulan program yang sekiranya bisa sedikit menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Perlu ditekankan bahwa regulasi atau pengaturan melalui undang-undang, atau peraturan pemerintah/presiden bahwa *pendidikan berkesenian* adalah hak setiap warga negara Indonesia. Perlu diingat pula bahwa pendidikan berkesenian lebih luas dari pendidikan seni. Jika pendidikan seni mengarah pada keterampilan seni dan spesialisasi, maka pendidikan berkesenian menjadikan seni sebagai bagian dari pendidikan dan penumbuhan kreativitas manusia. Perlu adanya peninjauan kembali sistem lembaga pendidikan seni di Indonesia. Peninjauan kembali ini mencakup peninjauan kembali kurikulum dan sistem penjurusan perguruan tinggi di bidang seni.

Di dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, perlu pula diberdayakan masyarakat desa berbasis kesenian dan kebudayaan setempat. Perlu ditinjau ulang pelbagai program pendidikan dari berbagai kementerian pemerintah dengan tujuan mengubah filosofi kompetisi menjadi apresiasi. Ada beberapa contoh program yang perlu ditinjau ulang yakni OSN, FL2SN, Peksiminas, FKI, dan Porseni. Perlu ditetapkan lembaga pemerintah yang terkait/relevan untuk mendukung dan mengembangkan jejaring penyangga pendidikan berkesenian dalam bentuk pelatihan, pendokumentasian, pengarsipan, dan penerbitan. Perlu didorong Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengembangkan digitalisasi pengarsipan dan pendokumentasian seni budaya berbasis teknologi terbaru dalam mendukung pendidikan berkesenian di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Perlu pula dibentuk lembaga pendidikan seni tingkat dasar dan menengah di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Di Sulawesi Tengah misalnya sudah mengajukan pendirian sekolah seni tapi belum dipenuhi pemerintah terkait.

SIDANG KOMISI

Sidang Komisi pada KKI III dibagi menjadi empat komisi yakni Komisi A yang membicarakan Politik Kesenian Dalam Perspektif Negara, Komisi B yang membicarakan Kesenian, Negara, dan Tantangan di Tingkat Global, Komisi C yang mengurai Pendidikan Seni, Media, dan Kreativitas, serta Komisi D yang membahas Seni Dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian.

Komisi A: Politik Kesenian Dalam Perspektif Negara

Komisi A menekankan tiga hal yakni Regulasi Nasional Berkait dengan Kesenian, Lembaga Independen Tingkat Nasional, dan Badan Pekerja Ad-Hoc. Regulasi nasional berkaitan dengan kesenian dianggap isu yang penting mengingat kesimpangsiuran pengaturan perihal kesenian di negeri ini. Secara jangka panjang, perlu ada sebuah undang-undang khusus perihal kesenian. Namun, sembari menunggu adanya UU tersebut, kesenian tetap membutuhkan sebuah regulasi. Hal ini, secara jangka pendek, bisa ditanggulangi oleh adanya Keputusan Presiden perihal kesenian.

Komisi A juga merasa perlu ada sebuah lembaga independen tingkat nasional untuk isu kesenian. Lembaga independen ini bisa menjadi rekan kerja Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pembentukan kebijakan-kebijakan turunan (dari Keppres/UU) perihal kesenian. Lembaga ini juga bisa mengambil peran sebagai pengawas/evaluator terhadap kerja/kinerja Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator kesenian Indonesia. Mengingat pentingnya lembaga ini dan agar ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, lembaga ini perlu memiliki akses yang terbuka untuk publik kesenian, serta memiliki mekanisme transparansi yang baik. Nama lembaga apa yang tepat bisa dibahas lebih lanjut dalam Badan Pekerja.

Demi supaya Kongres Kesenian Indonesia III tidak menjadi sebuah kegiatan yang mubazir, perlu ada langkah-langkah konkret untuk mengawal rekomendasi yang dihasilkannya.

Komisi A mengusulkan dibentuknya Badan Pekerja Ad-Hoc. Badan Pekerja Ad-Hoc ini bertugas mengawal hasil rekomendasi dari Kongres Kesenian Indonesia III ini untuk disampaikan kepada Presiden RI (sebagai kepala pemerintahan), serta mengupayakan rekomendasi-rekomendasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah. Lembaga ini juga perlu membuat kajian khusus mengenai kelembagaan (yang direkomendasikan di atas).

Kajian khusus untuk merinci setiap butir hasil siding Komite dan Komisi

dalam Kongres Kesenian III ini perlu juga dilakukan oleh Badan Pekerja Ad-Hoc ini. Hal ini dimaksudkan supaya Kongres bisa menghasilkan Lampiran Rekomendasi yang rinci, sistematis, dan operasional untuk dilaksanakan oleh Pemerintah. Segera membuat kajian khusus mengenai isi butir-butir penting yang diusulkan dalam Keppres perihal Kesenian sebagaimana yang direkomendasikan di atas. Badan Ad-Hoc ini juga perlu segera membuat kajian khusus penyusunan RUU Kesenian, dari naskah akademis sampai *legal drafting*-nya.

Komisi B: Kesenian, Negara, dan Tantangan di Tingkat Global

Komisi B yang membahas Kesenian, Negara, dan Tantangan di Tingkat Global membicarakan tiga hal yakni regulasi, konservasi dan inovasi, serta jejaring. Menurut Komisi B, perlu dibentuk payung hukum berupa Undang-undang dan Keppres Kesenian yang memuat *roadmap* kesenian.

Pada penekanan Konservasi dan Inovasi, komisi menganggap perlu adanya revitalisasi lembaga-lembaga dan infrastruktur kesenian yang sudah ada. Perlu juga didirikan Pusat Kesenian Nasional yang mewadahi aktivitas-aktivitas konservasi dan inovasi di bidang seni, seperti pendokumentasian/ pengarsipan, dan pengoleksian. Hal-hal ini bisa dikerjakan melalu ntara lain museum, lembaga arsip, ruang pertunjukan, dan ruangpameran yang berskala nternasional.

Perlu juga dibentuk Komisi Kesenian Nasional sebagai lembaga mediasi, advokasi, dan diplomasi kesenian Indonesia. Salah satu tugas utama komisi ini adalah mengawal implementasi hasil Kongres Kesenian III. Perlu juga dibentuk lembaga penerjemahan. Lembaga inilah yang nantinya akan memungkinkan kesenian Indonesia dimengerti oleh berbagai bangsa. Pemanfaatan ruang virtual, teknologi internet/IT untuk mendistribusikan seluruh produk kesenian juga menjadi penekanan dari Komisi B.

Pada problem jejaring, Komisi B melihat pentingnya diambil beberapa tindakan. *Pertama*, perlu didirikan lembaga yang secara khusus menangani program-program kesenian Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan. *Kedua*, pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring kegiatan kesenian di dalam dan luar negeri, misalnya festival, pameran, bienial, ekspo, pameran buku, dan pementasan.

Komisi C: Pendidikan Seni, Media, dan Kreativitas

Pembahasan perihal Pendidikan Seni, Media, dan Kreativitas oleh

Komisi C bermuara pada lima hal penting yakni kurikulum, sumber daya, sarana dan prasarana, apresiasi serta Badan Independen Pengawal Rekomendasi.

Pada perbincangan perihal kurikulum, ditekankan bahwa pemerintah harus mengubah visi dan misi Kurikulum Nasional terhadap keilmuan dan praktik seni terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya persepsi yang menganaktirikan seni/merendahkan kehidupan seni.

Terkait dengan hal itu, isi kurikulum yang dimaksud harus memberikan porsi yang komprehensif terhadap budaya lokal, di samping masalah kekinian/kontemporer terutama untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga diminta, melalui program Gerakan Nasional, harus menetapkan Mata Kuliah Seni sebagai mata kuliah wajib yang diselenggarakan di seluruh Perguruan Tinggi. *Blue print* pendidikan seni perlu dibuat pemerintah dan *blue print* tersebut perlu direkomendasikan ke masyarakat.

Sumber daya juga menjadi sorotan Komisi C. Peningkatan sumber daya pendidik kesenian perlu menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya, pemerintah perlu memberikan beasiswa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para tenaga pendidik seni. Melalui Gerakan Nasional, pemerintah harus menggalang program belajar bersama tenaga ahli kesenian non-akademi (empuseni/maestro seni yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan formal). Kesejahteraan para pengajar pun perlu diperhatikan. Secara konkret, pemerintah wajib mengangkat guru-guru seni non PNS menjadi PNS berdasarkan UU ASN.

Pemerintah juga diminta memfasilitasi pelatihan intensif bagi sanggar dan komunitas seni serta memberlakukan Kerangka Kualifikasi Nasional di seluruh Indonesia.

Sarana dan prasarana menjadi penekanan Komisi C berikutnya. Pemerintah perlu memperbanyak sekolah-sekolah seni di seluruh Indonesia untuk tingkat menengah dan tinggi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah juga wajib membentuk lembaga guna mendukung dan mengembangkan jejaring penyangga pendidikan seni dalam bentuk pelatihan, pendokumentasian, pengarsipan, dan penerbitan, seperti program sejuta buku sastra, referensi musik nusantara, naskah-naskah drama, buku-buku tentang film, buku sejarah seni rupa Indonesia, serta ensiklopedi seni Indonesia dari A-Z.

Terkait dengan hal terakhir di atas, pemerintah wajib memfasilitasi dan

menginisiasi penerjemahan buku-buku bahan ajar dan referensi seni dari bahasa asing dan bahasa Indonesia. Perlu pula diadakan program berjenjang secara regular seperti festival teater dari tingkat desa sampai dengan internasional, dan festival tari. Pemerintah juga diminta untuk kembali menghidupkan buku-buku inpres di bidang seni dan budaya.

Pemerintah perlu mendirikan museum sebagai situs referensi pendidikan yang menyelenggarakan praktik konservasi, preservasi, dan restorasi serta menyelenggarakan program-program yang mengedepankan hubungan sinergis antara masalah dan kontemporer. Pemerintah mendirikan dan mengembangkan laboratorium seni di tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Sarana pelatihan dan sanggar-sanggar serta komunitas seni sebagai sarana pendidikan non formal harus pula didukung dan difasilitasi oleh pemerintah. Perlu pula dipastikan oleh pemerintah ketersediaan alat-alat dan media pengajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Lebih lanjut, pemerintah melalui gerakan nasional wajib memfasilitasi dan mendanai ruang-ruang apresiasi. Di dalam prakteknya, ruang-ruang apresiasi ini akan mempertemukan seniman-seniman dengan siswa-mahasiswa melalui program-program yang sesuai dengan Kurikulum Nasional.

Semua rekomendasi ini perlu dikawal. Oleh karena itu, Komisi C merekomendasikan pembentukan badan independen di tingkat nasional untuk memastikan terlaksananya rekomendasi-rekomendasi Kongres Kesenian III 2015 di Bandung.

Komisi D: Seni Dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian

Komisi D menekankan enam hal di dalam kaitannya dengan Seni Dalam Pusaran Kompleksitas Kekinian. Enam hal itu adalah pengarsipan dan database (Pusat Data dan Informasi), ruang presentasi atau eksebis, jaringan dan aktivasi komunitas, perihal hukum, perihal anggaran dan pendanaan, serta perihal institusi.

Pemerintah perlu, *pertama*, memfasilitasi berdirinya pusat data dan arsip kesenian di Indonesia yang terbuka dan mudah diakses oleh semua stakeholder kesenian Indonesia dan masyarakat luas.

Kedua, pemerintah perlu melakukan identifikasi praktek-praktek kesenian dalam usaha melakukan pemetaan potensi-potensi berbagai aktivitas kesenian di Indonesia. Yang *ketiga* adalah pemerintah perlu melakukan persebaran dan produksi pengetahuan yang berbasis dari hasil-

hasil riset pengarsipan dimaksud. Itulah hal-hal yang ditekankan di dalam konteks pengarsipan dan database.

Di dalam konteks ruang presentasi dan eksebis, komisi D menekankan bahwa pemerintah perlu memfasilitasi berdirinya ruang-ruang baru yang digagas oleh penggiat seni di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini untuk dapat menangkap perkembangan fenomena yang paling mutakhir dari perkembangan seni di berbagai wilayah Indonesia. Perlu dimunculkan kegiatan-kegiatan festival, eksebis skalanasional dan internasional yang tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa, yang menunjukkan perkembangan praktik kesenian yang menangkap kompleksitas kekinian.

Pemerintah perlu mendukung kegiatan-kegiatan presentasi-eksebis yang digagas oleh komunitas lokal. Kegiatan-kegiatan presentasi-eksibisi yang membuka ruang bagi eksperimentasi dan elajah kemungkinan-kemungkinan baru dalam kesenian perlu difasilitasi pula oleh pemerintah.

Jaringan dan aktivasi komunitas dianggap juga oleh Komisi D sebagai hal yang perlu diberi perhatian serius. Untuk itu pemerintah diminta untuk memfasilitasi pembentukan pusatjaringan kerja baru yang terbagi menurut kewilayahan, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Madura, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Pemerintah pun mesti memfasilitasi kesaling-terhubungan antar komunitas seni di Indonesia dan mendorong terjadinya perluasan jaringan dan kerjasama di tingkat internasional.

Pada bidang hukum, pemerintah perlu memastikan bahwa perangkat-perangkat hukum yang berlaku di Indonesia melindungi atau memberi ruang bagi kebebasan berekspresi dalam praktik kesenian sekarang. Di dalam konteks pendanaan, perlu juga dipastikan perangkat hukum perpajakan dan CSR yang bisa mendukung kegiatan kesenian di Indonesia.

Selain itu, perihal anggaran dan pendanaan, perlu dipastikan adanya politik anggaran yang mendukung dan berpihak pada perkembangan praktik kesenian di seluruh Indonesia. Politik anggaran ini haruslah akuntabel dan profesional. Pemerintah juga perlu mengaktivasi dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga kesenian yang sudah ada, sehingga mampu beradaptasi dengan kompleksitas kekinian. Selain itu, perlu pula memastikan berdirinya museum-museum di tiap bidangnya seni di Indonesia, sebagai institusi yang memberi pengakuan terhadap nilai dan eksistensi kesenian yang berkembang di Indonesia.

Keputusan Kongres Kesenian III 2015

Setelah berkongres selama 4 hari, akhirnya KKI III menghasilkan keputusan yang disusun oleh Tim Perumus berdasarkan keputusan Sidang Komite yang telah dimatangkan dalam Sidang Komisi. Tim Perumus terdiri dari: Agung Hujatnika, Alex Sihar, Aminudin TH Siregar, Fakhrunnas MA Jabbar, Hafiz Rancajale, M. Abduh Aziz dan Adi Wicaksono. Keputusan KKI III 2015 disebut sebagai “Deklarasi Bandung”. Berikut adalah kutipan secara lengkap keputusan tersebut.

Deklarasi Bandung untuk Kesenian Indonesia Keputusan dan Rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia III/2015

Mukadimmah

Adalah suatu kepastian, bahwa dengan kebuntuan Reformasi 1998 yang mengamanatkan tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat melalui kebebasan berbicara dan berekspresi, serta reformasi institusi demokrasi, rakyat Indonesia mengalami stagnasi dan disorientasi di semua sektor kehidupan. Pembangunan instrumen politik telah menyisihkan kebudayaan dan kesenian yang seharusnya menjadi basis nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, kami pelaku kesenian merasa perlu mengembalikan kesenian kepada kodratnya, yaitu membentuk manusia Indonesia yang berkarakter terbuka, kritis, toleran dan berdaulat. Sesuai dengan amanat UUD 45 pasal 32, negara wajib memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin keberlangsungan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Pernyataan Kongres

Kongres Kesenian Indonesia III 2015 adalah suatu refleksi yang melibatkan para pemangku kepentingan kesenian di Indonesia untuk membaca kembali kondisi terkini dunia seni kita di tengah arus perubahan yang terjadi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik baik dalam tataran lokal maupun global. Perubahan mengimplikasikan adanya hambatan maupun peluang yang dapat digunakan dalam rangka mengoptimalkan peran strategis seni dalam pembangunan dan kehidupan bernegara.

Negara hendaknya menempatkan kesenian sebagai landasan daya cipta dan kreativitas manusia; sebagai sarana dialog yang memungkinkan pertukaran nilai yang sehat, dan rangsangan terhadap imajinasi kolektif untuk membangun visi masa depan yang lebih baik; sarana untuk terus-menerus merumuskan identitas kebangsaan secara dinamis, terbuka dan inklusif. Pemerintah dapat mengoptimalkan peran strategis kesenian melalui rekomendasi yang dihasilkan oleh Kongres Kesenian Indonesia / KKI III 2015:

Rekomendasi

I. Regulasi.

Harus disusun dan dilaksanakan kebijakan menyeluruh yang diikat oleh ketetapan hukum di tingkat nasional hingga daerah yang mengatur peran dan fungsi negara sebagai fasilitator, politik anggaran yang berpihak pada kesenian, dan partisipasi aktif warga negara dalam pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan preservasi kesenian di Indonesia. Produk hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang Kesenian atau produk hukum setara Undang-Undang.

Payung hukum menjadi fundamental untuk memastikan dukungan pemerintah terhadap tumbuhnya ekosistem kesenian yang sehat dan berkelanjutan. Ekosistem seni tersebut terkait dengan mata rantai yang mencakup pendidikan, penciptaan, mediasi dan apresiasi seni. Dukungan yang dimaksud berkaitan erat dengan pengembangan ataupun pengadaan infrastruktur untuk setiap mata rantai tersebut melalui dukungan pendanaan yang cukup untuk, antara lain: a) fasilitas untuk pusat-pusat kesenian, ruang-ruang publik, kelembagaan atau organisasi kesenian; b) jejaring kelembagaan, dan; c) merancang peta jalan (*roadmap*) kebijakan kesenian; d) menjamin kebebasan berekspresi dan operasionalisasi kegiatan-kegiatan kesenian berlangsung dengan baik dan merata.

Payung hukum tentang kesenian menjadi penting untuk menegaskan peran negara, bukan sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan kesenian; melainkan sebagai fasilitator aktif yang responsif terhadap perubahan kebutuhan maupun prioritas pengembangan kesenian. Secara bertahap, perlu direncanakan tahapan-tahapan penerbitan payung hukum kesenian, dalam bentuk UU dan Keppres yang menaungi peraturan-peraturan dalam berbagai tingkatan.

Upaya membangun payung hukum untuk pengelolaan dan

pengembangan kesenian juga terkait dengan upaya merevisi UU yang telah ada dan mengikat seperti UU No. 33/2009 mengenai Perfilman; serta mengkaji ulang RUU Kebudayaan yang sudah ada.

II. Pemetaan Ekosistem Kesenian.

Perlu upaya menyeluruh dan sistematis memetakan ekosistem kesenian Indonesia terkini dalam rangka melihat pertumbuhan yang ada beserta kebutuhan-kebutuhan spesifik dari berbagai sektor seni dengan rentang cakupan dari seni tradisi hingga yang paling kontemporer. Upaya ini sebagai langkah awal untuk menandai kekosongan di tingkat aturan, kelembagaan maupun anggaran yang dianggap menghambat perkembangan seni untuk memenuhi peran strategisnya tersebut.

III. Infrastruktur

Infrastruktur dimaksud bersifat fisik (pusat-pusat kesenian, ruang-ruang publik), kelembagaan atau organisasi kesenian dan jaringan kelembagaan sebagai agen pelaku maupun kebijakan publik mengenai kesenian yang menjamin kebebasan berekspresi dan operasionalisasi kegiatan-kegiatan seni berlangsung dengan baik dan merata.

IV. Kelembagaan dan Politik Anggaran Kesenian.

Realitas struktur birokrasi dan pengelolaan tata administrasi negara hari ini masih menyulitkan koordinasi antar Kementerian maupun lembaga negara hampir di semua sektor; tak terkecuali sektor pengelolaan dan pengembangan kesenian. Akibatnya banyak inisiatif dan penggunaan sumberdaya berjalan sendiri-sendiri, terkesan tidak adanya acuan yang memungkinkan pencapaian bersama yang lebih efektif; efisien, transparan dan akuntabel dalam soal politik anggarannya.

Soal lain yang tak kalah pentingnya adalah semua proses pembentukan inisiatif-inisiatif termasuk pengelolaan sumberdaya dalam sektor ini juga seringkali tidak memenuhi prinsip partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan utama pengelolaan dan pengembangan kesenian.

Untuk itu perlu sebuah upaya terobosan untuk mempercepat penataan ekosistem kesenian yang lebih sehat dan berkelanjutan, terutama melalui mekanisme kelembagaan independen yang mempunyai posisi, kekuatan dan sumberdaya yang cukup untuk melakukan intervensi sekaligus koordinasi yang dapat mengurai kebuntuan koordinasi Kementerian / Lembaga. Kelembagaan independen yang dirancang sedemikian rupa

untuk memainkan peranan sebagai representasi dunia kesenian Indonesia untuk menampung aspirasi, merancang inisiatif-inisiatif bersama para pemangku kepentingan dalam kerangka penataan ekosistem kesenian yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator atas inisiatif-inisiatif tersebut.

V. Pendidikan Kesenian.

Harus dipastikan ruang gerak yang lebih luas bagi tumbuh dan berkembangnya bidang kesenian secara terstruktur melalui peninjauan ulang terhadap visi, misi dan kurikulum nasional terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan kesenian dimaksud harus mengandung muatan lokal (*local content*) yang memberikan porsi yang komprehensif bagi keberlanjutan budaya lokal tanpa mengabaikan budaya kekinian yang dinamis. Sejalan dengan itu, perlu diwujudkan suatu gerakan nasional yang menetapkan mata pelajaran seni yang dapat memperhalus akal budi dan nilai-nilai moralitas yang tinggi harus diajarkan kepada para anak didik mulai pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Sekaitan dengan itu, pihak pemerintah perlu membuat cetak biru (blue print) pendidikan seni dimaksud dan melakukan sosialisasi yang melibatkan para pihak (*stake holder*) yang terkait sehingga mempercepat pencapaiannya.

VI. Pengembangan Sistem Pusat Data, Dokumentasi dan Informasi.

Harus diwujudkan pusat data, dokumentasi dan informasi terpadu tentang kesenian Indonesia sebagai wahana preservasi dan pengembangan seluruh kekayaan seni di Indonesia. Sistem pusat data ini harus terbuka dan mudah diakses oleh semua para pihak (*stake holder*) di negeri sendiri.

Sejalan dengan itu, perlu dilakukan identifikasi aktivitas kesenian melalui pengkajian dan penelitian dalam upaya melakukan pemetaan potensi kesenian yang ada.

VII. Jejaring Kesenian.

Penguatan dan penciptaan jejaring penyangga dan wahana promosi segala kegiatan dan hasil ciptaan seni di dalam maupun luar negeri. Negara harus mewujudkan suatu mekanisme terbentuknya pusat jaringan yang menghubungkan semua wilayah geografis sekaligus memfasilitasi antarkomunitas seni di Indonesia serta mendorong terjadinya perluasan jaringan kerjasama di tingkat dunia.

VIII. Pembentukan Sekretariat Kerja Kongres Kesenian Indonesia III/2015

Harus dibentuk Sekretariat Kerja KKI III/2015 dengan tugas dan fungsi di antaranya melakukan sosialisasi mengawal dan mengimplementasikan semua Hasil Keputusan Kongres yang dapat menjembatani antara pelaku seni dengan pihak pemerintah pada tataran tertinggi yang dapat membuat keputusan.

IX. Usulan Program.

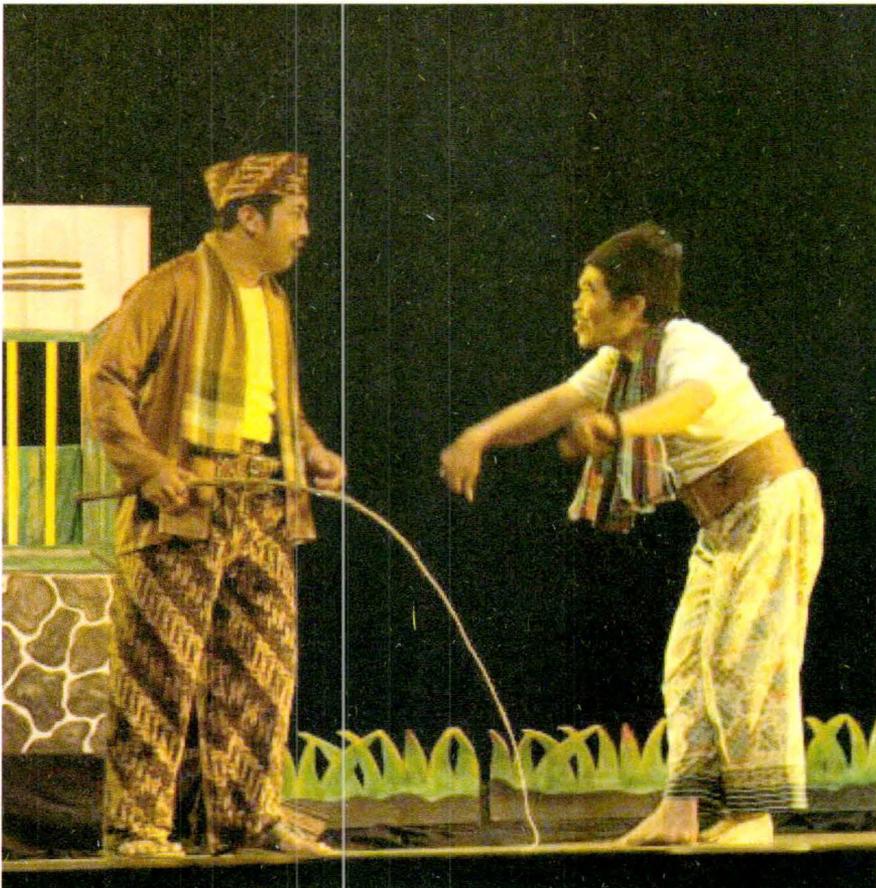
Seluruh usulan program terlampir yang telah ditetapkan dalam sidang komisi, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rekomendasi ini. Keputusan Kongres Kesenian Indonesia (KKI) III 2015, dinyatakan sebagai Deklarasi Bandung.

Di Luar Arena Kongres

Selain acara utama berupa persidangan, dalam KKI III juga diselenggarakan pertunjukan seni berupa pementasan, gelar sastra, dan pameran pentas pameran seni rupa, yang meliputi:

Pertunjukan Gending Karesmen *Nyai Dasima*

Berlangsung pada 3 Desember 2015 di Gedung Kesenian Sunan Ambu, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Pertunjukan ini dipilih atas dasar kontribusi dan ketokohan Koko Koswara (Alm), seniman asal Indihiang, Tasikmalaya, yang dikenal dengan sebutan Mang Koko. Mang Koko dikenal sebagai pelopor pembaharu dan maestro karawitan Sunda. Selain itu, pertunjukan yang kental dengan gending Sunda ini ditampilkan



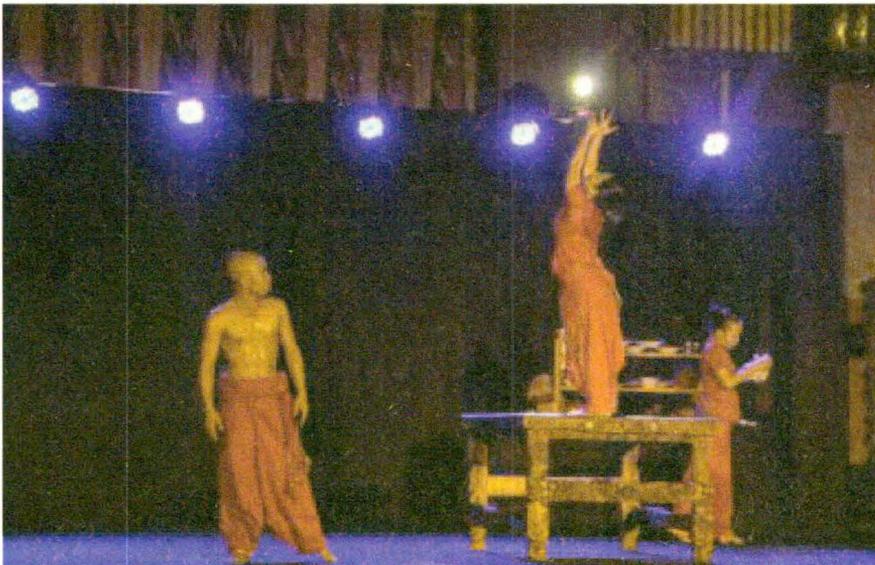
dalam bahasa Indonesia serta dialek Betawi sehingga pertunjukannya dapat dinikmati oleh seluruh penonton.

Pertunjukan Gending Karesmen Nyai Dasima merujuk pada kisah asli Nyai Dasima tentang cinta segitiga, tragedi dan pengorbanan antara Nyai Dasima, Samiun dan Tuan Edward. Ciri khas pertunjukan ini tentunya menampilkan musik gending yang tidak hanya karawitan Sunda namun juga melibatkan banjaran coked hingga gambang kromong. Dengan menggunakan dialek Betawi, penggarapan naskahnya ditulis oleh EP Syafei, lagu dan gending tetap berdasarkan karya Mang Koko sedangkan untuk penata vokal dan gending oleh Ida Rosida Koswara dan Atang Warsita.

Gending Karesmen adalah drama yang dialog-dialognya ditembangkan atau dikawihkan (dinyanyikan) dan diiringi dengan karawitan (alat musik tradisional Sunda). Jadi, semacam opera. Umumnya dibawakan dalam Bahasa Sunda dan diiringi oleh musik (karawitan) Sunda. Para pemain yang terlibat meliputi seniman-seniman Sunda di antaranya: Nyai Dasima oleh Sri Ningsih, Samiun diperankan Ujang Supriatna, Bang Puase oleh Tantan Sugandi, Tuan Edward oleh Riskonda Hayati oleh Elis Rosliani, Mak Buyung oleh Ida Rosida, Pok Leha oleh Iis Ida R, peran Duloh oleh Maman Sudirman dan Wak Lihun oleh Odi Kusnadi.

Pentas Tari Nan Jombang

Pentas tari kelompok Nan Jombang tampil memeriahkan KKI III pada 4



Desember malam di ballroom Hotel Grand Royal Bandung, tempat berlangsungnya kongres. Menyajikan tema “Kehidupan Merantau dalam Warung Nasi Padang”, pentas ini bertolak dari pepatah Minang yang berbunyi: *“Karatautum buah di hulu, babuah babungo alun, marantau bujang dahulu, di rumah baguno alun”*, menjadi pijakan utama pertunjukan yang diberi judul **Rantau Berbisik**.

Karya Eri Mefry ini pernah dipentaskan di Indonesian Performing Arts Mart di Solo, selanjutnya “Pesta Raya” di Esplanade Teater – Singapura (2009), “Tokyo Performing Arts Market” (2010), “Asean Performing Arts 2010” di Clark Pampanga-Philippine. Tour Australia: “Darwin Festival” di Darwin, “Brisbane Festival” di Brisbane, Cairns Festival di Cairns dan “Adelaide Oz Asia Festival” di Adelaide.

Panggung Kebun Seni



Berlangsung di areal parkir pintu masuk Kebun Binatang Bandung, Panggung Kebun Seni adalah forum spontanitas para seniman peserta KKI III di depan publik. Diisi dengan pembacaan puisi, dramatisasi puisi, musikalisasi puisi, pertunjukan musik, dan sebagainya, kegiatan ini berlangsung sepanjang pelaksanaan KKI III. Sejumlah seniman unjuk kebolehan di forum ini. Antara lain, Deddy Koral, Matdon, Ratna M Rochiman, Faisal Syahreza, Matdon, Yusep Muldiyana, Wawan Husein,

dan aktor teater Irwan Jamal dari Bandung. Selain itu juga tampil penyair Sunda Godi Suwarna (Ciamis), Bode Riswandi (Tasikmalaya), Heru Joni Putra (Padang), Mario Lawi dan Romo Mance (Kupang). Panggung Seni juga dihangatkan oleh suguhan musikalisasi puisi Yayan Kato, penampilan *Bandung Blues Community*, dan tontonan memukau dari Teater Cassanova yang membawakan dramatisasi naskah puisi Maria Zaitun karya Rendra.

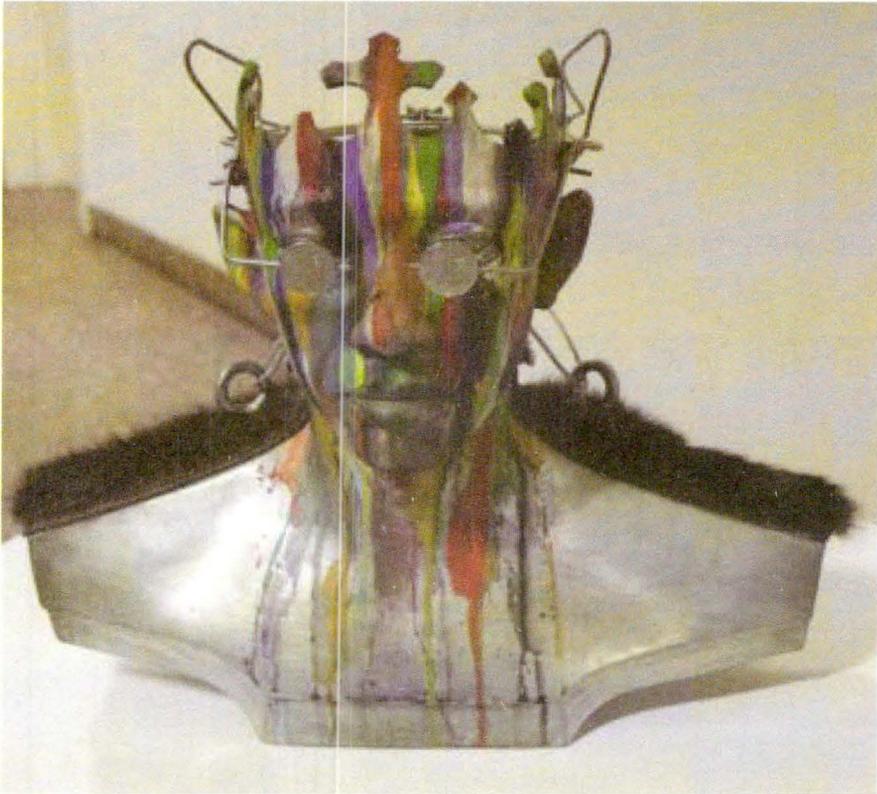
Pameran Seni Lawan Korupsi



Dihelat atas kerjasama Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Koalisi Seni Indonesia (KSI) dengan panitia pelaksana Kongres Kesenian Indonesia (KKI) III 2015 dan Festival Antikorupsi Bandung 2015, pameran ini berlangsung dari 3-14 Desember 2015. Dibuka oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pameran berlangsung di Gedung Gas Negara, Jl Braga Bandung. Sebanyak 114 karya yang mengeritik keras korupsi, yang diantaranya melibatkan komunitas Akademi Samali, Creative Circle Indonesia (CCI), dan Demokreatif ditampilkan dalam pameran ini.

Pameran Akumulasi

Pameran ini menampilkan 50 perupa dari 34 provinsi di Indonesia. Dikurasi Rikrik Kusmara, secara umum pameran ini merupakan cerminan kemajemukan seni rupa Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Beberapa di antara



seniman yang terlibat adalah Dedy Afriadi (Aceh), Wan Saad (Sumatera Utara), Thariq Munthaha (Sumatera Barat), Deden Mulyana (Banten), Diyanto (Jawa Barat), Surya Darma (Kalimantan Timur), Syarief Munawar (Gorontalo), Wilem Indey (Maluku), serta Pubelius Aubar (Papua).

Pameran Temporal

Pameran ini mencoba pameran ini mengelaborasi fenomena kesementaraan dalam ruang lingkup lingkungan kota dengan melibatkan seniman muda Bandung yang bekerja dalam beragam medium-material penciptaan, penjelajahan isu perkotaan, serta terbiasa bekerja di ruang publik dan melibatkan komunitas dalam dalam menciptakan karya seni. Dikurasi oleh Gustaff H. Iskandar dan Chabib Duta Hapsoro, pameran berlangsung di sejumlah titik di Kota Bandung seperti Pasar Cihapit, Kawasan Simpang Dago, Kampung Pulosari, Alun-alun Bandung, Alun-alun Ujung Berung, Flyover Pasupati, Viaduct, selain juga di Grand Hotel Panghegar tempat berlangsungnya kongres. Tema "Temporal" dipilih atas dasar menyoal kota dan berbagai kesementaraan dalam lingkungan

perkotaan yang amat relevan dengan kondisi kota hari ini. Pameran ini berangkat dari pemikiran kota sebagai salah satu simpul peradaban manusia yang tak pernah selesai dikisahkan oleh orang kebanyakan. Mereka yang terlibat dalam pameran ini adalah Arman Jamparing, Arum Tresnaningtyas Dayuputri, Ensemble Tikoro, Etza Meisyara, Gilang Anom Manapu Manik, Ida Latifa, KULTSE, Mufti Priyanka (Amenk), Oka Riadi, Resatio Adi Putra, Sandi Jaya Saputra, The Yellow Dino, Vincent Rumahloine, Yosefa Pratiwi Aulia, Yusuf Ismail.



Pasca Kongres

Seperti halnya Kongres Kesenian Indonesia (KKI) I dan II, KKI III juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk dilaksanakan. Ada sembilan poin yang diajukan dalam rekomendasi KKI III. Salah satunya mengamanatkan pembentukan Sekretariat Kerja KKI III yang bertugas melakukan sosialisasi, mengawal dan mengimplementasikan keputusan kongres, sekaligus menjadi penghubung antara pelaku seni dengan pemerintah.

Pembentukan Tim Kerja

Munculnya usulan untuk membentuk sekretariat kerja tersebut, berangkat dari pengalaman dari dua kongres sebelumnya. Seperti diketahui, KKI I dan KKI II sama-sama menghasilkan rekomendasi, usulan, bahkan tuntutan yang diajukan kepada dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi, semua rekomendasi, usulan, maupun tuntutan tersebut, praktis tak pernah terdengar tindak lanjut implementasinya selepas kongres digelar. Masalahnya, meski disebut pemerintah, tidak pernah jelas siapa pihak yang akan bertanggungjawab melaksanakannya.

Peserta KKI III yang sebagian di antaranya juga mengikuti KKI I dan KKI II agaknya menyadari kenyataan ini. Karenanya, saat merumuskan keputusan dan rekomendasi yang akan ditetapkan dalam KKI III, muncul pemikiran untuk secara eksplisit mencantumkan pembentukan suatu badan atau lembaga yang akan bertugas mengawal pelaksanaan keputusan dan rekomendasi kongres.

Awalnya ada sedikit pesimisme bahwa pembentukan lembaga tersebut tidak akan mungkin terwujud. Atau, walaupun bisa terwujud, prosesnya mungkin akan lama dan berlarut-larut dan bisa jadi tidak direspon sebagaimana mestinya. Namun, pesimisme itu tak terjadi. Anis Baswedan, yang ketika itu masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, langsung memberi respon positif tatkala perwakilan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana KKI III datang menghadap untuk menyampaikan hasil-hasil KKI III kurang lebih sebulan setelah pelaksanaan kongres.

Sebelumnya, dalam kesempatan informal sebelum pembukaan KKI III di Bandung, kepada Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana, Anis telah pula melontarkan ide agar dipikirkan adanya pertemuan sejenis kongres yang diselenggarakan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. "Jangan tunggu sampai lima tahun baru bertemu lagi. Mungkin, sekali

setahun perlu diselenggarakan pertemuan serupa kongres. Jadi bukan kongres. Tujuannya untuk melakukan evaluasi dan membicarakan hal-hal baru yang mungkin berkembang dalam rentang waktu itu," ujar Anis ketika itu.

Demikianlah, respon sangat positif diberikan Anis untuk segera diijazahkan pembentukan lembaga yang bertugas sesuai yang diamanatkan dalam rekomendasi kongres. Dirjen Kebudayaan diberi tugas untuk berkoordinasi dengan Sekjen Kemendikbud terkait pembentukan lembaga dimaksud. Kepada Biro Hukum yang hadir pada pertemuan tersebut diperintahkan untuk mencari bentuk kelembagaan yang pas serta sesuai ketentuan perundangan yang ada.

Dengan difasilitasi Subdit Seni Media, Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, serangkaian diskusi dan pertemuan diselenggarakan antara eks Panitia Pengarah dengan jajaran Kemendikbud, khususnya bagian hukum dan Direktorat Kesenian. Hasil dari diskusi tersebut adalah: 1) Bahwa secara aturan pembentukan lembaga yang bertugas untuk mengawal pelaksanaan keputusan KKI III memungkinkan untuk dilakukan; 2) Pembentukan lembaga dimaksud akan dilakukan dengan keputusan menteri; 3) Nama untuk lembaga dimaksud tidak bisa menggunakan istilah Sekretariat, Badan, atau Lembaga, tapi Tim. Karena itu, nama yang dipandang tepat dan tidak menyalahi ketentuan adalah Tim Kerja Rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia III. 4) Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan draf keputusan Mendikbud tentang Tim Kerja yang disusun bersama oleh pihak Bagian Hukum, Direktorat Kesenian, dan eks Panitia Pengarah KKI III. Demikianlah, akhirnya pada 17 Mei 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 096/P/2016 tentang Tim Kerja Rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia III.

Tugas Tim Kerja

Pada hakikatnya, Keputusan Mendikbud No. 096/P/2016 tersebut mencakup dua hal, yakni menyangkut Susunan Organisasi dan Tugas Tim Kerja. Susunan Organisasi sekaligus mencakup personil Tim Kerja, sementara Tugas terdiri atas 7 (tujuh) aspek. Susunan organisasi terdiri atas tiga kelompok. Masing-masing disebut Anggota Pleno, Pengurus Harian, dan Sekretariat. Anggota Pleno adalah keseluruhan anggota Tim Kerja. Berjumlah 19 orang, 17 orang berasal dari kalangan masyarakat kesenian dan 2 (orang) bersifat *ex officio* dari jajaran Direktorat Kesenian.

Adapun Pengurus Harian adalah Anggota Pleno yang ditunjuk untuk melaksanakan kepengurusan Tim Kerja sehari-hari. Jumlahnya tujuh orang. Lima orang berasal kalangan masyarakat kesenian dan dua orang bersifat *exofficio* dari jajaran Direktorat Kesenian. Terakhir adalah Sekretariat. Sekretariat merupakan unsur pelaksana teknis administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja, terdiri atas satu orang Kepala ditambah dua orang staf.

Susunan organisasi dan personil Tim Kerja terdiri dari Anggota Pleno dan Pengurus Harian. Anggota Pleno terdiri dari: M. Abduh Aziz, Arie Batubara, Adi Wicaksono, Irawan Karseno, Totot Indrarto, Benny Yohanes, Fakhrunnas MA Jabbar, Ary Sutedja, Hapri Ika Poigi, Heru Hikayat, Dolorosa Sinaga, Alex Sihar, Warih Wisatsana, Hafiz Rancajale, Irmina Maria Silas, Anastasia Melati, Nungki Kusumastuti, Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Kasubdit Seni Media, Direktorat Kesenian. Sedangkan Pengurus Harian terdiri dari M. Abduh Aziz (Ketua merangkap anggota), Arie Batubara (Sekretaris merangkap anggota), Adi Wicaksono (Anggota), Irawan Karseno (Anggota), Totot Indrarto (Anggota), Direktur Kesenian (Anggota), Kasubdit Seni Media (Anggota). Tim didukung oleh sekretariat yang terdiri dari Koko Sondari (Kepala), Galih Setiono (staf), Christisia Melati Putri (Staf).

Adapun tugas Tim Kerja adalah: 1) Membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan isi rekomendasi KKI III dalam bentuk Program Aksi dan Rencana Kerja; 2) Membantu sinkronisasi penjabaran isi rekomendasi KKI III sebagai dimaksud dalam angka 1 dengan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kesenian; 3) Membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan program-program di bidang kesenian yang terkait pemenuhan rekomendasi KKI III, khususnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya; 4) Menyiapkan dan menyelenggarakan Forum Masyarakat Kesenian Nasional secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk melaporkan kemajuan implementasi rekomendasi KKI III; 5) Menyiapkan penyelenggaraan Kongres Kesenian IV; 6) Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kesenian, terutama yang terkait dengan rekomendasi KKI III; dan 7) Penghubung antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan para pemangku kepentingan di bidang kesenian, utamanya yang terlibat dengan penyelenggaraan Kongres

Kesenian Indonesia III.

Mencermati uraian tugas di atas, jelas terlihat bahwa Tim Kerja tidaklah bertindak sebagai eksekutor langsung atas suatu pelaksanaan program yang terkait dengan pemenuhan implementasi rekomendasi KKI III. Melainkan, lebih sebagai penyusun program aksi dan rencana kerja yang kemudian disesuaikan dengan program kerja yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Kesenian. Untuk itu, posisi Tim Kerja terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait rekomendasi KKI III adalah sebagai pemberi masukan dan saran, serta sampai batas tertentu melakukan pemantauan.

Dalam konteks ini, maka tidak bisa lain “bentuk pekerjaan” yang dilakukan oleh Tim Kerja lebih banyak bersifat rapat dan menyelenggarakan rapat. Ada dua jenis rapat yang kemudian ditetapkan sebagai “agenda kerja” Tim Kerja sehari-hari. Yaitu, Rapat Pleno dan Rapat Pengurus Harian. Rapat Pleno adalah rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Tim Kerja. Rapat Pleno diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Kerja, serta menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja sehari-hari yang dilakukan oleh Pengurus Harian. Rapat Pleno diselenggarakan berdasarkan kebutuhan.

Adapun Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang hanya diikuti oleh Pengurus Harian Tim Kerja. Rapat Pengurus Harian diselenggarakan secara berkala setiap bulan. Agenda rapat biasanya terdiri atas dua hal. Pertama membahas dan mengambil keputusan terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja sehari-hari, dan kedua membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja secara umum yang kemudian akan dimintai persetujuan pada rapat pleno.

Secara *de jure*, Tim Kerja memang sudah dibentuk terhitung sejak keluarnya Keputusan Mendikbud No. 096/P/2016. Namun, *de facto*, Tim Kerja tidaklah dengan serta-merta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya seiring keluarnya keputusan tersebut. Ada jeda waktu yang harus dilewati sehingga Tim Kerja baru benar-benar bisa bekerja, terutama terkait dengan masalah teknis pembiayaan. Walau demikian, dalam rentang waktu lebih kurang satu tahun terbentuknya, Tim Kerja telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas sebagai berikut:

Program Aksi dan Rencana Kerja

Penyusunan Program Aksi dan Rencana Kerja merupakan prioritas

pertama yang disusun Tim Kerja segera setelah terbentuk. Program Aksi dan Rencana Kerja adalah suatu uraian berupa *break down* atau turunan perincian lebih lanjut atas butir-butir rekomendasi KKI III. Dari 7 (tujuh) point rekomendasi KKI III tersebut, Tim Kerja kemudian menyusun Program Aksi dan Rencana Kerja dalam bentuk matrik yang terdiri atas 6 (enam) aspek, yakni: (1) Regulasi, (2) Infrastruktur, (3) Kelembagaan, (4) Pendidikan, (5) Sumber Daya Manusia, dan (6) Pelembagaan Apresiasi. Penyusunan kerangka awal Program Aksi dan Rencana Kerja dilakukan oleh Pengurus Harian Tim Kerja pada akhir September 2016 dan kemudian dibahas serta diperkaya lagi dan kemudian ditetapkan melalui Rapat Pleno Tim Kerja pada bulan November 2016.

Forum Masyarakat Kesenian Nasional 2017

Dalam Keputusan Mendikbud No. 096/P/2016 disebutkan, salah satu tugas Tim Kerja adalah menyelenggarakan Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) secara berkala satu kali dalam satu tahun. Mengingat keputusan pembentukan Tim Kerja sendiri baru terbit pada 17 Mei 2016, maka rentang waktu satu tahun bagi Tim Kerja adalah antara 17 Mei 2016 hingga 16 Mei 2017. Atas dasar itu, maka FMKN baru dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2017, yakni pada 17-19 Mei 2017.

Dihadiri kurang lebih 120 orang peserta dari seluruh Indonesia, selain menyampaikan laporan kemajuan implementasi rekomendasi KKI III yang sudah berjalan sesuai Keputusan Mendikbud No. 096/P/2016, FMKN 2017 juga diisi diskusi dan pengambilan keputusan tentang Tata Kelola Kesenian yang dipandang relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Dipilihnya topik tata kelola untuk dibahas dalam forum ini didasarkan pada berbagai masukan yang dihimpun oleh Tim Kerja sebelumnya. Masukan ini kemudian diformulasikan oleh Tim Kerja sehingga terangkumlah gambaran permasalahan menyangkut tata kelola kesenian di Indonesia yang selama ini ternyata dirasakan menghadapi banyak masalah. Hasil dari FMKN adalah rekomendasi berupa rumusan Tata Kelola Kesenian yang kemudian disampaikan kepada Direktorat Kesenian.

Sinkronisasi Program

Sinkronisasi penjabaran isi rekomendasi KKI III (dalam bentuk Program Aksi dan Rencana Kerja) dengan program kerja Kemendikbud di bidang kesenian, merupakan tugas kedua Tim Kerja yang disebutkan dalam Keputusan Mendikbud No. 096/P/2016. Sejauh ini, pelaksanaan tugas

tersebut belum berlangsung secara optimal. Pada tahun 2017, penyusunan program untuk tahun 2017 sudah selesai dilakukan ketika Tim Kerja terbentuk sehingga praktis yang bisa dilakukan hanya mencari kemungkinan kesesuaian antara program yang sudah disusun dengan coba dirumuskan dalam Program Aksi dan Rencana Kerja. Adapun untuk tahun 2018, saat ini sedang dicari waktu untuk melakukan sinkronisasi dimaksud.

Harus diakui, sejauh ini, pelaksanaan tugas-tugas tersebut memang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, dalam hal memberi saran, masukan, dan pertimbangan Kemendikbud di bidang kesenian, terutama yang terkait dengan rekomendasi KKI III sebagai disebutkan dalam angka 6 tugas Tim Kerja, belum dilaksanakan sama sekali. Diharapkan, tahun 2017 ini, atau paling lambat tahun 2018 mendatang, tugas tersebut sudah bisa dilaksanakan.

Program Aksi

Salah satu tugas Tim Kerja Kongres Kesenian Indonesia III adalah membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan isi rekomendasi KKI III dalam bentuk Program Aksi dan Rencana Kerja. Atas dasar ini, Tim Kerja telah menyusun Program Aksi dan Rencana Kerja dimaksud dengan mengacu kepada keputusan dan rekomendasi yang ditelurkan dalam KKI III, baik pada sidang Komite, Sidang Komisi, maupun rekomendasi akhir.

Berikut program aksi dimaksud:

REGULASI				
Tujuan	Strategi		Program	Kegiatan
I 1. Melahirkan berbagai kebijakan dalam bidang kesenian/kebudayaan yang bisa menjamin: <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah sebagai fasilitator Jaminan kebebasan berekspresi Penguatan kelembagaan, tata kelola kesenian dari pusat sampai tingkat daerah Kebijakan anggaran APBN/APBD yang berpihak pada pemajuan kesenian Kebijakan insentif yang menstimulasi keterlibatan berbagai pihak untuk turut serta terlibat dalam memajukan kesenian (filantropi). Adanya Dana Abadi Kesenian sebagai sumber pembiayaan pendukung di luar APBN/APBD 	1. Membantu Kemdikbud mempersiapkan RUU Pemajuan Ekspresi Budaya: <ol style="list-style-type: none"> Finalisasi draft kajian yang sudah ada Penyusunan legal crafting Sosialisasi dan uji publik 		1. Menyusun konsep revisi naskah RUU Pemajuan Ekspresi Budaya 2. Sosialisasi RUU Pemajuan Ekspresi Budaya	1. Seri FGD untuk kajian penyusunan naskah akademik 2. Seri FGD untuk legal drafting 3. Uji publik RUU Pemajuan Ekspresi Budaya di seluruh Indonesia yang melibatkan seniman, akademisi, privat sektor, dll.
	2. Membantu Kemdikbud menyusun regulasi atau kebijakan strategis dalam tata kelola kesenian (sebelum adanya UU): <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan Jaminan kebebasan berekspresi Kebijakan insentif untuk mendorong lahirnya filantropi kesenian Pendirian dana abadi kesenian 		1. Membentuk tim kajian lintas bidang, disiplin, dan K/L 2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan kesenian oleh pemerintah selama ini 3. Penyusunan rekomendasi kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan Kebebasan berekspresi Filantropi dan dana abadi 	1. Seri FGD: <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan Kebebasan berekspresi Filantropi dan dana abadi
	3. Memastikan pelaksanaan rekomendasi kebijakan			Menyusun mekanisme operasional (NSPK, SOP) dalam rangka implementasi kebijakan / regulasi
2. Memajukan ekosistem kesenian	1. Melahirkan berbagai kebijakan insentif khusus dalam fiskal (pajak, bea, retribusi) untuk memajukan ekosistem kesenian		1. Membentuk tim kajian lintas bidang, disiplin, dan K/L 2. Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk insentif fiskal (pajak, bea, retribusi) di bidang kesenian.	Seri FGD insentif perpajakan: <ol style="list-style-type: none"> Film Sastra Seni Rupa Seni Pertunjukan Desain
	2. Mendorong penegakan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual		1. Membentuk tim lintas K/L dalam rangka mengaji ulang UU Hak Atas Kekayaan Intelektual Membentuk Satuan Tugas penegakan hukum anti pembajakan dan pemalsuan karya seni.	1. Lokakarya untuk mengaji ulang dan analisis UU Hak Kekayaan Intelektual 2. Menyusun revisi UU Hak Kekayaan Intelektual (terutama menyangkut Hak Kekayaan Intelektual Komunal/ produk kebudayaan komunal) 3. Lokakarya penyusunan: <ol style="list-style-type: none"> Sistem pelaporan/pengaduan Sistem penindakan 4. Sosialisasi di seluruh Indonesia
	3. Memasukkan revisi UJ Perfilman dalam Prolegnas 2017		Membentuk tim lintas K/L untuk UU Nomor 33 Tahun 2009	1. Menyusun Naskah Akademik 2. Menyusun revisi UU Perfilman 3. Advokasi dan sosialisasi revisi tentang UU Perfilman

INFRASTRUKTUR

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan
Memajukan ekosistem kesenian	1. Mendirikan pusat kesenian di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia	2. Proyek percontohan pendirian pusat kesenian di tingkat kabupaten/kota	Membentuk tim kerja lintas K/L dengan tugas: <ol style="list-style-type: none"> Menyusun kriteria tentang pusat kesenian kabupaten/kota Menyusun kualifikasi kabupaten/kota untuk proyek percontohan Menyusun model pola pendanaan proyek percontohan pendirian pusat kesenian di tingkat kabupaten/kota Memilih kabupaten/kota yang akan dijadikan proyek percontohan dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> Adanya komunitas yang aktif dan membutuhkan Adanya komitmen pemda dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proyek percontohan pendirian pusat kesenian di tingkat kabupaten/kota
	2. Reposisi Taman Budaya yang sudah ada.	Pembentukan tim kerja lintas K/L dan Pemda: provinsi dan kabupaten/kota dengan tugas: <ol style="list-style-type: none"> Menyusun konsep reposisi Taman Budaya Menyusun rencana implementasi reposisi Taman Budaya Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reposisi Taman Budaya 	Lokakarya, FGD, seminar
	3. Mendirikan pusat-pusat dokumentasi kesenian di Indonesia	Membentuk tim kajian pendirian pusat-pusat dokumentasi kesenian, dengan tugas: <ol style="list-style-type: none"> Memetakan inisiatif-inisiatif pusat dokumentasi kesenian yang sudah berjalan Membuat cetak biru pusat-pusat dokumentasi kesenian yang terintegrasi dengan pusat-pusat kesenian yang akan dibangun 	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian dan pemetaan Seri FGD dalam rangka membuat cetak biru pusat-pusat dokumentasi kesenian yang terintegrasi. Membangun sistem jaringan dokumentasi kesenian yang ramah akses publik. Monitoring dan evaluasi pembangunan sistem jaringan dokumentasi
	5. Pemanfaatan sarana pendidikan (sekolah, kampus) sebagai wahana pengembangan kesenian	<ol style="list-style-type: none"> Membentuk tim lintas bidang dan K/L untuk : <ol style="list-style-type: none"> menyusun model-model pemanfaatan sarana pendidikan sebagai wahana pengembangan kesenian Memilih sekolah yang pemda-nya memiliki komitmen dalam membangun sarana kegiatan kesenian di sekolah dan perguruan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> FGD lokakarya, seminar Sosialisasi pemanfaatan sarana pendidikan sebagai wahana pengembangan kesenian.

BAGIAN III: KONGRES KESENIAN INDONESIA III/2015

KELEMBAGAAN

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan
1. Menciptakan birokrasi kesenian yang efektif dan efisien	1. Memperbaiki struktur kelembagaan kesenian untuk memajukan kesenian Indonesia (reposisi, revitalisasi dan reorganisasi)	Membentuk tim lintas K/L untuk: <ol style="list-style-type: none"> Konsolidasi dan pemetaan yang melibatkan semua lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi pengelolaan kesenian Evaluasi dan perumusan sistem dan kelembagaan birokrasi lintas K/L yang mengelola kesenian, mulai tingkat pusat sampai daerah Perencanaan, konsolidasi, dan implementasi lintas K/L 	<ol style="list-style-type: none"> Seri FGD, seminar, lokakarya Sosialisasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
	2. Peningkatan kompetensi SDM birokrasi yang mengurus kesenian dari tingkat pusat sampai daerah	Merekomendasikan standar kompetensi SDM dalam birokrasi kesenian	<ol style="list-style-type: none"> Asesmen kompetensi SDM birokrasi dari tingkat pusat sampai daerah Lokakarya penyusunan standar kompetensi SDM birokrasi pengelola kesenian Pelatihan peningkatan kompetensi SDM birokrasi
2. Memajukan keterlibatan publik dalam pengembangan kesenian	Memposisikan komunitas seni sebagai agen utama dalam struktur tata kelola pengembangan kesenian di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan kebijakan/regulasi yang menjamin eksistensi komunitas seni sebagai agen utama dalam struktur tata kelola pengembangan kesenian di Indonesia Penguatan kapasitas organisasi komunitas seni di seluruh Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> FGD, seminar, lokakarya Pemetaan kapasitas komunitas-komunitas di seluruh Indonesia Pelatihan peningkatan kapasitas komunitas
3. Menjadikan Dewan Kesenian sebagai institusi formal dalam melakukan supervisi, monitoring, evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan tata kelola dan program pengembangan kesenian di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Revitalisasi Dewan Kesenian di Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> Pemetaan kondisi dan kebutuhan peningkatan kapasitas Dewan Kesenian di seluruh Indonesia Merumuskan model kelembagaan, mekanisme organisasi, pelibatan komunitas, dan hubungan dengan pemangku kepentingan di daerah masing-masing dengan tetap mempertimbangkan potensi dan kekhasan lokal Merumuskan kebijakan/regulasi yang menjadikan Dewan Kesenian sebagai institusi formal untuk melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pemetaan FGD, lokakarya, seminar Sosialisasi Pelatihan peningkatan kapasitas anggota Dewan Kesenian

PENDIDIKAN

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan
1. Menjadikan kesenian sebagai bagian penting dalam pendidikan karakter bangsa.	Integrasi kesenian dalam pendidikan.	1. Menyusun modul pendidikan karakter di sekolah dengan menggunakan kesenian sebagai wahana. 2. Pengayaan kesenian dalam pendidikan.	KELAS KARAKTER 1. Membentuk tim kerja yang terdiri dari seniman, akademisi dan guru seni untuk menyusun modul pelatihan kreativitas bagi siswa yang dapat diterapkan secara nasional. Hasil: modul yang mengandung nilai-nilai kreativitas, disiplin, solidaritas dan toleransi. 2. Penerapan dan evaluasi modul di sekolah terpilih 10 provinsi sebagai proyek percontohan. 3. Gerakan Seniman Mengajar: pelibatan seniman lokal dan nasional untuk penerapan modul Kelas Karakter dalam kegiatan Ekstra Kurikuler di sekolah-sekolah secara nasional. Memasukkan kegiatan ekstrakurikuler yang memberi bobot pada nilai intrakurikuler. 4. Pengadaan buku-buku referensi seni berkualitas: - Seleksi dan penerbitan referensi berupa kanon seni yang disebar secara nasional. - Seleksi dan penerbitan buku-buku referensi yang diciptakan seniman lokal untuk sekolah di daerah masing-masing.
2. Menjadikan pendidikan kesenian sebagai wahana peningkatan pemahaman terhadap kesenian dalam kerangka penguatan karakter.	Reorientasi pelajaran kesenian di sekolah umum	1. Evaluasi kurikulum pelajaran kesenian di sekolah umum. 2. Mengubah muatan/materi kurikulum kesenian di sekolah umum (pelajaran bahasa menjadi mengarang).	EVALUASI MUATAN KURIKULUM SENI. 1. FGD di 10 provinsi (masing-masing 1 kali) untuk mengevaluasi dan mengubah muatan kurikulum pelajaran seni di sekolah umum. Hasil: rumusan baru muatan kurikulum seni. 2. Contoh: pelajaran bahasa mengutamakan praktik bahasa (menulis, membaca, berbicara), bukan teori bahasa atau linguistik.
3. Menghasilkan lebih banyak SDM kesenian yang berkualitas melalui pendidikan formal.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah seni.	1. Mendorong lahirnya cetak biru standarisasi dan kebutuhan sekolah seni di Indonesia. 2. Mendorong pendirian sekolah seni baru yang melibatkan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemda.	PENGEMBANGAN SEKOLAH SENI. 1. Penelitian tentang permasalahan sekolah seni tingkat menengah dan tinggi seni yang sudah ada. 2. FGD (3 kali) mengevaluasi seluruh sekolah seni tingkat menengah dan tinggi berdasar penelitian di atas. 3. Penelitian tentang kebutuhan dan peluang mendirikan sekolah seni yang baru tingkat menengah dan tinggi di 10 provinsi. 4. FGD (3 kali) pembuatan cetak biru sekolah seni yang baru berdasar penelitian pada poin 3 di atas. 5. Pendirian sekolah seni percontohan dan akademi seni oleh Lintas Kementerian dan Lembaga. Kegiatan ini terkait secara integral dengan program pengembangan industri kesenian masa depan. 6. Mendatangkan tenaga pengajar seni dari universitas dan akademi seni terkemuka di dunia.

SDM

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan
1. Memperkuat ekosistem kesenian dalam bidang manajemen kesenian	Peningkatan kapasitas: pengelola kegiatan kesenian	Pemetaan kebutuhan kapasitas manajemen kesenian dalam berbagai bidang	<p>GUGUS MANAJEMEN SENI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tentang permasalahan manajemen seni di Indonesia. 2. FGD (3 kali) pengembangan manajemen seni dengan melibatkan pelaku yang sudah aktif dan para pemangku kepentingan. 3. FGD (3 kali) penyusunan norma dan standard kompetensi manajemen kesenian. 4. Lokakarya berdasar hasil FGD poin 3 di atas untuk peningkatan kapasitas pengelola kegiatan kesenian di 10 provinsi (2 kali per provinsi). 5. Pembentukan Asosiasi Penyelenggara Kegiatan Seni.
2. Melahirkan pelaku kesenian yang berkualitas.	Meningkatkan profesionalisme pelaku kesenian.	Perluasan akses dan sumber daya seni.	<p>PUSAT INFORMASI SENI INDONESIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan Pusat Data & Informasi Seni Indonesia yang terintegrasi dengan perkembangan seni di tingkat lokal, nasional, dan global. 2. Pertukaran Seniman antar wilayah dan negara. (Seniman lokal ke lokal, dan lokal ke internasional). 3. Membentuk Asosiasi Profesi Seniman.
3. Memperkuat ekosistem kesenian dalam pendidikan kesenian.	Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar kesenian.	Pelatihan tenaga pengajar seni.	<p>STANDAR KOMPETENSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Standar Kompetensi Pengajar Seni. Hasil: rumusan standar kompetensi untuk pengajar kesenian di sekolah umum. 2. Pelatihan intensif Peningkatan Kualitas Guru Seni di 10 provinsi sebagai proyek percontohan penerapan standar kompetensi. 3. Pelatihan intensif untuk memperbanyak jumlah dan ragam bidang seni, tenaga pengajar kesenian di sekolah. Pelatihan dilakukan di 10 provinsi.

PELEMBAGAAN APRESIASI

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan
Mendayagunakan kesenian untuk peningkatan kreativitas masyarakat dan potensi ekonomi masa depan.	Memperkuat pelembagaan upaya-upaya, apresiasi yang selama ini telah berlangsung di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem tata kelola peningkatan apresiasi yang berjenjang dan terhubung mulai dari lokal, nasional dan internasional. - Membuat model pendukung yang tepat dalam rangka keberlanjutan lembaga-lembaga penyelenggara event kesenian - Penguatan institusional penyelenggaraan even kesenian dalam aspek : <ul style="list-style-type: none"> a. Managerial b. Keberlanjutan c. Programing dan kuratorial d. Pengembangan jaringan - Mengadakan penghargaan tingkat nasional untuk karya atau seniman berprestasi di setiap bidang. - Membangun strategi promosi dan publikasi kesenian Indonesia di tingkat internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kondisi kelembagaan penyelenggara event kesenian yang selama ini sudah berjalan selama ini dalam masyarakat 2. Evaluasi pelaksanaan pemberian pendukung even-event kesenian yang selama ini sudah berlangsung 3. FGD, lokakarya, seminar untuk menghasilkan : <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria / kualifikasi - Menyusun petunjuk teknis pendukung - yang transparan dan akuntabel - Pelatihan manajemen "grant" 4. Memilih dan memberikan pendukung terhadap event-event yang memenuhi kualifikasi yang dihasilkan dari FGD pada poin 3 (Festival berbagai bidang seni, pameran, simposium, lokakarya, residensi, program pertukaran pelaku kesenian) 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendukung terhadap event-event kesenian 6. Penerjemahan dan penerbitan buku-buku seni Indonesia ke Bahasa asing. 7. Penerjemahan dan penerbitan buku-buku seni bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia 8. Penghargaan seni di tingkat daerah, nasional dan internasional 9. Aktivasi Rumah Budaya Indonesia di negara-negara terpilih: Asia, Amerika dan Eropa. 10. Gerakan Indonesia Mengarang. 11. Art Summit Indonesia (Festival seni pertunjukan tingkat internasional). 12. Event Teater tingkat nasional dan daerah 13. Event Sastra tingkat Internasional. 14. Event Seni Anak-anak tingkat nasional dan daerah. 15. Event Tari tingkat nasional dan Internasional. 16. Event Musik tingkat nasional dan Internasional. 17. Pameran Besar Seni Rupa tingkat internasional. 18. Event Film tingkat Internasional. 19. Event Komponis Kini, tingkat nasional. 20. Festival Summit. Forum pertemuan reguler para penyelenggara festival seni di Indonesia. Pelaksanaan dilakukan bersama Bekraf. 21. Event Seni Lintas Media.

KONGRES KESENIAN INDONESIA 1995-2015



ISBN 978-979-35238-7-5



9

789791

523875

**DIREKTORAT KESENIAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

